

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jln. Majapahit No. 16 Telepon/Fax 0370-631080
Website: www.disperkim.ntbprov.go.id : Email : disperkim@ntbprov.go.id
Mataram - 83125

2023

RP3KP



PERENCANAAN
PERUMAHAN



PERENCANAAN
KAWASAN
PERMUKIMAN



PERENCANAAN
PSU

**RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2023-2043**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanulisa Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas telah tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2043.

Dokumen RP3KP Provinsi NTB Tahun 2023-2043 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman, badan usaha, masyarakat dan lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional dan dapat menjadi basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 20 tahun ke depan.

Saya berharap agar dokumen RP3KP Provinsi NTB Tahun 2023-2043 ini dapat berperan sebagai "adat" yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kebijakan antar pemangku kepentingan, maupun antara dunia usaha dan masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Akhir kata, saya mengimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait untuk menjalankan perencanaan dan program pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman, guna percepatan pencapaian pembangunan Daerah. Bismillah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merestui niat dan langkah kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, Terima Kasih.

Wallaahulmuwafiqu Wal Hadi Rasabillirasyad

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Matahari,

2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Dengan mengesap piyi nukar kepada Tahun Yang Maha Esa Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2043 telah selesai disusun.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut Strategi dan Indikator Program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan, merupakan implementasi dan pengabuan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 yang berisi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

RP3KP berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah kothan berskala provinsi, fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program Pemerintah Provinsi, fasilitas peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan PSU urusan permukiman.

Uraian terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak-pihak terkait yang telah berhasil mewujudkan Dokumen RP3KP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2043 ini.

Sebagai Dokumen ini bisa memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan dan stakeholders dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Mei 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Nusa Tenggara Barat.



SACHMI N. S. I
Pembina Utama Muda (TVA)
NIP. 19650905 195703 1 016





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan dan Sasaran	I-3
1.2.1 Tujuan	I-3
1.2.2 Sasaran	I-4
1.3 Dasar Hukum.....	I-4
1.4 Kedudukan RP3KP	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-8

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Tata Ruang	II-1
2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	II-1
2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	II-2
2.1.2.1 Tujuan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat	II-2
2.1.2.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang PKP	II-2
2.1.2.3 Rencana Sistem Perkotaan.....	II-4
2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-10
2.2 Kebijakan Pembangunan	II-13
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025	II-13
2.2.1.1 Visi Nasional.....	II-13
2.2.1.2 Pembangunan Daerah	II-14
2.2.1.3 Pembangunan Infrastruktur	II-16

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	II-21
2.2.2.1. Visi Indonesia 2045	II-22
2.2.2.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2024	II-22
2.2.2.3. Batasan Pembangunan	II-22
2.2.2.4. Lingkungan Dan Isu Strategis Infrastruktur Pelayanan Dasar	II-24
2.2.2.5. Lingkungan Dan Isu Strategis Infrastruktur Perkotaan	II-28
2.2.2.6. Arah Kebijakan Dan Strategi	II-29
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025	II-32
2.2.3.1 Visi	II-32
2.2.3.2 Misi	II-32
2.2.3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025.....	II-33
2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023	II-36
2.2.4.1 Visi	II-36
2.2.4.2 Misi	II-37
2.2.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi	II-37
2.2.4.4 Program Pembangunan Daerah.....	II-41
2.2.5 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024	II-42
2.2.5.1 Pembangunan Permukiman	II-42
2.2.5.2 Pembangunan Perumahan	II-44
2.2.5.3 Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	II-46
2.2.5.4 Visi	II-46
2.2.5.5 Misi	II-46
2.2.5.6 Tujuan	II-47
2.2.6 Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024	II-47
2.2.7 Sustainable Development Goals (SDG's).....	II-48
2.3 Kebijakan Rencana Induk Sektor	II-50
2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	II-50
2.3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok – Gili Tramena.....	II-51

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

3.1 Identifikasi Kondisi Fisik Wilayah	III-1
---	--------------

3.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah	III-1
3.1.2 Kondisi Fisik Dasar	III-7
3.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	III-17
3.1.4 Daftar Daerah Terlarang (<i>Negative List</i>) Untuk RP3KP	III-30
3.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan.....	III-31
3.2 Identifikasi sosial, Budaya dan Kependudukan.....	III-35
3.2.1 Kondisi Sosial	III-35
3.2.2 Budaya Bermukim.....	III-36
3.2.3 Kondisi Kependudukan	III-43
3.2.3.1 Jumlah dan kepadatan Penduduk	III-43
3.2.3.2 Ketenagakerjaan	III-48
3.2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia	III-48
3.2.3.4 Penduduk Miskin.....	III-49
3.2.3.5 Struktur Penduduk	III-52
3.3 Identifikasi Perekonomian	III-56
3.3.1 Perkembangan Perekonomian	III-56
3.3.2 Suply and Demand Perumahan	III-59

BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1 Profil Perumahan Provinsi NTB.....	IV-1
4.1.1 Jumlah Rumah	IV-2
4.1.2 Rumah Tidak Layak Huni	IV-2
4.1.3 Backlog Kepemilikan Rumah.....	IV-6
4.1.4 Kondisi Rumah Berdasarkan Dinding.....	IV-7
4.1.5 Kondisi Rumah Berdasarkan Lantai.....	IV-7
4.1.6 Kondisi Rumah Berdasarkan Luas Lantai.....	IV-8
4.1.7 Perumahan Pengembang.....	IV-9
4.1.8 Profil Rumah Susun dan Rumah Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-14
4.1.9 Profil Kelembagaan	IV-25
4.1.10 Profil Pembiayaan Perumahan	IV-26
4.2 Profil Permukiman Provinsi NTB	IV-30
4.2.1 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di NTB.....	IV-33
4.2.2 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Lombok	IV-54
4.2.3 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Sumbawa	IV-75

4.2.4	Budaya Bermukim	IV-99
4.2.5	Permukiman Rawan Bencana	IV-128
4.2.6	Wilayah Terlarang (Negative List).....	IV-159
4.3	Profil Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)	IV-162
4.3.1	Jaringan Jalan/ Transportasi	IV-162
4.3.2	Jaringan Drainase	IV-165
4.3.3	Jaringan Listrik	IV-165
4.3.4	Jaringan Air Minum.....	IV-166
4.3.5	Sanitasi dan Air Limbah	IV-169
4.3.6	Persampahan	IV-171
4.3.7	Fasilitas Pendidikan	IV-172
4.3.8	Fasilitas Kesehatan	IV-173
4.3.9	Fasilitas Peribadatan	IV-174
4.3.10	Fasilitas Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau	IV-175

BAB V DATA ANALISA PKP

5.1	Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	V-1
5.2	Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang Disasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan yang Ada di Wilayah Perencanaan.....	V-29
5.3	Analisis Kependudukan	V-29
5.4	Analisis Karakter PKP	V-38
5.4.1	Karakteristik dan Tipologi PKP.....	V-38
5.4.2	Analisis Identifikasi Permasalahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	V-42
5.4.2.1	Analisis Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	V-44
5.4.2.2	Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman	V-51
5.4.2.3	Analisis Penanganan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana	V-52
5.4.2.4	Analisis Backlog	V-55
5.5	Analisis Arah Pengembangan PKP	V-59
5.6	Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Regional atau Rencana Induk Sistem dan PSU di Kawasan Lintas	V-62

5.7	Analisis Kebutuhan Penyediaan Rumah.....	V-62
5.8	Analisis Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	V-88
5.9	Analisis Pemenuhan Rumah Layak Huni	V-89
5.10	Analisis Daya Dukung Permukiman.	V-91
5.10.1	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi	V-92
5.10.2	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan.....	V-93
5.10.3	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng	V-96
5.10.4	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi	V-98
5.10.5	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air.....	V-100
5.10.6	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase.....	V-103
5.10.7	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Erosi	V-106
5.10.8	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah.....	V-107
5.10.9	Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam	V-108
5.11	Analisis Penyediaan Lahan untuk Kawasan Rawan Bencana dan yang Terkena Dampak Relokasi	V-123
5.12	Analisis Penyediaan PSU Permukiman	V-123
5.12.1	Analisis Kebutuhan Jaringan Jalan	V-132
5.12.2	Analisis Sistem Drainase Kawasan.....	V-133
5.12.3	Analisa Kebutuhan Air Bersih.....	V-135
5.12.4	Analisa Proyeksi Produksi dan Kebutuhan Fasilitas Pengelolaan Limbah Cair...V-141	
5.12.5	Analisa Kebutuhan Penanganan Sampah.....	V-149
5.12.6	Analisa Kebutuhan Jaringan Listrik.....	V-156
5.12.7	Analisa Kebutuhan Mitigasi Bencana Kebakaran.....	V-160
5.12.8	Analisa Kebutuhan Sarana Peribadatan	V-160
5.12.9	Analisa Kebutuhan RTH	V-161
5.13	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pembiayaan PKP	V-171
5.13.1	Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah di Wilayah NTB	V-171
5.13.2	Perkembangan Inflasi Daerah	V-172

5.13.3	Prospek Perekonomian Provinsi NTB.....	V-173
5.14	Analisis Kelembagaan PKP.....	V-174

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

6.1	Penyelenggaraan Perumahan	VI-2
6.1.1	Perencanaan dan Penanganan Perumahan.....	VI-2
6.1.2	Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.....	VI-2
6.1.3	Pembangunan Perumahan	VI-3
6.1.3.1	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah.....	VI-3
6.1.3.2	Rencana Pembangunan Perumahan Baru.....	VI-4
6.1.3.3	Rencana Pembangunan Kembali.....	VI-5
6.1.3.4	Rencana Keterpaduan PSU Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	VI-6
6.1.3.5	Rencana Pembangunan Perumahan Dikawasan Rawan Bencana.....	VI-8
6.1.4	Pengendalian Perumahan	VI-10
6.2	Penyelenggaraan Permukiman	VI-10
6.2.1	Perencanaan Kawasan Permukiman.....	VI-11
6.2.2	Pembangunan Kawasan Permukiman.....	VI-11
6.2.2.1	Skenario peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	VI-12
6.2.2.2	Skenario Keterpenuhan akses air minum, sanitasi dan persampahan	VI-13
6.2.3	Pengendalian Kawasan Permukiman	VI-15
6.3	Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	VI-15
6.3.1	Strategi Perwujudan permukiman layak dan Sehat.....	VI-22



DAFTAR TABEL

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN

Tabel 2.1 Program pembangunan daerah bidang PKP provinsi NTB yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah mempertimbangkan Permendagri 13 Tahun 2006..... II-42

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

Tabel 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota	III-2
Tabel 3.2 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/Kota di NTB	III-2
Tabel 3.3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	III-7
Tabel 3.4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor	III-17
Tabel 3.5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi.....	III-18
Tabel 3.6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami.....	III-18
Tabel 3.7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan.....	III-19
Tabel 3.8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang	III-19
Tabel 3.9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan.....	III-20
Tabel 3.10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia.....	III-20
Tabel 3.11 Penggunaan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-32
Tabel. 3.12 Matrik tipologi perumahan adat di Provinsi NTB	III-41
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota.....	III-43
Lanjutan tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021, Berdasarkan Kabupaten Dalam Angka 2022.....	III-44
Tabel 3.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	III-46
Tabel 3.15 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota.....	III-46

Tabel 3.16	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	III-47
Tabel 3.17	Gambaran Ketengakerjaan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.....	III-48
Tabel 3.18	Nilai IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021.....	III-49
Tabel 3.19	Jumlah Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2021	III-50
Tabel. 3.20	Data penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021	III-52
Tabel. 3.21	Data Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tahun 2020 dan 2021	III-58
Tabel. 3.22	Persentase Pekerja Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2021	III-53
Tabel. 3.23	Rasio Ketergantungan Provinsi NTB, 2021 (persen)	III-54
Tabel. 3.24	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas di Provinsi NTB Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (persen).....	III-54
Tabel. 3.25	<i>Beberapa Capaian Indikator Pendidikan Provinsi NTB, 2019-2021</i>	III-55
Tabel. 3.26	Data Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan	III-55
Tabel. 3.27	Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal, Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Rupiah), Tahun 2021	55
Tabel 3.28	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2019-2021	III-56
Tabel 3.29	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah), 2019- 2021	III-56
Tabel 3.30	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2019-2021	III-57
Tabel 3.31	Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2021	III-61
Tabel 3.32	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar , 2021	III-62
Tabel 3.33	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak ..	III-62
Tabel 3.34	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum yang Layak.....	III-63

BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 4.1	Jumlah Rumah Tahun 2022	IV-2
-----------	-------------------------------	------

Tabel 4.2 Jumlah RTLH di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022	IV-4
Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga/KK di Provinsi NTB Tahun 2022	IV-6
Tabel 4.4 Jumlah <i>Backlog</i> di Provinsi NTB Tahun 2022	IV-6
Tabel 4.5 Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Dinding Di Provinsi NTB tahun 2021	IV-7
Tabel 4.6 Kondisi Rumah berdasarkan Jenis Lantai tahun 2021	IV-8
Tabel 4.7 Kondisi Rumah berdasarkan Luas Lantai tahun 2021	IV-9
Tabel 4.8 Pembangunan Perumahan Subsidi FLPP Oleh REI yang Terealisasi Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021	IV-10
Tabel. 4.9 Data Perizinan Pembangunan PKP Yang Telah di Terbitkan Berdasarkan data e-Profil Perumahan, Direktorat Jendral Perumahan.....	IV-12
Tabel 4.10 Program Rumah Susun Sampai Dengan Tahun 2021 (APBN).....	IV-14
Tabel 4.11 Program Rumah Susun Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021 Berdasarkan Peruntukannya	IV-15
Tabel 4.12 Lokasi Program Rumah Susun Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021 ...	IV-15
Tabel 4.13 Program Revitalisasi Rumah Susun Tahun Anggaran 2020	IV-20
Tabel 4.14 Program Rumah Khusus di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021	IV-22
Tabel 4.15 Program Rumah Khusus di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021 Berdasarkan Peruntukannya	IV-22
Tabel 4.16 Lokasi Program Rumah Khusus di NTB Sampai Dengan Tahun 2021	IV-23
Tabel 4.17 Kelembagaan di masing-masing kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021	IV-26
Tabel 4.18 Alokasi APBD untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi NTB	IV-27
Tabel 4.19 Alokasi APBD untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Disperkim Provinsi NTB.....	IV-27
Tabel 4.20 Alokasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat	IV-28
Tabel 4.21 Luasan Kawasan Permukiman Wilayah Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.....	IV-30
Tabel 4.22 Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi NTB tahun 2023	IV-40
Tabel 4.23 Kondisi Permukiman Kumuh 10-15 Ha dalam Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-53
Tabel 4.24 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luasan Kumuh	IV-54
Tabel 4.25 Sebaran Kumuh Kota Mataram.....	IV-55

Tabel 4.26 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Barat	IV-58
Tabel 4.27 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah.....	IV-62
Tabel 4.28 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Timur.....	IV-66
Tabel 4.29 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Utara.....	IV-71
Tabel 4.30 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luasan Kumuh	IV-75
Tabel 4.31 Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat	IV-76
Tabel 4.32 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Sumbawa	IV-79
Tabel 4.33 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Dompu	IV-83
Tabel 4.34 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Bima.....	IV-87
Tabel 4.35 Sebaran dan Luasan Kumuh Kota Bima	IV-92
Tabel 4.36 Sebaran Perumahan di Lintas Kabupaten/Kota.....	IV-106
Tabel 4.37 Daftar Penerima Bantuan PSU Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai Dengan Tahun 2022.....	IV-107
Tabel 4.38 Data tentang PSU Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang Berbatasan.....	IV-109
Tabel 4.39 Data KKPR yang Telah Diterbitkan Oleh Lembaga OSS Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	IV-109
Tabel 4.40 Data Perizinan Pembangunan PKP Tahun 2022 Yang Telah Diterbitkan Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-110
Tabel 4.41 Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembangunan Terkait Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Berbatasan	IV-127
Tabel 4.42 Sebaran lokasi Bahaya Banjir di Pulau Lombok Tahun 2020	IV-128
Tabel 4.43 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-129
Tabel 4.44 Potensi Luas Bahaya Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-130
Tabel 4.45 Sebaran lokasi bahaya tanah longsor	IV-136
Tabel 4.46 Potensi Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-136
Tabel 4.47 Sebaran lokasi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-141
Tabel 4.48 Potensi Luas Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-141
Tabel 4.49 Sebaran lokasi Bahaya Kekeringan di Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-145

Tabel 4.50 Potensi Luas Bahaya Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-145
Tabel 4.51 Sebaran lokasi Bahaya Gunung Berapi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	IV-150
Tabel 4.52 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunung Api Rinjani di Provinsi NTB	IV-151
Tabel 4.53 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunung Api Tambora di Provinsi NTB	IV-151
Tabel 4.54 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunungapi Tambora di Provinsi NTB	IV-151
Tabel 4.55 Sebaran lokasi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	IV-153
Tabel 4.56 Potensi Luas Bahaya Bencana Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-153
Tabel 4.57 Sebaran lokasi Bahaya Tsunami di Provinsi NTB	IV-157
Tabel 4.58 Potensi Luas Bahaya Bencana Tsunami di Provinsi NTB	IV-157
Tabel 4.59 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021	IV-162
Tabel 4.60 Panjang Jalan Menurut Status di kabupaten/Kota	IV-163
Tabel 4.61 Panjang Jembatan Menurut Keadaan dan Status di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019	IV-164
Tabel 4.62 Panjang Saluran Drainase di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	IV-165
Tabel 4.63 Distribusi Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	IV-166
Tabel 4.64 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	IV-167
Tabel 4.65 Distribusi Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	IV-168
Tabel 4.66 Jumlah Penduduk Terlayani Menurut Kabupaten/Kota di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	IV-169
Tabel 4.67 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	IV-169
Tabel 4.68 Jumlah Akses Fasilitas Sanitasi Yang Layak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	IV-170

Tabel 4. 69 Persentase Kepemilikan Jamban Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	IV-170
Tabel 4. 70 Persentase Pelayanan Persampahan di Nusa Tenggara Barat	IV-171
Tabel 4. 71 Jumlah Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun ajaran 2019/2021, dan 2020/2021	IV-172
Tabel 4. 72 Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021	IV-174
Tabel 4. 73 Jumlah Fasilitas Peribadatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ...	IV-174

BAB V DATA ANALISA PKP

Tabel 5.1 Implikasi Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Provinsi Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-18
Tabel 5.2 Kajian Implikasi Kebijakan Pembangunan Terhadap PKP di Provinsi NTB.....	V-20
Tabel 5.3 Proyeksi Penduduk 2027-2042 Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-31
Tabel 5.4 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KK Tahun 2027-2042	V-33
Tabel 5.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2027-2042	V-34
Tabel 5.6 Tipologi Perumahan di Provinsi NTB.....	V-38
Tabel 5.7 Batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak serta luas lantai satuan rumah susun umum.....	V-42
Tabel 5.8 Identifikasi Permasalahan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-42
Tabel 5.9 Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh	V-46
Tabel 5.10 Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan Kebutuhan Infrastruktur.....	V-49
Tabel 5.11 Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman	V-51
Tabel 5.12 Analisis Penanganan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana	V-52
Tabel. 5.13 Perhitungan proyeksi backlog kepemilikan rumah tahun 2027 – 2042	V-56
Tabel 5.14 Matriks Potensi Wilayah	V-61
Tabel 5.15 Analisis Kebutuhan Rumah Tahun 2027 sd 2042.....	V-64
Tabel 5.16 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan Permukiman berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2027 sd 2042	V-65
Tabel 5.17 Data Lokasi Potensial dan Luas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sederhana dan	

Rencana Pengembangan Lahan Permukiman	V-68
Tabel 5.18 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-69
Tabel 5.19 Jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) sampai dengan tahun 2021	V-88
Tabel 5.20 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022	V-89
Tabel 5.21 Rincian Penanganan RTLH Tahun 2015-2021 Per Sumber Anggaran	V-89
Tabel 5.22 Rincian penanganan RTLH tahun 2017 -2021.....	V-90
Tabel 5.23 Skenario penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	V-91
Tabel 5.24 Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2022	V-91
Tabel 5.25 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi.....	V-93
Tabel 5.26 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kemudahan Dikerjakan	V-94
Tabel 5.27 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan	V-95
Tabel 5.28 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kestabilan Lereng.....	V-96
Tabel 5.29 Nilai SKL Kestabilan Lereng.....	V-97
Tabel 5.30 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kestabilan Pondasi	V-99
Tabel 5.31 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi	V-100
Tabel 5.32 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Ketersediaan Air.....	V-102
Tabel 5.33 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air	V-103
Tabel 5.34 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL drainase.....	V-104
Tabel 5.35 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase	V-105
Tabel 5.36 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Erosi.....	V-106
Tabel 5.37 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terhadap Erosi	V-107
Tabel 5.38 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Pembuangan Limbah	V-107
Tabel 5.39 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah	V-108
Tabel 5.40 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam.....	V-109
Tabel 5.41 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	V-114
Tabel 5.42 Luas Rencana Pengembangan Permukiman dan Pembangunan Rumah	V-114
Tabel 5.43 Lahan pemerintah yang berpotensi untuk kawasan rawan bencana dan relokasi .	V-123

Tabel 5.44 Analisis Evaluasi Daya Dukung Fasilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-127
Tabel 5.45 Banyaknya Sungai di rinci menurut Wilayah Sungai	V-134
Tabel 5.46 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-137
Tabel 5.47 Proyeksi Produksi Limbah cair di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-142
Tabel 5.48 Proyeksi Fasilitas Pengelolaan Limbah cair di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-147
Tabel 5.49 Proyeksi Produksi Sampah di Provinsi NTB Tahun 2027-2042.....	V-150
Tabel 5.50 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Provinsi NTB Tahun 2027-2042.	V-153
Tabel 5.51 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-157
Tabel 5.52 Proyeksi Sarana Mitigasi Bencana Kebakaran di Provinsi NTB Tahun 2027-2042.....	V-162
Tabel 5.53 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-164
Tabel 5.54 Proyeksi Kebutuhan RTH di Provinsi NTB Tahun 2027-2042	V-168
Tabel 5.55 Matrik Kondisi kelembagaan PKP di Kabupaten/Kota Provinsi NTB	V-175

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

Tabel 6.1 Matriks Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.....	VI-4
Tabel 6.2 Matriks Rencana Pembangunan Kembali Perumahan di Wilayah Provinsi NTB	VI-5
Tabel 6.3 Matriks Rencana Pembangunan Kembali Perumahan	VI-5
Tabel 6.4 Matriks Keterpaduan Pembangunan PSU	VI-6
Tabel 6.5 Pembangunan Perumahan di Kawasan Rawan Bencana	VI-8
Tabel 6.6 Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	VI-25
Tabel 6.7 Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	VI-27
Tabel 6.8 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha	VI-28
Tabel 6.9 Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota.....	VI-29
Tabel 6.10 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).....	VI-29
Tabel 6.11 Peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	VI-30



DAFTAR GAMBAR

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN

Gambar 2.1 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.....	II-51
Gambar 2.2 Pola Pengembangan Pariwisata secara Spasial dalam Bentuk Tapal Kuda (The Horseshoe).....	II-55

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

Gambar 3.1 Potret Permukiman Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-36
Gambar 3.2 Potret Permukiman Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-40
Gambar 3.3 Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-47
Gambar 3.4 Diagram Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.....	III-51

BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gambar 4.1 Kriteria Hunian Layak dalam SDGs	IV-3
Gambar 4.2 Grafik Potret RTLH di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-4
Gambar 4.3 Persentase Kondisi Rumah Berdasarkan Dinding Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-7
Gambar 4.4 Persentase Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Lantai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-8
Gambar 4.5 Persentase Kondisi Rumah Berdasarkan Luas Lantai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-9
Gambar 4.6 Perumahan Pengembang di Pulau Lombok.....	IV-11
Gambar 4.7 Potret Rusunawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-21

Gambar 4.8 Kelembagaan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-25
Gambar 4.9 Potret Kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-31
Gambar 4.10 Gambaran Permukiman Kumuh	IV-98
Gambar 4.11 Perumahan Lingkar Mahkota dan Lingkar Permata.....	IV-105
Gambar 4.12 Potret Banjir di Permukiman Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-133
Gambar 4.13 Potret Kejadian Longsor di Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-139
Gambar 4.14 Potret Kejadian Cuaca Ekstrim di Nusa Tenggara Barat	IV-143
Gambar 4.15 Potret Kejadian Kekeringan di Nusa Tenggara Barat	IV-148
Gambar 4.16 Potret Kejadian Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat.....	IV-155
Gambar 4.17 Kondisi Jalan dan Jembatan di beberapa titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-163
Gambar 4.18 Salah satu PLTU yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-166
Gambar 4.19 Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021	IV-173

BAB V DATA ANALISA PKP

Gambar 5.1 Kebijakan Pembangunan PKP Provinsi NTB	V-1
Gambar 5.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024	V-2
Gambar 5.3 Proyeksi Penduduk Tahun 2027 Sampai Tahun 2042.....	V-32
Gambar 5.4 Proyeksi KK tahun 2027-2042	V-33
Gambar 5.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk tahun 2027	V-34
Gambar 5.6 Arah Pengembangan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-60
Gambar 5.7 Arah Pengembangan Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-60
Gambar 5.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB.....	V-172
Gambar 5.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB	V-173

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

Gambar 6.1 Skenario Pengurangan RTLH	VI-13
Gambar 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan 2020 – 2024	VI-18
Gambar 6.3 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.....	VI-23

Gambar 6.4 Penerapan SPM Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	VI-24
Gambar 6.5 Penerapan SPM tahapan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	VI-25
Gambar 6.6 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah.....	VI-26



DAFTAR PETA

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN

Peta 2.1 Peta Struktur Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	II-7
Peta 2.2 Peta Pola Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	II-8
Peta 2.3 Peta Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat	II-9

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

Peta 3.1 Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-4
Peta 3.2 Peta Kelerengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-5
Peta 3.3 Peta Topografi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-6
Peta 3.4 Peta Geologi Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-9
Peta 3.5 Peta DAS Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-10
Peta 3.6 Peta Hidrologi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-11
Peta 3.7 Peta Curah Hujan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-12
Peta 3.8 Peta Jenis Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-13
Peta 3.9 Peta Perbatasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-14
Peta 3.10 Peta Citra Satelit Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-15
Peta 3.11 Peta Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-16
Peta 3.12 Peta Resiko Tanah Longsor Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-22
Peta 3.13 Peta Resiko Bencana Gunung Berapi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-23
Peta 3.14 Peta Resiko Bencana Tsunami Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-24
Peta 3.15 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-25
Peta 3.16 Peta Resiko Bencana Gelombang Pasang Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-26

Peta 3.17 Peta Resiko Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-27
Peta 3.18 Peta Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat ..	III-28
Peta 3.19 Peta Arah Mitigasi Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-29
Peta 3.20 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-33
Peta 3.21 Peta Tata Guna Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-34
Peta 3.22 Peta Sebaran Permukiman Peisir Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	III-37
Peta 3.23 Peta Sebaran Permukiman Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-42

BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peta 4.1 Peta Sebaran RTLH Provinsi NTB	IV-5
Peta 4.2 Peta Sebaran Permukiman Provinsi NTB	IV-32
Peta 4.3 Peta Administrasi Kota Mataram	IV-56
Peta 4.4 Peta Sebaran Kumuh Kota Mataram	IV-57
Peta 4.5 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat	IV-60
Peta 4.6 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Lombok Barat.....	IV-61
Peta 4.7 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah.....	IV-64
Peta 4.8 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Lombok Tengah	IV-65
Peta 4.9 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur.....	IV-69
Peta 4.10 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Timur.....	IV-70
Peta 4.11 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara.....	IV-73
Peta 4.12 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Lombok Utara	IV-74
Peta 4.13 Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat.....	IV-77
Peta 4.14 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat	IV-78
Peta 4.15 Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa	IV-81
Peta 4.16 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa	IV-82
Peta 4.17 Peta Administrasi Kabupaten Dompu	IV-85
Peta 4.18 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Dompu	IV-86
Peta 4.19 Peta Administrasi Kabupaten Bima	IV-90
Peta 4.20 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Bima	IV-91
Peta 4.21 Peta Administrasi Kota Bima	IV-96
Peta 4.22 Peta Sebaran Kumuh Kota Bima.....	IV-97
Peta 4.23 Peta Permukiman Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-100
Peta 4.24 Peta Sebaran Permukiman Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-104
Peta 4.25 Permukiman Rawan Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-134

Peta 4.26 Permukiman Rawan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-135
Peta 4.27 Peta Permukiman Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-140
Peta 4.28 Peta Permukiman Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-144
Peta 4.29 Permukiman Rawan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-149
Peta 4.30 Permukiman Rawan Bencana Gunung Berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-152
Peta 4.31 Peta Permukiman Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-156
Peta 4.32 Peta Permukiman Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-158
Peta 4.33 Peta Jaringan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-177
Peta 4.34 Peta Fasilitas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-178
Peta 4.35 Peta Fasilitas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	IV-179

BAB V DATA ANALISA PKP

Peta 5.1 Peta Delinasi Kumuh Lintas Kabupaten (Mataram-Lombok Barat) Provinsi NTB	V-7
Peta 5.2 Peta Delinasi Kumuh Lintas Kabupaten (Lombok Tengah-Lombok Timur) Provinsi NTB	V-8
Peta 5.3 Perbatasan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat	V-9
Peta 5.4 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat.....	V-10
Peta.5.5 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah	V-11
Peta 5.6 Peta Perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.....	V-12
Peta 5.7 Peta Perbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima.....	V-13
Peta 5.8 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Kabuapten Lombok Tengah.....	V-14
Peta 5.9 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	V-15
Peta 5.10 Peta Perbatasan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa	V-16
Peta 5.11 Peta Perbatasan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.....	V-17

Peta 5.12 Analisa Pengaruh Rencana Jalan Nasional terhadap Pengembangan Permukiman..	V-27
Peta 5.13 Analisa Pengaruh Rencana Kawasan Industri terhadap Pengembangan Permukiman.....	V-28
Peta 5.14 Peta Pola Pergerakan Pulau Lombok Provinsi NTB	V-35
Peta 5.15 Peta Pola Pergerakan Pulau Sumbawa Provinsi NTB.....	V-36
Peta 5.16 Analisa Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-37
Peta 5.17 Peta Tipologi Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-40
Peta 5.18 <i>Backlog</i> Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-58
Peta 5.19 Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman....	V-87
Peta 5.20 Peta Analisis Kelerengan Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-111
Peta 5.21 Peta Analisis Ketinggian Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-112
Peta 5.22 Peta Analisa Geologi Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-113
Peta 5.23 Peta Sebaran Permukiman Provinsi NTB	V-116
Peta 5.24 Peta Kondisi Prumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-117
Peta 5.25 Peta Rencana Pengembangan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	V-118
Peta 5.26 Peta Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-119
Peta 5.27 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Pengaturan Air Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-120
Peta 5.28 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-121
Peta 5.29 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Penyediaan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	V-122

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

Peta 6.1 Peta RP3KP Pada Kawasan Dan Lingkungan Strategis Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB	VI-31
Peta 6.2 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Pulau Lombok	VI-32
Peta 6.3 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Pulau	

Sumbawa.....	VI-33
Peta 6.4 Arahkan PSU.....	VI-34
Peta 6.5 Potensi dan Masalah PSU.....	VI-35

DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu
AP	: <i>Administered Prices</i> (Harga yang diatur)
APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
APBD	: Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BP2BT	: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPN	: Destinasi Pariwisata Nasional
DTW	: Daerah Tujuan Wisata
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
GSB	: Garis Sempadan Bangunan
HCS	: <i>Hauled Container System</i>
HDI	: Human Development Index
HLPF	: <i>High-Level Political Forum</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPAL	: Instalasi Pengelolaan Air Limbah
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
JP	: Jaringan Perpipaan
KDB	: Koefisien Dasar Bangunan
KDH	: Koefisien Dasar Hijau
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KIN	: Kebijakan Industri Nasional
KLB	: Koefisien Lantai Bangunan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
KP2B	: Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KPR	: Rasio Pemilikan Rumah
KSP	: Kawasan Strategis Provinsi
KTA	: <i>Key Tourism Area</i>
LNPR	: Lembaga Non Profit Rumah Tangga
LP2B	: Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan
LU	: Lapangan Usaha
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
PKP	: Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
PKWp	: Pusat Kegiatan Wilayah Promosi
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
PPL	: Pusat Pelayanan Lokal
PSU	: Prasarana, Sarana, dan Utilitas
RIPIN	: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
RP3KP	: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SKL	: Satuan Kemampuan Lahan
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
SNVT	: Satuan Non Vertikal Tertentu
SPALD	: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SSB	: Subsidi Selisih Bunga
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
SSWS	: Sub Satuan Wilayah Sungai
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SWS	: Satuan Wilayah Sungai
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS 3R	: Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i>
TPS	: Tempat Pengumpulan Sampah
TPST	: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
VF	: <i>Volatile Foods</i>
VNR	: Voluntary National Review



RP3KP

Dokumen RP3KP
(Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman.



Tujuan :

- 1. Memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota;**
- 2. Memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar sektor, implementatif dan sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota; dan**
- 3. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota.**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Pusat kota sudah tidak mampu lagi menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (*sub urban*) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap

perumahan dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, CSR BUMN/BUMD, lembaga sosial, baznas dan/atau swadaya masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 14 huruf f, disebutkan salah satu tugas pemerintah provinsi yaitu menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) lintas kabupaten/kota.

RP3KP berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi, fasilitasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengentasan *backlog* serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.

RP3KP juga berfungsi dalam hal pengembangan investasi pembangunan sarana dan prasarana berskala regional; pengembangan kerjasama pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya; pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi kawasan permukiman

terhadap kawasan fungsional lainnya.

Saat ini, kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga muncul pergeseran fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (*urban fringe*) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar dari kota (*urban sprawl*) bahkan lokasi pengembangan permukiman berbatasan langsung dengan kabupaten/kota terdekatnya. Akibat selanjutnya adalah di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari transformasi sosial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan.

Dengan adanya dokumen RP3KP, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memperoleh gambaran prospek perkembangan permukiman di wilayahnya, mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman, memiliki acuan yang jelas bagi upaya prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman, serta merencanakan upaya penanganan yang efektif terhadap permasalahan sektor perumahan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan penyelenggaraan RP3KP adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di perkotaan maupun perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- f. menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan

- berkelanjutan; serta
- g. acuan untuk membuat dokumen yang sistematis bagi kabupaten/kota sesuai dengan kedudukan RP3KP Provinsi.

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB adalah :

- a. tersedianya data primer dan sekunder bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selaras dengan data kabupaten/kota dan nasional;
- b. tersedianya rumusan strategi terkait perencanaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; serta
- c. tersedianya konsep dan program perencanaan kawasan permukiman dan pengembangan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga terjadi sinergisitas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antar pihak-pihak yang membidangi PKP dan pihak-pihak lain yang terkait PKP.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
20. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
27. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB;
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Kedudukan RP3KP

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi/kabupaten/kota. RP3KP menjadi jabaran dan pengisian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk rencana untuk pembangunan dan pengembangan PKP untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yang terkoordinasi dan terpadu serta rencana sektor bidang PKP di tingkat provinsi dan mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektor lain.

RP3KP merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Dengan demikian harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun menengah; rencana keuangan daerah maupun rencana pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait dari tingkat pusat hingga daerah.

Pada dasarnya muatan RP3KP secara nasional berisi kebijakan dan strategi serta rencana program pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sedangkan strategi penyelenggaraannya dituangkan dalam RP3KP Provinsi yang selanjutnya menjadi Peraturan Gubernur. RP3KP merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.



Gambar 1.1 Kedudukan RP3KP Dalam Rencana Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan

Pada bagan kedudukan RP3KP dalam perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan tersebut, terlihat bahwa RP3KP disusun dengan mengacu pada produk perencanaan pembangunan dan produk perencanaan tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan hasil perencanaan tata ruang yang telah

ditetapkan dengan peraturan daerah. RTRW terdiri dari 3 (tiga) tingkatan rencana berdasarkan lingkup wilayahnya, yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang lebih rendah harus mengacu pada perencanaan yang lebih tinggi. Perencanaan tata ruang yang lebih detail sebagai turunan RTRW, yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Produk perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Seperti halnya dalam perencanaan tata ruang, produk perencanaan pembangunan juga terdapat tingkatan rencana, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sementara itu, RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RP3KP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan, dan Sasaran
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Kedudukan RP3KP
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN

- 2.1 Kebijakan Tata Ruang
 - 2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 2.1.2.1 Tujuan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 2.1.2.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang PKP
 - 2.1.2.3 Rencana Sistem Perkotaan
 - 2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2.2 Kebijakan Pembangunan
 - 2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
 - 2.2.1.1 Visi Nasional

- 2.2.1.2 Pembangunan Daerah
- 2.2.1.3 Pembangunan Infrastruktur
- 2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
 - 2.2.2.1 Visi Indonesia 2045
 - 2.2.2.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2024
 - 2.2.2.3 Batasan Pembangunan
 - 2.2.2.4 Lingkungan dan Isu Strategis Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - 2.2.2.5 Lingkungan dan Isu Strategis Infrastruktur Perkotaan
 - 2.2.2.6 Arah Kebijakan dan Strategi
- 2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTB 2005-2025
 - 2.2.3.1 Visi
 - 2.2.3.2 Misi
 - 2.2.3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTB 2005-2025
- 2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. NTB 2019-2023
 - 2.2.4.1 Visi
 - 2.2.4.2 Misi
 - 2.2.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi
 - 2.2.4.4 Program Pembangunan Daerah
- 2.2.5 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024
 - 2.2.5.1 Pembangunan Permukiman
 - 2.2.5.2 Pembangunan Perumahan
 - 2.2.5.3 Visium Kementerian PUPR
 - 2.2.5.4 Visi
 - 2.2.5.5 Misi
 - 2.2.5.6 Tujuan
- 2.2.6 Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024
- 2.2.7 Sustainable Development Goals (SDG's)
- 2.3 Kebijakan Rencana Induk Sektor
 - 2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
 - 2.3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

3.1 Identifikasi Kondisi Fisik Wilayah

- 3.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah
- 3.1.2 Kondisi Fisik Dasar
- 3.1.3 Wilayah Rawan Bencana
- 3.1.4 Daftar Daerah Terlarang (*Negative List*) untuk RP3KP
- 3.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

3.2 Identifikasi Sosial, Budaya dan Kependudukan

- 3.2.1 Kondisi Sosial
- 3.2.2 Budaya Bermukim
- 3.2.3 Kondisi Kependudukan
 - 3.2.3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
 - 3.2.3.2 Ketenagakerjaan
 - 3.2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia
 - 3.2.3.4 Penduduk Miskin
 - 3.2.3.5 Struktur Penduduk

3.3 Identifikasi Perekonomian

- 3.3.1 Perkembangan Perekonomian
- 3.3.2 *Supply and Demand* Perumahan

BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1 Profil Perumahan

- 4.1.1 Jumlah Rumah
- 4.1.2 Rumah Tidak Layak Huni
- 4.1.3 *Backlog* Kepemilikan Rumah
- 4.1.4 Kondisi Rumah Berdasarkan Dinding
- 4.1.5 Kondisi Rumah Berdasarkan Lantai
- 4.1.6 Kondisi Rumah Berdasarkan Luas Lantai
- 4.1.7 Perumahan Pengembang
- 4.1.8 Profil Rumah Susun dan Rumah Khusus di Provinsi NTB
- 4.1.9 Profil Kelembagaan
- 4.1.10 Profil Pembiayaan Perumahan

4.2 Profil Permukiman Provinsi NTB

- 4.2.1 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di NTB
- 4.2.2 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Lombok

- 4.2.3 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Sumbawa
- 4.2.4 Budaya Bermukim
- 4.2.5 Permukiman Rawan Bencana
- 4.2.6 Wilayah Terlarang (*Negative List*)
- 4.3 Profil Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
 - 4.3.1 Jaringan Jalan/Transportasi
 - 4.3.2 Jaringan Drainase
 - 4.3.3 Jaringan Listrik
 - 4.3.4 Jaringan Air Minum
 - 4.3.5 Sanitasi dan Air Limbah
 - 4.3.6 Persampahan
 - 4.3.7 Fasilitas Pendidikan
 - 4.3.8 Fasilitas Kesehatan
 - 4.3.9 Fasilitas Peribadatan
 - 4.3.10 Fasilitas Ruang Terbuka Hijau / Non Hijau

BAB V ANALISA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 5.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5.2 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang Disasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Pedesaan yang Ada di Wilayah Perencanaan
- 5.3 Analisis Kependudukan
- 5.4 Analisis Karakter PKP
 - 5.4.1 Karakteristik dan Tipologi PKP
 - 5.4.2 Analisis Identifikasi Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 5.4.2.1 Analisis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
 - 5.4.2.2 Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman
 - 5.4.2.3 Analisis Penanganan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana
 - 5.4.2.4 Analisis Backlog
- 5.5 Analisis Arah Pengembangan PKP
- 5.6 Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan

Jaringan Utilitas Regional atau Rencana Induk Sistem dan PSU di Kawasan Lintas

- 5.7 Analisis Kebutuhan Penyediaan Rumah
- 5.8 Analisis Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- 5.9 Analisis Daya Dukung Permukiman
 - 5.9.1 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi
 - 5.9.2 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan
 - 5.9.3 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng
 - 5.9.4 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi
 - 5.9.5 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air
 - 5.9.6 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase
 - 5.9.7 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Erosi
 - 5.9.8 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah
 - 5.9.9 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam
- 5.10 Analisis Penyediaan Lahan Untuk Kawasan Rawan Bencana dan yang Terkena Dampak Relokasi
- 5.11 Analisis Penyediaan PSU Permukiman
 - 5.11.1 Analisis Kebutuhan Jaringan Jalan
 - 5.11.2 Analisis Sistem Drainase Kawasan
 - 5.11.3 Analisis Kebutuhan Air Bersih
 - 5.11.4 Analisa Proyeksi Produksi dan Kebutuhan Fasilitas Pengelolaan Limbah Cair
 - 5.11.5 Analisa Kebutuhan Penanganan Sampah
 - 5.11.6 Analisa Kebutuhan Jaringan Listrik
 - 5.11.7 Analisa Kebutuhan Mitigasi Bencana Kebakaran
 - 5.11.8 Analisa Kebutuhan Sarana Peribadatan
 - 5.11.9 Analisa Kebutuhan RTH
- 5.12 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pembiayaan PKP
 - 5.12.1 Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah Provinsi NTB
 - 5.12.2 Perkembangan Inflasi Daerah
 - 5.12.3 Prospek Perekonomian Provinsi NTB
- 5.13 Analisis Kelembagaan PKP

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

- 6.1 Penyelenggaraan Perumahan
 - 6.1.1 Perencanaan dan Penanganan Perumahan
 - 6.1.2 Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
 - 6.1.3 Pembangunan Perumahan
 - 6.1.3.1 Pembangunan dan Pengembangan Rumah
 - 6.1.3.2 Pembangunan Perumahan Baru
 - 6.1.3.3 Pembangunan Kembali
 - 6.1.3.4 Rencana Keterpaduan PSU Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan
 - 6.1.3.5 Rencana Pembangunan Perumahan Dikawasan Rawan Bencana
 - 6.1.4 Pengendalian Perumahan
- 6.2 Penyelenggaraan Permukiman
 - 6.2.1 Perencanaan Kawasan Permukiman
 - 6.2.2 Pembangunan Kawasan Permukiman
 - 6.2.2.1 Skenario Peningkatan Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau
 - 6.2.2.2 Skenario Keterpenuhan Akses Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan
 - 6.2.3 Pengendalian Kawasan Permukiman
- 6.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
 - 6.3.1 Strategi Perwujudan Permukiman Layak dan Sehat



Jumlah proyeksi produksi sampah Prov. NTB di tahun 2042 mencapai 26.800.665 kg yang berasal dari Rumah Tangga, Perdagangan, Jalan, dll.

Persampahan



Untuk dapat mengetahui volume sampah yang dihasilkan akan dihitung timbulan sampah harian dari tahun ke tahun. Dasar perhitungannya adalah perkiraan timbulan sampah sebesar 2,5 liter/orang/hari untuk sampah domestik (rumah tangga), 1 liter/orang/hari atau 500 lt/org/1.000 m² untuk sampah non-domestik (pertokoan/ komersial, perkantoran, dan jalan) dan untuk sarana umum diasumsikan 0,2 liter/orang/hari atau 100 lt/1.000 m².





BAB II

KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Tata Ruang

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Peraturan terkait RTRWN tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

RTRWN merupakan pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah wilayah nasional, pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah nasional; pedoman penataan kawasan strategis nasional serta pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sedangkan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan strategis nasional.

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Di dalam Pasal 63 huruf h menyebutkan kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

- a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.

2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.1.2.1 Tujuan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam.

2.1.2.2 Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang PKP

a. Arahan kebijakan pemanfaatan ruang PKP

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan RTRW ini.

b. Rencana struktur ruang dan pola ruang

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tercapai.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada;
- b. Pengembangan struktur ruang berbasis pulau untuk Pulau Lombok dan berbasis kawasan untuk Pulau Sumbawa; dan
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, persampahan, dan sanitasi yang terpadu dan sesuai kebutuhan wilayah provinsi.

Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada meliputi:

- a. Mendorong pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW Promosi (PKWp) dan PKL;
- c. Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
- b. Revitalisasi peran dan fungsi Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, dan Ibu Kota Kecamatan yang sebelumnya telah merupakan PKN, PKW, dan PKL; dan

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. Kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya; dan

c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. Rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi; dan
- b. Rencana pola ruang provinsi, pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. Pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.

2.1.2.3 Rencana Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan terdiri dari sistem perkotaan nasional yang ada di wilayah provinsi terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan sistem perkotaan wilayah provinsi yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sistem Perkotaan Nasional yang ada di provinsi NTB terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional berada di Mataram dan Pusat Kegiatan Wilayah berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba. Ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. Sistem perkotaan provinsi Pusat Kegiatan Lokal berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, dan Sape.

Sistem perkotaan kabupaten/kota yaitu Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Pusat Pelayanan Lokal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan usulan pemerintah kecamatan dan memperhatikan potensi wilayah. PPL memiliki kriteria:

- kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan; dan/atau
- kawasan perdesaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa/ kelurahan.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi NTB yang ditetapkan terdiri dari KSP berdasarkan sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dan Sudut Kepentingan Daya dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;
- b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;
- d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
- e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
- f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri;
- i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
- j. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;
- k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima

dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;

1. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
dan
- d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima

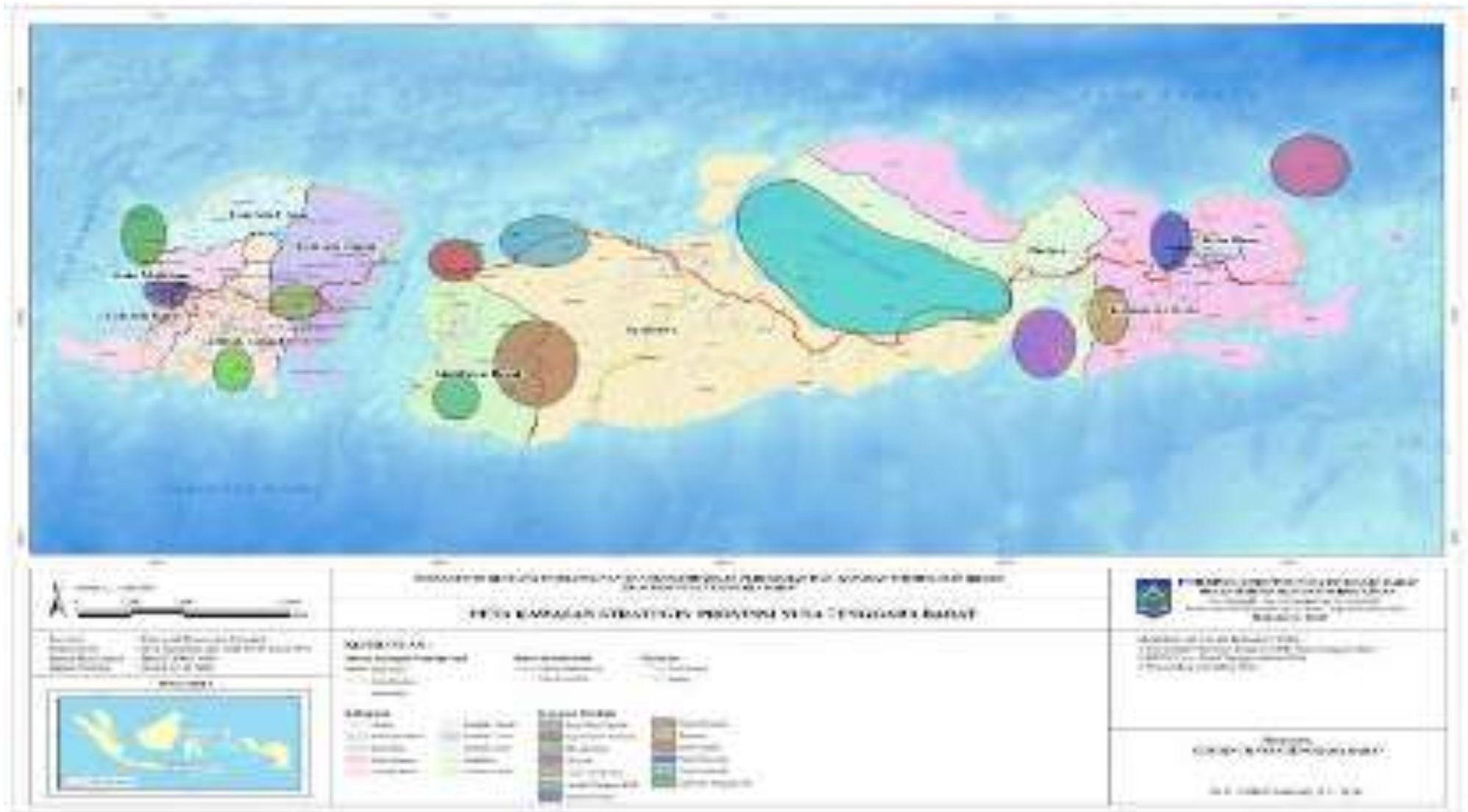
Peta 2.1 Peta Struktur Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 2.2 Peta Pola Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 2.3 Peta Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat



2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar kelayakan. Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk : (a) mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (b) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan (c) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaanya dilaksanakan di daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
- g. Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

- perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
- h. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
 - i. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi; dan
 - k. Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan berwenang:

- a. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- b. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- c. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tingkat provinsi;
- h. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

- permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
- i. Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah atau korban bencana;
 - j. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional;
 - k. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis provinsi;
 - m. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi rumah korban bencana provinsi;
 - n. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah;
 - o. Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman;
 - p. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan menengah;
 - q. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah negara untuk mewujudkan ketertiban penyediaan dan penghunian rumah negara;
 - r. Peningkatan kualitas homestay atau rumah masyarakat yang berpotensi untuk disewakan sebagai homestay dan berada di desa wisata; dan
 - s. Memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh sertifikat lahan bagi MBR.

Urusan perumahan dan kawasan perumahan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu Perumahan, Kawasan permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Program prioritas daerah di bidang PKP

1. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman
2. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi
3. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis provinsi
4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi rumah korban bencana provinsi
5. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah
6. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota
7. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR
8. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah negara untuk mewujudkan ketertiban penyediaan dan penghunian rumah negara
9. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi

2.2 Kebijakan Pembangunan

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

2.2.1.1 Visi Nasional

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

2.2.1.2 Pembangunan Daerah

a. Visi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

b. Arah Pembangunan Jangka Panjang

1. Dalam rangka keserasian pemanfaatan ruang, fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok akan ditingkatkan. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non-pertanian, khususnya di pulau Jawa. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah (*carrying capacity*) Pulau Jawa, maka proses konversi lahan pertanian ke non-pertanian (industri, perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya: (a) kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir; (b) kelangkaan sumber air bersih; (c) agglomerasi perkotaan yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*). Selain itu proses konversi tersebut akan mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Oleh karena itu, proses konversi lahan pertanian ke non pertanian harus dikendalikan melalui (a) pengawasan dan penerapan law enforcement tata ruang yang efektif; (b) penyeimbangan land-rent antara Jawa dan Luar Jawa dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa; (c) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan industri di luar Jawa;
2. Pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar, terutama di Pulau Jawa, akan dikendalikan melalui: (a) penerapan manajemen perkotaan (*urban-sprawl management*) yang meliputi optimasi dan

pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga (*buffer zone*) di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *dormitory town* tetapi dapat menjadi kota mandiri; (b) pengembangan kegiatan ekonomi kota (*urban economic development*) yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dll; (c) revitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*) meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui redevelopment kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi masal yang terintegrasi antar moda; (d) reformasi keuangan daerah perkotaan (*urban fiscal reforms*) seperti perluasan basis perpajakan termasuk kemungkinan penerapan *road pricing*, menaikkan tarif parkir, penerapan PBB secara progresif, serta pinjaman daerah termasuk penerbitan obligasi (*municipal bonds*) yang manfaatnya dikembalikan ke publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan transportasi (darat, laut, sungai, dan udara), telematika, dan energi secara lebih efektif dan efisien untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi strategis dan cepat tumbuh dengan wilayah-wilayah pertumbuhan lain secara nasional dan internasional. Pembangunan prasarana dan sarana dapat dibiayai dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta, dunia usaha, serta masyarakat. Peningkatan pelayanan transportasi masal terutama untuk kota-kota metropolitan di Pulau Jawa.
4. Dalam rangka penataan pertanahan perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan

pengenaan perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka NKRI, utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

2.2.1.3 Pembangunan Infrastruktur

a. Visi Pembangunan Infrastruktur

Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

b. Arah Pembangunan Jangka Panjang

1. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip "*one river one management and one consolidated planning*" (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten/kota dan wilayah sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mencegah konflik horizontal dan vertikal.
2. Pembangunan transportasi dimasa mendatang diarahkan untuk: (a) meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan

orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan; (b) menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan *e-commerce* dalam konteks *less paper document*, sehingga kemudahan, kelancaran, dan kepastian pelayanan dapat dicapai; (c) menyelaraskan semua peraturan perundang undangan baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; (d) menciptakan sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi dibidang prasarana dan sarana transportasi; (e) mendorong seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiaannya; (f) menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; (g) mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; (h) menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services*.

3. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada terselenggaranya: (a) pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; (b) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; (c) terselenggaranya pembangunan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
4. Pembangunan energi diarahkan pada penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya energi; peningkatan prasarana dan sarana produksi;

peningkatan fungsi kelembagaan; peningkatan mutu SDM dan penguasaan teknologi; serta peningkatan peran masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi.

5. Pembangunan ketenaga-listrikan diarahkan pada penyediaan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan peningkatan kapasitas pembangkit melalui rehabilitasi dan *repowering* pembangkit yang telah ada maupun pembangunan pembangkit baru yang diarahkan pada peningkatan efisiensi, penggunaan bahan bakar yang lebih murah. Sistem jaringan transmisi dan distribusi ditingkatkan kualitas dan jangkauannya agar mampu menunjang penyediaan tenaga listrik yang handal melalui pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi dan dengan kapasitas yang memadai, serta pengembangan sistem jaringan distribusi yang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah “*INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR*”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan

pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai

aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarvmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

a. Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Adapun misi presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

2.2.2.1. Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

2.2.2.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Sasaran pembangunan tahun 2024 pada RPJMN Tahun 2020-2024 terkait PKP adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur pelayanan dasar
 - 70% rumah tangga menempati hunian layak
 - 100% hunian dengan akses air minum layak
 - 90% hunian dengan akses sanitasi layak
 - 30% hunian dengan akses air minum perpipaan
2. Infrastruktur perkotaan
 - 80% dan 20% hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik.

2.2.2.3. Batasan Pembangunan

a. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah daerah yang rawan terjadi abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai). Sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000 akibat dampak

perubahan iklim. Kenaikan tinggi gelombang laut ini akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen sehingga diperkirakan meningkatkan cakupan luas wilayah permukiman di pesisir yang rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas pembangunan karena akan mengancam permukiman dan infrastruktur lain yang sudah ada, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada tingginya gelombang laut yang mempengaruhi pola penangkapan ikan dan nelayan (Bappenas, 2018).

b. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar.

Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih-alih dijadikan sebagai kawasan budidaya. Apabila tidak bisa dihindari sebagai kawasan budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

c. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m³/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

2.2.2.4. Lingkungan Dan Isu Strategis Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28 (h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas terutama dalam penyediaan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Meskipun tingkat kepemilikan rumah berada pada kisaran 80 persen dalam dasawarsa terakhir, namun masih terdapat 45,9 persen rumah tangga pada tahun 2018 yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yang meliputi ketahanan bangunan, luas lantai per kapita serta akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Pada sisi permintaan, akses masyarakat terhadap

pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya akses terhadap pembiayaan perumahan diindikasikan dengan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap PDB Indonesia masih di bawah 3 persen (2017) dan cukup tertinggal dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 38,4 persen. Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan bagi yang membangun rumah secara swadaya.

Salah satu tantangan dalam perluasan akses tersebut adalah belum mapannya pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk masih terjadinya maturity mismatch sumber pembiayaan. Kebijakan pemerintah dalam pemberian kemudahan dan bantuan belum berjalan optimal dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah. Pada sisi lainnya jumlah bantuan yang diberikan belum proporsional dengan besar pendapatan penerima yang beragam.

Pada sisi pasokan, lokasi rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah cenderung tersebar serta menjauh dari pusat kota sehingga menyebabkan tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kondisi tersebut disebabkan oleh manajemen lahan untuk perumahan yang belum efektif serta tidak terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman. Di samping itu, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan untuk menjamin keandalan dan tertib bangunan dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana, serta mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

Dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan perumahan dan permukiman yang multisektor, masih diperlukan peningkatan keterpaduan kebijakan dan program baik antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional keterpaduan kebijakan sangat diperlukan pada seluruh rantai pasok (*supply chain*) penyediaan perumahan terutama terkait pertanahan dan pembiayaan.

Di tingkat daerah, meskipun seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah

memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman namun keberadaannya belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan dilayani ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun. PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDAM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah

keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen PDAM baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan keterbatasan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang lebih dapat meningkatkan minat investasi dan kerja sama badan usaha.

Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61 persen rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R). Di sisi lain, upaya pengangkutan sampah di perkotaan mengalami tantangan karena masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis.

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas. Laporan *Urban Sanitation Development Program* tahun 2017 menunjukkan hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2 persen dari total APBD.

Fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, baru 77

kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018).

Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman juga belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang, serta implementasi perencanaan yang belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah disusunnya dokumen SSK di 489 kabupaten/kota (di 33 provinsi) namun masih terdapat 9 provinsi yang memerlukan percepatan peningkatan akses sanitasi yang signifikan.

2.2.2.5. Lingkungan Dan Isu Strategis Infrastruktur Perkotaan

a. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak di kawasan perkotaan baru mencapai 51,54 persen, termasuk di dalamnya cakupan layanan akses air minum perpipaan yang baru mencapai 29,30 persen. Begitu halnya dengan layanan air limbah domestik yang layak di perkotaan hanya 69,36 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses aman 11,12 persen. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (3,85 persen), dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/ atau pantai/tanah lapang/kebun) sebesar 8,52 persen di perkotaan. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan stunting.

Di sisi lain, rendahnya akses air limbah yang aman di perkotaan disebabkan oleh pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota dan Penyediaan Layanan pengolahan lumpur tinja (*Fecal Sludge Management*) yang belum optimal. Perlu upaya dan kerja lebih keras dalam percepatan pembangunan penyediaan air minum dan air limbah

khususnya di perkotaan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi.

b. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Saat ini terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan dibutuhkan upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pada daerah tertentu, dibutuhkan konsolidasi tanah vertikal dalam rangka menangani permukiman kumuh sekaligus menyediakan pasokan rumah baru di perkotaan dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

2.2.2.6. Arah Kebijakan Dan Strategi

a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:

- Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
- Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara

swadaya;

- Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:

- Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
- Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
- Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
- Pemanfaatan tanah milik negara / BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
- Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN / BUMD dalam penyediaan perumahan,

Sedangkan strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), dilakukan melalui:

- Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
- Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
- Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;

b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan

adalah:

1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui (a) penguatan fungsi operator dan regulator; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (*Fecal Sludge Management*); (c) penyediaan layanan terintegrasi air minum, air limbah dan persampahan; (d) pengembangan kawasan dengan layanan air siap minum (*portable water*) / Zona Air Minum Prima (ZAMP); dan (e) peningkatan keandalan pengelolaan jaringan air minum melalui *Smart Grid Water Management*.
2. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.
3. Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan adalah Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi.

c. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru. Proyek prioritas yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025

2.2.3.1 Visi

Berdasarkan kondisi dan analisis terhadap kondisi saat ini, modal pembangunan yang dimiliki, dan tantangan dalam 20 tahun ke depan serta mengacu pada visi RPJP Nasional 2005-2025, maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 adalah:

*“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA”*

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat” seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Disamping “kemandirian dan kemajuan” sebagai prasyarat dalam memacu ketertinggalan daerah.

2.2.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

- Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai- nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
- Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan

hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.

- Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
- Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

2.2.3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera perlu ditentukan arah pembangunan yang hendak dituju. Sementara itu, untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, maka ditentukan terlebih dahulu sasaran pembangunan pada setiap misi yang telah dirumuskan.

Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum yang ditunjukkan oleh:

- Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan dimasyarakat.
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

- Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib dan harmonis.
- Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

Terwujudnya masyarakat sejahtera, ditunjukkan oleh:

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
- Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
- Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi. menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditandai oleh:

- Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat
- Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan

dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

- Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, ditandai oleh:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
- Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
- Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, ditunjukkan oleh:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
- Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun *geo park*, *Lombok as Ecoisland* (Leci) dan *Sumbawa as Ecozone* (Suez).

2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.2.4.1 Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah: *“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”*

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna:

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtirakan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada

pelayanan publik.

2.2.4.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
- NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
- NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
- NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
- NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

2.2.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengacu kepada Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi dan misi Presiden sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terjemahan Nawa Cita dijabarkan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan,

terpencil dan tertinggal (3T); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Terkait dengan kewilayahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam wilayah pembangunan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2015-2019. Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015- 2019 tema pembangunan pada wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convation, Exhibition* (MICE); penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan industri mangan, dan tembaga.”

Tujuan pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga,

- b. penyediaan infrastruktur wilayah,
- c. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

2.2.4.4 Program Pembangunan Daerah

a. Program Prioritas Daerah

Program Strategis dan Program Unggulan yang tertuang dalam RPJM Daerah Provinsi NTB disusun dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana.
2. Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah.
3. Reformasi Birokrasi.
4. Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM.
5. Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM.
6. Pengelolaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan.
7. Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif.
8. Pariwisata Andalan.
9. Industrialisasi Unggul.
10. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia).

b. Program Pembangunan Daerah Bidang PKP

Program pembangunan daerah disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Program pembangunan daerah bidang PKP yang tertuang didalam program unggulan daerah Provinsi NTB merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk melaksanakan program unggulan dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah.

Adapun integrasi program bidang PKP tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Program pembangunan daerah bidang PKP provinsi NTB yang ditetapkan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah mempertimbangkan Permendagri 13 Tahun 2006

No	BIDANG URUSAN	No	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1	Program Pengembangan Perumahan (Termasuk : Rumah Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (Termasuk : NTB Zero Waste, Penataan 99 Desa Wisata, Jamban Keluarga/Stop BABS)	

2.2.5 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

2.2.5.1 Pembangunan Permukiman

Selama periode 2015–2019, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan infrastruktur permukiman difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Pencapaian pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan air minum nasional meningkat sebesar 5,21% yaitu dari

84,06% pada akhir tahun 2014 menjadi 89,27% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Dari angka tersebut, akses air minum layak pada jaringan perpipaan (JP) sebesar 20,18% secara nasional di akhir tahun 2019. Selain melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat juga didukung dari peningkatan jumlah PDAM yang sehat. Sampai akhir tahun 2019, jumlah PDAM sehat meningkat dari 196 (53,3%) PDAM sehat di tahun 2015 menjadi 224 (58,9%) PDAM sehat pada tahun 2019.

2. Sampai akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 38.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman juga dilaksanakan di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau- pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana. Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga dilakukan melalui pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
3. Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multi stake holder telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional sebesar 11,21% dari baseline 66,23% (BPS, 2014 diolah Bappenas) menjadi 77,44% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Selaras dengan pembangunan infrastruktur air limbah, akses persampahan perkotaan juga mengalami peningkatan dari baseline 46,40% (BPS, 2013 diolah Bappenas) menjadi 60,63% (BPS, 2016 diolah Bappenas). Selain itu, capaian penanganan drainase lingkungan juga telah mencapai 100% dari target luas genangan yang tertangani sebesar 4.655 hektar.
4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan

bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan pada 507 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Pusaka, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitasi Ruang Terbuka Publik, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dalam rangka dukungan pengembangan infrastruktur strategis antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

5. Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut terdiri atas jumlah atas sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN, 1 lembaga PTKIN, 4 venue olahraga PON Papua, 8 gedung pasar, dan 7.175 m² penanganan pasca bencana di Papua dan Maluku.

2.2.5.2 Pembangunan Perumahan

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;
2. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 700.641 unit;
3. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta
4. Penurunan backlog rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan

hunian layak, melalui pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM. Fasilitas Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang di-launching oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan Program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

2.2.5.3 Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Tahun 2017 – 2019

Backlog rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.

2. Tahun 2020 – 2024

Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3. Tahun 2025 – 2030

Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

2.2.5.4 Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

2.2.5.5 Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta

- penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.2.5.6 Tujuan

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

2.2.6 Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang 4 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 dan dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang Ditjen Perumahan mendapat tanggung jawab untuk:

- a. Menyediakan 875.000 unit rumah melalui pembangunan 51.340 unit rumah rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, dan penanganan 813.660 unit rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni; serta
- b. Menyediakan PSU yang melayani 262.345 unit rumah milik MBR.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Perumahan, penyelenggaraan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Ditjen Perumahan diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; dan
- b. Persentase rumah bagi MBR yang mendapat bantuan PSU.

2. Program dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan, yang ditujukan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan yang diukur menggunakan indikator tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR.

2.2.7 Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah pedesaan, serta disparitas pencapaian target antarprovinsi yang masih lebar.

Adapun dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di tingkat global maupun nasional. Pencapaian di tingkat global antara lain Indonesia telah dua kali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) pada tahun 2017 dan 2019 dalam rangkaian High-Level Political Forum (HLPF) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menilai VNR 2017 Indonesia merupakan salah satu dari enam VNR terbaik di dunia. Oleh karenanya Indonesia diundang oleh PBB untuk mengikuti Investment Fair tahun 2018 untuk membahas berbagai proyek-proyek untuk pencapaian SDGs dengan para investor internasional. VNR Indonesia tahun 2019 juga mendapat penghargaan dari PBB terutama untuk laporan Goal 16 tentang Perdamaian,

Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh karena Indonesia menyusun laporan ini dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip inklusif.

1. Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; (2) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; dan (3) Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

2. Tujuan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung (enabling environment) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

2.3 Kebijakan Rencana Induk Sektor

2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Tinjauan terhadap kebijakan ini dimaksudkan sebagai acuan dan referensi dalam perencanaan, pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disekitar area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, agar tercipta penataan kawasan yang baik dan sehat. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan zona pariwisata dengan keunggulan geostrategis, yang memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan, dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok.

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika memiliki luas 1.035,67 ha (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuta, Desa Sukadane, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertak dan Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Kuta, Teluk Serenting, dan Teluk Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Batas sebagaimana yang dimaksud digambarkan dalam peta dibawah ini.



Gambar 2.1 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

2.3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok – Gili Tramena

Tinjauan terhadap kebijakan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman disekitar area Rencana Destinasi Pariwisata Nasional Lombok – Gili Tramena. Sehingga mewujudkan pembangunan dan pengembangan PKP yang terintegrasi dan selaras dengan pembangunan

Pariwisata.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian dan harapan besar terhadap sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Perkembangan Pariwisata diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar berupa peningkatan devisa dari kunjungan dan pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman), pendapatan dari wisatawan nusantara (wisnus), dan pembukaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan untuk mewujudkan sasaran pembangunan Pariwisata tersebut telah direncanakan oleh pemerintah pusat melalui pengembangan 10 destinasi Pariwisata prioritas untuk menunjang Bali, termasuk Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Pulau Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, atau disebut dalam dokumen ini Lombok-Gili Tramenana.

Konsep pengembangan Pariwisata secara spasial di DPN Lombok-Gili Tramenana akan mengikuti pola pengembangan dengan bentuk Tapal Kuda (*The Horseshoe*). Pola ini dipilih berdasarkan pertimbangan (i) pertumbuhan Pariwisata, (ii) kebutuhan penggunaan lahan, serta (iii) potensi dampak sosial dan lingkungan.

Secara terinci, pola pengembangan ini mencakup tujuh pendekatan pengembangan sebagai berikut:

1. Melindungi Global Geopark Rinjani dengan melestarikan alam di wilayah utara Pulau Lombok dan merevitalisasi kualitas lingkungan di Gili Trawangan, Meno, dan Air, serta mengendalikan pengembangan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
2. Mendistribusikan kesejahteraan dengan membatasi dan mengontrol pengembangan Pariwisata skala besar di sekitar Gili dan Senggigi, serta menyebarkan kegiatan Pariwisata dan membagikan manfaat pengembangan Pariwisata ke selatan dan timur Pulau Lombok.
3. Membuka potensi pantai selatan dengan membagi kepadatan wisatawan di Gili-Senggigi ke beberapa daerah di pantai selatan, serta mendukung dan mempromosikan Mandalika dengan tempat-tempat wisata baru di sekitarnya.

4. Meningkatkan konektivitas ke pulau di sekitarnya dengan memaksimalkan peran pelabuhan dan bandara di Pulau Lombok sebagai pintu pengembangan untuk mendukung peningkatan kegiatan Pariwisata di sekitarnya, serta meningkatkan kualitas koneksi jalan internal Pulau Lombok. Peningkatan aksesibilitas antara Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan sehingga mampu menghubungkan konektivitas antar pulau antara Bali-Lombok-Sumbawa.
5. Melestarikan area pertanian dan meningkatkan rantai pasok Pariwisata dengan menjamin konservasi area Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah tengah Pulau Lombok dan memaksimalkan peran sektor pertanian untuk menjadi bagian dari rantai pasok pengembangan Pariwisata.
6. Melestarikan dan mempromosikan keragaman budaya Lombok dengan melibatkan warga lokal dan masyarakat adat dalam setiap kegiatan Pariwisata, mengembangkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, serta meningkatkan pemasaran produk budaya dan Pariwisata lokal.
7. Mengembangkan Pariwisata tematik dengan menentukan klaster Pariwisata sesuai dengan karakteristiknya, mengembangkan tema Pariwisata yang berbeda di setiap KTA untuk memperkaya pilihan destinasi, serta menetapkan area prioritas dan area potensial untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

Pola Tapal Kuda telah mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan lahan di DPN Lombok-Gili Tramen yang dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi termasuk infrastruktur, permukiman, dan Pariwisata. Penggunaan lahan untuk permukiman tidak saja merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk, tetapi juga dari perkembangan Pariwisata yang dapat mengundang migrasi penduduk dari daerah lain. Dari aspek sosial, pengembangan Pariwisata secara spasial telah mempertimbangkan tingkat kemiskinan, risiko sosial (konflik sosial dan tingkat kejahatan), serta potensi pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama penduduk di Pulau Lombok.

Pertimbangan untuk menyesuaikan pengembangan fisik dengan warisan budaya dan aspirasi masyarakat adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengembangan Pariwisata dengan pola Tapal Kuda ini. Pola pengembangan Tapal Kuda juga telah mempertimbangkan aspek-aspek jasa ekosistem yang meliputi: (i) jasa pasokan air; (ii) jasa pengendali iklim; (iii) jasa mitigasi bencana; (iv) jasa pengolahan limbah dan air; (v) jasa budaya; serta (vi) jasa pendukung keanekaragaman hayati di DPN Lombok-Gili Tramena. Berdasarkan aspek-aspek jasa ekosistem tersebut, wilayah yang dicakup dalam pola Tapal Kuda ini memiliki daya dukung yang tinggi dan sangat tinggi sekitar 34,9 persen dari total area yang ada. Proporsi ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pilihan skenario pengembangan lainnya, sehingga lebih mendukung pengembangan Pariwisata, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan aset masyarakat. Pola Tapal Kuda juga telah mempertimbangkan keterkaitan antar koridor Pariwisata, mulai dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang sudah berkembang di wilayah utara-barat (Gili Tramena, Senggigi, dan Kota Mataram), dengan DTW pengembangan baru wilayah selatan dengan pengungkit KEK Mandalika, serta DTW di *Key Tourism Area* (KTA) Rinjani di bagian timur dan utara yang berfokus pada konservasi. Pada saat yang sama, keterkaitan antara pengembangan Pariwisata dan Pertanian dibangun dengan memperkuat koridor pertanian di wilayah tengah yang nantinya akan berperan sebagai pemasok pangan bagi industri Pariwisata. Pengembangan Pariwisata di bagian utara dibatasi terutama di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Rencana pengembangan Bandar Kayangan di bagian utara Pulau Lombok akan dijadikan sebagai pengungkit pada pengembangan wisata berbasis kota di tahapan pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena di masa mendatang. Pola Tapal Kuda ini juga memungkinkan keterkaitan pola perjalanan Pariwisata yang semakin kuat antara destinasi Bali di sisi barat dan destinasi Pulau Sumbawa di sisi timur. Pengintegrasian pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena dalam pola Tapal Kuda ini diharapkan dapat menyebarkan peluang bagi masyarakat di DPN Lombok-Gili Tramena untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari

pengembangan Pariwisata. Hal ini selaras dengan aspek-aspek keberlanjutan, ketangguhan, dan inklusivitas yang menjadi visi pengembangan Pariwisata di DPN Lombok-Gili Tramena



Gambar 2.2 Pola Pengembangan Pariwisata secara Spasial dalam Bentuk Tapal Kuda (The Horseshoe)



RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Dalam menghitung kebutuhan sarana RTH menggunakan Permen PU Nomor 05/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.



Hasil proyeksi pada tahun tahun akhir yaitu tahun 2042 menunjukkan kebutuhan akan taman bermain yaitu sebanyak 29.791 unit dengan luas taman 7.447.787 m². Untuk kebutuhan akan taman lingkungan yaitu sebanyak 2.979 unit dengan luas 3.723.894 m². Sedangkan untuk lapangan olahraga membutuhkan 248 unit dengan luas kebutuhan 2.234.336 m² .



BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

3.1 Identifikasi Kondisi Fisik Wilayah

3.1.1 Kondisi Geografi dan Administrasi Wilayah

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 48.949,06 km² terdiri dari daratan seluas 19.790,02 km² (40,43%) dan perairan laut seluas 29.159,04 km² (59,57%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.467,97 km² (22,58%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.322,05 km² (77,42 %) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil. Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 Desa/Kelurahan. Pulau Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 Desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 Kecamatan.

Tabel 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tepi Laut/ Coastal			Bukan Tepi Laut/ Non Coastal		
		2014	2018	2021	2014	2018	2021
1	Lombok Barat	18	18	18	104	104	104
2	Lombok Tengah	11	11	10	128	128	129
3	Lombok Timur	44	44	43	210	210	211
4	Sumbawa	68	73	57	98	93	108
5	Dompu	31	29	32	50	52	49
6	Bima	70	65	65	123	127	126
7	Sumbawa Barat	23	22	22	42	43	43
8	Lombok Utara	23	22	23	10	11	20
9	Kota Mataram	7	7	7	43	43	43
10	Kota Bima	6	6	4	32	35	37
Nusa Tenggara Barat		301	297	281	840	846	870

Sumber : NTB Dalam Angka 2022

Tabel 3.2 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/Kota di NTB

No	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase
1	Lombok Barat	896,56	4,53
2	Lombok Tengah	1.095,03	5,53
3	Lombok Timur	1.605,55	8,11
4	Sumbawa	6.643,98	33,57
5	Dompu	2.324,55	11,75
6	Bima	4.389	22,18
7	Sumbawa Barat	1.742,27	8,80
8	Lombok Utara	809,53	4,09
9	Kota Mataram	61,30	0,31
10	Kota Bima	222,25	1,12
Nusa Tenggara Barat		19.790,02	100,00

Sumber : Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2022

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 m dpl untuk Pulau Lombok, dan 0 – 2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478.911 Ha, ketinggian 100 - 500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753.612 Ha, ketinggian 500 - 1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307.259 Ha dan lebih dari 1000 m dpl seluas 475.533 Ha 23,60%. Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan antara 15 - 40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0 - 2% seluas 338.552 Ha (16,80%).

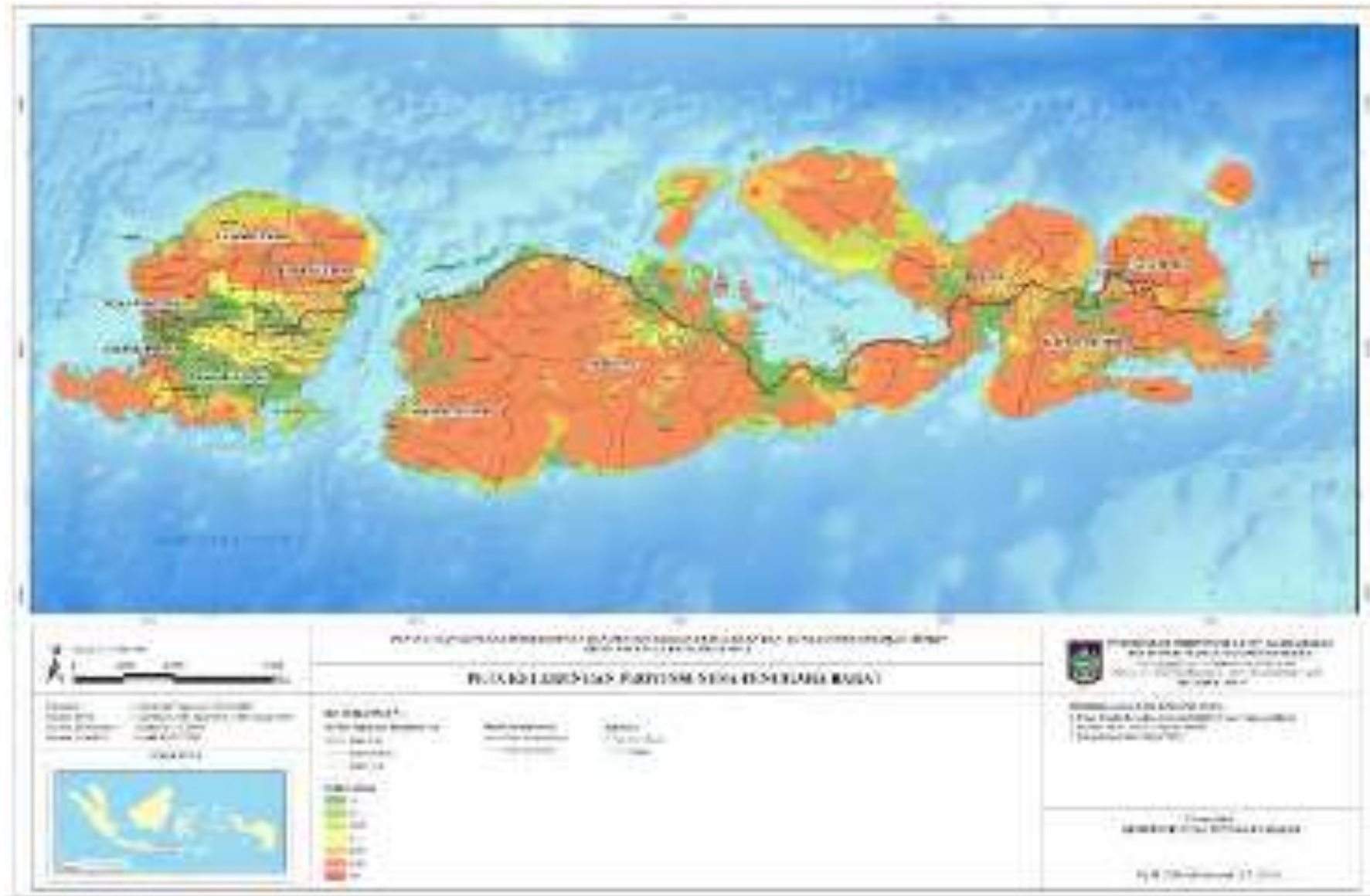
Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2 - 15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang

paling luas berkisar antara 15 - 40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0 - 2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

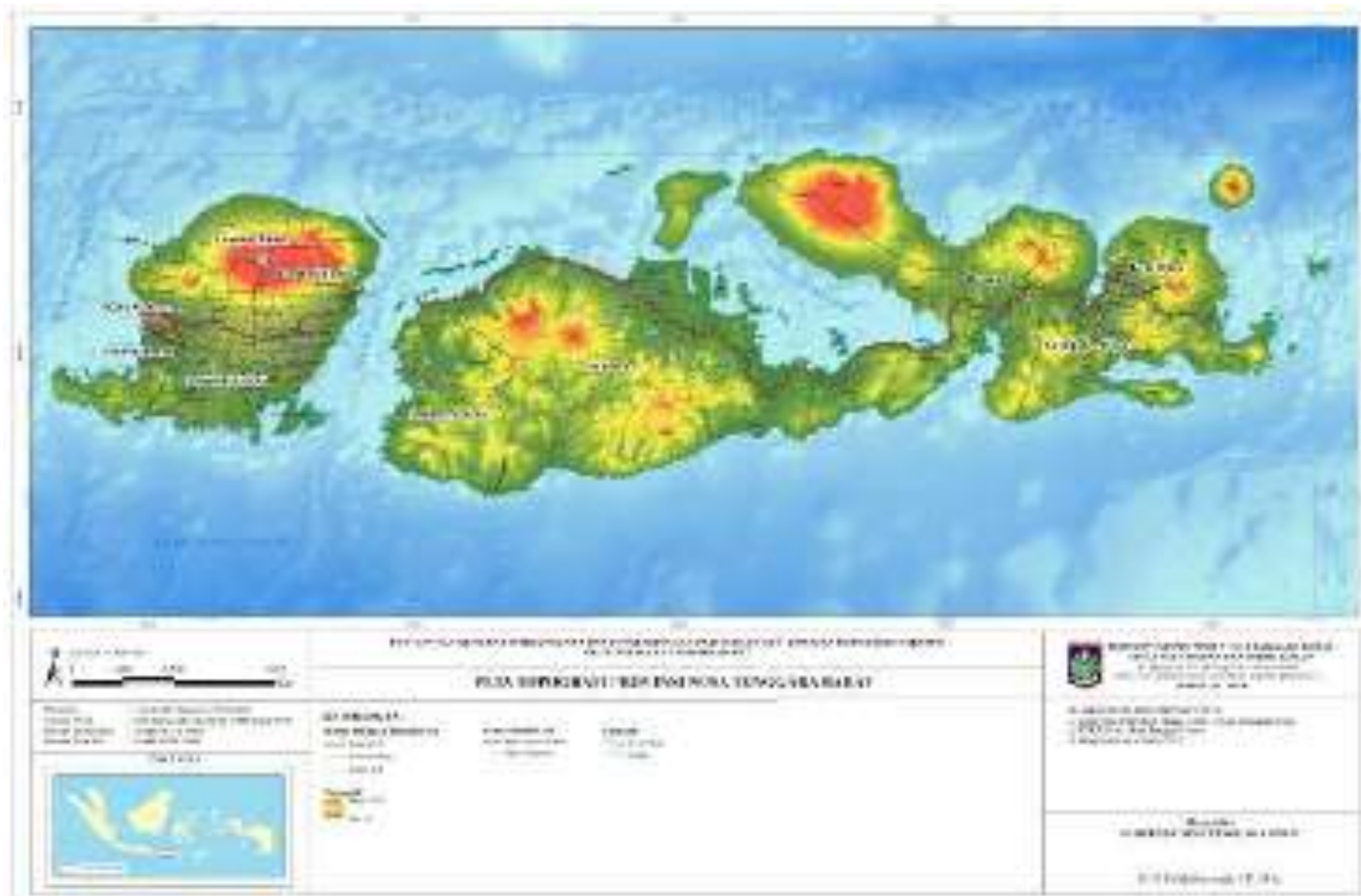
Peta 3.1 Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.2 Peta Kelerengan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.3 Peta Topografi Provinsi Nusa Tenggara Barat



3.1.2 Kondisi Fisik Dasar

a. Kondisi Geologi

Geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

b. Kondisi DAS

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

c. Kondisi Hidrologi

Kondisi Hidrologi di Provinsi NTB terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang ada berupa sungai, danau, dan lainnya. Sedangkan untuk air tanah berupa cekungan air tanah. Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

d. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 33,2°C – 33,6°C, temperatur udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata-rata 26,9°C – 27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3-5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm

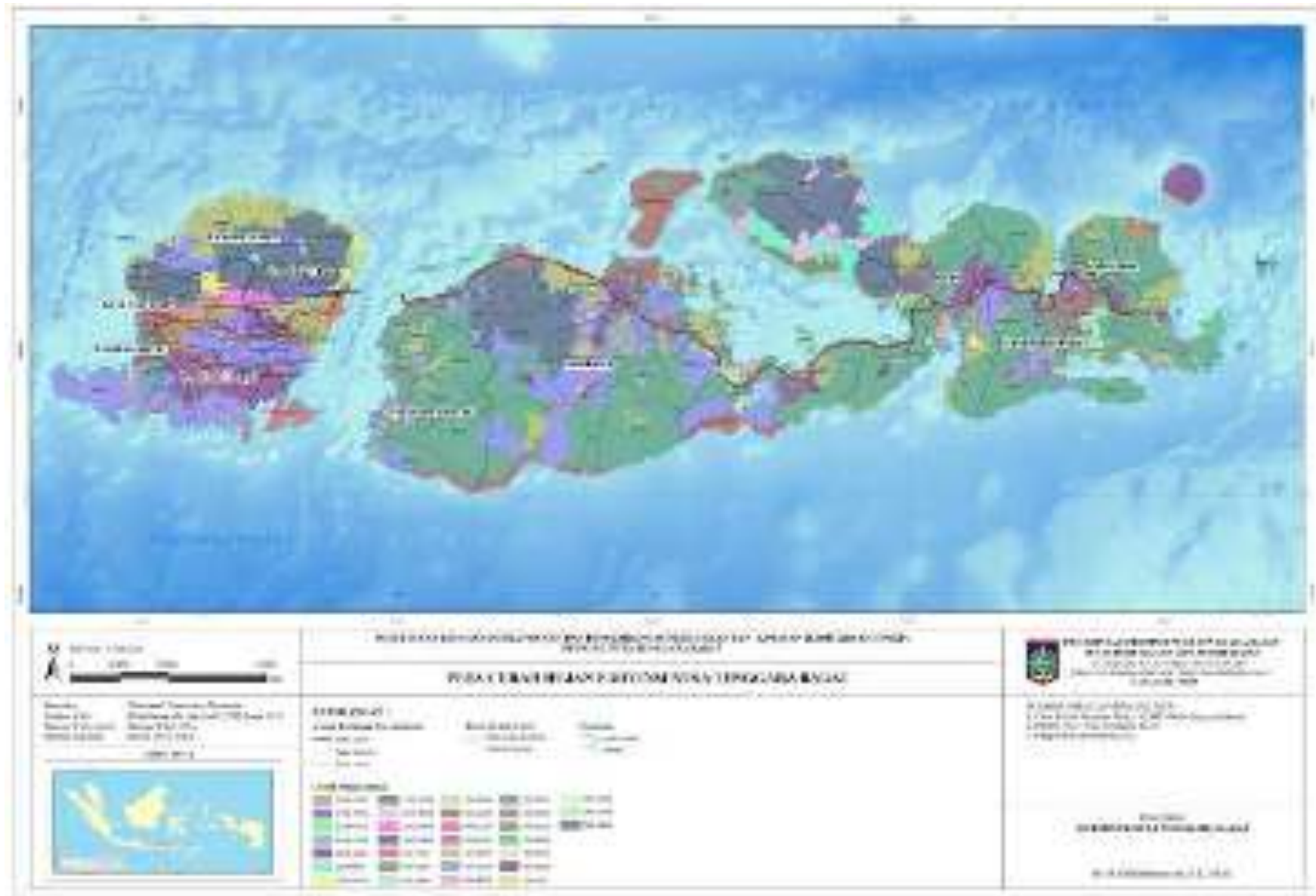
Peta 3.5 Peta DAS Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.6 Peta Hidrologi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.7 Peta Curah Hujan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.8 Peta Jenis Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat



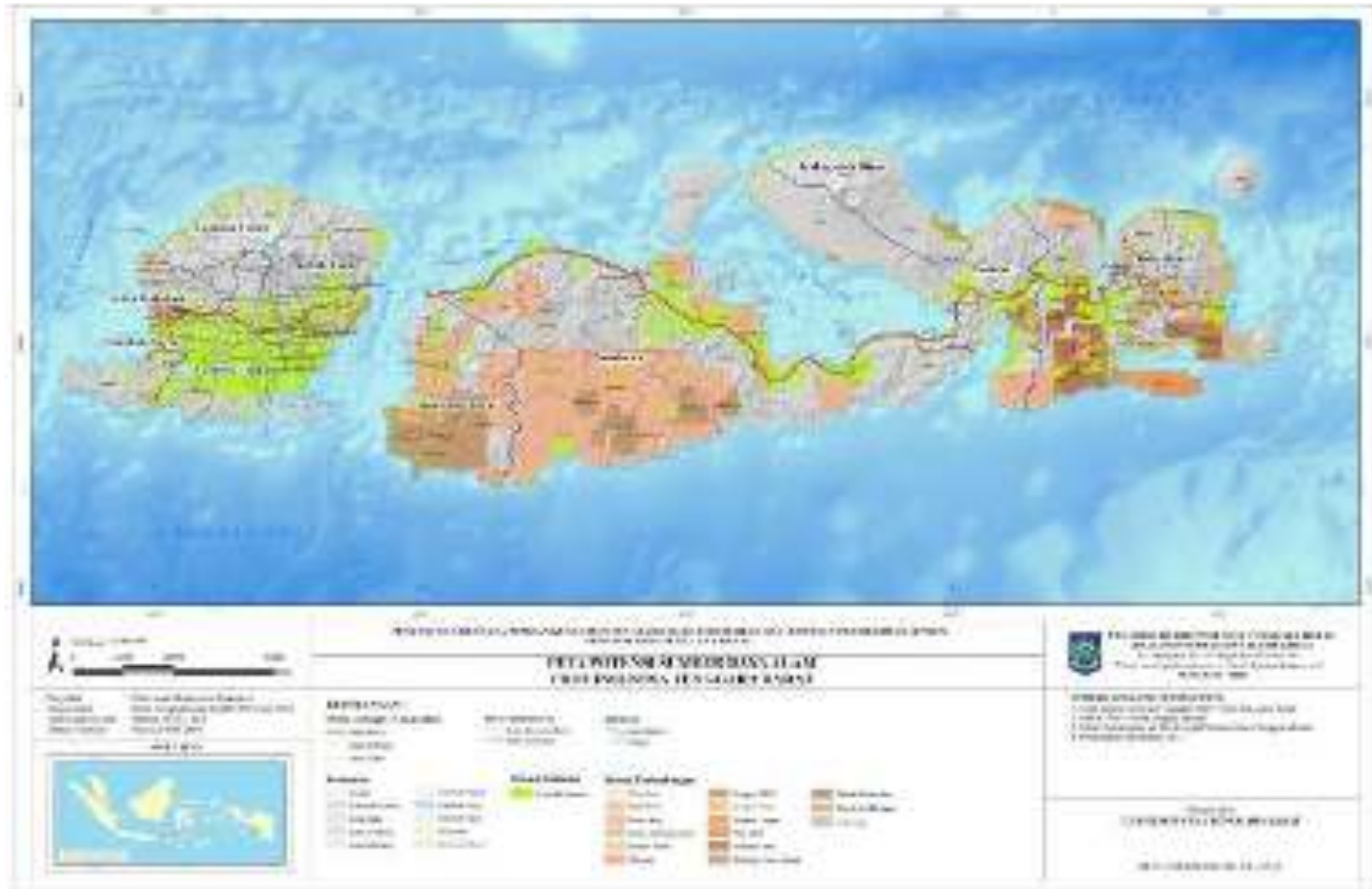
Peta 3.9 Peta Perbatasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.10 Peta Citra Satelit Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.11 Peta Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat



3.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat dari kondisi fisik wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan topografi yang sangat bervariasi, kondisi iklim, kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang debit airnya tidak stabil, dan material alluvial pembentuk tanah, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi terhadap terjadinya berbagai macam jenis bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, epidemi dan wabah penyakit, konflik / kerusuhan sosial, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan karena letaknya dikelilingi oleh selat, laut, dan samudera, maka bencana tsunami pun dapat terjadi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A		
1.	Kab. Lobar dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
2.	Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
3.	Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
4.	Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
5.	Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
6.	Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
7.	Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B		
1.	Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
2.	Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
3.	Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
4.	Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
5.	Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Tabel 3.5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani		
1.	Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kec. Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
2.	Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kec. Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora		
1.	Kab. Dompu	Daerah Bahaya: di sekitar kaldera dengan luas 58,7 km ²
2.	Kota Bima	Daerah Waspada: sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
3.	Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang		
1.	Kab. Bima	Daerah terlarang : dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sosi Panda, Sori Iso dan Sori Berano
		Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang , kecuali kampung Toro Panda di bagian selatan
		Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Tabel 3.6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
1.	Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
2.	Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
3.	Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
4.	Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
5.	Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
6.	Kab. Dompu	Kawasan pesisir bag. barat dan selatan Kab. Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u pesisir bag selatan
7.	Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
8.	Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Tabel 3.7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
1.	Kab. Lobar dan KLU	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
2.	Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
3.	Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
4.	Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk Kab
5.	Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
6.	Kab Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Tabel 3.8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
1.	Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
2.	Kab. Lombok Barat dan KLU	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
3.	Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
4.	Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
5.	Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
6.	Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
7.	Kab. Dompu	Pantai bagian barat yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
8.	Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
9.	Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Tabel 3.9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Kekeringan
1.	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang, Tanjung, Liuk- Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
2.	Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
3.	Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
4.	Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong TaliwangTepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
5.	Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-BatubulanLopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang Empang
6.	Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
7.	Kab dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

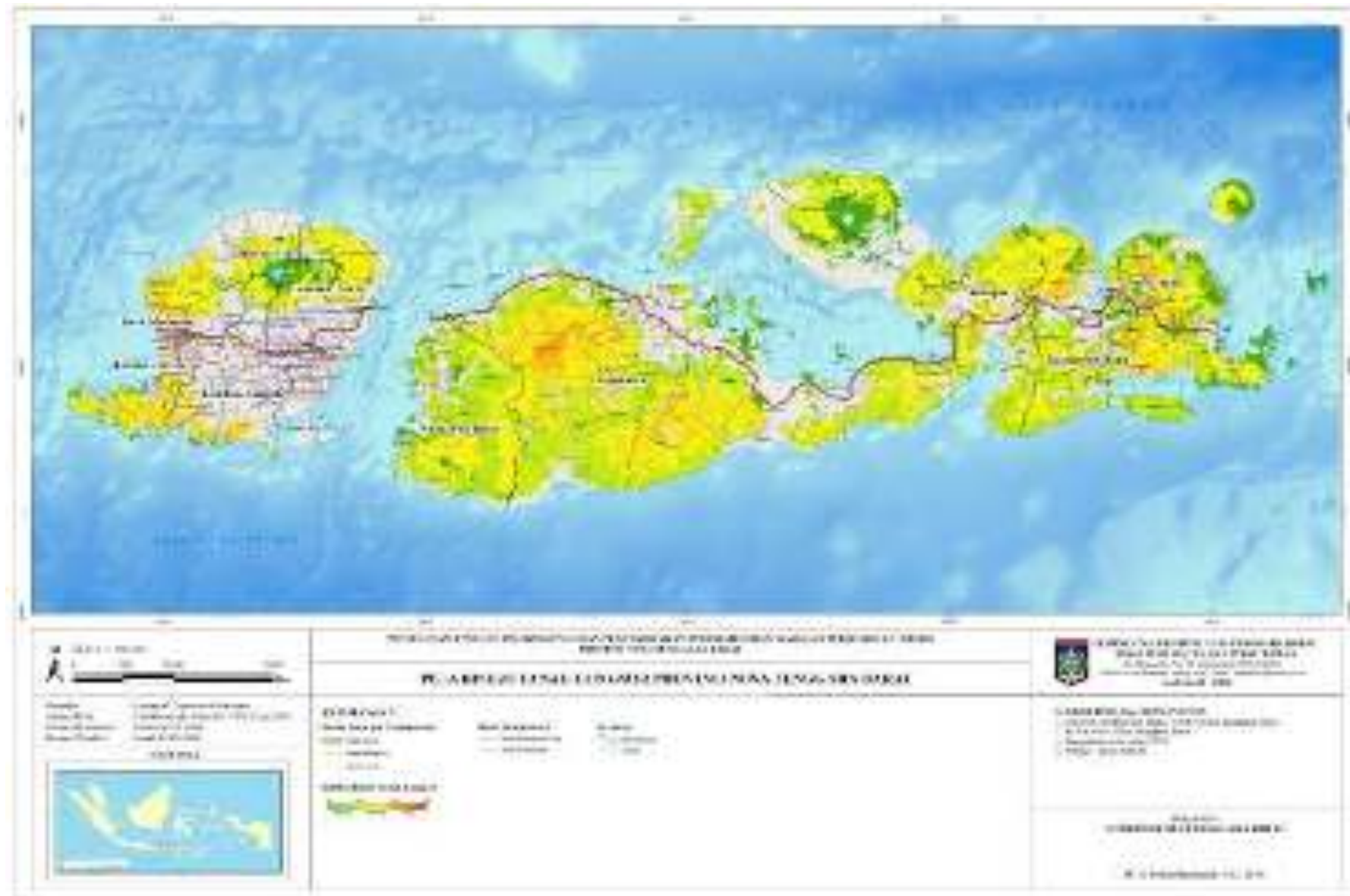
Tabel 3.10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia
1.	Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
2.	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, GanggaLempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
3.	Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
4.	Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
5.	Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
6.	Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
7.	Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai

No.	Lokasi	Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia
8.	Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, NtokeTawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber: PERDA Provinsi NTB No.3 tahun 2010 tentang RTRW

Peta 3.12 Peta Resiko Tanah Longsor Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.13 Peta Resiko Bencana Gunung Berapi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.14 Peta Resiko Bencana Tsunami Provinsi Nusa Tenggara Barat



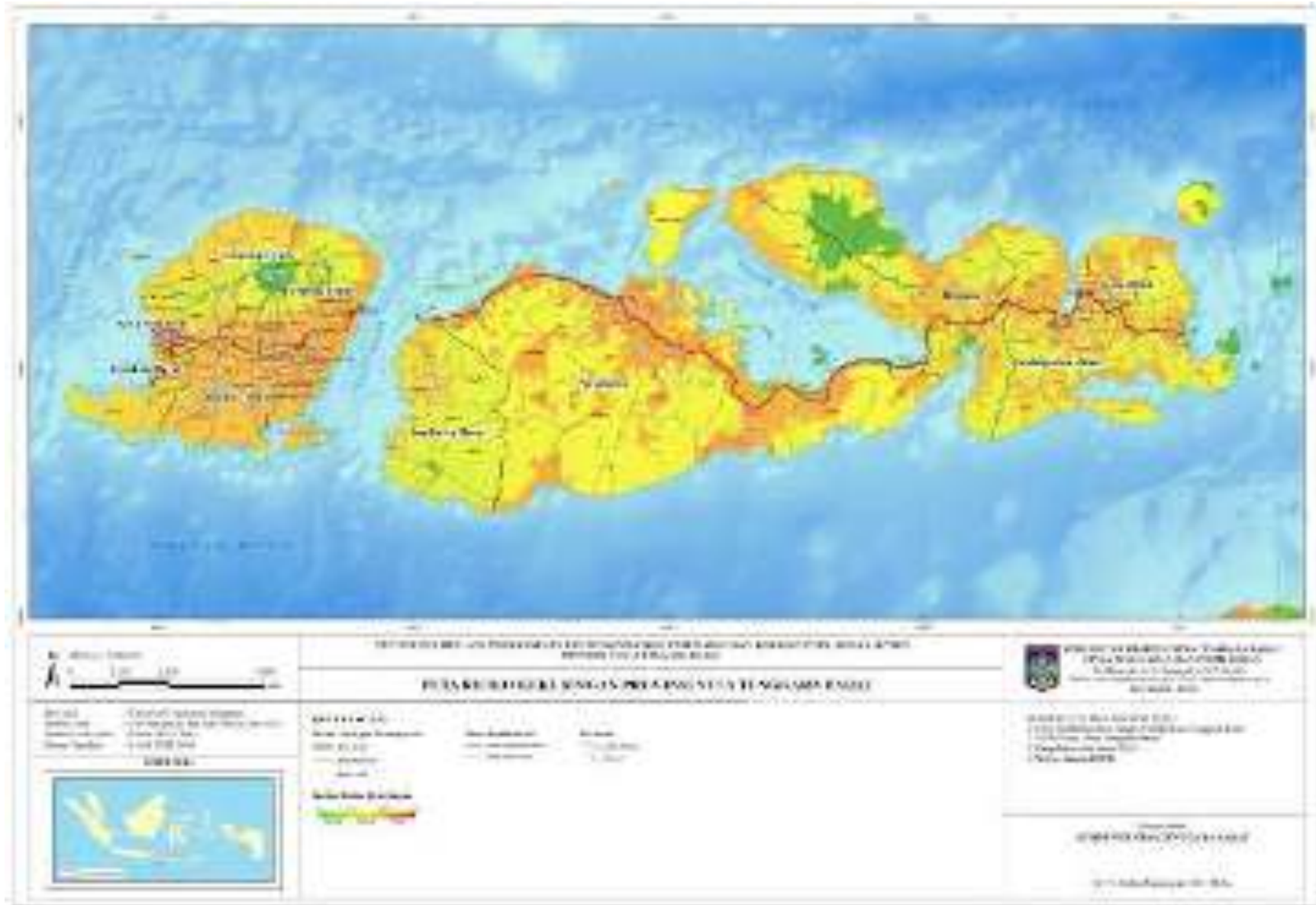
Peta 3.15 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim Provinsi Nusa Tenggara Barat



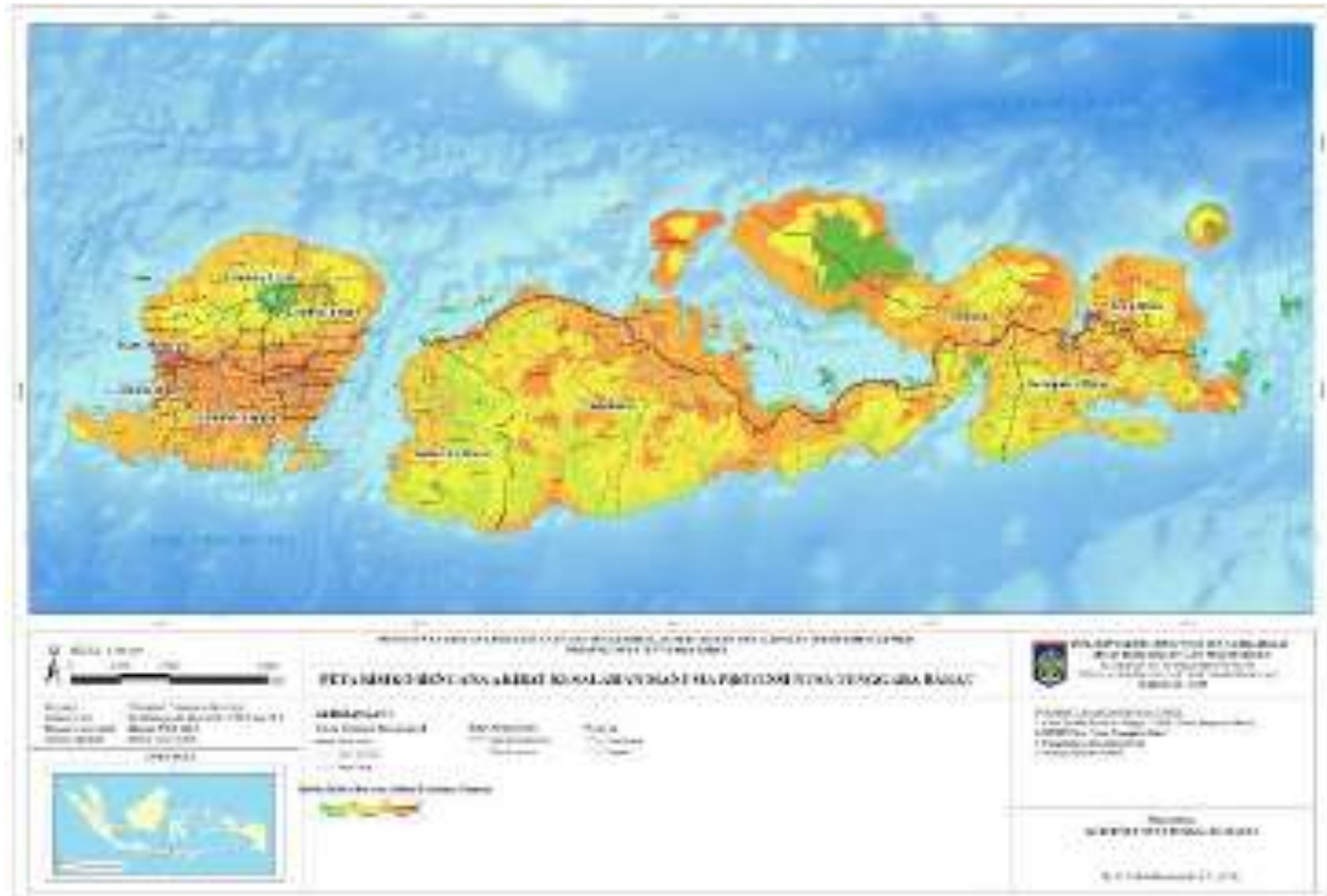
Peta 3.16 Peta Resiko Bencana Gelombang Pasang Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.17 Peta Resiko Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.18 Peta Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.19 Peta Arahlan Mitigasi Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat



3.1.4 Daftar Daerah Terlarang (*Negative List*) Untuk RP3KP

Identifikasi kawasan *negative list* di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diturunkan dari kebijakan pola ruang yang terdapat dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan *negative list* yang dimaksud terbagi atas dua kategori yakni kawasan yang berada pada kawasan lindung (kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau /waduk, kawasan sempadan mata air, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya (tahura), kawasan taman wisata alam) dan yang berada pada kawasan rawan bencana (kawasan rawan tanah longsor dan tanah bergerak, kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami).

Adapun kawasan *negative list* berdasarkan perwujudan kawasan lindung di provinsi NTB :

1. Taman Nasional Gunung Rinjani lokasi Gn. Rinjani
2. Taman Wisata Alam Bangko-Bangko lokasi Pelangan
3. Taman Wisata Alam Gunung Tunak lokasi Gunung Tunak
4. Taman Wisata Alam Kerandangan lokasi Gn. Rinjani
5. Taman Wisata Alam Pelangan lokasi Pelangan
6. Taman Wisata Alam Suranadi lokasi Suranadi
7. Taman Wisata Alam Laut Gili Meno-Air-Terawangan lokasi Gili Meno, Air & Trawangan
8. Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang lokasi Danau Taliwang
9. Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo lokasi Pulau Moyo
10. Taman Wisata Alam Semongkat lokasi Batulanteh
11. Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda lokasi Pulau Satonda
12. Taman Wisata Alam Madapangga lokasi Toffo Rompu
13. Cagar Alam Pulau Panjang lokasi Pulau Panjang
14. Cagar Alam Pedauh lokasi Pedauh
15. Cagar Alam Tambora Selatan lokasi Tambora
16. Cagar Alam Toffo Kota Lambu lokasi Kota Donggomasa
17. Cagar Alam Pulau Sangiang lokasi Pulau Sangiang
18. Suaka Margasatwa Tambora Selatan lokasi Tambora
19. Taman Buru Pulau Moyo lokasi Pulau Moyo

20. Taman Buru Tambora lokasi Selatan Tambora

21. Taman Hutan Raya Nuraksa lokasi Sesaot

Kawasan negative list berdasarkan perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Lindung lokasi kabupaten se-NTB
2. Kawasan Resapan Air lokasi Kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Selatan Pulau Lombok, Slalu Legini
3. Kawasan Sempadan Sungai lokasi seluruh SWS pada WS Pulau Lombok dan WS Pulau Sumbawa
4. Kawasan Sempadan Pantai Seluruh pesisir pantai se-NTB
5. Ruang Terbuka Hijau Seluruh ibukota kabupaten/kota se-NTB
6. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana sesuai dengan Sub Bab.3.1.3 Wilayah Rawan Bencana.

Adapun kondisi eksisting yang ada saat ini tetap mengacu kepada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029. Arahan pengaturan daerah negative list dengan pembangunan dan pengembangan perumahan berupa :

1. Penentuan tipologi kawasan negative list, sehingga diketahui kawasan yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penduduk
2. Pengaturan pemanfaatan ruang disekitar kawasan negative list. Ini untuk meminimalisir dan membatasi pemanfaatan ruang bagi aktifitas penduduk.
3. Pembuatan gardu atau pos polisi hutan.
4. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah negative list tersebut
5. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kawasan negative list.
6. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar *negative list*, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga daerah negative list.

3.1.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang terdapat di Provnsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa macam, antara lain kawasan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, selain itu ada juga lahan terbuka,

permukiman, pertanian lahan kering, sawah, semak/belukar, semak/belukar rawa, tambak, badan air.

Berdasarkan Interpretasi Citra Landsat Provinsi NTB Tahun 2016 (Kementerian ATR/Kepala BPN), penggunaan lahan yang memiliki luas terbanyak yaitu penggunaan lahan untuk semak/belukar yaitu seluas 780.563,44 Ha atau 39,65 % dari luas keseluruhan penggunaan lahan di Provinsi NTB. Kemudian yang kedua yaitu hutan lahan kering primer dengan luas 623.316,92 ha atau sebesar 31,66%, lalu pertanian lahan kering dan permukiman berada di urutan ketiga dan keempat dengan luasan 201.267,91 ha atau 10,22% dan 109.506,14 ha atau sebesar 5,56%. Sedangkan penggunaan lahan dengan luasan paling sedikit yaitu peruntukan Hutan Mangrove Primer dengan luasan 24,55 ha atau hanya 0,001% dari luas keseluruhan penggunaan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi untuk pengembangan pertanian (tanaman pangan tanaman pangan, hokikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan). Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian penggunaan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dan peta dibawah ini.

Tabel 3.11 Penggunaan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Tutupan Lahan	luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Lahan Kering Primer	623.316,92	31,66
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	83.346,51	4,23
3.	Hutan Mangrove Primer	24,55	0.001
4.	Hutan Mangrove Sekunder	391,95	0,02
5.	Lahan Terbuka	47.732,52	2,42
6.	Pemukiman	109.506,14	5,56
7.	Pertanian Lahan Kering	201.267,91	10,22
8.	Sawah	96.871,90	4,92
9.	Semak/Belukar	780.563,44	39,65
10.	Semak/Belukar Rawa	5.351,55	0,27
11.	Tambak	1.359,59	0,07
12.	Badan Air	11.522,23	0,59
13.	Belum Terklasifikasi	7.562,12	0,38
Jumlah		1.968.817,33	100

Sumber: Interpretasi Citra Landsat Provinsi NTB Tahun 2016 (Kementerian ATR/Kepala BPN)

Peta 3.20 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 3.21 Peta Tata Guna Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat



3.2 Identifikasi sosial, Budaya dan Kependudukan

3.2.1 Kondisi Sosial

Di tinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di pulau Lombok, suku Mbojo di kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dua kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat NTB, di antaranya Sasak, Sumbawa, dan Mbojo dan bahasa daerah yang di gunakan, yaitu bahasa Sasak, bahasa Sumbawa, dan bahasa Mbojo.

Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat dominan adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, karenanya pengaruh kehidupan masyarakat yang dilandasi sistem patriarkhis. Interpretasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya di NTB merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumber daya utama pembangunan daerah. Selain itu, budaya daerah yang sangat beragam ini mencerminkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifikasi dan unik.

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan pelayanan sosial. Sasaran pembangunan kebudayaan adalah terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa, tersebar luasnya perkembangan modal budaya dan modal sosial, terfasilitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajaran yang berorientasi iptek dan kesenian, terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas, serta terselenggaranya upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integritas bangsa.

Dalam kaitan itu, prioritas perkembangan bidang kebudayaan diletakkan pada upaya untuk mengembangkan tumbuhnya apresiasi terhadap kekayaan budaya nasional, serta memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya, dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan, mengembangkan kebudayaan NTB sebagai pendorong pengembangan budaya dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat.

3.2.2 Budaya Bermukim

(1) Permukiman di pesisir

Permukiman pesisir/nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar di sepanjang pesisir yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Potensi kelautan dan perikanan serta wisata yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat mempengaruhi perkembangan kawasan terutama tumbuhnya permukiman.

Permukiman nelayan merupakan permukiman dengan penduduk yang bermata pencaharian di perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Terdapat juga tambak di sekitar permukiman tersebut. Kondisi kawasan permukiman di pesisir sebagian merupakan permukiman kumuh seperti di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah serta Kabupaten Lombok Utara. Kondisi kualitas permukimannya masih rendah dan minim akan prasarana lingkungan.



Gambar 3.1 Potret Permukiman Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peta 3.22 Peta Sebaran Permukiman Peisir Provinsi Nusa Tenggara Barat



(2) Permukiman Adat

Permukiman adat merupakan permukiman khusus yang hanya ada di beberapa tempat. Permukiman adat memiliki ciri khas bentuk dan pola permukiman tersendiri. Keberadaan permukiman adat dapat menjadi potensi wisata yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Permukiman adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

1. Permukiman Adat Bayan

Permukiman Adat Bayan merupakan salah satu desa tradisional di Kabupaten Lombok Utara yang masih menjalankan dan menjaga adat istiadat kehidupan asli suku sasak-bayan. Untuk pola permukiman adat bayan yaitu mengelompok dan terbentuk oleh kondisi alam yang berbukit-bukit dan berdasarkan system keakraban yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Permukiman Sade

Permukiman Sade merupakan permukiman adat yang terletak di Desa Rambitan Kabupaten Lombok Tengah. Permukiman adat yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadat yang sudah ada dan menjadi daya tarik wisata berupa keunikan dari bangunan rumah yang berpola permukiman linear dengan bentuk masa bangunan yang didominasi atap berpenutup daun alang-alang dan kesenian berupa kerajinan tangan serta tarian adat. Hal ini yang menjadikan permukiman sade merupakan potensi wilayah yang berada di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Permukiman Limbungan

Permukiman adat limbungan merupakan permukiman tradisional yang berada di Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur, permukiman adat yang masih mempertahankan local wisdom dan masih mempertahankan pemerintahan tradisional. Pola permukiman adat limbungan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu mengelompok dan Linear mengikuti jalan dan material dari bangunan adat limbungan berbahan dari ilalang, tanah liat, dan getah tumbuh – tumbuhan.

4. Permukiman Adat Segenter

Permukiman adat segenter merupakan permukiman tradisional yang berada di Desa Segenter Kabupaten Lombok Utara, permukiman adat yang masih

mempertahankan *local wisdom* dan masih memertahankan pemerintahan tradisional. Pola permukiman adat segenter yaitu mengelompok. Strukur bangunan yang masih memertahankan ketradiisonal dari bangunan dengan bentuk umum bangunan 6x7 meter, Dinding bangunan yang terbuat dari anyaman bambu dan bentuk atap limas dengan material atap ilalang.

5. Permukiman tradisional suku bajo - Pulau Bungin

Permukiman tradisonal suku bajo Pulau bungin merupakan permukiman yang berada di Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa. Permukiman adat yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadat yang sudah ada dan menjadi daya tarik wisata dan berupa keunikan akan kepadatannya dalam bermukim dengan pola permukiman yang berada di Pulau Bungin terbentuk dengan pola mengelompok serta kesenian berupa tarian adat, serta memiliki tradisi yang mengharuskan pihak laki-laki untuk membangun rumah panggung yang merupakan rumah khas masyarakat bungin yaitu dengan memeperluas wilayah daratan melalui penambahan gugusan karang di areal lahan yang akan mereka dirikan rumah panggung sebagai modal pernikahan.

6. Permukiman Desa Hu'u

Permukiman Desa Hu'u merupakan Permukiman yang berada di Kabupaten Dompu, Konsep awal dari pemukiman Desa Hu'u didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik dasar berupa; aspek topografi, dimana areal datar untuk kawasan pemukiman dan pertanian, areal bergelombang untuk kebun, ladang dan padang penggembalaan. Sedangkan areal terjal untuk dipertahankan kawasan hutan. Tanah yang subur dijadikan areal pertanian. Mata air dan sungai dipertahankan keberadaanya dengan membuat ruang imajiner disekelilingnya.

Berdasarkan pola penggunaan lahan yang ada, masjid merupakan pusat desa, yang dibangun ditengah-tengah kawasan pemukiman. Kemudian areal tempat tinggal yang membentuk kelompok-kelompok kecil yang dibatasi oleh gang biasanya masih dalam satu hubungan keluarga, dengan struktur bangunan adalah rumah panggung, orientasi arah hadap adalah utara-selatan, halaman yang tidak memiliki pagar. Di luar kawasan pemukiman dibangun ruang terbuka berupa lapangan, kemudian areal dimana masyarakat melaksanakan kegiatan bercocok tanam berupa sawah, ruang terbuka berupa kuburan, padang penggembalaan serta kawasan hutan.

Pola ruang yang ada pada pemukiman Desa Hu`u merupakan perwujudan dari tiga bentuk budaya yaitu; sistem religi, dengan pola ruang yang dibentuk berkembang dalam dua masa yaitu sebelum Islam dan setelah Islam. Sebelum Islam, keyakinan masyarakat adalah parafu, dimana rumah kepala suku (ncuhi) adalah pusat pemukiman, terdapat ruang imajiner pada mata air, muara, sungai dan tepi pantai yang dijadikan tempat persembahan. Setelah Islam masuk, maka masjid dijadikan pusat desa, konsep leka dana (seleksi lahan) dikembangkan, ruang terbuka pada kawasan pemukiman lebih dikembangkan sebagai bentuk interaksi dengan sesama, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan, dengan mempertahankan ruang imajiner pada sumber-sumber air.

7. Permukiman Tradisional Uma Lengge

Permukiman tradisional uma lengge merupakan permukiman yang berada di Desa Maria, Kecamatan Wawo-Kabupaten Bima. Permukiman Tradisional Uma Lengge memiliki budaya lokal serta adat istiadat yang masih dipegang masyarakat sekitar dan permukiman yang memiliki kompleks bangunan peninggalan budaya yang sudah berumur ratusan tahun dan menjadi objek wisata dan cagar alam Kabupaten Bima. Bangunan Uma Lengge memiliki beberapa fungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Pola permukiman yang berada di permukiman tradisional Uma Lengge yaitu berpola homogen dengan bangunan rumah panggung yang berada di kawasan permukiman dengan pola jalan yang dimiliki yaitu berpola grid.



Gambar 3.2 Potret Permukiman Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel. 3.12 Matrik tipologi perumahan adat di Provinsi NTB

No	Nama Rumah	Lokasi	Tipologi
1	Rumah adat bayan	Kab.Lombok Utara	Rumah adat Suku Sasak dengan material kayu, bambu dan atap terbuat dari rumbia/ilalang. Struktur bangunan rumah terdapat 6 tiang penyangga <i>inan bale</i> , dan 5 tiang penyangga ditiap sisi luar rumah.
2	Rumah adat sade	Kab.Lombok Tengah	Rumah tradisional Suku Sasak dengan model lumbung, atap menggunakan alang-alang dan lantai tanah.
3	Rumah adat limbungan	Kab. Lombok Timur	Rumah adat dengan bentuk atap limas, dibuat dari alang-alang yang dianyam menggunakan bambu. Memiliki 2 pintu dan tidak memiliki jendela. Pada bagian depan rumah terdapat pantek (lumbung) disetiap rumah.
4	Rumah adat Segenter	Kab. Lombok Utara	rumah tradisional Suku Sasak umumnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 6×7 Meter. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, berbentuk limas, beratap ilalang dan berlantai tanah.
5	Rumah tradisional suku bajo-pulau bungin	Kab.Sumbawa	Rumah yang didirikan diatas gundukan pasir dengan pondasi terbuat dari tumpukan karang laut yang sudah mati.
6	Rmah adat desa Hu'u	Kab. Dompu	struktur bangunan adalah rumah panggung, orientasi arah hadap adalah utara-selatan, halaman yang tidak memiliki pagar
7	Rumah tradisional Uma Lengge	Kabupaten Bima	Rumah dengan model atap yang tinggi mengerucut, rumah berbahan kayu berukuran 40 x 40 cm sebanyak 4 buah yang menumpu pada pondasi batu sebagai tumpuan tiang.

Peta 3.23 Peta Sebaran Permukiman Adat Provinsi Nusa Tenggara Barat



3.2.3 Kondisi Kependudukan

3.2.3.1 Jumlah dan kepadatan Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Oleh karena itu data terkait perkembangan kependudukan sangat penting diketahui untuk menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan. Perkembangan penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2021, jumlah penduduk NTB menunjukkan trend meningkat yang umumnya disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi.

Sebaran penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat paling tinggi berada di Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk Pada Tahun 2021 sebanyak 1.343.900 atau 24,93% dari total penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2021 adalah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebanyak 148.500 jiwa (2,75%).

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (Ribuan) Population (Thousand)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	721,4	731,8	731,81
Lombok Tengah	1 034,9	1 049,7	1.049,70
Lombok Timur	1 325,2	1 343,9	1.343,90
Sumbawa	509,8	517,8	519,78
Dompu	236,7	238,2	238,20
Bima	514,1	520,4	520,44
Sumbawa Barat	145,8	148,5	144,55
Lombok Utara	247,4	251,5	251,45
Kota Mataram	429,7	432,0	432,00
Kota Bima	155,1	156,2	156,20
Nusa Tenggara Barat	5 320,0	5 390,0	5.388,035

Sumber : Data Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan NTB Dalam Angka 2022 & Data Tahun 2022 Berdasarkan Data Dinas Perkim Kabupaten/Kota Tahun 2023

Lanjutan tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021, Berdasarkan Kabupaten Dalam Angka 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Penduduk
1	Lombok Barat	Sekotong	67,12
2		Lembar	55,19
3		Gerung	90,88
4		Labuapi	80,09
5		Kediri	64,40
6		Kuripan	42,41
7		Narmada	104,10
8		Lingsar	76,88
9		Gunungsari	96,36
10		Batu Layar	54,39
Jumlah			731,81
1	Lombok Tengah	Praya Barat	83,93
2		Praya Barat Daya	58,63
3		Pujut	118,51
4		Praya Timur	73,18
5		Janapria	85,80
6		Kopang	93,89
7		Praya	127,70
8		Praya Tengah	73,70
9		Jonggat	107,57
10		Pringgarata	76,73
11		Batukliang	89,11
12		Batukliang Utara	60,96
Jumlah			1 049,71
1	Lombok Timur	Keruak	58 518
2		Jerowaru	62 276
3		Sakra	64 982
4		Sakra Barat	59 003
5		Sakra Timur	52 744
6		Terara	76 958
7		Montong Gading	49 488
8		Sikur	80 136
9		Masbagaik	109 412
10		Pringgasela	63 999
11		Sukamulia	36 885
12		Suralaga	65 592
13		Selong	93 766
14		Labuhan Haji	65 400
15		Pringgabaya	112 373
16		Suela	46 061
17		Aikmel	71 108
18		Wanasaba	69 264
19		Sembalun	23 900
20		Lenek	44 133
21		Sambelia	37 903
Jumlah			1 343 901

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Penduduk
1	Sumbawa	Lunyuk	22 466
2		Orong Telu	5 564
3		Alas	33 805
4		Alas Barat	25 533
5		Buer	17 233
6		Utan	36 363
7		Rhee	9 234
8		Batulanteh	12 010
9		Sumbawa	63 739
10		Lab. Badas	35 985
11		Unter Iwes	23 734
12		Moyo Hilir	28 401
13		Moyo Utara	11 690
14		Moyo Hulu	25 025
15		Ropang	6 238
16		Lenangguar	8 037
17		Lantung	3 940
18		Lape	20 242
19		Lopok	21 579
20		Plampang	34 995
21		Labangka	13 492
22		Maronge	12 195
23		Empang	26 633
24		Tarano	19 436
Jumlah			517 777
1	Dompu	Hu'u	17980
2		Pajo	13778
3		Dompu	55344
4		Woja	57389
5		Kilo	13087
6		Kempo	19085
7		Manggalewa	30427
8		Pekat	31111
Jumlah			238 201
1	Kota Bima	Rasanae Barat	30 648
2		Mpunda	33 543
3		Rasanae Timur	18 706
4		Raba	38 822
5		Asakota	34 505
Jumlah			156 224

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Penduduk
1	Kabupaten Bima	Monta	39,63
2		Parado	10,81
3		Bolo	51,99
4		Mada Pangga	31,81
5		Woha	51,82
6		Belo	27,78
7		Palibelo	28,18
8		Wawo	19,07
9		Langgudu	31,95
10		Lambitu	6,24
11		Sape	61,71
12		Lambu	42,58
13		Wera	32,88
14		Ambalawi	21,31
15		Donggo	20,25
16		Soromandi	19,49
17		Sanggar	14,08
18		Tambora	8,89
Jumlah			520,44
1	Sumabawa Barat	Sekongkang	147 500
2		Jereweh	994 000
3		Maluk	118 600
4		Taliwang	563 500
5		Brang Ene	671 000
6		Brang Rea	163 400
7		Sateluk	197 700
8		Poto Tano	127 400
Jumlah			1 484 600
1	Lombok Utara	Pemenang	40 517
2		Tanjung	55 130
3		Gangga	52 238
4		Kayangan	48 548
5		Bayan	55 018
Jumlah			251 451
1	Kota Mataram	Ampenan	88 507
2		Sekarbela	59 111
3		Mataram	77 893
4		Selaparang	60 036
5		Cakranegara	68 201
6		Sandubaya	69 276
Jumlah			432 024

Tabel 3.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

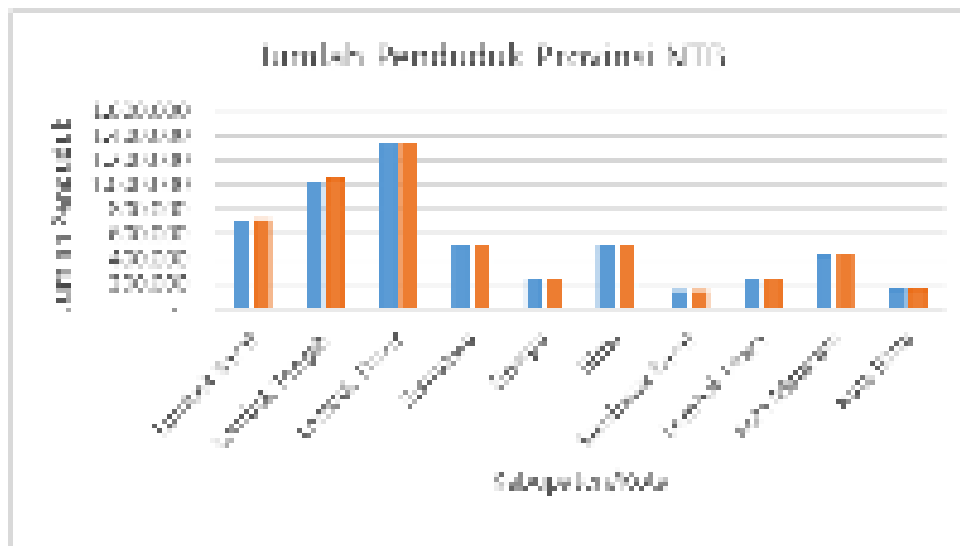
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	1,80	1,91
Lombok Tengah	1,80	1,92
Lombok Timur	1,77	1,88
Sumbawa	1,99	2,10
Dompu	0,75	0,87
Bima	1,53	1,65
Sumbawa Barat	2,33	2,44
Lombok Utara	2,08	2,19
Kota Mataram	0,63	0,74
Kota Bima	0,82	0,93
Nusa Tenggara Barat	1,63	1,76

Sumber : NTB Dalam Angka 2022

Tabel 3.15 Jumlah Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Rata-rata ART
1	Lombok Barat	244.125	3.00
2	Lombok Tengah	313.086	3.35
3	Lombok Timur	395.265	3.41
4	Sumbawa	164.837	3.15
5	Dompu	63.295	3.76
6	Bima	144.411	3,60
7	Sumbawa Barat	35.208	4,10
8	Lombok Utara	85.921	2,92
9	Kota Mataram	118.156	3.65
10	Kota Bima	38.953	4.00
Nusa Tenggara Barat		1.603.257	3,36

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten/Kota Tahun 2023



Gambar 3.3 Diagram Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 3.16 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km ²	
	2020	2021
Lombok Barat	685	694
Lombok Tengah	885	898
Lombok Timur	825	837
Sumbawa	77	78
Dompu	102	103
Bima	117	119
Sumbawa Barat	79	80
Lombok Utara	306	311
Kota Mataram	7009	7048
Kota Bima	698	703
Nusa Tenggara Barat	264	255

Sumber : NTB Dalam Angka 2022

* Total jumlah kepadatan penduduk Provinsi NTB adalah total penduduk Provinsi NTB dibagi dengan total luas wilayah (Km²)

Jika diperhatikan pada tabel diatas, baik pada tahun 2020 maupun 2021, tingkat kepadatan penduduk yang paling tertinggi terdapat di Kota Mataram yaitu sebesar 7.009 jiwa/km² pada tahun 2020 dan 7.048 jiwa/km² pada tahun 2021 sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 79 jiwa/km² pada tahun 2020 dan 80 jiwa/km² pada tahun 2021 .

3.2.3.2 Ketenagakerjaan

Dalam mendukung pertumbuhan suatu wilayah, dapat dilihat dari jumlah penduduk dalam ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ditinjau dari jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Berikut tabel mengenai angkatan kerja berdasarkan jumlah penduduk 15 tahun keatas.

Tabel 3.17 Gambaran Ketengakerjaan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	1.560.836	1.179.054	2.739.890
	- Bekerja	1.505.277	1.152.118	2.657.395
	- Pengangguran Terbuka	55.559	26.936	82.495
	Bukan Angkatan Kerja	329.187	813.383	1.142.570
	- Sekolah	115.321	133.078	248.399
	- Mengurus Rumah tangga	87.466	614.272	701.738
	- Lainnya	126.400	66.033	192.433
Jumlah		1.890.023	1.992.437	3.882.460

Sumber: BPS, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 berjumlah 2.739.890 jiwa, jumlah angkatan kerja ini ditinjau dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan jumlah yang bukan angkatan kerja berjumlah 1.142.570 jiwa, dan jumlah bukan angkatan kerja ini ditinjau dari penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

3.2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia :

- hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

- Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan itu dari 68,25 di tahun 2020 menjadi 68,65 pada tahun 2021. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2021 mencapai 0,59 persen. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Saat ini, IPM Provinsi NTB masih berada pada urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia. Ada beberapa indikator untuk menentukan tingkat IPM di suatu daerah. Di antaranya terkait pendidikan, umur harapan hidup dan dimensi hidup layak.

Tabel 3.18 Nilai IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021

No.	Wilayah	Nilai IPM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Lombok Barat	65,55	66,37	67,18	68,03	68,20	68,21
2	Kab. Lombok Tengah	63,22	64,36	65,36	66,36	66,43	66,72
3	Kab. Lombok Timur	63,70	64,37	65,35	66,23	66,30	66,66
4	Kab. Lombok Utara	62,24	63,04	63,83	64,49	64,42	64,77
5	Kota Mataram	77,20	77,84	78,43	79,10	78,91	79,14
6	Sumbawa	64,89	65,84	66,77	67,60	67,61	68,01
7	Sumbawa Barat	69,26	70,08	70,71	71,52	71,63	71,85
8	Dompu	65,48	66,33	66,97	67,83	67,84	68,45
9	Bima	64,15	65,01	65,62	66,37	66,30	66,66
10	Kota Bima	73,67	74,36	75,04	75,80	75,81	76,11
Nusa Tenggara Barat		65,81	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

3.2.3.4 Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan pendudukan yang memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis rata-rata. Terdapat 14 kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat tergolong miskin. Berikut merupakan gambaran jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Susenas Maret-September BPS tahun 2021 :

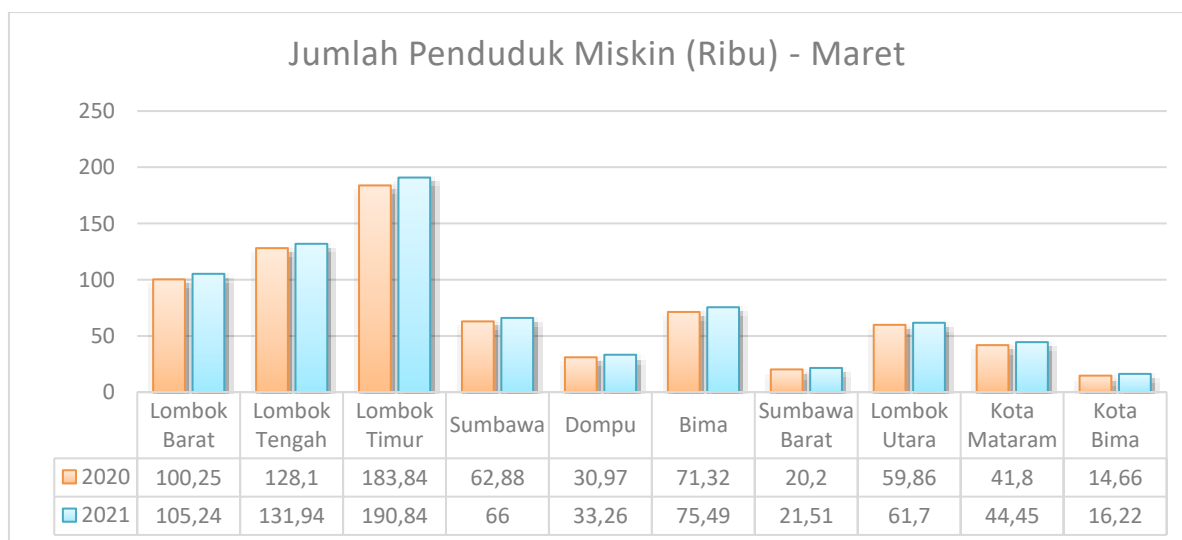
Tabel 3.19 Jumlah Penduduk Miskin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	
		Maret	
		2020	2021
1	Lombok Barat	100,25	105,24
2	Lombok Tengah	128,10	131,94
3	Lombok Timur	183,84	190,84
4	Sumbawa	62,88	66,00
5	Dompu	30,97	33,26
6	Bima	71,32	75,49
7	Sumbawa Barat	20,20	21,51

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	
		Maret	
		2020	2021
8	Lombok Utara	59,86	61,70
9	Kota Mataram	41,80	44,45
10	Kota Bima	14,66	16,22
Nusa Tenggara Barat		713,89	746,66

Sumber: BPS dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari tahun 2020-2021. Jika pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 713,89 ribu jiwa, maka di Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 746,66 ribu jiwa atau dikatakan naik sebesar 0,17%. Namun berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2022 sebesar 731,94 ribu orang (13,68%) berkurang sebesar 3,36 ribu orang (13,83%) terhadap September 2021 dan berkurang 14,72 ribu orang terhadap Maret 2021.



Sumber: Diolah dari BPS, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2022

Gambar 3.4 Diagram Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

Adapun Kabupaten/Kota dengan persentase jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten terendah berada di Kota Mataram. Jika dilihat dari data diatas ada beberapa faktor masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten tersebut diantaranya karena minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mutu pendidikan, karena sebagian besar penduduk yang masuk kategori miskin itu belum tamat sekolah dasar,

sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk meningkatkan pendapatannya, sebagian rumahnya tidak layak huni dan masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

3.2.3.5 Struktur Penduduk

Selain sebagai aktor dalam pembangunan, penduduk merupakan objek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan dalam meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain jumlah penduduk yang besar tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih kompleks. Sex ratio Provinsi NTB tahun 2021 mencapai 100. Artinya komposisi penduduk laki-laki dengan perempuan di NTB hampir sama. Hal tersebut tercermin dari nilai sex ratio kabupaten/kota di NTB berada di sekitar 100, yaitu antara 98 sampai dengan 101.

Tabel. 3.20 Data penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Gender</i> <i>(jiwa/lives)</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
-1	-2	-3	-4
0-4	255.757,0	245.324,0	501.081,0
05-09	264.590,0	255.039,0	519.989,0
10-14	236.403,0	223.728,0	460.131,0
15-19	223.484,0	212.520,0	436.004,0
20-24	225.964,0	220.004,0	445.968,0
25-29	223.606,0	221.024,0	444.630,0
30-34	219.619,0	223.139,0	442.758,0
35-39	208.246,0	213.891,0	422.137,0
40-44	193.044,0	200.006,0	393.050,0
45-49	170.793,0	177.328,0	348.121,0
50-54	140.767,0	146.954,0	287.721,0
55-59	112.962,0	218.698,0	231.660,0
60-64	84.701,0	89.848	174.549,0
65-69	60.963,0	65.409	126.372,0
70-74	38.161,0	40.640	78.801,0
75+	36.132,0	49.894	77.026,0
Nusa Tenggara Barat	2.695.552,0	2.694.446,0	5.389.998,0

Sumber : BPS, NTB Dalam Angka Tahun 2022

Tabel. 3.21 Data Penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin	
	2022	2021
Lombok Barat	100,5	100,8
Lombok Tengah	98,8	99,1
Lombok Timur	99,1	99,4
Sumbawa	99,6	99,9
Dompu	101,2	101,5
Bima	101,3	101,6
Sumbawa Barat	102,2	102,5
Lombok Utara	100,8	101,1
Kota Mataram	99	99,3
Kota Bima	98,6	98,9
Nusa Tenggara Barat	99,7	100

Sumber : BPS, NTB Dalam Angka Tahun 2022

Jenis mata pencaharian di Provinsi NTB, Pertanian masih menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja di Provinsi NTB yang paling besar dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Serapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian mencapai sepertiga dari keseluruhan pekerja di Provinsi NTB. Dibandingkan tahun 2020, persentase pekerja di lapangan usaha pertanian sedikit menurun yaitu dari 34,68 persen menjadi 32,61 persen. Berikutnya usaha perdagangan mampu menyerap pekerja sebanyak 21,23 persen pada tahun 2021. Persentase ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mampu menyerap pekerja sebanyak 20,99 persen. Selain itu lapangan usaha industri mampu menyerap pekerja sebanyak 12,09 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 11,14 persen.

Tabel. 3.22 Persentase Pekerja Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2021

Lapangan Usaha	Laki- Laki	Perempuan	Total
Pertanian	35,86	28,36	32,61
Industri	9,59	19,37	12,09
Perdagangan	14,89	29,51	21,23
Penyediaan Akomodasi	3,52	8,11	5,51
Jasa Pendidikan	4,23	7,37	5,59
Lainnya	31,91	11,28	22,97
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Statistik Daerah, Provinsi NTB Tahun 2022

Perbandingan usia produktif (usia 15-64 tahun) dengan usia yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun) ditunjukkan oleh Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio). Rasio Ketergantungan Provinsi NTB pada tahun 2021 adalah sebesar 48,62 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi NTB menanggung sekitar 49 penduduk usia tidak produktif. Jika dipilah menurut gender, penduduk laki laki memiliki ketergantungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rasio ketergantungan penduduk laki-laki mencapai 49,49 sedangkan rasio ketergantungan untuk penduduk perempuan mencapai 47,77.

Tabel. 3.23 Rasio Ketergantungan Provinsi NTB, 2021 (persen)

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk (Jiwa)	2 695 552	2 694 446	5 389 998
0-14 tahun	757 110	724 091	1 481 201
15-64 tahun	1 803 186	1 823 412	3 626 598
>65 tahun	135 256	146 943	282 199
Ratio Ketergantungan	49,49	47,77	48,62

Sumber : BPS, Statistik Daerah, Provinsi NTB Tahun 2022

Tingkat pendidikan pada tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi NTB usia 15 tahun ke atas yang belum sekolah atau tidak tamat SD masih cukup banyak, yaitu mencapai 22,87 persen. Kelompok penduduk yang termasuk dalam kategori ini adalah usia lanjut atau generasi X dan baby boomer. Sedangkan yang sudah menamatkan pendidikan dasar atau SD adalah sebesar 19,83 persen. Penduduk yang menamatkan sekolah sampai dengan jenjang SMP dan SMA adalah masing-masing 22,66 persen dan 25,46 persen. Sementara yang mampu menamatkan pendidikan tinggi relatif masih sedikit yaitu hanya mencakup 9,18 persen. Masih tingginya penduduk yang belum mempunyai ijazah atau yang belum menamatkan ijazah SD menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar penduduk mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan. Berikut tabel tingkat pendidikan di provinsi NTB

Tabel. 3.24 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas di Provinsi NTB Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (persen)

Tingkat Pendidikan	Persentase
1	2
SD/MI	19,83%
SMP/Mts	22,66%
SMA/SMK/Ma	25,46%
Perguruan Tinggi	9,18%
Tidak Punya Ijazah	22,87%

Sumber : BPS, Statistik Daerah, Provinsi NTB Tahun 2022

Tabel. 3.25 Beberapa Capaian Indikator Pendidikan Provinsi NTB, 2019-2021

Indikator Pendidikan	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7-12 tahun	99,46	99,52	99,52
13-15 tahun	97,92	98,32	98,34
16-18 tahun	77,51	77,64	77,49
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD/ sederajat	98,87	98,78	98,81
SMP/ sederajat	83,92	84,98	85,28
SMA/ sederajat	66,04	66,81	67,09
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD/ sederajat	108,50	107,02	107,23
SMP/ sederajat	92,07	93,59	93,72
SMA/ sederajat	90,86	91,77	93,75

Sumber : BPS, Statistik Daerah, Provinsi NTB Tahun 2022

Tabel. 3.26 Data Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Kabupaten Lombok Barat	391823	312763	704586
Kabupaten Lombok Tengah	348236	607175	955411
Kabupaten Lombok Timur	699614	508980	1208594
Kabupaten Sumbawa	177288	284214	461502
Kabupaten Dompu	68558	187011	255569
Kabupaten Bima	76159	417039	493198
Kabupaten Sumbawa Barat	56281	96156	152437
Kabupaten Lombok Utara	54163	168049	222212
Kota Mataram	495681	0.00	495681
Kota Bima	152215	24217	176432
Nusa Tenggara Barat	2520018	2605604	5125622

Sumber : Proyeksi Penduduk - BPS Provinsi NTB

Tabel. 3.27 Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal, Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Rupiah), Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
Lombok Barat	658 886	1 128 474	1 302 718	1 092 783
Lombok Tengah	612 946	1 170 328	911 790	921 639
Lombok Timur	1 015 508	933 593	1 120 841	1 025 829
Sumbawa	1 040 304	1 770 971	1 344 635	1 292 537
Dompu	1 574 046	1 369 489	1 595 621	1 535 896
Bima	986 281	1 216 542	1 327 864	1 176 279
Sumbawa Barat	917 320	1 091 836	1 292 597	1 140 930

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
Lombok Utara	840 152	1 241 721	963 686	965 702
Kota Mataram	1 060 496	1 046 809	1 305 969	1 229 357
Kota Bima	916 659	1 461 007	1 235 080	1 302 677
Nusa Tenggara Barat	894 074	1 125 267	1 177 647	1 081 240

Sumber : BPS, Statistik Daerah, Provinsi NTB Tahun 2022

3.3 Identifikasi Perekonomian

3.3.1 Perkembangan Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi yang ada di wilayah NTB. Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 140,15 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 95,44 triliun.

Tabel 3.28 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2019-2021

No	PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	83 915 658,79	82 080 744,03	85 128 975,73
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2 201 687,32	2 178 738,97	2 230 783,68
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20 238 840,55	20 758 268,34	21 226 588,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	51 936 866,95	49 488 695,84	53 023 049,40
5	Perubahan Inventori	813 000,22	824 347,94	320 968,26
6	Ekspor Luar Negeri	5 890 196,50	8 899 757,51	16 593 769,38
7	Impor Luar Negeri	4 325 858,65	4 106 165,04	2 298 871,44
8	Net Ekspor Antar Daerah	-28 170 291,92	-26 510 643,42	-36 071 944,17
	PDRB	132 500 099,76	133 613 744,17	140 153 319,13

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022.

Tabel 3.29 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah), 2019-2021

No	PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58442832.99	56729843.10	57746622.42
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1513757.98	1488078.63	1496146.36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12366479.21	12509343.81	12574483.38

No	PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)		
		2019	2020	2021
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32163880.02	30386395.90	31543366.61
5	Perubahan Inventori	299306.66	296766.45	113096.18
6	Ekspor Luar Negeri	3865442.28	5577544.14	9348147.94
7	Impor Luar Negeri	2608526.27	2456041.92	1394461.40
8	Net Ekspor Antar Daerah	-12170734.24	-11243056.47	-15990553.83
	PDRB	93872438.65	93288873.64	95436847.66

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022.

Ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen (customer-to-customer/ c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen.

Tabel 3.30 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen), 2019-2021

NO	PDRB Pengeluaran (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)		
		2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.30	-2.93	1.79
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR)	3.87	-1.70	0.54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.56	1.16	0.52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.19	-5.53	3.81
5	Perubahan Inventori	0.00	0.00	0.00
6	Ekspor Luar Negeri	-40.19	44.29	67.60
7	Impor Luar Negeri	-19.19	-5.85	-43.22
8	Net Ekspor Antar Daerah	0.00	0.00	0.00
9	PDRB	3.90	-0.62	2.30

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2022.

Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi NTB tercatat mengalami pertumbuhan 2,30% (yoy), membaik dibandingkan tahun 2020 yang sempat berkontraksi sebesar 0,62% (year on year). Pada sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ditopang oleh kenaikan Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Luar Negeri, sementara komponen

Konsumsi Pemerintah sedikit mengalami perlambatan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU utama mengalami pertumbuhan positif kecuali LU Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB di luar LU Pertambangan tumbuh sebesar 2,85%(yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,17% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Realisasi pendapatan dan Realisasi Belanja Provinsi NTB dan kota/kabupaten di Provinsi NTB tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Realisasi pendapatan tahun 2021 tumbuh sebesar 1,40% (yoy), cukup tinggi jika dibandingkan tahun 2020 terkontraksi 3,87% (yoy). Searah dengan realisasi pendapatan, realisasi belanja tahun 2021 Provinsi NTB tercatat sebesar 6,89% (yoy), tumbuh signifikan dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,74% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi yang semakin tinggi akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan), sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tahunan, Provinsi NTB pada tahun 2021 mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), meningkat dibandingkan di tahun 2020 yang tercatat inflasi sebesar 0,60% (yoy). Tekanan inflasi pada tahun 2021 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok komoditas Transportasi, kelompok komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya. Tingkat inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok komoditas Pendidikan dan kelompok komoditas Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan IV 2020 secara umum masih terjaga. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada triwulan IV 2021 tumbuh 6,13% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang sebesar 6,03% (yoy). Rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,37%, masih relatif terjaga di bawah 5%. Tingkat pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan IV 2021 tercatat 15,53% (yoy),

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan tahun 2020 yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 10,38% (yoy) dan 10,49% (yoy).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB per Agustus 2021 mengalami perbaikan dibandingkan Agustus 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,22% pada Agustus 2020 menjadi 3,01% pada Agustus 2021. Ditinjau secara spasial, tingkat pengangguran di perkotaan dan pedesaan per Agustus 2021 juga mengalami penurunan.

Tingkat kesejahteraan di Provinsi NTB untuk periode September 2021 mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan periode September 2020 dan September 2019. Jumlah penduduk miskin pada periode September 2021 tercatat 13,83% dari keseluruhan penduduk NTB, menurun dibandingkan periode September 2020 yang tercatat 14,23% dari total penduduk serta sudah sedikit membaik dibandingkan periode September 2019 (pra pandemi) yang tercatat sebesar 13,88%.

Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), serta Ekspor Luar Negeri yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh progres pembangunan smelter perusahaan tambang dan kenaikan target produksi konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekpektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama.

Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun masih dalam kisaran target inflasi nasional 3% +/- 1% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2022 sehingga permintaan cenderung lebih tinggi. Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi terjadi pada kelompok komoditas volatile foods (VF), kelompok administered prices (AP), dan kelompok core.

3.3.2 Supply and Demand Perumahan

Pemenuhan kebutuhan hunian berupa rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar telah berstatus milik sendiri (87,43 persen), Kota Mataram dan Kota Bima tercatat dengan jumlah status kepemilikan rumah sendiri yang paling kecil yakni 62,25 persen dan

78,92 persen. Kondisi fisik bangunan rumah pada lantai dominan (98,39) telah dibangun. Bahan bangunan yang digunakan untuk lantai 50.03 persen adalah semen, dan 36.31 persen adalah keramik. Jenis atap yang digunakan pada bangunan rumah 59.06 persen menggunakan genteng dan 24.49 persen menggunakan seng. Dinding rumah masyarakat dominan telah berupa tembok yakni sebesar 83.5 persen.

Backlog

Backlog mencerminkan perbedaan antara kebutuhan rumah dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi tersedianya perumahan yang layak untuk masyarakat. Permasalahan backlog yang tinggi disebabkan karena ketidak seimbangan dalam penyediaan hunian layak huni untuk masyarakat. yaitu :

a) *Supply* (Penawaran) :

- Mengandalkan fasilitas pembiayaan formal
- Harga rumah semakin tinggi

b) *Demand* (Permintaan) :

- *Minimnya fasilitas pembiayaan bagi MBR Non-bankable* (informal. tidak memperoleh akses bank)
- Keterbatasan *Affordabilitas* (keterjangkauan)

1. Backlog Kepenghunan Rumah

Backlog rumah dari perspektif kepenghunan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal : 1 keluarga menghuni 1 rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung backlog kepenghunan

$$\text{Backlog Kepenghunan} = \Sigma \text{Keluarga} - \Sigma \text{Rumah}$$

Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, namun pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, khususnya yang tergolong MBR bisa menghuni Rumah Layak Huni (RLH), baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya.

2. Backlog Kepemilikan Rumah

Backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka *home ownership rate*/presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri. Sumber data dasar yang digunakan adalah bersumber dari data BPS. Cara perhitungan backlog kepemilikan rumah :

$$\text{Backlog Kepemilikan} = \Sigma \text{Rumah Tangga} - \Sigma \text{Rumah Tangga Milik}$$

Backlog mencerminkan perbedaan antara kebutuhan rumah dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi tersedianya perumahan yang layak untuk masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Tabel 3.31 Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Rumah /Backlog	
		Backlog Kepemilikan (KK)	Backlog Kepenghunian (KK)
1	Lombok Barat	27.376	20.780
2	Lombok Tengah	31.074	28.102
3	Lombok Timur	67.005	59.853
4	Sumbawa	11.938	
5	Dompu	7.671	5.541
6	Bima	12.746	6.577
7	Sumbawa Barat	6.209	4252
8	Lombok Utara	4.991	4.310
9	Kota Mataram	27.887	13.356
10	Kota Bima	7.595	5.008
Nusa Tenggara Barat		204.492	147.779

Sumber : Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan data dari masing-masing Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten/Kota tersebut diatas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 87,24% sehingga rumah tangga yang termasuk dalam backlog kepemilikan sebesar 12,75% atau 204.492 rumah tangga dari 1.603.257 jumlah rumah tangga.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelayakan sebuah hunian menentukan kualitas kehidupan didalamnya. Sarana pemenuhan kebutuhan seperti air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sistem sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan lingkungan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk penyediaan fasilitas pembuangan MCK 69,35 persen masyarakat NTB telah memiliki fasilitas secara pribadi. Namun masih terdapat 11,79 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan.

Tabel 3.32 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Buang Air Besar , 2022

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Buang Air Besar				
		Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
1	Lombok Barat	60,0	20,0	2,1	0,9	19,6
2	Lombok Tengah	69,67	15,41	1,07	0,59	13,26
3	Lombok Timur	92,85	7,15	0	0	0
4	Sumbawa	88,52	0	0	0	11,48
5	Dompu	73,28	8,61	4,04	0,32	13,75
6	Bima	78,3	8,87	0,8	0,4	11,63
7	Sumbawa Barat	93,2	5,23	0,61	0	0,96
8	Lombok Utara	71,43	16,24	1,46	0,34	10,52
9	Kota Mataram	77,51	18,64	1,08	0	2,78
10	Kota Bima	79,08	13,45	3,35	0	4,12
Nusa Tenggara Barat		78,38	11,36	1,45	0,25	8,81

Sumber : Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2023

Tabel 3.33 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Rata yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (Persen)		
		2018	2019	2020
1	Lombok Barat	65,16	69,51	69,57
2	Lombok Tengah	70,84	79,24	84,23
3	Lombok Timur	76,06	80,06	83,19
4	Sumbawa	68,27	81,72	85,24
5	Dompu	71,95	78,77	79,26
6	Bima	72,43	76,06	81,83
7	Sumbawa Barat	94,37	97,35	97,76
8	Lombok Utara	78,75	80,57	86,22
9	Kota Mataram	83,37	89,60	91,45
10	Kota Bima	80,16	94,18	88,32
Nusa Tenggara Barat		73,82	80,02	82,89

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2020

Tabel 3.34 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum yang Layak Tahun 2022

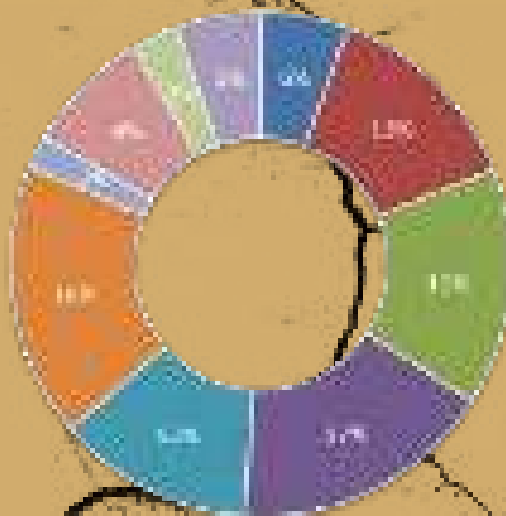
No	Kabupaten / Kota	Persentase Rata yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum yang Layak (persen)	Jumlah Jiwa
1	Lombok Barat	83,08	726.228
2	Lombok Tengah	92,52	971.182
3	Lombok Timur	90,40	1.343.901
4	Sumbawa	99,86	518.828
5	Dompu	96,57	230.030
6	Bima	90,46	453.802
7	Sumbawa Barat	96,35	144.548
8	Lombok Utara	94,95	237.799
9	Kota Mataram	74,09	319.338
10	Kota Bima	99,23	154.997
Nusa Tenggara Barat		91,75	5.100.653

Sumber : Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2023



RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Rumah tidak layak huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas lantai serta kesehatan penghuninya.



- Kab. Bima
- Kota Bima
- Kab. Sumbawa Barat
- Sumbawa
- Dompu
- Mataram
- Kab. Lombok Barat
- Kab. Lombok Selatan
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Lombok Utara
- Gowa

Adapun Sebaran Data RTLH berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Se- Provinsi NTB pada Tahun 2022 memiliki sebaran RTLH sejumlah 203.598 Unit di provinsi NTB . Persentase RTLH terbesar di Kab. Bima sejumlah 18 %, selanjutnya Kota Bima 17 % dan persentase terkecil di Kab. Sumbawa Barat yaitu 2 %.



BAB IV PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1 Profil Perumahan Provinsi NTB

Perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal, dan rumah merupakan kebutuhan pokok setelah sandang dan pangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28h Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, juga menyebutkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diantaranya adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah, dan menengah bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*); meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai, meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi); dan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah, persampahan

serta drainase. Hak hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, untuk mewujudkan amanat dari Undang-undang tersebut diperlukan profil atau kondisi perumahan.

4.1.1 Jumlah Rumah

Jumlah rumah ideal didasarkan dari data jumlah rumah tangga yang diperoleh dari data Disperkim Kabupaten/Kota. Pengertian rumah tangga berdasarkan BPS adalah adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak dan lainnya.

Berdasarkan data Disperkim Kabupaten/Kota, diketahui jumlah rumah tangga ideal tahun 2022 sebesar 1.603.257 unit. Berikut data jumlah rumah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 :

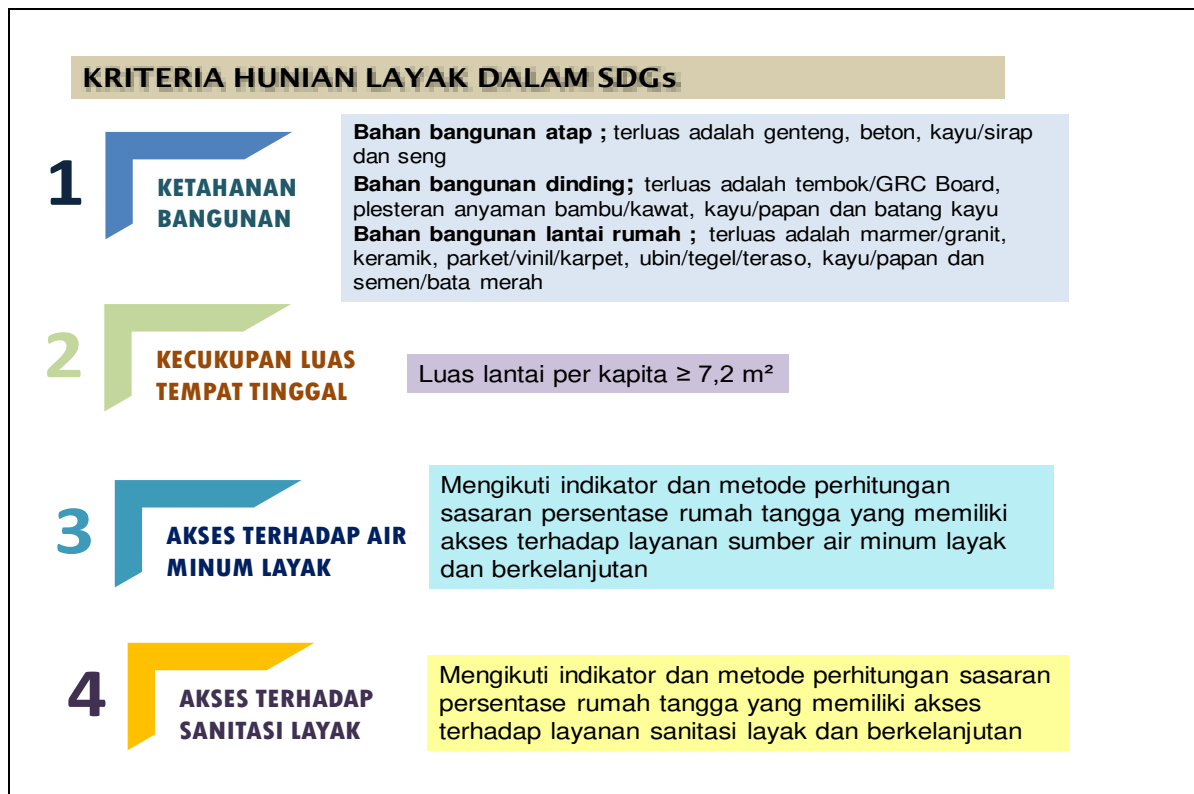
Tabel 4.1 Jumlah Rumah Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah
1	Kab. Lombok Barat	244.125
2	Kab. Lombok Tengah	313.086
3	Kab. Lombok Timur	395.265
4	Sumbawa	164.837
5	Dompu	63.295
6	Bima	144.411
7	Sumbawa Barat	35.208
8	Kab. Lombok Utara	85.921
9	Kota Mataram	118.156
10	Kota Bima	38.953
Total		1.603.257

Sumber: Data Disperkim Kabupaten Kota Tahun 2023

4.1.2 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas lantai serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas. Kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).



Gambar 4.1 Kriteria Hunian Layak dalam SDGs

Dalam mengukur ketahanan dan keselamatan bangunan, jenis material bahan bangunan merupakan proksi terbaik yang dianggap paling mendekati saat ini untuk mengukur aspek ketahanan dan keselamatan bangunan. Hal ini karena hingga saat ini, belum ada metode lebih lanjut mengenai cara menilai ketahanan bangunan dengan hanya melalui observasi yang dilakukan oleh petugas BPS dalam pencacahan. Selanjutnya di masa depan diharapkan penilaian komponen tersebut dapat dengan mudah dilakukan jika seluruh bangunan/gedung sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

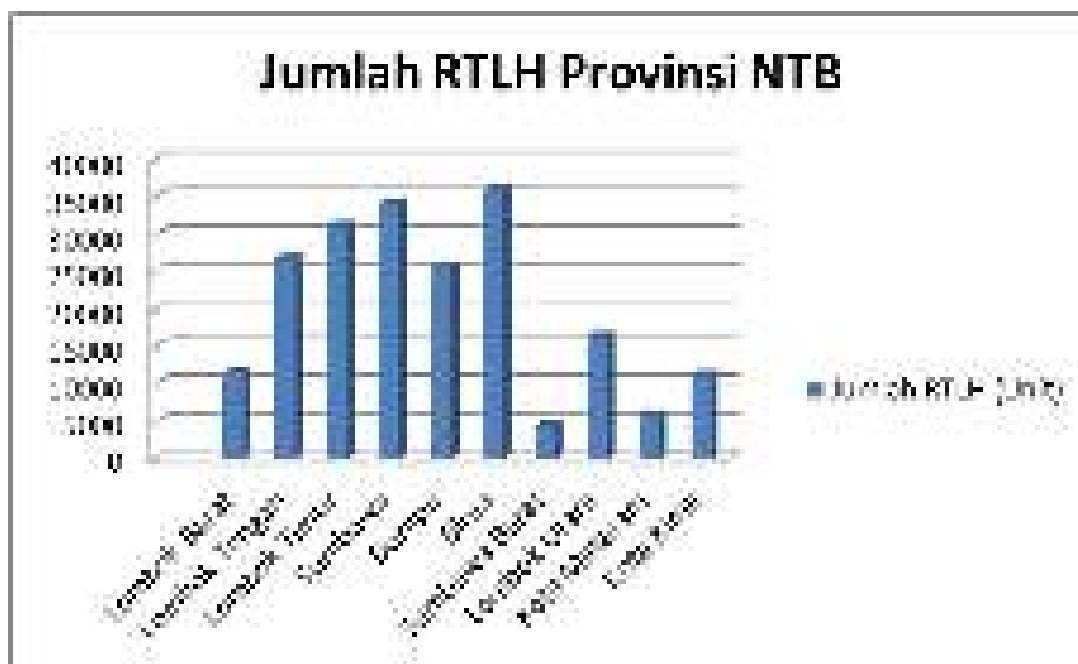
Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari sumber pencemar. Memiliki akses sanitasi layak, yang dilihat dari beberapa komponen antara lain (1) penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, (2) bangunan atas/jenis kloset berupa leher angsa dan (3) bangunan bawah/tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun. Khusus wilayah perdesaan, fasilitas sanitasi yang menggunakan leher angsa dengan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah masih dikategorikan akses sanitasi layak. Perhitungan SDGs melihat seluruh komponen mempunyai bobot yang sama

penting dan mutlak wajib dipenuhi kelayakannya sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Artinya jika salah satu indikator komponen tidak memenuhi standar, maka hunian dianggap tidak layak.

Tabel 4. 2 Jumlah RTLH di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022

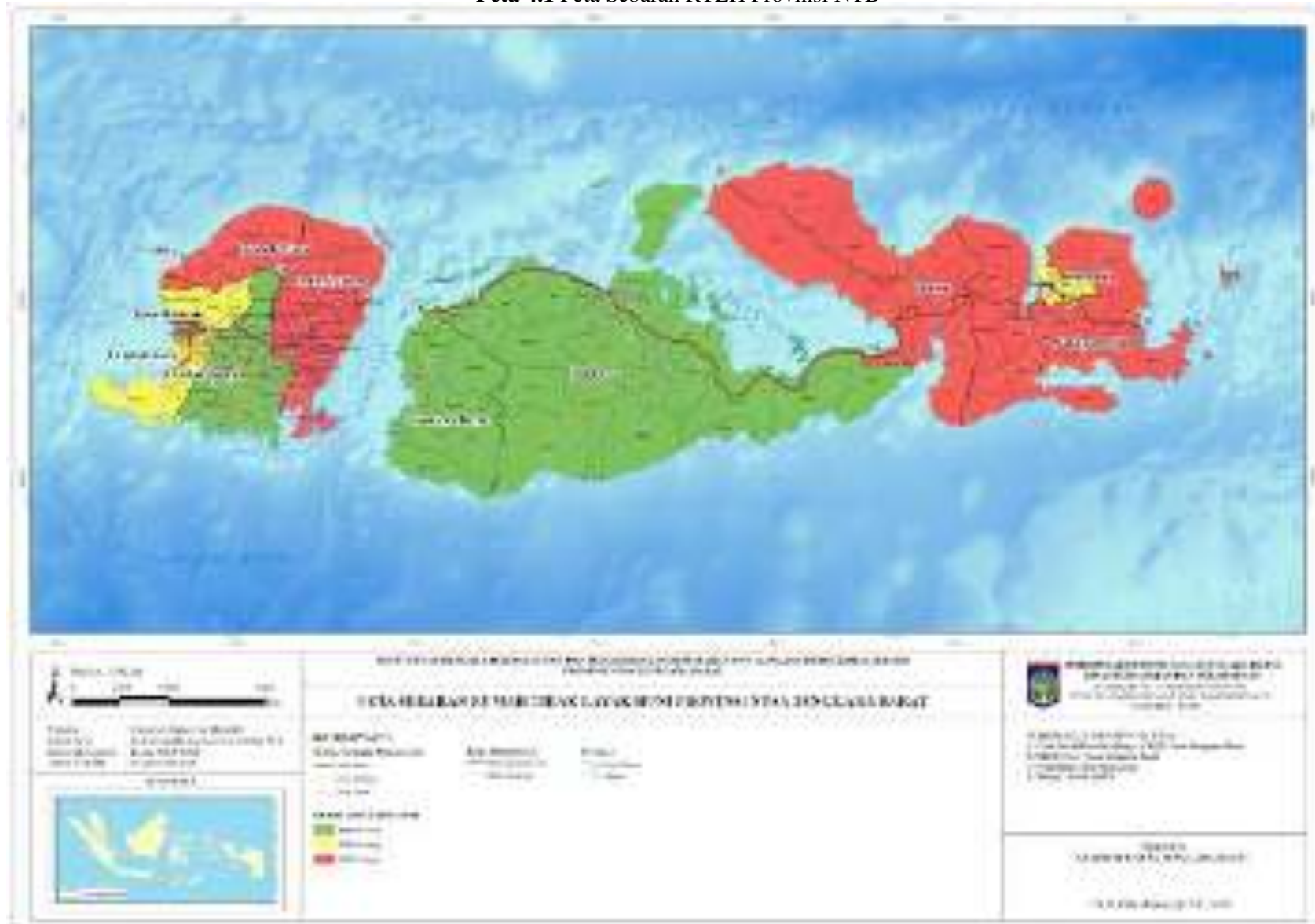
No	Kabupaten/Kota	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kelurahan	Jumlah RTLH	%
1	Kab. Lombok Barat	10	119	11.503	5,65
2	Kab. Lombok Tengah	12	139	26.864	13,19
3	Kab. Lombok Timur	21	254	31.217	15,33
4	Sumbawa	24	165	34.285	16,84
5	Dompu	8	81	25.733	12,64
6	Bima	18	143	35.991	17,68
7	Sumbawa Barat	8	58	4.319	2,12
8	Kab. Lombok Utara	5	33	16.466	8,09
9	Kota Mataram	6	49	5.987	2,94
10	Kota Bima	5	41	11.233	5,52
Total		117	1082	203598	100,00

Sumber: Data Disperkim Kabupaten Kota Tahun 2023



Gambar 4.2 Grafik Potret RTLH di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peta 4.1 Peta Sebaran RTLH Provinsi NTB



4.1.3 Backlog Kepemilikan Rumah

Pemenuhan kebutuhan hunian berupa rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar telah berstatus milik sendiri berdasarkan data Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2022,

Ditahun 2022, jumlah *backlog* kepemilikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni 204.492 unit. Dimana Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah *backlog* kepemilikan tertinggi yaitu 67.005 unit. Sedangkan Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten dengan jumlah *backlog* kepemilikan terendah yakni 4.991 unit.

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (KK)
1.	Lombok Barat	244.125
2.	Lombok Tengah	313.086
3.	Lombok Timur	395.265
4.	Sumbawa	164.837
5.	Dompu	63.295
6.	Bima	144.411
7.	Sumbawa Barat	35.208
8.	Lombok Utara	85.921
9.	Kota Mataram	118.156
10.	Kota Bima	38.953
Jumlah		1.603.257

Sumber: Data Disperkim Kabupaten Kota Tahun 2023

Tabel 4.4 Jumlah *Backlog* di Provinsi NTB Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan (KK)	Backlog Kepenghunian (KK)
1	Lombok Barat	27.376	20.780
2	Lombok Tengah	31.074	28.102
3	Lombok Timur	67.005	59.853
4	Sumbawa	11.938	
5	Dompu	7.671	5.541
6	Bima	12.746	6.577
7	Sumbawa Barat	6.209	4252
8	Lombok Utara	4.991	4.310
9	Kota Mataram	27.887	13.356
10	Kota Bima	7.595	5.008
Nusa Tenggara Barat		204.492	147.779

Sumber: Data Disperkim Kabupaten Kota Tahun 2023

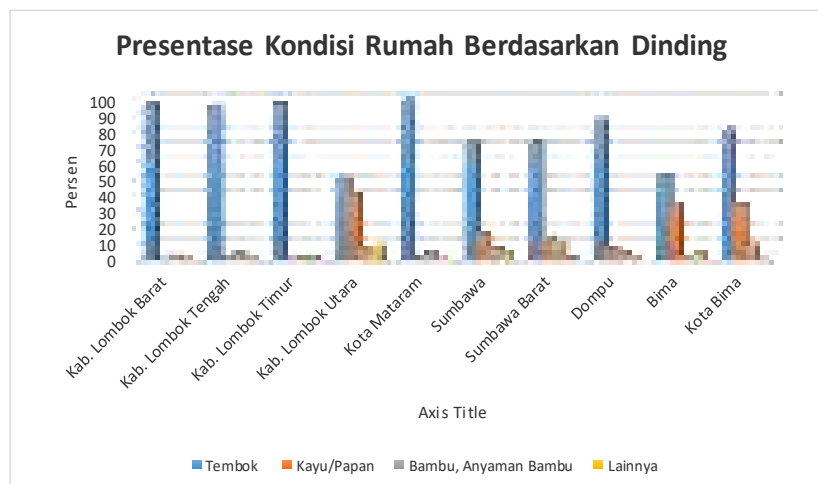
4.1.4 Kondisi Rumah Berdasarkan Dinding

Bangunan berdasarkan dinding terluas adalah klasifikasi bangunan berdasarkan sisi luar/batas/penyekat dari suatu bangunan dengan bangunan lain. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 82,88% rumah menggunakan tembok/plasteran atau anyaman bambu/kawat sebagai dinding bangunan. Berikut merupakan tabel persentase jumlah bangunan berdasarkan dinding terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 :

Tabel 4.5 Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Dinding Di Provinsi NTB tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Tembok (%)	Kayu/Papan (%)	Anyaman Bambu (%)	Lainnya (%)
1	Kab. Lombok Barat	93,26	1,40	4,18	1,16
2	Kab. Lombok Tengah	92,36	0,24	7,09	0,31
3	Kab. Lombok Timur	90,91	1,91	6,16	1,02
4	Sumbawa	70,70	14,87	11,60	2,83
5	Dompu	73,83	21,05	3,69	1,43
6	Bima	53,15	44,48	1,67	0,70
7	Sumbawa Barat	65,77	20,10	8,58	5,55
8	Kab. Lombok Utara	31,69	38,25	13,25	16,81
9	Kota Mataram	98,31	0,65	1,05	0,00
10	Kota Bima	85,64	12,89	0,92	0,56
Total		82,88	9,60	5,75	1,76

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi NTB Tahun 2021



Gambar 4.3 Presentase Kondisi Rumah Berdasarkan Dinding Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.5 Kondisi Rumah Berdasarkan Lantai

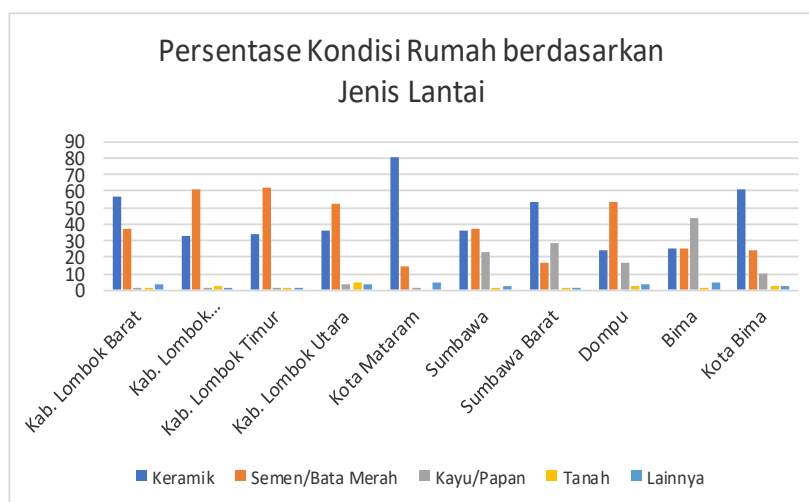
Bangunan berdasarkan jenis lantai terluas adalah klasifikasi bangunan berdasarkan bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer, keramik, granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah dan lainnya seperti bambu. Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebanyakan

bangunan menggunakan semen/bata merah sebagai lantai yaitu 45,23% dari total bangunan. Berikut merupakan tabel persentase jumlah bangunan berdasarkan jenis lantai terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 :

Tabel 4.6 Kondisi Rumah berdasarkan Jenis Lantai tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas (%)				
		Keramik	Semen/Bata Merah	Kayu/Papan	Tanah	Lainnya
1	Kab. Lombok Barat	57,01	37,50	1,21	1,08	3,21
2	Kab. Lombok Tengah	32,46	61,50	1,86	2,80	1,38
3	Kab. Lombok Timur	34,12	61,77	0,57	1,88	1,66
4	Sumbawa	35,85	37,62	22,82	1,18	2,53
5	Dompu	24,44	53,67	16,09	2,45	3,34
6	Bima	25,27	24,92	44,18	1,08	4,56
7	Sumbawa Barat	53,02	16,76	28,01	0,46	1,75
8	Kab. Lombok Utara	36,07	51,98	3,86	4,83	3,26
9	Kota Mataram	80,72	14,41	0,40	0,00	4,47
10	Kota Bima	60,76	24,47	10,48	1,95	2,35
Total		41,82	45,23	8,60	1,76	2,59

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi NTB Tahun 2021



Gambar 4.4 Persentase Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Lantai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

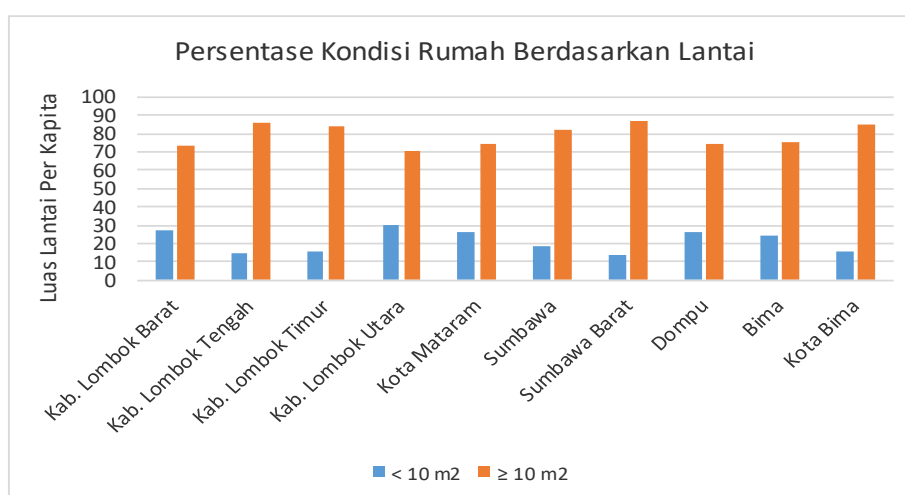
4.1.6 Kondisi Rumah Berdasarkan Luas Lantai

Luas perkapita merupakan salah satu kriteria rumah layak huni. Berdasarkan publikasi BPS, luas perkapita minimal agar sebuah rumah dikatakan layak huni adalah $\geq 7,2 \text{ m}^2$. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas perkapita yang mendominasi adalah $\geq 10 \text{ m}^2$ yaitu 79,87%. Berikut merupakan tabel persentase jumlah bangunan berdasarkan luas perkapita di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 :

Tabel 4.7 Kondisi Rumah berdasarkan Luas Lantai tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita(%)	
		< 10 m ²	≥ 10 m ²
1	Kab. Lombok Barat	26,96	73,04
2	Kab. Lombok Tengah	14,21	85,79
3	Kab. Lombok Timur	15,81	84,19
4	Sumbawa	18,45	81,55
5	Dompu	25,99	74,01
6	Bima	24,39	75,61
7	Sumbawa Barat	13,62	86,38
8	Kab. Lombok Utara	29,53	70,47
9	Kota Mataram	25,78	74,22
10	Kota Bima	15,52	84,48
Total		20,13	79,87

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi NTB Tahun 2021



Gambar 4.5 Persentase Kondisi Rumah Berdasarkan Luas Lantai Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.7 Perumahan Pengembang

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang PKP Pasal 1 angka 2). Dengan demikian, maka kawasan perumahan merupakan kawasan perumahan yang terencana dengan baik dengan kapling yang disediakan mulai dari kapling kecil hingga kapling besar yang dikembangkan oleh pengembang/developer. Pada kawasan ini kondisi bangunan dan lingkungannya sudah memadai karena sudah direncanakan sebelumnya, selain itu prasarana penunjang juga tersedia. Kawasan perumahan di wilayah perencanaan kebanyakan terdiri dari tipe kapling kecil hingga sedang.

Persebaran kawasan pengembangan perumahan di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati pusat kota, dekat dengan kawasan Industri, dan Pada Kawasan Perbatasan. Rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang menurut UU No.1 tahun 2011 masuk dalam kategori rumah umum yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan perumahan dilaksanakan dengan hunian berimbang.

Sampai dengan tahun 2021, perumahan subsidi sudah terbangun 158 perumahan dengan 22.852 unit rumah yang terebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, dengan Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu jumlah paling sedikit pembangunan rumah bersubsidi oleh pengembang yaitu masing-masing 1 perumahan. Dari jumlah tersebut, lokasi pembangunan perumahan terbanyak yaitu Kabupaten Lombok Barat dengan 86 perumahan dan 15.429 unit rumah semua tipe, dengan melibatkan sejumlah badan usaha property lokal dan nasional.

Tabel 4.8 Pembangunan Perumahan Subsidi FLPP Oleh REI yang Terealisasi Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN PER UNIT						JMLH PERUM.	JMLH RUMAH
		s.d. 2019		2020		2021			
		JMLH PERUM	JMLH RUMAH	JMLH PERUM	JMLH RUMAH	JMLH PERUM	JMLH RUMAH		
1	LOMBOK BARAT	23	7365	26	3650	37	4414	86	15429
2	LOMBOK TENGAH	4	266	5	235	5	201	14	702
3	LOMBOK TIMUR	1	50	2	73	4	450	7	573
4	SUMBAWA	3	650	7	954	9	1645	19	3249
5	DOMPU	0	0	0	0	1	30	1	30
6	KABUPATEN BIMA	0	0	0	0	1	69	1	69
7	SUMBAWA BARAT	1	311	1	78	2	275	4	664
8	LOMBOK UTARA	3	229	2	29	1	20	6	278
9	KOTA MATARAM	6	787	5	501	4	304	15	1592
10	KOTA BIMA	1	100	1	41	3	125	5	266
JUMLAH		42	9758	49	5561	67	7533	158	22852

Sumber : Disperkim Provinsi NTB, Buku Profil Penanganan Perumahan Di Provinsi NTB Tahun 2021



Gambar 4. 6 Perumahan Pengembang di Pulau Lombok

Tabel. 4.9 Data Perizinan Pembangunan PKP Yang Telah di Terbitkan Berdasarkan data e-Profil Perumahan, Direktorat Jendral Perumahan.

NO	Kota / Kabupaten	Bulan Tahun	Developer	Nama	Lokasi	Luas Lahan	Tipe Rumah	MBR	Non MBR
1	Lombok Barat	Februari 2020	PT. VARINDO LOMBOK INTI	GRIYA PESONA ALAM	Dusun Duman Dasan Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat	10104	24/85	421	0
2		Februari 2020	PT. LAMBANG SEJATI (Kota Mataram)	BUKIT CITRA KENCANA	Dusun Perampuan Barat, Desa Perampuan, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	8955	25/90	192	0
3		Februari 2020	PT. LAMBANG SEJATI (Kota Mataram)	BUKIT CITRA KENCANA	Dusun Perampuan Barat, Desa Perampuan, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	8955	35/100	18	0
4		Februari 2020	PT. NURSULA JAYA PROPERTY	PERUMAHAN	Jl. Abu Bakar, Dusun Telaga Waru, Desa Telaga Waru Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	1290	30/80	43	0
5		Februari 2020	PT. LAMBANG SEJATI (Kota Mataram)	BUKIT CITRA KENCANA	Dusun Perampuan Barat, Desa Perampuan, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	8955	36/100	50	0
6		Maret 2020	PT. MATARAMA DEVINDO CORPORATION	PERUMAHAN	Jl. Matahari Raya, Perum. Villa Damai, Desa Bajur Kec. Labuapi	213	24/70	7	0
7		Maret 2020	PT. MATARAMA DEVINDO CORPORATION	PERUMAHAN	Jl. Matahari Raya, Perum. Villa Damai, Desa Bajur Kec. Labuapi	213	5/100	1	0
8		Maret 2020	PT. DIRGANTARA CAHAYA LOMBOK	LARIZA HOME URBAN	Dusun Kelongkong, Desa Kuranji, Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	840	30/90	28	0
9		Maret 2020	PT. ANUGRAH ALAM PROPERTY	GRAND MADANI LABUAPI	Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kec. Labuapi	525136	36/100	33	0
10		Maret 2020	PT. ANUGRAH ALAM PROPERTY	GRAND MADANI LABUAPI	Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kec. Labuapi	525136	26/80	140	0
11		Mar 2020	PT. PARTHA ANINDITA	GRAHA PANDA	Jl. Rengganis Raya, Desa Bajur, Kec. Labuapi	5982	70/120	0	36
12		Mar 2020	PT. PARTHA ANINDITA	GRAHA PANDA	Jl. Rengganis Raya, Desa Bajur, Kec. Labuapi	5982	40/100	0	69
13		Mar 2020	PT. MEKA ASIA PROPERTI	GREEN ASIA	Dusun Karang Kebun Timur, Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi	7216	36/100	24	0
14		Mar 2020	PT. MEKA ASIA PROPERTI	GREEN ASIA	Dusun Karang Kebun Timur, Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi	7216	27/80	230	0
15		Apr 2020	PT. MATARAMA DEVINDO CORPORATION	MAVILLA ASRI	Jl. Matahari Raya, Dusun Mavilla Rengganis, Desa Kuranji Kec. Labuapi	744	24/80	31	0
16		Apr 2020	PT. BALE LOMBOK AGUNG	BALE AGUNG 2	Dusun Kerangkeng Barat, Desa Banyumulek, Kec. Kediri	924	28/80	33	0
17		May 2020	PT. IONE HOME INDONESIA	IONE HOME RESIDENCE	Dusun Lendang Jae, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar	10599	27/90	58	0
18		Apr 2020	PT. IONE HOME INDONESIA	IONE HOME RESIDENCE	Dusun Lendang Jae, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar	10599	37/100	0	163
19		May 2020	PT. IONE HOME INDONESIA	IONE HOME RESIDENCE	Dusun Lendang Jae, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar	10599	45/120	0	57
20		May 2020	PT. SADHUTAMA CIPTA LOKA	LILIR RUMAH KITA	Dusun Lilir, Desa Mekarsari, Kec. Gunungsari	4350	30/90	123	0
21		Mar 2020	PT. GRIYA PERMATA ARMAI	PERMATA ARMAI	Dusun Karang, Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi	1680	30/70	56	0
22		Apr 2020	PT. SASTRIA GARUDA MUDA	TELAGA ANANTA	Jl. Abu Bakar, Dusun Terong Tawah, Desa Terong Tawah Kec. Labuapi	1120	28/80	40	0
23		Apr 2020	PT. ADYA SURYA PROPERTI	NHM DASAN BARU	Desa Dasan Baru Kec. Kediri	1980	30/90	66	0
24		Jun 2020	PT. PARTHA ANINDITA	GRAHA PANDITA	Jl. Rengganis Raya, Desa Bajur Kec. Labuapi	5982	70/120	0	36
25		Jun 2020	PT. PARTHA ANINDITA	GRAHA PANDITA	Jl. Rengganis Raya, Desa Bajur Kec. Labuapi	5982	40/100	0	69
26		Jun 2020	PT. VARINDO LOMBOK INTI	GRIYA PEREMBUN ASRI	Jl. Gunung Pengsong, Desa Perampuan, Kec. Labuapi	1272	24/90	53	0
27		Jun 2020	PT. VARINDO LOMBOK INTI	GRIYA TAMAN ASRI	Dusun Kebun Sudak, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi	648	24/85	27	0
28		Jun 2020	PT. VARINDO LOMBOK INTI	GRIYA TAMAN ASRI	Dusun Kebun Sudak, Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi	984	24/85	41	0
29		Jun 2020	PT. JARI MULIA PROPERTI	BANYUMULEK TAHAJJUD	Dusun Karang Pande, Desa Banyumulek Kec. Kediri	732	30/90	22	0

30	Lombok Tengah	Agustus 2020	PT. MAHKOTA CIPTA INDONESIA (Lombok Barat)	Taj Gerunung	Gerunung	14000	40	0	61
31		Agustus 2020	PT. MAHKOTA CIPTA INDONESIA (Lombok Barat)	Taj Gerunung	Gerunung	14000	30	6	0
32		Agustus 2020	PT. MAHKOTA CIPTA INDONESIA (Lombok Barat)	Taj Gerunung	Gerunung	14000	54	0	10
33		Agustus 2020	PT. BANGUN NUSRA PROPERTI	Griya Nusra Penujak	Penujak	2178	30	16	0
34		Agustus 2020	PT. LINGSAR DARMA KESAWA	PERMATA PUYUNG PERMAI	Puyung Kec. Jonggat	4441	36	16	0
35		Agustus 2020	PT. LINGSAR DARMA KESAWA	PERMATA PUYUNG PERMAI	Puyung Kec. Jonggat	4441	45	0	6
36		Agustus 2020	PT. CAHAYA MELATI MANDIRI	PRATAMA BUKIT MELATI	Janapria Kec. Janapria	0	30	39	0
37	Lombok Timur	Januari 2020	PT. ASIA KARYA IMAN	Perumahan Rensing Rensica	Desa Rensing Raya Kec. Sakra Barat	0	30	102	0
38		Juni 2020	PT. BUMI SEJUTA ASA		RT. 019. Lingkungan Tomba Urip Kel. Tanjung Kec. Labuan Haji	0	30	14	0
39	Sumbawa	Juni 2020	PT. EMAAR INVESTMENT GROUP		Jl. Lintas Sumbawa Moyo	30000	36	217	0
40	Kota Bima	Juli 2020	PT. NENDO MARGOMULYO GROUP	PERUMAHAN NENDO GROUP	Jl. Lingkar Nggaro Te RT. 001 RW. 001 Lingk. Perumahan Nendo Group Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima	7290	36	0	7
41		Juli 2020	PT. KAMATA INTI PERSADA	PERUMAHAN KAMATA LAND	Jl. Lintas Melayu Kolo Perumahan Kamata Land Block B-4 No. 1-12 Lingk. Bonto Kel. Kolo Kec. Asakota	16560	36	0	12
42	Bima	Maret 2020	PT. BIMA PONDOK INDAH	Pondok Indah	Desa Risa, Kec. Woha	648	36	18	0

Sumber : Data e-Profil Perumahan, Direktorat Jendral Perumahan

4.1.8 Profil Rumah Susun dan Rumah Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Rumah Susun

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2011, Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Adapun maksud dibangunnya Rumah Susun ini adalah untuk mengurangi Backlog yaitu kurangnya jumlah rumah, dimana satu rumah ditempati lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) serta untuk menyediakan hunian yang layak huni, aman, nyaman bagi masyarakat. Total Rumah Susun yang sudah terbangun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 54 Tower Block (TB) atau 1.698 unit tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di NTB. Pembangunan Rusun yang bersumber dari APBN ini terbanyak di Kota Mataram, yaitu 15 Tower dengan berbagai jenis, tipe dan peruntukan, baik untuk masyarakat umum maupun kelompok masyarakat lainnya seperti mahasiswa, dan kelompok profesi.

Tabel 4.10 Program Rumah Susun Sampai Dengan Tahun 2021 (APBN)

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN PER TOWER BLOK						JUMLAH
		s.d. 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	LOMBOK BARAT	5	0	1	0	0		6
2	LOMBOK TENGAH	3	1	0	0	0		4
3	LOMBOK TIMUR	6	0	2	1	0	1	10
4	SUMBAWA	4	1	2	1	0		8
5	DOMPU	0	0	0	0	0	1	1
6	KABUPATEN BIMA	1	0	1	1	0		3
7	SUMBAWA BARAT	1	0	1	0	0		2
8	LOMBOK UTARA	2	0	0	0	0		2
9	KOTA MATARAM	11	1	1	0	0	2	15
10	KOTA BIMA	3	0	0	0	0		3
NUSA TENGGARA BARAT		36	3	8	3	0	4	54

Sumber: BP2P-NT1, 2021

Tabel 4.11 Program Rumah Susun Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021 Berdasarkan Peruntukannya

NO.	KABUPATEN /KOTA	PERUNTUKANNYA					JUMLAH
		Pelajar/ Mahasiswa/ Santri (Blok)	TNI/Polri (Blok)	Pegawai Kejaksaan (Blok)	ASN (Blok)	MBR (Blok)	
1	LOMBOK BARAT	5	0	1	0	0	6
2	LOMBOK TENGAH	3	0	0	0	1	4
3	LOMBOK TIMUR	7	0	0	0	3	10
4	SUMBAWA	7	0	0	0	1	8
5	DOMPU	1	0	0	0	0	1
6	KABUPATEN BIMA	2	0	0	1	0	3
7	SUMBAWA BARAT	1	0	0	0	1	2
8	LOMBOK UTARA	1	1	0	0	0	2
9	KOTA MATARAM	6	4	1	0	4	15
10	KOTA BIMA	1	0	0	0	2	3
NUSA TENGGARA BARAT		34	5	2	1	12	54

Sumber : BP2P-NT1, 2021

Tabel 4.12 Lokasi Program Rumah Susun Di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021

NO	NAMARUSUN	LOKASI	JUMLAH				PER UNTUKAN	INSTANSI PEMBANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
KOTA MATARAM (15 Tower Blok)									
1	Rusun Polri Brimob NTB	Jl. Industri Skip 1 Ampenan Selatan	1	-	-	-	Polri		2009
2	Rusun Pekerja Selagalas	Jl. Petenakan 1 Selagalas, Sandubaya	1	5	24	96	MBR	Ditjen Cipta Karya	2010
3	Rusun Mahasiswa UNRAM	Jl. Pemuda, Dasan Agung Baru, Selaparang	1	-	-	98	Mahasiswa	Kemendagri	2011
4	Rusun Pekerja Mandalika 1	Jl. TGH. Islahuddin Bukhori, Mandalika, Sandubaya	1	5	24	198	MBR	Ditjen Cipta Karya	2012

NO	NAMARUSUN	LOKASI	JUMLAH				PER UNTUKAN	INSTANSI PEM BANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
5	Rusun Mahasiswa IAIN	Jl. Gajah Mada, Jempong Baru	1	-	-	-	Mahasiswa	Kemendagri	2012
6	Rusun Ponpes Yayasan NurulIslam	Karang Pule, Sekarbela	1	3	-	-	Pelajar	Kemendagri	2014
7	Rusun Pekerja Mandalika 2	Montong Are, Sandubaya	1	5	24	99	MBR	Ditjen Cipta Karya	2015
8	Rusun Mahasiswa AMIKOM	Kampus AMIKO M,ASM, Kekalik Jaya	1	4	-	50	Mahasiswa	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
9	Rusun PolriPolda NTB	Jl. Majapahit 45, Taman Sari	1	3	36	48	Polri	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
10	Rusun TNI ADYonif Gebang	KI Zipur B Yonzipur Dam IX/UDY, Jl. Saptamarga, Gebang	1	-	-	35	TNI-AD	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
11	Rusun TNI AL	Jl. Swadaya	1	-	-	-	TNI AL	Ditjen Penyediaan Perumahan	2016
12	Rusun Kejaksaan Tinggi NTB	Jl. Langko	1	2	36	21	Pegawai Kejaksaan	Ditjen Penyediaan Perumahan	2017
13	Rusun MahasiswaNW	Universitas Nahdlatu Wathan	1	3	24	37	Mahasiswa	Satker PNP	2018
14	Rusun Bintaro Ampenan	Ampenan Kota Mataram	1	3	36	43	MBR	Ditjen Penyediaan Perumahan	2021

NO	NAMA RUSUN	LOKASI	JUMLAH				PER UNTU KAN	INSTANSI PEM BANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
15	Rusun Universitas Al-Azhar Mataram	Kota Mataram	1	3	24	43	Mahasiswa	Ditjen Penyediaan Perumahan	2021
LOMBOK BARAT (6 Tower Blok)									
16	Rusun Ponpes Nujumul Huda	Batu Samban, Lembar	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2013
17	Rusun Ponpes Addinul Qayyim 2	Kapek, Gunung Sari	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2013
18	Rusun Ponpes Nurul Harmaen Narmada	Jl. Hamzawadi 5 Lembuak, Mekar Indah, Narmada	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
19	Rusun Ponpes Islahuddin Kediri	Jl. TGH Ibrahim Al Kholidy, Kediri	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
20	Rusun Ponpes Darul Qur'an Wal Hadist	Jl. Telaga Lebur, Sekotong Tengah	1	3	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
21	Rusun MBR Senggigi	Kec. Senggigi	1	3	36	42	MBR	Satker Bangkum	2018
LOMBOK TENGAH (4 Tower Blok)									
22	Rusun Ponpes Manhalul Ma'arif	Desa Derek, Lombok Tengah	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2013
23	Rusun Ponpes Sa'adatud darain	Jl. Gajah Mada Desa Wakan Leneng	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
24	Rusun Ponpes Ta'limussibyan	Desa Bonder, Praya	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
25	Rusun NTB I	Jl. Dolok, Kel. Semayam, Praya	1	5	36	70	MBR	Satker Bangkum	2017
LOMBOK TIMUR (10 Tower Blok)									
26	Rusun Ponpes Al Ijthath Almahsuni	Jl. Lintas Laskar, Danger, Masbagik	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2013
27	Rusun Pekerja Masbagik	Masbagik	1	-	-	-	MBR	Kemenpera	2013

NO	NAMA RUSUN	LOKASI	JUMLAH				PER UNTU KAN	INSTANSI PEM BANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
28	Rusun Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor	Jl. TGH KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Pancor, Selong	1	-	-	20	Pelajar	Kemenpera	2014
29	Rusun Institut Agama Islam Hamzanwadi Anjani	Jl. Raya Mataram KM 49 Anjani Suralaga	1	3	-	20	Mahasiswa	Kemenpera	2014
30	Rusun Ponpes Manaqita'limat	Jl. Raya Mamben Daya, Labuhan Lombok, Wanasabe	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
31	Rusun Kelautan MBR	Kayangan, Labuhan Lombok	1	4	24	114	MBR	Ditjen Penyediaan Perumahan	2014
32	Rusun MBR Labuhan Haji	Keurahan.Labuhan Haji	1	3	36	42	MBR	Satker PNP	2018
33	Rusun Ponpes Hamzanwadi Anjani	Desa Anjani, Suralaga	1	3	Barak	8	Santri	Satker Bangkum	2018
34	Rusun NTB 1 Ponpes Ulil Albab, NW Lombok Timur		1	2	Barak	4	Santri		2019
35	Rusun Ponpes Al Qimah Lombok Timur	Lombok Timur	1	4	Barak		Santri	Ditjen Penyediaan Perumahan	2021
LOMBOK UTARA (2 Tower Blok)									
36	YPP. Hidayaturrahman	Jl. Tanjung-Bayan Pemenang Barat Pemenang	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2014
37	Rusun Polri Polres Gangga	Desa Ganggalang	1	-	-	48	Polri	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
SUMBAWA BARAT (2 Tower Blok)									
38	Rusun Ponpes Al-Ikhlash	Jl. Ponpes 112 Menala Taliwang	1	-	-	-	Santri/ Pelajar	Kemenpera	2012 2013
39	Rusun MBR Menala	Kel. Mandala Taliwang	1	3	36	42	MBR	Satker PNP	2018
SUMBAWA (8 Tower Blok)									

NO	NAMA RUSUN	LOKASI	JUMLAH				PER UNTU KAN	INSTANSI PEM BANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
40	Rusun Ponpes Maronge (PP At Tanwir)	Maronge, Sumbawa	1	-	-	-	Santri	Kemenpera	2013
41	Rusun Mahasiswa Univ. Teknik Sumbawa (UTS)	Jl. Olat Maras, Desa Batu Alang, Moyo Ulu	2	4	-	100	Maha siswa	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
42	Rusun Santri Yayasan Dea Malela	Pemanggong, Kec. Lendangguar	1	3	-	30	Santri	Ditjen Penyediaan Perumahan	2015
43	Rusun NTB 2 (Univ. Sumbawa (UNSA))	Jl. Ray Sering, Bypass Sumbawa	1	3	24	37	Mahasiswa	Satker PNP	2017
44	Rusun MBR Uma Sima	Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	1	3	36	42	MBR	SNVT	2018
45	Rusun Ponpes Dea Malela	Pemanggong, Kec. Lendangguar	1	3	Barak	8	Santri	Satker Bangkum	2018
46	Rusun NTB2 Ponpes Al-Kahfi, Sumbawa		1	2	Barak	4	Santri		2019
BIMA (3 Tower Blok)									
47	PP Al Muchlisin Ys. Paramuallim Bima	Salama Parado Rato	1	-	-	-	Pelajar	Kemenpera	2012-2013
48	Rusun ASN Bima	Kec. Woha	1	3	35	42	ASN	Satker Bangkum	2018
49	Ponpes/Yayasan Al-Madinah, Bima		1	2	Barak	4	Santri		2019
KOTA BIMA (3 Tower Blok)									
50	Rusun Pekerja Kota Bima	Jl. Industri Kel. Paruga, Kec. RasanaE Barat	2	-	24	198	MBR	Ditjen Cipta Karya	2013-2014
51	Rusun Polri	Jl. Soekarno Hatta 15 Panatoi Kec. Mpunda	1	3	36	47	Polri	Dirjen Cipta Karya	2015
KABUPATEN DOMPU (1 Tower Blok)									

NO	NAMA RUSUN	LOKASI	JUMLAH				PERUNTUKAN	INSTANSI PEMBANGUN	TAHUN
			BLOK	LANTAI	TIPE	UNIT			
52	Rusun Ponpes Ustman Bin Affan	Dompu	1	4	Barak			Ditjen PenyeDiaan Perumahan	2021
Total Rusun Terbangun 54 Tower Block									

Sumber : BP2P-NT1, 2021

Tabel 4.13 Program Revitalisasi Rumah Susun Tahun Anggaran 2020

NO.	RUMAH SUSUN	LOKASI	JUMLAH UNIT	PERUNTUKAN	TAHUN PEMBANGUNAN
1	Rusun Ponpes Hidayaturrahman NW	Desa Pemenang, Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	3 Barak	SANTRI	2014
2	Rusun Ponpes Nujumul Huda	Desa Batu Samban Kec. Lembar Kab. Lombok Barat	6 Barak	SANTRI	2013
3	Rumah Susun Universitas NW	Kelurahan Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram	37 Unit	MAHASISWA	2018
4	Rumah Susun DKP	Desa Labuan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur	114 Unit	MBR	2016
Total Revitalisasi Rusun 4 Tower Block					

Sumber : BP2P-NT1, 2021

Untuk tahun 2020 tidak ada program pembangunan Rumah Susun, dari 54 tower blok Rusun yang sudah terbangun sampai dengan tahun 2021 terdiri 1.698 unit hunian dengan berbagai tipe serta jumlah lantai antara 2 sampai 5 lantai (sesuai ketentuan tinggi bangunan yang diperbolehkan). Sedangkan kelompok penerima manfaat dari rusun yang sudah terbangun, terdiri dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebanyak 986 unit, mahasiswa 385 unit, pelajar 20 unit, santri 66 unit, polri 143 unit, TNI 35 unit, pegawai kejaksaan 21 unit dan ASN 42 unit.

Untuk tahun 2021 pembangunan rumah susun sebanyak 4 TB yaitu 2 di Kota Mataram, 1 di Lombok Timur dan 1 di Dompu. Lokasi, jumlah unit dan peruntukannya terdapat pada tabel di atas.



Gambar 4.7 Potret Rusunawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Rumah Khusus

Berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus”, antara lain adalah kebutuhan untuk perumahan transmigrasi, permukiman kembali korban bencana alam, dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu, dan anak terlantar, pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan wilayah negara. Rumah Khusus disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Permen PUPR 20/2017 menjelaskan bahwa Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan Rumah Khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pasal 5 huruf a Permen PUPR 20/2017 menerangkan bahwa pembangunan Rumah Khusus merupakan kegiatan mendirikan bangunan rumah layak huni, dengan ketentuan: luas lantai bangunan rumah khusus paling rendah 28 m² (dua puluh delapan meter persegi) dan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pembangunan Rumah Khusus sampai dengan tahun 2021 mencapai 1.389 unit di NTB tersebar di 9 (sembilan) kab/kota di NTB kecuali untuk Kota Mataram. Pada tahun 2021

pembangunan Rumah Khusus sebanyak 312 unit terdiri dari rumah khusus untuk korban bencana banjir di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Tabel 4.14 Program Rumah Khusus di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN PER UNIT					JUMLAH
		s.d. 2016	2017	2018	2019	2021	
1	LOMBOK BARAT	0	1	0	0	0	1
2	LOMBOK TENGAH	25	0	40	25	0	90
3	LOMBOK TIMUR	104	52	0	0	0	156
4	SUMBAWA	0	100	50	25	0	175
5	DOMPU	9	52	50	0	107	218
6	KABUPATEN BIMA	196	0	0	0	185	381
7	SUMBAWA BARAT	140	0	42	25	0	207
8	LOMBOK UTARA	0	0	1	0	0	1
9	KOTA MATARAM	0	0	0	0	0	0
10	KOTA BIMA	0	0	90	50	20	160
NUSA TENGGARA BARAT		474	205	273	125	312	1.389

Sumber : BP2P NT-1, 2021

Tabel 4.15 Program Rumah Khusus di Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2021 Berdasarkan Peruntukannya

NO.	KABUPATEN/KOTA	PERUNTUKANNYA						JUMLAH
		Dokter	Polri	Nelayan	Atlet Berprestasi	Masy. Desa Wisata	Korban Bencana	
1	LOMBOK BARAT	1	0	0	0	0	0	1
2	LOMBOK TENGAH	0	0	50	0	40	0	90
3	LOMBOK TIMUR	0	4	152	0	0	0	156
4	SUMBAWA	0	0	175	0	0	0	175
5	DOMPU	0	9	102	0	0	107	218
6	KABUPATEN BIMA	0	2	47	0	0	332	381
7	SUMBAWA BARAT	0	0	207	0	0	0	207
8	LOMBOK UTARA	0	0	0	1	0	0	1
9	KOTA MATARAM	0	0	0	0	0	0	0
10	KOTA BIMA	0	0	0	0	0	160	160
NUSA TENGGARA BARAT		1	15	733	1	40	599	1.389

Sumber : BP2P NT-1, 2021

Dari jumlah unit yang sudah terbangun sebagian besar diperuntukkan bagi perumahan nelayan, yaitu sebanyak 733 unit rumah (52,7 % dari unit yang sudah dibangun). Selain itu dibangun rumah khusus untuk tenaga medis (Lombok Barat), dan pembangunan 1 (satu) unit

rumah untuk pelari nasional Lalu M. Zohri di Tanjung-Kabupaten Lombok Utara. Jumlah unit, tipe, dan peruntukan rumah khusus, selengkapnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16 Lokasi Program Rumah Khusus di NTB Sampai Dengan Tahun 2021

NO.	NAMA RUMAH KHUSUS	LOKASI	TIPE	UNIT	PERUNTUKAN	INSTANSI PEMBANGUN	TAHUN
KABUPATEN LOMBOK BARAT							
1	1 Rumah Khusus WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis)	RSUD Patut Patuh Patju, Lombok Barat		1	Dokter	Strategis	2017
KABUPATEN LOMBOK TENGAH							
2	1 Rumah Khusus Kecamatan Pujut	Dusun Awang, Desa Mertak Kecamatan Pujut		25	Nelayan	Kemenpera	2009
3	2 Rumah Khusus Desa Wisata Sade	Desa Sade, Kec. Pujut	28	40	Warga desa wisata Sade	Strategis	2018
4	3 Rumah Khusus NTB 3/2019	Desa Mertak, Pujut	28	25	Nelayan	SNVT	2019
KABUPATEN LOMBOK TIMUR							
5	1 Rumah Khusus Desa Ketapang Raya 1	Desa Ketapang Kecamatan Keruak		50	Nelayan	Strategis	2015
7	2 Rumah Khusus Desa Ketapang Raya 2	Desa Ketapang Kecamatan Keruak		50	Nelayan	Strategis	2015
8	3 Rumah Khusus Polri	Rumah Dinas Polsek Masbagik, Labuhan Lombok		4	Polri	Strategis	2016
9	4 Rumah Khusus NTB 3	Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak	36	52	Nelayan	SNVT	2017
KABUPATEN SUMBAWA							
16	1 Rumah Khusus NTB 1	Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano	36	100	Nelayan	SNVT	2017
17	2 Rumah Khusus Pulau Kaung	Desa Pulau Kaung, Kec. Buer	28	50	Nelayan	SNVT	2018
18	3 Rumah Khusus NTB 2/2019	Desa Aik Bari	28	25	Nelayan	SNVT	2019
KABUPATEN DOMPU							
19	1 Rumah Khusus Polri / Polres Dompus	Jl. Bhayangkara, Bada, Dompus		1	Polri	Strategis	2015

NO.	NAMA RUMAH KHUSUS	LOKASI	TIPE	UNIT	PERUNTUKAN	INSTANSI PEMBANGUN	TAHUN
20	2 Rumah Khusus Polri / Polsek Dompu Kota	Polsek Dompu Kota		2	Polri	Strategis	2016
21	3 Rumah Khusus Polri / Brimob Dompu	Brimob Dompu, Kecamatan Dompu		4	Polri	Strategis	2016
22	4 Rumah Khusus Polri / Rumah Dinas Kanit Polsek Hu'u	Polsek Hu'u Kecamatan Hu'u		2	Polri	Strategis	2016
23	5 Rumah Khusus NTB 2	Desa Hu'u Kecamatan Hu'u	36	52	Nelayan	SNVT	2017
24	6 Rumah Khusus Desa Keramat	Desa Keramat, Kec. Kilo	28	50	Nelayan	Strategis	2018
25	7 Hunian Tetap Daha Hu;u	Desa Daha Kecamatan Hu'u		107	Korban Bencana	SNVT	2021
KABUPATEN BIMA							
26	1 Rumah Khusus Bajo Pulo	Kampung Bajo Pulo, Kecamatan Sape		100	Korban Bencana	SNVT	2016
27	2 Rumah Khusus Langgudu	Desa Laju, Kecamatan Langgudu		47	Korban Bencana	SNVT	2016
28	3 Rumah Khusus Sape	Desa Bugis, Kecamatan Sape		47	Nelayan	SNVT	2016
29	4 Rumah Khusus Polri / Polsek Bima	Polsek Bima		2	Polri	Strategis	2016
30	5 Hunian Tetap Tambe Bolo	Desa Tambe Kecamatan Bolo		185	Korban Bencana	SNVT	2021
KABUPATEN SUMBAWA BARAT							
	1 Rumah Khusus Labuhan Lalar	Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang		40	Nelayan	Strategis	2010
	2 Rumah Khusus Labuhan Lalar 1	Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang		50	Nelayan	Strategis	2015
	3 Rumah Khusus Labuhan Lalar 2	Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang		50	Nelayan	Strategis	2015
	4 Rumah Khusus Poto Tano	Desa Poto Tano Kec. Taliwang	28	42	Nelayan	SNVT	2018
	5 Rumah Khusus NTB 4/2019	Desa Poto Tano, Kec. Poto Tano	28	25	Nelayan	SNVT	2019
KABUPATEN LOMBOK UTARA							

NO.	NAMA RUMAH KHUSUS	LOKASI	TIPE	UNIT	PERUNTUKAN	INSTANSI PEMBANGUN	TAHUN
10	1 Rumah Khusus Atlet	Desa Pemenang Barat, Kec. Pemenang	60	1	Atlet lari, Lalu M. Zohri	SNVT	2018
KOTA BIMA							
31	1 Rumah Khusus Jatiwangi 1	Desa Jatiwangi, Kec. Asakota	28	50	Korban Bencana	SNVT	2018
32	2 Rumah Khusus Jatiwangi 2	Desa Jatiwangi, Kec. Asakota	28	40	Korban Bencana	SNVT	2018
33	3 Rumah Khusus NTB 1/2019	Desa Jatiwangi, Kec. Asakota	28	50	Korban Bencana	SNVT	2019
34	4 Rumah Khusus Jatiwangi	Desa Jatiwangi, Kec. Asakota	28	20	Korban Bencana	SNVT	2021
TOTAL			1.389		UNIT RUMAH		

Sumber : BP2P NT-1, 2021

4.1.9 Profil Kelembagaan

Untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diperlukan kelembagaan. Struktur dinas yang menangani perumahan dan permukiman di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 8 Kelembagaan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kelembagaan yang menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat juga Pokja PKP dan Forum PKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota. Fungsi Pokja PKP adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP

Keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP diatur dalam permen PU nomor 12 tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dimana dalam penyelenggaraan PKP mengedepankan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat. Peran Masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Forum PKP, dalam hal penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP, pemanfaatan PKP, pemeliharaan PKP, dan Pengendalian PKP.

Berdasarkan data pokja PKP di Nusa Tenggara Barat, 10 (empat) kabupaten/kota telah memiliki pokja PKP dan Forum PKP telah terbentuk di 3 (tiga) kabupaten/kota, Pokja PKP dan Forum PKP yang sudah terbentuk cukup aktif dalam penangana PKP. Berikut detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.17 Kelembagaan di masing-masing kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021

No	KOTA/ KABUPATEN	POKJA PKP		Forum PKP	
		Jml. Anggota	No.SK Gubernur/Walikota/Bupati	Jml. Anggota	Nomor SK
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	36	600-251 Tahun 2021	80	07/KPTS/POKJA PKP NTB/2021
2	Kab. Lombok Barat	19	347/214.a/04-BAPPEDA/2021		
3	Kab. Lombok Tengah	17	Nomor 1 Tahun 2021	49	Nomor 14/2021
4	Kab. Lombok Timur	12	188.45/140/PD/2021	17	188.45/50/PD/2021
5	Kab. Sumbawa	25	Nomor 79 Tahun 2021		
6	Kab. Dompu	33	800/284/DPKP/2020		
7	Kab. Sumbawa Barat	21	188.4.45.489 Tahun 2021		
8	Kab. Lombok Utara	31	154/33/DLH-PKP/2021	16	800/146.b/Bappeda/2022
9	Kota Mataram	20	8/I/SEKDA/2021	19	1/SK/POKJA-PKP/IV/2021
10	Kota Bima	45	188.45/34/050/I/2021		

Sumber: Basis Data PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.1.10 Profil Pembiayaan Perumahan

Pembiayaan perumahan dapat dilakukan secara informal/ *Self Help*/ Swadaya, Formal, dan *hybrid*. pembiayaan swadaya merupakan pembiayaan yang diusahakan sendiri oleh

masyarakat. Pembiayaan perumahan formal adalah pembiayaan terkait dengan perumahan formal yang berupa pembiayaan yang melibatkan pemerintah dan bank-bank tertentu dengan menyangkut komponen-komponen, antara lain biaya pembebasan lahan, pematangan lahan, perijinan, penyediaan sarpras serta biaya konstruksi. Sedangkan pembiayaan *hybrid* adalah penyediaan perumahan lewat lembaga- lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, dan sebagainya.

Keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan formal memberikan jaminan lebih akan keterjangkauan pembiayaan perumahan untuk masyarakat dibandingkan pembiayaan swadaya. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk menjamin penyediaan rumah bagi seluruh warga negara. Pemerintah menjadi pelaku dalam penyediaan perumahan dengan sasaran MBR melalui dinas-dinas terkait. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembiayaan perumahan dilakukan secara swadaya, formal, dan *hybrid*. Sebagian besar perumahan yang sudah lama berdiri merupakan perumahan dengan pembiayaan swadaya. Perumahan dengan pembiayaan formal dikembangkan oleh developer swasta bekerjasama dengan pihak bank dan biasanya menyediakan rumah untuk golongan menengah dan atas. Sedangkan pembiayaan perumahan dengan sistem *hybrid* bentuk pembangunannya berupa pembangunan perumahan melalui lembaga keswadayaan masyarakat.

Selain melalui pembiayaan perumahan secara formal, pemerintah juga mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan program sebagai berikut:

1. Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Tabel 4.18 Alokasi APBD untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi NTB

Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
Total APBD Provinsi	5.230.285.800.854,-	5.449.754.766.128,-	5.405.179.978.133,-	5.538.931.855.427,-
Anggaran Dinas PKP Provinsi	246.732.594.400,-	206.439.753.010,50	158.410.394.624,-	333.388.962.621,-

Tabel 4.19 Alokasi APBD untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Disperkim Provinsi NTB

No.	Jenis Kegiatan Urusan PKP	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021
		Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
1	Program Pengembangan perumahan				
	Kegiatan Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	54.731.650.000	5.910.148.680	8.694.240.200	-

No.	Jenis Kegiatan Urusan PKP	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021
		Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
	Kegiatan Penyediaan dan pembangunan perumahan	-	10.000.000.000	9.062.872.390	-
	Kegiatan Pembangunan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program provinsi	527.580.700	1.120.461.700	-	1.011.015.100
Total 1		55.259.230.700	17.030.610.380	17.757.112.590,00	1.011.015.100
2	Program Pengembangan Permukiman				
	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	-	-	-	309.475.917.154
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha. Sampai dengan dibawah 15 Ha.	132.053.165.410	180.330.091.210	132.053.165.410	15.824.204.400
Total 2		132.053.165.410	180.330.091.210	132.053.165.410	325.300.121.554

Sumber : Dinas Perkim Provinsi Nusa Tenggara Barat

***) Jenis Kegiatan Urusan PKP merupakan kegiatan pengembangan perumahan yang dimonitoring oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Kegiatan urusan PKP yang didanai dari DIPA Dinas PKP Provinsi masih berbentuk pembangunan prasarana permukiman seperti perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan PSU.

Tabel 4.20 Alokasi Anggaran Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/ Kota	Alokasi APBD			
	APBD Tahun 2020	Anggaran Dinas PKP Kab/ Kota Tahun 2020	APBD Tahun 2021	Anggaran Dinas PKP Kab/ Kota Tahun 2021
Kab. Lombok Barat	1.991.276.559.288,-	16.355.438.446,-	1.709.663.498.661,-	30.746.170.185,-
Kab. Lombok Tengah	2.052.823.200.755,-	-	2.181.621.072.012,-	34.337.683.490,-
Kab. Lombok Timur	2.769.650.639.458,-	37.432.022.000,-	2.822.731.337.872,-	-
Kab. Sumbawa	1.856.143.716.452,-	76.205.427.365,-	1.726.955.311.741,-	26.539.771.092,-
Kab. Dompu	1.051.820.705.161,-	-	1.039.875.296.777,-	20.490.994.560,-
Kab. Bima	1.922.557.290.449,-	-	1.850.150.000.000,-	-
Sumbawa Barat	1.069.526.526.257,-	-	965.702.248.855,-	-
Kab. Lombok Utara	1.007.697.925.344,-	26.617.550.068,-	915.147.585.249,-	19.788.507.232,-
Kota Mataram	1.525.018.922.683,-	70.434.413.333,-	1.441.077.739.337,-	37.891.978.959,-
Kota Bima	782.163.084.634,-	14.865.608.300,-	764.747.135.434,-	3.794.269.000,-

Sumber : Dinas PKP pada masing-masing Kab/Kota

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini tidak terlepas dari perubahan anggaran dan pengurangan dana transfer dari pusat akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan penanggulangan Covid 19. Postur APBD

terbesar di NTB adalah di kabupaten Lombok Timur, sebanyak Rp. 2.769.650.639.458,- di tahun 2020 dan Rp.2.822.731.337.872,- di tahun 2021. Mengingat Lombok Timur sebagai kabupaten yang memiliki penduduk terbanyak di NTB, wajar jika memiliki APBD terbesar dan Postur anggaran ini selaras juga dengan Kota Bima yang memiliki penduduk paling sedikit sehingga APBD-nya masih dibawah 1 triliun.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat dari tahun 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini tidak terlepas dari perubahan anggaran dan pengurangan dana transfer dari pusat akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan penanggulangan Covid 19. Postur APBD terbesar di Pulau Sumbawa adalah di kabupaten Sumbawa, yaitu sebanyak Rp.1.856.143.716.452,- di tahun 2020 dan Rp.1.726.955.311.741,- di tahun 2021. Mengingat Sumbawa sebagai kabupaten yang memiliki penduduk terbanyak di Pulau Sumbawa, wajar jika memiliki APBD terbesar.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima dari tahun 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini tidak terlepas dari perubahan anggaran dan pengurangan dana transfer dari pusat akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan penanggulangan Covid 19. Postur APBD terbesar di 3 kabupaten/kota ini adalah di kabupaten Lombok Bima, sebanyak Rp.1.922.557.290.449,- di tahun 2020 dan Rp.1.850.150.000.000,- di tahun 2021. Mengingat Kabupaten Bima sebagai kabupaten yang memiliki penduduk terbanyak, wajar jika memiliki APBD terbesar dan Postur anggaran ini selaras juga dengan Kota Bima yang memiliki penduduk paling sedikit sehingga APBD-nya masih dibawah 1 triliun.

Porsi Anggaran yang terbagi untuk masing-masing OPD terutama untuk dinas PKP rata-rata sebesar 2% jika dibandingkan dengan jumlah APBD secara keseluruhan di setiap kota/kabupaten, hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penanganan perumahan dan kawasan permukiman bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Selain itu banyaknya OPD dan adanya kebijakan alokasi dana desa dari APBD cukup menguras porsi untuk masing-masing OPD. Akan tetapi anggaran untuk Dinas PKP di kota/kabupaten seperti tabel diatas tidak bisa sepenuhnya menggambarkan pendanaan untuk penanganan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, karena anggaran untuk perumahan dan kawasan permukiman biasanya juga tersebar di beberapa OPD yang lain, seperti di Dinas PU, Dinas LH, Dinas Kesehatan, dinas terkait lainnya, dan juga melalui dana desa atau dana kelurahan.

4.2 Profil Permukiman Provinsi NTB

Permukiman adalah kawasan lingkungan hidup baik tingkat desa maupun kota dan dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan; diasumsikan mampu menampung sekurang-kurangnya 1.000 unit sampai dengan 3.000 unit (asumsi mengacu pada jumlah unit Lisiba).

Berdasarkan definisi perundangan di atas, maka area yang bercirikan permukiman dapat secara jelas dilihat pada area perkotaan utama atau area yang mulai terbentuk sebagai perkotaan yang ditandai dengan sebaran pembangunan permukiman baru oleh pengembang.

Kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang terdiri dari permukiman kawasan perkotaan dan permukiman kawasan perdesaan. Berdasarkan dari data BPS, Jumlah luasan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 58.152,39 Ha. Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten yang memiliki luasan permukiman paling tinggi yaitu seluas 12.794,06 Ha sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan luasan 1.585,69 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran luas permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21 Luasan Kawasan Permukiman Wilayah Perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Luas Permukiman (Ha)
1	Kab. Lombok Barat	7.837,19
2	Kab. Lombok Tengah	14.084,00
3	Kab. Lombok Timur	12.794,06
4	Sumbawa	4.914,66
5	Dompu	3.316,20
6	Bima	4.562,25
7	Sumbawa Barat	1.585,69
8	Kab. Lombok Utara	3.427,58
9	Kota Mataram	4.101,33

No.	Kabupaten/Kota	Luas Permukiman (Ha)
10	Kota Bima	1.529,44
Luas Total (Ha)		58.152,39

Sumber : Bappeda Prov. NTB, 2022



Gambar 4.9 Potret Kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peta 4.2 Peta Sebaran Permukiman Provinsi NTB



4.2.1 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di NTB

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu fenomena perubahan karakteristik kawasan ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk yang dikarenakan oleh tiga hal yaitu: penambahan penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan perubahan ciri dari desa menjadi kota. Perubahan karakteristik permukiman merupakan salah satu tantangan yang timbul sebagai implikasi yang harus mampu dijawab oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan permukiman yang layak huni, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur permukiman yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan harus mampu diimbangi pula dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang tepat.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Perwujudan permukiman menjadi layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif dan kolaboratif. Penanganan berbagai aspek permukiman kumuh sangat diperlukan untuk menjamin penuntasan permasalahan yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala lingkungan atau komunitas, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota. Penanganan permukiman kumuh merupakan upaya bersama pelaku pembangunan untuk mencapai perkembangan kota yang berkesinambungan.

Didalam Perda No.15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB dinyatakan bahwa :

1. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan luasan 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penetapan lokasi sebagai perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan kriteria:

- kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
- tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;

- kualitas bangunan; dan
 - kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

a. Pencegahan

Pencegahan dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pencegahan bertujuan agar tidak terjadi:

- ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- ketidakteraturan dan kepadatan bangunan;
- ketidaklengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan/atau
- penurunan kualitas rumah, perumahan, dan/atau permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pencegahan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

- Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan dokumen perizinan, standar teknis, dan persyaratan kelaikan fungsi.
- Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan teknis, pendampingan, dan pelayanan informasi.

b. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas dilakukan dengan pola penanganan :

1. Pemugaran

- a. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum jika terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- b. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

- c. Pemugaran dapat dilakukan dengan ketentuan lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.

2. Peremajaan

- a. Peremajaan merupakan pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
- b. Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat.
- c. Peremajaan dapat dilakukan dengan ketentuan memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan/atau sedang dengan status tanah legal.
- d. Peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan bersama Pemerintah Daerah dan setiap orang.

3. Pemukiman Kembali

- a. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan lokasi perumahan dan permukiman dari lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, rawan bencana, kumuh, dan/atau lokasi yang alih fungsi menurut rencana tata ruang ke lokasi yang sesuai untuk perumahan dan permukiman.
- b. Pemukiman kembali bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- c. Pemukiman kembali hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - Lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat/sedang/ ringan dengan status tanah ilegal;
 - lokasi rawan bencana dan/atau terkena dampak bencana; dan/atau
 - alih fungsi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

4. Pengelolaan

- a. Pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- b. Tanggung jawab Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk:
 - norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - bantuan teknis dan bimbingan teknis; dan
 - bantuan operasi dan pemeliharaan.
- c. Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - menetapkan peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kebijakan pemerintah;
 - melakukan pemeliharaan dan perawatan hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkala;
 - menetapkan badan usaha atau badan hukum yang melakukan pemeliharaan dan perawatan; dan
 - melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. Tanggung jawab masyarakat diwujudkan dengan menjaga serta melakukan pemeliharaan dan perawatan pada lokasi hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

5. Pengawasan

- a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkala.
- b. Pengawasan peningkatan kualitas sesuai dengan tata ruang wilayah dan kearifan lokal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/ PRT/M/ 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pasal 18 (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah sebagai berikut :

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari Bangunan gedung mencakup:
 - a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk
 - b. Kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
 - c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan
- (2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup :
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.
- (3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
 - a. Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 90 liter/orang/hari.
- (4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:
 - a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air.
 - b. Ketersediaan drainase sebagaimana merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir menimbulkan genangan.
 - d. Tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa Pemeliharaan rutin dan/atau Pemeliharaan berkala.

- e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis dan penutup atau telah terjadi kerusakan.
- (5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - 1. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - 2. Tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat.
- (6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:
- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut :
 - 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala rumah tangga;
 - 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS3R (mengurangi). *Reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (daur ulang) pada skala permukiman;
 - 3. Gerobak sampah, motor roda 3 (tiga) dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - 4. Tempat pengumpulan sampah skala perumahan atau kelompok bank sampah.
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Pewadahan dan pemilahan domestic;
 - 2. Pengumpulan lingkungan;
 - 3. Pengangkutan lingkungan;
 - 4. Pengolahan lingkungan.

- c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
1. Pemeliharaan rutin; dan/atau
 2. Pemeliharaan berkala.
- (7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidakterediaan. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
1. Pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 2. Jalan lingkungan yang memudahkan untuk akses kendaraan pemadam kebakaran;
 3. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada instansi pemadam kebakaran; dan
 4. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
 5. Alat pemadam api ringan (APAR); dan Peralatan pendukung lainnya.
- (8) Kriteria kekumuhan ditinjau dari ruang terbuka hijau mencakup:
1. Tidak tersedianya ruang terbuka hijau, atau permukiman tidak memiliki RTH. (RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan perkotaan);
 2. Tersedianya ruang terbuka public seluas 20% (dua puluh persen) dari luas kelurahan, 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat dengan tutupan vegetasi; dan/atau
 3. Kualitas ruang terbuka hijau buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruhnya terjadi kerusakan.

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di NTB seluas 612,83 (enam ratus dua belas koma delapan puluh tiga) Ha tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten / kota dengan 61 (enam puluh satu) lokasi, 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan, dan 54 (lima puluh empat) kelurahan berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 600-231 Tahun 2023.

Tabel 4.22 Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi NTB tahun 2023

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)			
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	
1	Mataram (SK NOMOR : 1096/VII/2020)	Ampenan	4	Ampenan Selatan	3,52	-	-	-	-	-	-	
				Bintaro	4,42							
				Banjar	6,21							
				Dayan Peken	7,4							
		Sekarbela	2	Jempong Baru	3,78	2	Jempong Baru & Karang Pule	-	-	-	-	-
				Karang Pule	8,17							
		Mataram	1	Punia	4,39	-	-	-	-	-	-	-
		Selaparang	2	Monjok	4,66	-	-	-	-	-	-	-
				Rembiga	2,92							
		Cakranegara	5	Cakranegara Barat	2,28	-	-	-	-	-	-	-
				Cilinaya	3,25							
				Mayura	0,86							
				Cakranegara Selatan Baru	5,06							
				Sayang-sayang	5,62							
	Sandubaya	5	Abian Tubuh	7,73	1	Turida	12,04	-	-	-		
			Baru									
			Babakan	5,94								
			Bertais	8,62								
			Selagalas	9,86								
			Dasan Cermen	5,87								
Sub Total					100,56	Sub Total		12,04	Sub Total			0
2	Lombok Barat (SK NOMOR : 649.A/42/04-BAPPEDA/2020)	Batu Layar	3	Meninting	3,46	3	-	-	-	-	-	
				Sandik	5,34							
				Senteluk	4,5							
		Gunung Sari	3	Jatisela	3,07	-	-	-	1	Sesela	15,74	
				Midang	6,21							
				Gunung Sari	9,96							
		Lingsar	5	Sari Baya	2,13	5	-	-	-	-	-	-
				Lingsar	2,86							
				Gontoran	2,65							
				Peteluan Indah	3,25							
			Bug-bug	1,95								

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)		
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
		Narmada	6	Lembuak	2,1	-	-	-	-	-	-
				Lembuak Kebon	2,12						
				Narmada	4,8						
				Selat	3,49						
				Batu Kute	2,22						
				Gerimak	2,58						
		Kuripan	2	Iting	1,9	1	Tongkek	11,5	-	-	-
				Monto	1,19						
		Gerung	4	Menang	1,24	-	-	-	-	-	-
				Dasan Geres	3,63						
				Perigi	3,53						
				Babussalam	3,96						
		Sekotong	6	Madak Belek Pantai 1	0,53	-	-	-	-	-	-
				Madak Belek Pantai 2	1,01						
				Madak Belek 3	4,23						
				Sekotong Tengah	5,38						
				Taman Baru	3,53						
				Cendi	5,55						
				Manik							
Lembar	3	Lembar Selatan	4,69	-	-	-	-	-	-		
		Labuan Tereng	2,24								
		Jakem	3,3								
Labuapi	8	Kuranji	3,15	2	Perampunan Barat	14,99	3	Muhajirin	15,26		
		Kuranji Dalang	3,78								
		Merembu	7,33								
		Bagek Polak	6,82								
		Bagek Polak Barat	4,14								
		Bajur	5,99								
Labuapi	4,3										
Kediri	2	Kediri	2,19	-	-	-	8	Kediri Selatan	25,24		
		Dasan Baru	5,79					Montong Are	17,55		
								Gelogor	19,91		

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)				
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)		
									Banyu Mulek	27,51			
									Lelede	15,91			
									Rumak	17,54			
									Ombe Baru	15,15			
									Jagaraga Indah	26,96			
Sub Total					152,09	Sub Total			37,64	Sub Total		230,93	
3	Lombok Utara (SK NOMOR : 155/33-1/DLH-PKP/2021)	Pemenang	1	Menggala	7,18	1	Malaka	13,53	3	Pemenang Barat	33,21		
										Pemenang Timur	36,26		
										Gili Indah	113,76		
		Tanjung	3		Medana	5,57	2		Sigar	12,78	2	Jenggala	17,22
					Samaguna	4,6			Sokong	13,79		Tanjung	50,33
					Tegal Maja	6,02							
		Gangga	-	-	-	-	1	Sambik Bangkol	12,52	3	Gondang	47,93	
											Segara Katon	23,73	
											Rempek	16,58	
		Kayangan	3		Pendua	9,05	-	-	-	3	Kayangan	39,13	
					Gumantar	8,27					Santong	45,2	
					Selengen	7,01					Dangiangan	17,41	
		Bayan	2		Akar-akar	9,17	2		Loloan	11,51	2	Anyar	36,68
Andalan	3,84				Senaru	13,94			Karang Bajo	16,58			
Sub Total					60,71	Sub Total			78,07	Sub Total		494,02	
4	Lombok Tengah (SK NOMOR : 278 TAHUN 2021)	Praya	6	Sernayan	2,25	-	-	-	1	Prapen	16,76		
				Tiwugalih	2,6								
				Leneng	7,42								
				Panjisari	2,31								
				Renteng	2,92								
				Praya	4,42								
		Kopang	-	-	-	-	-	-	-	4	Kopang Rembige	16,6	
											Montong Gamang	25,11	
											Dasan Baru	15,5	
											Darmaji	30	
Pujut	5		Kuta Dua	5,23	1	Mertak (Sokat)	14,99	9	Kuta	17,18			
			Rembitan (Lentek 1, Lentek	9,49					Mertak (Awang)	20,74			

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)								
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)						
				2)													
				Tumpak (Bongak, Bunlesung)	6					Rembitan (Penyalun, Kukun, Rebuk)	15,22						
				Sengkol (Piang)	9,84					Sengkol (Gerupuk)	23,98						
				Sengkol (Dusun Selak)	3,23					Sukadana	23,02						
											Tumpak (Baturiti, Tumpak 1, Mawun, Aregulin g)	81,93					
											Tumpak (Pancor)	25,97					
											Tanak Awu	15,38					
										Ketare	51,1						
		Praya Barat	3	Selong Belanak (Kampung Nelayan)	1,3					Mekarsari	18,84						
					Selong Belanak (Rujak Praya)	7,99	-	-	-	5	Selong Belanak (Dsn. Baru, Kapal, Terake)	22,61					
					Selong Belanak (Rujak Tengah)	9,01					Batujaai	44,65					
											Penujak (Bagean, Mentor)	50,79					
		Praya Timur	2	Bilelendo (Aur Manis)	4,77					4	Mujur	23					
							Bilelendo (Kelongkong)	2,29	-		-	-		Beleka	56,61		
												Ganti	25				
												Semoyang	25				
		Jonggat	-	-	-	-	-	-	2	Labulia	40,8						
																Puyung	32,53
		Batukliang	-	-	-	-	-	-	3	Mantang	28						
																Aik Darek	17,3
																Tampak Siring	25
		Pringgarate	-	-	-	1	Pemepek	14,2	-	-	-						
Sub Total					81,07	Sub Total			29,19	Sub Total		810,11					
5	Lombok Timur (SK NOMOR 188.45/190/PD/202)	Sakra	5	Rumbuk Timur	3,18												
					Keselet	4,12	-	-	-	-	-	-					

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)			
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	
2)				Songak	4							
				Rumbuk	9,84							
				Kabar	9,23							
		Terara	2		Rarang	3,05	-	-	-	1	Lando	18,21
					Terara	6,6						
		Masbagik	3		-	-	-	-	-	-	-	-
					Masbagik Timur	6,7						
					Masbagik Utara	3,68						
		Labuhan Haji	8		Ijobalit	4,92	1	Teros	12,73	-	-	-
					Tanjung	4,33						
					Labuhan haji	6,43						
					Penedagandor	3,95						
					Suryawangi	4,52						
					Kertasari	3,48						
					Banjar Sari	4,38						
					Geres	5,83						
		Sukamulia	5		Dasan Lekong	8,66	-	-	-	-	-	-
					Sukamulia timur	8,44						
					Nyiur Tebel	5,36						
					Sukamulia	2,54						
					Paok Pampang	7,18						
		Keruak	3		Ketapang Raya	1,95	-	-	-	1	Tanjung Luar	40,85
					Mendana Raya	3,32						
	Maringkik			9,72								
Sakra Barat	-	-	-	1	Bungting	11,64	-	-	-			
Sakra Timur	-	-	-	-	-	-	1	Lepak	90,21			
Pringgabaya	-	-	-	-	-	-	-	4	Labuhan Lombok	112,52		
									Pohgading	62,32		
									Apitaik	60,42		
									Pringgabaya	152,47		
Suela	-	-	-	-	-	-	1	Perigi	35,71			
Lenek	-	-	-	-	-	-	-	2	Lenek Pesiraman	55		
									Lenek	73,2		

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)			
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	
		Aikmel	-	-	-	-	-	-	1	Aikmel	54,06	
		Wanasaba	3	Bebidas 1	4,56	-	Bebidas 4	13,30	4	Wanasaba Lauk	57,88	
				Bebidas 2	8					Wanasaba Lauk	48,36	
				-	-					Tembeng Putek	17,73	
										Bebidas 3	19,3	
		Sambelia	1	Darakunci	7,02	-	-	-	1	Senanggalih	864,95	
		Pringgasela	1	Rempung	6,7	-	-	-	-	-	-	
		Sembalun	1	Sembalun	7,39	2	Sembalun Timba Gading	13,91	3	Sembalun Bumbung	34,29	
										Bilok Petung	13,1	Sembalun Lawang
										Sajang	28,47	
		Jerowaru	9		Ekas Buana 1	8,12	-	-	-	-	-	-
					Ekas Buana 2	2,68						
					Ekas Buana 3	1,5						
					Ekas Buana 4	0,71						
					Batunam par Selatan 1	5,58						
Batunam par Selatan 2	6,34											
Telong Elong 1	2,66											
Telong Elong 2	1,6											
Jerowaru	1,6											
Sub Total					199,87	Sub Total			64,68	Sub Total		1856,02
6	Sumbawa (SK NOMOR 860 TAHUN 2022)	Sumbawa	6	Samapuin	1,91	1	Bugis	13,78	1	Brang Biji	15,48	
				Seketeng	3,53							
				Pekat	5,15							
				Brang Bara	4,65							
				Lempeh	2,17							
		Umasima	4,11									
		Labuhan Badas	-	-	-	1	Karang Dima	14,5	2	Labuhan Sumbawa (Jempol)	41,3	
								Labuhan Sumbawa	24,78			
Alas	7	Marente	1,8	1	Pulau Bungin	13,14	-	-	-			
		Labuan Alas	4,3									

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)		
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
				Baru	5,4						
				Dalam	5,8						
				Juran Alas	6,7						
				Kalimango	7,1						
				Luar	8,3						
		Alas Barat	-	-	-	1	Gontar	12,6	1	Labuan Mapin	16,1
		Buer	1	Labuhan Burung	7,5	-	-	-	-	-	-
		Empang	-	-	-	-	-	-	Empang Bawah	15,9	
	Jotang								22,97		
	Empang Atas								26		
		Lape	-	-	-	-	-	-	Lape	26,8	
		Lopok	2	Lopok	9,3	1	Langam	10,4	-	-	-
				Berora	2,93						
		Maronge	1	Simu	7,4	1	Maronge	13,2	-	-	-
		Moyo Hilir	2	Kakiang	5,1	1	Moyo Mekar	14,4	-	-	-
				Poto	2,05						
		Moyo Utara	1	Pungkit	10	1		12,3	1	Penyaringg	20,1
							Sebewe				
		Plampang	-	-	-	1	Plampang	14,3	1	Selante	17,6
		Rhee	1	Rhee	6,9	-	-	-	-	-	-
		Terano	1	Banda	2,16	1	Labuan Aji	13,8	1	Labuan Jambu	22,5
		Unter Iwes	2	Jorok	6,6	2	Nijang	12,1	1	Kerato	17,8
				Pungka	6,9		Uma Beringin	12,9			
		Utah	4	Stowe Brang	4	1	Jorok	11,2	-	-	-
				Motong	4,4						
				Orong Bawah	7,1						
				Tengah	7,3						
		Batu Lanteh	1	Kelungku ng	1,44	-	-	-	-	-	-
		Labangka	-	-	-	-	-	-	1	Suka Damai	15,28
				Batu Bangka	4,81						
				Labuan Aji	5,21						
		Lenangguar	-	-	-	2	Lenangguar	11,43	-	-	-
							Tatebal	10,06			
		Moyo Hulu	-	-	-	1	Sempe	10,71	-	-	-

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)				
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)		
Sub Total			162,02			Sub Total 200,82			Sub Total 282,61				
7	Sumbawa Barat (SK NOMOR 188.4.45.527 TAHUN 2020)	Taliwang	5	Dalam	4,83	1	Menala	10,44	4	Arab Kenangan	18,55		
				Sampir	6,04					Telaga Bertong	18,75		
				Dalam 2	0,49					Labuhan Lalar	24,35		
				Bugis	7,33					Kertasari	59,72		
				Kuang	8,69								
		Maluk	-	-	-	-	-	1	Maluk	136,54			
		Poto Tano	-	-	-	-	-	1	Poto Tano	16,86			
Seteluk	-	-	-	-	-	-	2	Seteluk Tengah	29,4				
								Seteluk Atas	18,51				
Sub Total			27,38			Sub Total 10,44			Sub Total 322,68				
8	Dompu (SK NOMOR : 800/97/DPKP/2023)	Dompu	5	Bada	5,24	1	Dorebara dan Mbawi Kawasan Tolomba' a	14,93	3	Kawasan Sorisilo (Desa Bada, Bali, Karijawa)	30,46		
				Mangge Asi kawasan Doroman gge II	4,91					Kawasan Doroman gge I (Desa Dorotangga, Manggae si)	30,79		
				O'o Kawasan Doroman gge III	0,66					Kawasan Sorilaju I (Desa kandai Satu, Kareke, Potu)	29,19		
				Kandai Satu	3,13								
				Mbawi	2,45								
		Woja	7	Kandai Dua, Kawasan Sambiboko II	8,41	3	Kawasan Meciangi II (Desa Maria, Ntori, Raba Tumpu, Rato Baka, Teta, Wawo barat, Wawo Timur)	13,17	3	Kawasan Sambiboko I (Desa Kandai Dua, Simpasai)	44,18		
				Kandai Dua, Kawasan Sambiboko III	6,92								
				Simpasai	9,08					Kawasan Doronawa II (Desa Rasanggaro Timur,	14,64	Kawasan Meciangi I (Desa Montabaru)	29,73
				Wawonduru	2,30								
				Baka Jaya	1,02								

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)		
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
				Bara, Kawasan Madarutu II	7,58		Selaparang Barat)				
				Bara, Kawasan Madarutu III	1,45						
			-	-	-		Kawasan Madarutu I (Desa Dori Dunga, Mada Libi, Mada Ntonggu, Mada Oi Ua, Sori Foo	10,15		Kawasan Doronawa I (Desa Baka Jaya, Matua, Nowa)	29,32
		Pajo	-	-	-	-	-	-	1	Kawasan Lanangga (Desa Fupu, Ladore, Manggadua, Lawiti, Pelita, Restu)	17,84
		Kempo	-	-	-	-	-	-	1	Kawasan Dorokaroma (Desa Soro, Soro Barat)	16,07
		Hu'u	4	Daha, Kawasan Puma I	5,20	-	-	-	-	-	-
				Hu'u Kawasan Puma II	8,85						
				Hu'u Kawasan Puma III	2,20						
				Hu'u Kawasan Puma IV	3,85						
		Manggalewa	3	Doromelo Kawasan Manggera'a I	3,85	-	-	-	-	-	-
				Doromelo Kawasan Manggera'a II	3,76						
				Soriutu Kawasan Manggera'a III	7,43						

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)					
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)			
9	Kabupaten Bima (SK NOMOR 188.45/201/07.1/T AHUN 2022)	Pekat	-	-	-	3	Kawasan Kaldera I Desa Karang Juli	14,94	-	-	-			
							Kawasan Kaldera II (Desa Calabai Atas, Sigi, Tente)	13,46						
							Kawasan Kaldera III (Desa Kalijaga I, Suka Damai, Suka Mulya)	10,61						
		Kilo	3	Lasi Kawasan Rastakilo II	7,86	-	-	-	1	Kawasan Rastakilo I (Desa Kramat, Lasi, Malaju)	19,40			
				Kiwu Kawasan Rastakilo III	4,25									
				Kiwu Kawasan Rastakilo IV	5,64									
		Sub Total					106,04	Sub Total			91,90	Sub Total		246,98
		9	Kabupaten Bima (SK NOMOR 188.45/201/07.1/T AHUN 2022)	Ambalawi	2	Nipa	6,506	-	-	-	-	-	-	
						Rite	7,048							
				Bolo	3	Sondosia	8,65	1	Darussalam	13,92	6	Tambe & Rasabou	42,9	
Nggembe	4,56					Sanolo	25,75							
Tumpu	4,41					Rato, Timu, Leu, Kananga	81,02							
Woha	1			Penapali	7,66	1	Dadibou	11,83	7	Nisa	17,66			
										Tente	29,97			
										Rabakodo	24,56			
										Naru	21,06			
										Samili	21,04			
Woha & Palibelo	-	-	-	-	-	-	1	Donggobolo	17,62					
								Kalampa	30,01					
Palibelo	5	-	Belo	9,71	1	Panda	12	2	Talabiu & Padolo	35,47				
			Bre	8,39					Nata	23,6				

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)		
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
				Tonggon doa	8,17						
				Tonggori sa	9,4				Teke	25,61	
				Ragi	6,69						
		Belo	-	-	-	-	-	-	3	Cenggu	16,77
										Ngali	32,21
										Renda	29,44
		Sape	-	-	-	2	Na'e	14,36	6	Bugis	55,01
										Rasabou	15,54
										Naru & Naru Barat	21,6
							Sangia	11,29		Oi Maci	20,97
										Rai Oi	17,33
										Parangin a	19,17
		Madapangga	3	Dena	7,209	-	-	-	-	-	-
				Rade	7,21						
				Bolo	6,408						
		Lambu	5	Lanta	6,529	-	-	-	1	Soro/Mel ayu	24,322
				Lanta Barat	2,171						
				Kaleo	6,642						
				Sumi	6,8						
				Simpasai	1,515						
		Wawo	2	Maria Utara	3,649	-	-	-	-	-	-
				Raba	1,276						
		Langgudu	2	Karumbu	2,133	-	-	-	-	-	-
				Rompo	1,847						
		Lambitu	1	Sambori	6,588						
		Wera	1	Sangiang	6,698				1	Tawali	17,456
		Donggo	2	O'o	6,48	-	-	-	1	Mbawa	20,411
				Kala	6,578						
		Soromandi	3	Punti	6,474	-	-	-	-	-	-
				Sai	7,695						
				Bajo	7,301						
		Sanggar	3	Kore	7,032	-	-	-	-	-	-
				Sandue	6,42						
				Oi Saro	6,438						
		Tambora	1	Labuan Kenanga	1,74						

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)				
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)		
		Monta	3	Tangga	1,888	-	-	-	-	-	-		
				Sie	1,033								
				Simpasai	1,172								
		Parado	2	Parado Rato	1,789	-	-	-	-	-	-		
				Parado Wane	1,065								
Sub Total					210,974	Sub Total			63,4	Sub Total			686,499
	Kota Bima (SK NOMOR 188.45/492/650/XII /2021)	Asakota	-	-	-	-	-	-	2	Kawasan Sapaga (Kel. Jatibaru, Jatibaru Timur)	16,75		
										Kawasan Kolo (Desa Kolo, Ule)	17,43		
			Rasanae Barat dan Asakota	-	-	-	1	Kawasan Ranggo (kel. Jatiwangi , Nae, Sarae)	12,31	1	Kawasan Dana taraha (Kel. Dara, Paruga, Melayu, Tanjung)	23,25	
			Raba							1	Kawasan Kotabaru (Pentaraga, Rabangodu Utara)	8,55	
			Raba dan Rasanae Timur	-	-	-	-	-	-	1	Kawasan Matakando (Kel. Matakando, Penatoi, Rite, Ntobo, Pananae, Kendo, Nungga)	25,35	
			Rasanae Timur dan Raba	2	Kawasan Nitu, Kel. Nitu	1,04	-	-	-	1	Kawasan Dodu (Kel. Dodu, Kodo, Lampe, Kumbe, Oi Mbo, Rasabaou Timur)	23,98	
			Kawasan Lelamase, Kel. Lelamase		6,08								

No	Kabupaten / Kota dan Nomor SK	Kecamatan	Kewenangan Kab/Kota (<10 Ha)			Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)			Kewenangan Pusat (>15 Ha)		
			Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Jumlah Kawasan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
		Mpunda dan Raba	-	-	-	1	Kawasan Sambimaci (Kel. Mandemangi, Sambinae, Rabangodu Selatan)	12,34	-	-	-
Sub Total			7,12			Sub Total			24,65		
TOTAL		1107,83			612,83			5045,16			

Tabel 4.23 Kondisi Permukiman Kumuh 10-15 Ha dalam Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KOTA/ KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI KUMUH / NAMA KAWASAN	TIPOLOGI PERMUKIMAN
1	Lombok Timur	Semalun	Semalun Timba Gading	Semalun Timba Gading	Permukiman di perbukitan dan masuk dalam Kawasan KSPN
2	Lombok Timur	Semalun	Bilok Petung	Bilok Petung	Permukiman di perbukitan dan masuk dalam Kawasan KSPN
3	Lombok Timur	Labuhan Haji	Teros	Kokok Daya, Timba Timuk, Selungkep, Timba Daya	Permukiman di dataran rendah
4	Lombok Timur	Sakra Barat	Bungtiang	Bungtiano	Permukiman di dataran rendah
5	Lombok Timur	Suela		Dusun Limbungan	Permukiman di dataran rendah
6	Kota Bima	Rasanae Barat	Dara	Kawasan Dana Taraha	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir serta rawan banjir
7	Mataram	Sandubaya	Turida	Turida	Permukiman di dataran rendah (di pusat Kota dan perekonomian)
8	Lombok Barat			Tongkek	Permukiman di dataran rendah
9	Lombok Barat	Labuapi	Karang Bongkot	Penyangga	Permukiman di dataran rendah
10	Lombok Barat		Perampuan		Permukiman di dataran rendah
11	Lombok Tengah	Pujut	Mertak	Sokat	Permukiman di dataran rendah
12	Lombok Tengah	Pringgarate	Pemepek	Pemepek	Permukiman di dataran rendah
13	Sumbawa	Sumbawa	Bugis	Bugis	Permukiman di dataran rendah
14	Sumbawa	Labuhan Badas	Karang Dima	Karang Dima	Permukiman di dekat bantaran sungai dan rawan banjir
15	Sumbawa	Alas	Pulau Bungin	Pulau Bungin	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir
16	Sumbawa	Alas Barat	Gontar	Gontar	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir dan kepulauan
17	Sumbawa	Lopok	Langam	Langam	Permukiman di dataran rendah
18	Sumbawa	Maronge	Maronge	Maronge	Permukiman di dataran rendah
19	Sumbawa	Moyo Hilir	Moyo Mekar	Moyo Mekar	Permukiman di dataran rendah
20	Sumbawa	Moyo Utara	Pungkit	Pungkit	Permukiman di dataran rendah
21	Sumbawa	Moyo Utara	Sebewe	Sebewe	Permukiman di dataran rendah
22	Sumbawa	Plampang	Plampang	Plampang	Permukiman di dataran rendah
23	Sumbawa	Terano	Labuan Aji	Labuan Aji	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir
24	Sumbawa	Unter Iwes	Nijang	Nijang	Permukiman di dataran rendah
25	Sumbawa	Unter Iwes	Uma Beringan	Uma Beringan	Permukiman di dataran rendah
26	Sumbawa	Utan	Jorok	Jorok	Permukiman di dataran rendah
27	Dompu	Woja	Riwo	Riwo	Permukiman di dataran rendah
28	Dompu	Woja	Mumbu	Mumbu	Permukiman di dataran rendah
29	Dompu	Woja	Serakapi	Serakapi	Permukiman di dataran rendah
30	Sumbawa Barat	Taliwang	Menala	Menala	Permukiman di dataran rendah
31	Kabupaten Bima	Bolo	Darussalam	Darussalam	Permukiman di dataran rendah

NO	KOTA/ KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI KUMUH / NAMA KAWASAN	TIPOLOGI PERMUKIMAN
32	Kabupaten Bima	Bolo	Donggobolo 2	Donggobolo 2	Permukiman di dataran rendah
33	Kabupaten Bima	Palibelo	Panda	Panda	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir
34	Kabupaten Bima	Sape	Nae	Nae	Permukiman di dataran rendah
35	Kabupaten Bima	Sape	Sangia	Sangia	Permukiman di dataran rendah dan berada pada kawasan pesisir

Sumber: SK Kumuh masing-masing Kabupaten/Kota dan hasil olahan, 2022

4.2.2 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Lombok

Pulau Lombok salah satu Pulau dari 2 Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Luas wilayah 4.738,70 km² (23,51%) dari total wilayah provinsi. Adapun jumlah Kota/Kabupaten di Pulau Lombok yaitu 1 Kota 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Dengan sebaran luasan kumuh sebesar 3.337,41 Ha.

Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/ Bupati. Berdasarkan hasil identifikasi Kawasan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan hingga tahun 2023 sebaran kumuh di pulau Lombok tersebar di 196 desa/kelurahan dengan persentase luasan terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur mencapai 37,48% atau 1.250,98 Ha, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar 27,57% atau 920,37 Ha dan terendah di Kota Mataram dengan luasan kumuh sebesar 112,60 Ha atau 3,37%. Untuk lebih jelasnya sebaran Kawasan kumuh untuk masing-masing Kota Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.24 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luasan Kumuh

No.	Kabupaten/Kota	∑ Kelurahan/ Desa Kumuh	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Persentase Luasan Kumuh
1	Kota Mataram	20	112,6	3,37%
2	Lombok Barat	50	420,66	12,60%
3	Lombok Tengah	35	920,37	27,57%
4	Lombok Timur	63	1250,98	37,48%
5	Lombok Utara	28	632,8	18,96%
Jumlah		196	3.337,41	100%

Sumber: SK Kumuh Kota/Kabupaten di Pulau Lombok dan hasil olahan, 2023

1) Gambaran Umum Permukiman dan Kawasan Kumuh Kota Mataram

Mataram sebagai salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Gunungsari, Sebelah Timur dengan Kecamatan Narmada Bagian Selatan dengan Kecamatan Labuapi dan Bagian Barat dengan Selat Lombok.

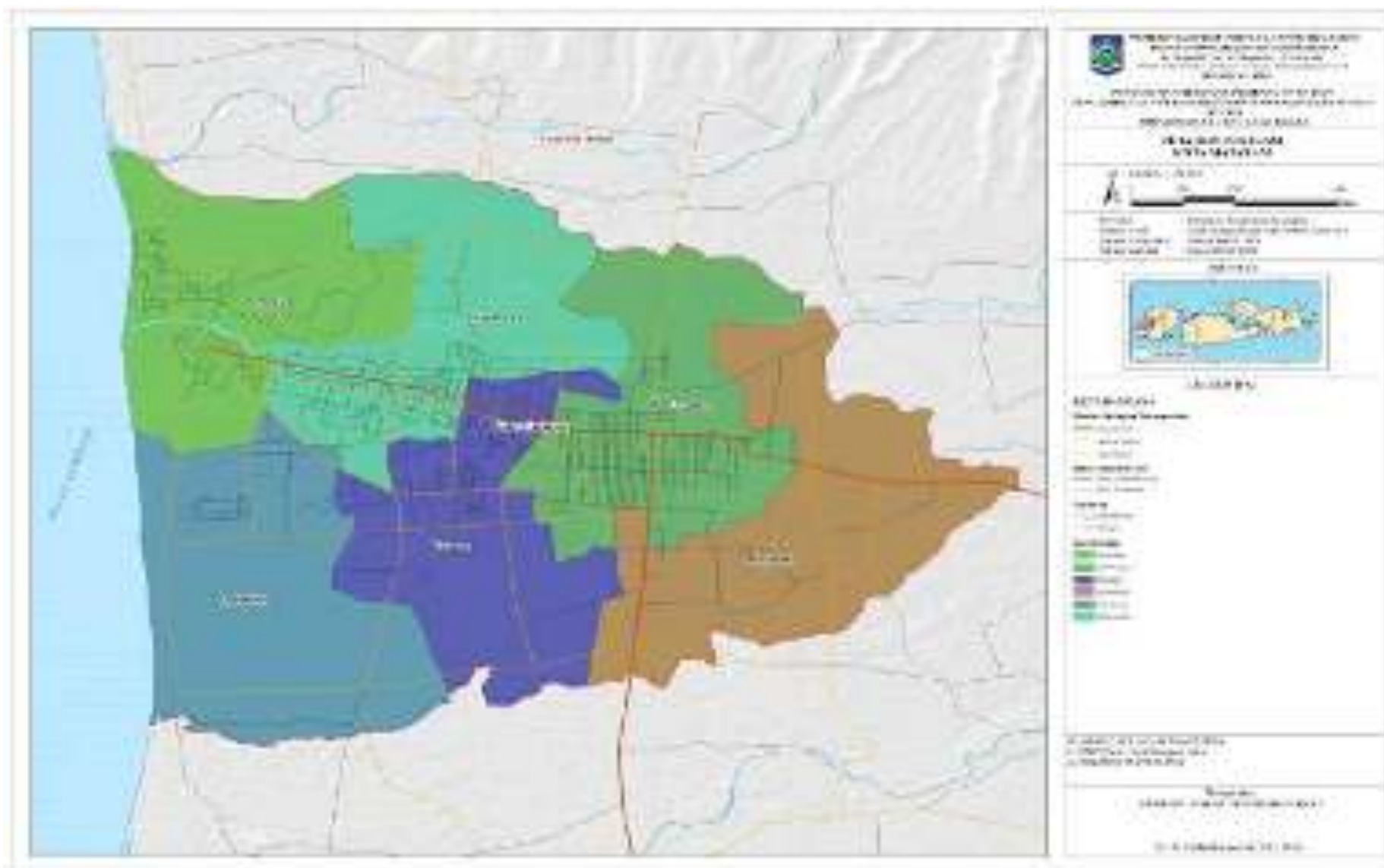
Kota Mataram memiliki luas wilayah daratan sebesar 61,30 Km² dengan luas kumuh sebesar 112,60 Ha berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Provinsi NTB Nomor: 1096/VII/2020 tentang Penetapan Lokasi kawasan permukiman kumuh Kota Mataram seluas 112,60 Ha yang tersebar di 20 Kelurahan.

Tabel 4.25 Sebaran Kumuh Kota Mataram

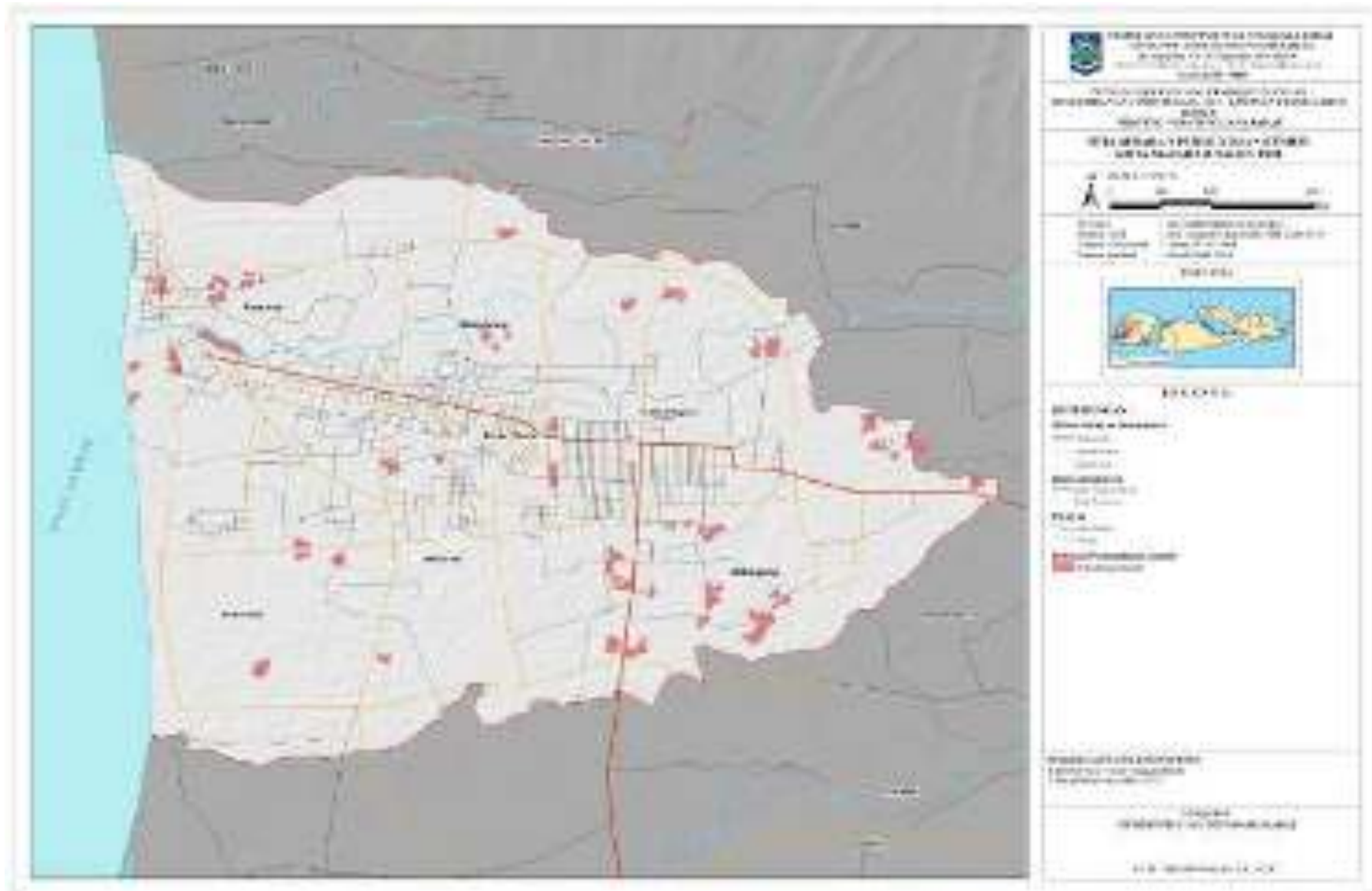
No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
1	Ampenan	Bintaro	4,42
		Ampenan Selatan	3,52
		Banjar	6,21
		Dayan Peken	7,4
2	Selaparang	Rembiga	2,92
		Monjok	4,66
3	Sekarbela	Jempong Baru	3,78
		Karang Pule	8,17
4	Mataram	Punia	4,39
5	Cakranegara	Cakranegara Selatan Baru	5,06
		Cakranegara Barat	2,28
		Cilinaya	3,25
		Mayura	0,86
		Sayang Sayang	5,62
6	Sandubaya	Dasan Cermen	5,87
		Bertais	8,62
		Selagalas	9,86
		Abian Tubuh Baru	7,73
		Babakan	5,94
		Turida	12,04
Total Luasan Wilayah			112,6

Sumber: SK Nomor: 1096/VII/2020

Peta 4.3 Peta Administrasi Kota Mataram



Peta 4.4 Peta Sebaran Kumuh Kota Mataram



2) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan data BPS tahun 2018, luas kabupaten Lombok Barat sebesar 1.053,92 km² yang terdiri dari 10 Kecamatan. Dengan luasan kumuh sebesar 420,66 Ha Berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor: 649.A/42/04-Bappeda/2020 tentang Penetapan Lokasi perumahan kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2025 seluas 420,66 Ha yang tersebar di 50 Kelurahan/Desa.

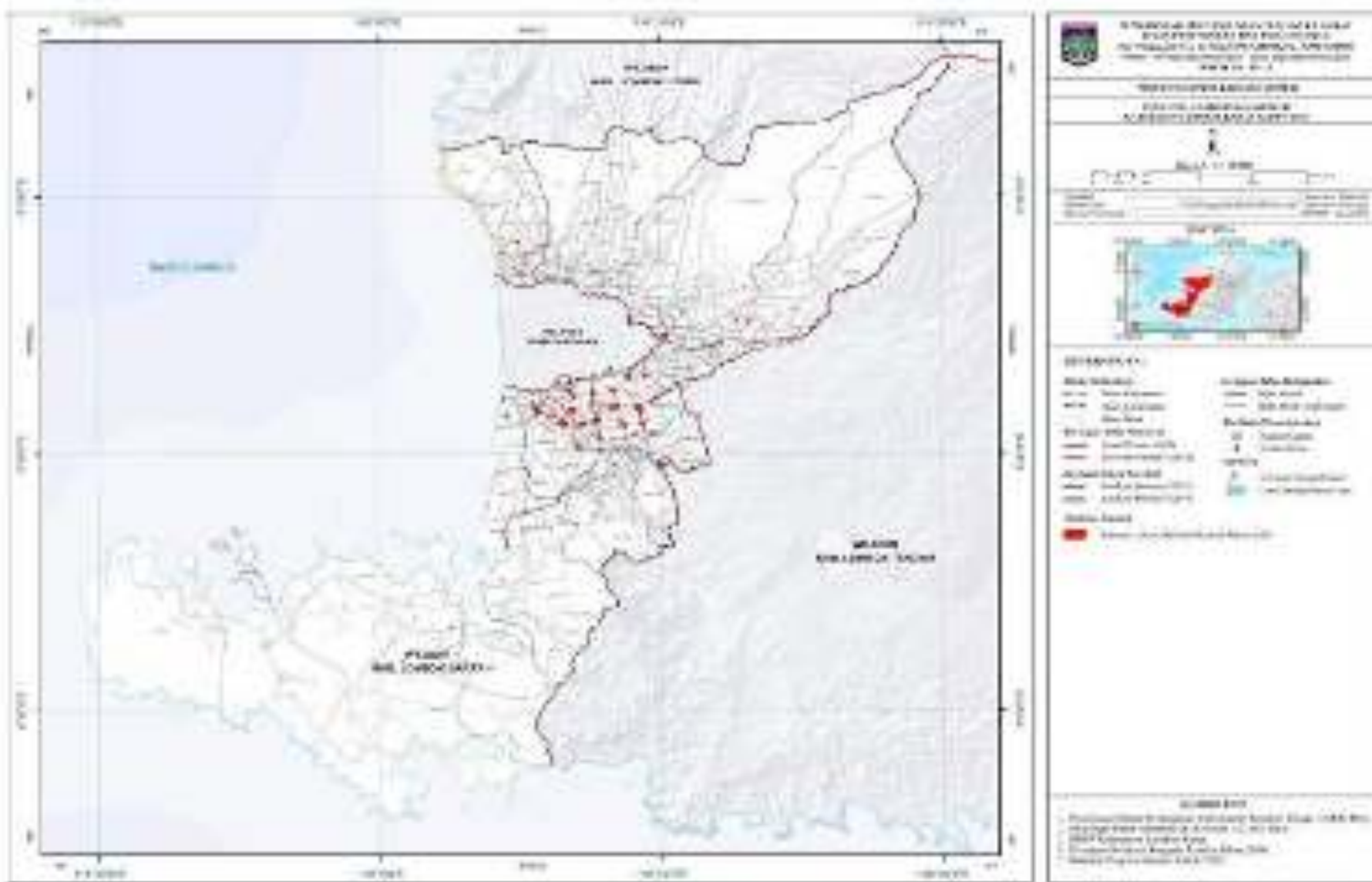
Tabel 4.26 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Barat

No	Desa/Kelurahan	Keterangan Lokasi/ Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Perampuan	Kawasan Penyangga	14,99
2	Karang Bongkot	Kawasan Penyangga	11,15
3	Jagaraga Indah	Kawasan Agro Industri	26,96
4	Ombe Baru	Kawasan Agro Industri	15,15
5	Kuranji Dalang	Pesisir	3,78
6	Kuranji	Pesisir	3,15
7	Labuapi	Kawasan Penyangga-2	4,30
8	Bagek Polak	Kawasan Penyangga-2	6,82
9	Bagek Polak Barat	Kawasan Penyangga-2	4,14
10	Bajur	Kawasan Penyangga-2	5,99
11	Telagawaru	Kawasan Penyangga-2	18,2
12	Terong Tawah	Kawasan Penyangga-2	15,26
13	Kediri	Kawasan Pendidikan	2,19
14	Kediri Selatan	Kawasan Pendidikan	25,24
15	Montong Are	Kawasan Pendidikan	17,55
16	Gelogor	Kawasan Pendidikan	19,91
17	Banyumulek	Kawasan Pendidikan	27,51
18	Bengkel	Kawasan Industri	15,96
19	Merembu	Kawasan Industri	7,33
20	Dasan Baru	Kawasan Industri Kerajinan	5,79
21	Lelede	Kawasan Industri Kerajinan	15,91
22	Rumak	Kawasan Industri Kerajinan	17,54
23	Meninting	Montong Buwuh	3,46
24	Sandik	Kayangan	5,34
25	Senteluk	Senteluk Daye	4,5
26	Sesela	Dasan Utama	15,74

No	Desa/Kelurahan	Keterangan Lokasi/ Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
27	Jatisela	Jatisela	3,07
28	Midang	Midang	6,21
28	Midang	Midang	6,21
29	Gunung Sari	Balekuwuh	9,96
30	Sari Baya	Lingsar	2,13
31	Lingsar	Lingsar Barat	2,86
32	Gontoran	Gontoran Daye	2,65
33	Peteluan Indah	Bagek Nunggal	3,25
34	Buk Buk	Buk-Buk Utara Timur	1,95
35	Lembuak	Lembuak,Lembuak Kebon	4,22
36	Narmada	Batu Kantar	4,8
37	Selat	Selat Timur	3,49
38	Batu Kute	Lenting	2,22
39	Gerimak	Karang Anyar	2,58
40	Kuripan	Iting, Monto, Tongkek	14,59
41	Gerung Selatan	Menang	1,24
42	Dasan Geres	Dasan Geres Tengah	3,63
43	Gerung Selatan	Perigi	3,53
44	Babussalam	Bile Kedit	3,96
45	Cendi Manik	madak belek pantai 1,2,3 dan sayong segering	11,32
46	Sekotong Tengah	Sekotong 1	5,38
47	Taman Baru	Pemegat	3,53
48	Lembar Selatan	Lembar Selatan	4,69
49	Labuan Tereng	Lendang Andus	2,24
50	Jakem	Gunung Gundil	3,3
Total Luasan Wilayah			420,66

Sumber: SK Nomor: 649.A/42/04-Bappeda/2020

Peta 4.6 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Lombok Barat



3) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi koordinat bumi antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 120.839 ha, diapit oleh Kabupaten Lombok barat disebelah Barat dan Utara dan Kabupaten Lombok Timur disebelah timur dan utara, dibagian selatan berbatasan dengan samudra hindia. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 278 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Tengah, seluas 920,37 ha tersebar di 35 Kelurahan/Desa.

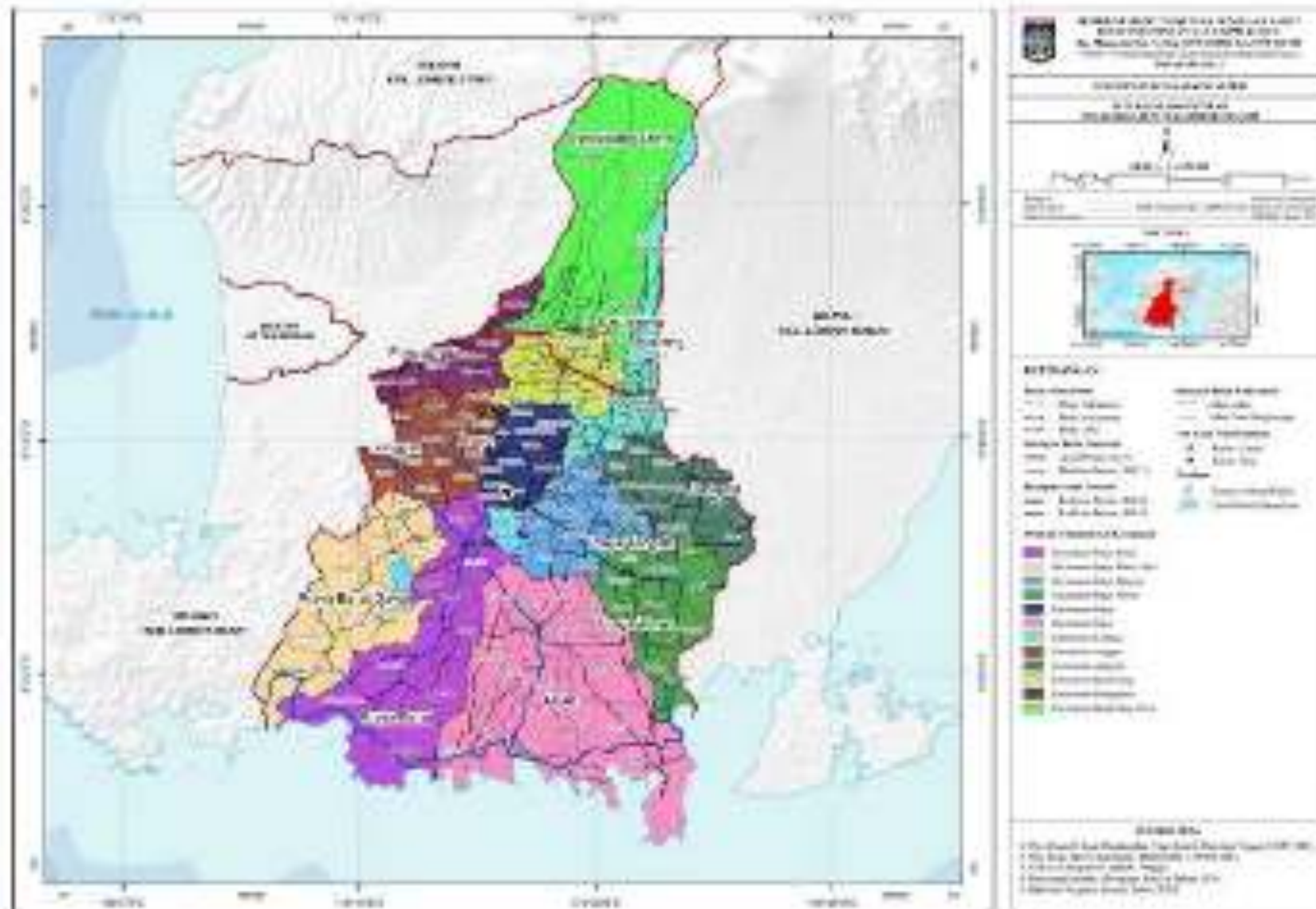
Tabel 4.27 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Tengah

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Prapen	Prapen dan Serengat Selatan	16,76
2	Semayan	Semayan	2,25
3	Tiwugalih	Perbawe	2,60
4	Leneng	Kawasan Perapen (Leneng dan Handayani)	7,42
5	Panjisari	Kemulah	2,31
6	Renteng	Wakul	2,92
7	Praya	Ketejer	4,42
8	Kopang Rembige	Lok, Gubuk Alang	16,6
9	Montong Gamang	Montong Gamang	25,11
10	Dasan Baru	Enjer	15,50
11	Kuta	Kuta Dua	5,23
		Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
12	Mertak	Sokat	14,99
		Awang	20,74
13	Rembitan	Penyalun, Kukun, Rebuk Satu, dan Rebuk Dua	15,22
		Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
14	Sengkol	Gerupuk	23,98
15	Sukadana	Ketiwing, Montong, Begem	23,02
16	Tumpak	Baturiti, Tumpak Satu, Mawun, Areguling	81,93
		Pancor	25,97
		Bongak dan Bunlesung	6,00
17	Mekarsari	Bile Tengah	18,84
18	Selong Belanak	Kampung Nelayan	1,30

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
		Rujak Praya	7,99
		Rujak Tengah	9,01
		Dasan Baru, Kapal, dan Terake	22,61
19	Bilelendo	Aur Manis	4,77
		Kelongkong	2,29
20	Tanak Awu	Tanak Awu	15,38
21	Batujai	Jomang, Kebonturi, Batulang, Belong, Ketangge, Gabah	44,65
22	Penuiak	Bagean dan Mentor	72,2850,79
		Adong, Krangi, Tongkek	21,49
23	Sengkol	Piang	13,07
		Dusun Selak	9,84
24	Ketare	Ketare	51,10
25	Mujur	Mujur	23,00
26	Beleka	Beleka	56,61
27	Labulia	Labulia, Sulin, Pande	40,80
28	Puyung	Bun Sumpak	32,53
29	Mantang	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
30	Aik Darek	Pancor Dao	17,30
31	Pemepek	Pemepek	14,20
32	Ganti	Gantar I dan Gantar II	25
		Renteng I dan Renteng II	
		Batu Rintang I, II dan III	
		Matek Maling	
33	Semoyang	Tanak Awu	25
		Batu Galang	
		Batu Gulung	
34	Darmaji	Gunung Presak	30
		Pendem	
		Sengapah	
35	Tampak Siring	Lendang Kekah	25
		Jeranjang	
		Dasan Baru	
Total Luasan Wilayah			920,37

Sumber: SK Bupati Nomor: 278 Tahun 2021

Peta 4.7 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah



4) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116°-117° Bujur Timur dan 8°-9° Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Lombok Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah
- Sebelah Timur : Selat Alas
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.678,88 km² dengan luasan kumuh sebesar 1.250,98 Ha, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Provinsi NTB Nomor: 188.45/190/PD/2022 tentang Penetapan Lokasi kumuh di Kabupaten Lombok Timur yang tersebar di 63 Kelurahan/Desa. Jumlah luasan kumuh yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati diatas berbeda dengan daftar kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, yang menjadi lampiran I dalam SK Bupati tersebut. Berikut dalam tabel 4.9 ditampilkan luasan kumuh sesuai dengan Lampiran I, yaitu Daftar Kawasan Kumuh di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, serta Peta Sebaran kumuh berikut.

Tabel 4.28 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Timur

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Lando	Lando	18,21
2	Tanjung Luar	Tanjung Luar	40,85
3	Lepak	Lepak	90,21
4	Labuhan Lombok	Labuhan Lombok	112,52
5	Pohgading	Pohgading	62,32
6	Apitaik	Apitaik	60,42
7	Pringgabaya	Pringgabaya	152,47
8	Perigi	Dsn, Bukit Duren, Limbungan	35,71
9	Lenek Pesiraman	Dsn. Karang Tojang, Karang Bila, Koloh Petung, Gubuq Bagek, Gubuq Tengaq	55,00
10	Lenek	Lenek	73,20
11	Aikmel	Aikmel	54,06

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
12	Wanasaba Lauk	Dsn. Tanak Mira	57,88
13	Wanasaba	Dsn. Beak Lauk dan Jorong	48,36
14	Tembeng Putek	Tembeng Putek	17,73
15	Bebidas	Lingkungan Bebidas 3	19,30
16	Senanggalih	Senanggalih	864,95
17	Sembalun Bumbung	Sembalun Bumbung	34,29
18	Sembalun Lawang	Sembalun Lawang	30,07
19	Sajang	Dusun Majelo	28,47
20	Teros	Dsn. Kokok Daya, Timba Timuk, Selungkep, Timba Daya	12,73
21	Bungtiang	Bungtiang	11,64
22	Bebidas	Lingkungan Bebidas 4	13,30
23	Sembalun Timba Gading	Sembalun Timba Gading	13,91
24	Bilok Pitung	Bilok Pitung	13,10
25	Rumbuk Timur	Dsn. Gelumpang	3,18
26	Rumbuk	Rumbuk	9,84
27	Kabar	Kabar Selatan, Trentem, Perenang	9,23
28	Keselet	Keselet Timur	4,12
29	Songak	Songak	4,00
30	Rarang	Rarang	3,05
31	Terara	Dsn Kliwat Tanja	6,60
32	Masbagik Timur	Kawasan Masbagik Timur	6,70
33	Masbagik Utara	Kawasan Masbagik Utara	3,68
34	Tanjung	Ling. Timba Dewa	4,33
35	Labuhan Haji	Dsn. Gelumpang	6,43
36	Ijobalit	Ijobalit	4,92
37	Penedagandor	Dsn. Burne	3,95
38	Suryawangi	Ling. Karang Sari	4,52
39	Kertasari	Kertasari	3,48
40	Banjar Sari	Dsn. Dasan Sawe dan Pungkang	4,38
41	Geres	Dsn. Geres Lauk	5,83
42	Sukamulia	Dsn. Dasan Tiga dan Lendang Batu	8,44
43	Dasan Lekong	Dsn. Gubuk Bongkot, Gubuk Peken, dan Timuk Jero	8,66
44	Nyiur Tebel	Nyiur Tebel	5,36
45	Sukamulia	Dsn. Gubuk Lauk	2,54

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
46	Paok Pampang	Paok Pampang	7,18
47	Ketapang Raya	Dsn. Kedome	1,95
48	Medana Raya	Medana Raya	3,32
49	Maringkik	Pulau Maringkik	9,72
50	Bebidas	Lingkungan Bebidas 1	4,56
51	Bebidas	Lingkungan Bebidas 2	8,00
52	Darakunci	Darakunci	7,02
53	Rempung	Dsn. Setia Bakti, Hikmah, Lestari, dan Karang Baru	6,70
54	Semalun	Semalun	7,39
55	Ekas Buana	Lingkungan Ekas Buana 1	8,12
56	Ekas Buana	Lingkungan Ekas Buana 2	2,68
57	Ekas Buana	Lingkungan Ekas Buana 3	1,50
58	Ekas Buana	Lingkungan Ekas Buana 4	0,71
59	Batu Nampar Selatan	Lingkungan Batu Nampar Selatan 1	5,58
60	Batu Nampar Selatan	Lingkungan Batu Nampar Selatan 2	6,34
61	Jerowaru	Telong Elong 1	2,66
62	Jerowaru	Telong Elong 2	1,60
63	Jerowaru	Jerowaru	1,60
Total Luasan Wilayah			2.120,57

Sumber: SK Bupati Nomor: 188.45/190/PD/2022

Peta 4.10 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Timur



5) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara membentang dari perbatasan wilayah Lombok Barat dan Lombok Timur. Desa paling barat adalah Desa Malaka yang langsung berbatasan dengan Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Desa yang terletak paling timur, adalah Desa Sambik Elen yang berbatasan dengan Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 809,53 km². Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 155/33-1/DLH-PKP/2021 tentang Penetapan Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Utara seluas 632,80 Ha yang tersebar di 28 Kelurahan/Desa.

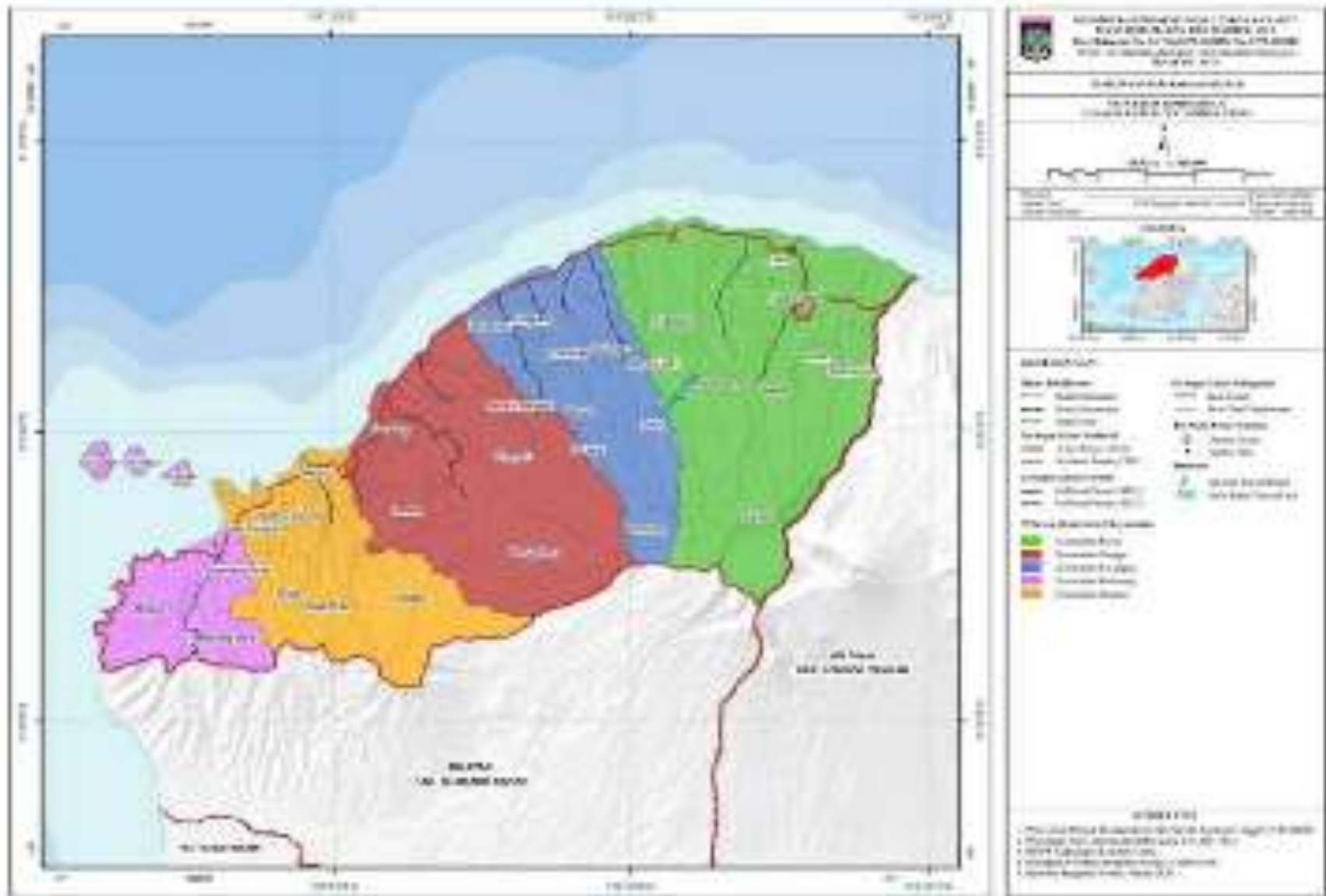
Tabel 4.29 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Lombok Utara

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
1	Pemenang	Menggala	7,18
		Malaka	13,53
		Pemenang Barat	33,21
		Pemenang Timur	36,26
		Gili Indah	113,76
2	Tanjung	Sigar	12,78
		Jenggala	17,22
		Medana	5,57
		Sokong	13,79
		Samaguna	4,60
		Tegal Maja	6,02
		Tanjung	50,33
3	Gangga	Gondang	47,93
		Segara Katon	23,73
		Rempek	16,58
		Sambik Bangkol	12,52
4	Kayangan	Kayangan	39,13
		Pendua	9,05
		Santong	45,20
		Dangiang	17,41
		Gumantar	8,27
		Selengen	7,01

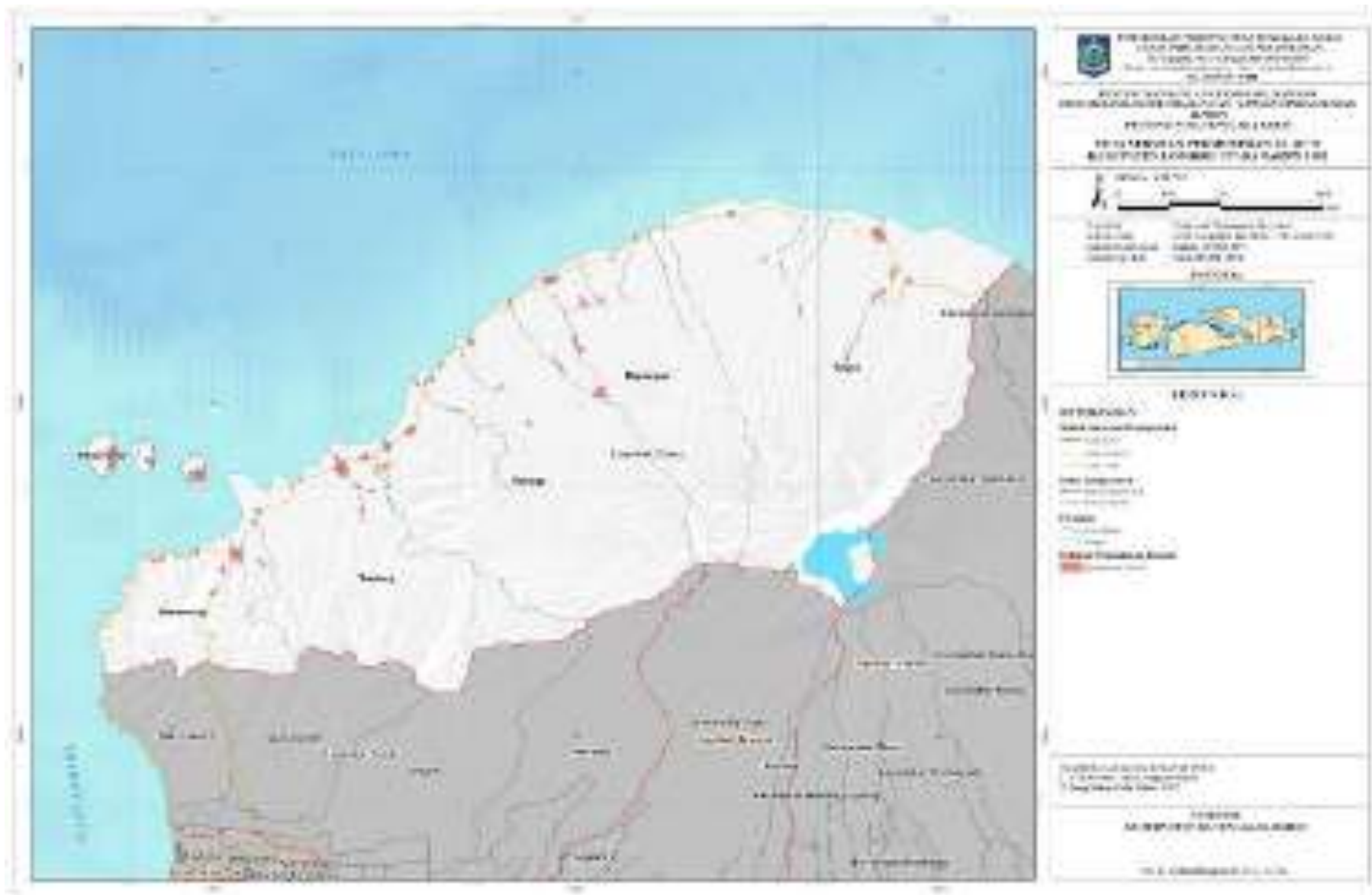
No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
5	Bayan	Akar-akar	9,17
		Anyar	36,68
		Loloan	11,51
		Karang Bajo	16,58
		Senaru	13,94
		Andalan	3,84
Total Luasan Wilayah			632,80

Sumber: SK No. 155/33-1/DLH-PKP/2021

Peta 4.11 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara



Peta 4.12 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Lombok Utara



4.2.3 Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pulau Sumbawa

Pulau Sumbawa salah satu Pulau dari 2 Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Luas wilayah 15414,5 Km² (76,49%) dari total wilayah provinsi. Adapun jumlah Kota/Kabupaten di Pulau Sumbawa yaitu sejumlah 5 Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dengan sebaran luasan kumuh sebesar 2.558,82 Ha. Dimana Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota/ Bupati.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh yang telah dimutakhirkan hingga tahun 2023, sebaran kumuh di pulau Sumbawa tersebar di 220 desa/kelurahan dengan persentase luasan terbesar berada di Kabupaten Bima sebesar 37,55% atau 960,873 Ha dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan luasan kumuh sebesar 360,5 Ha atau 14,08%. Untuk lebih jelasnya sebaran Kawasan kumuh untuk masing-masing Kota Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.30 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luasan Kumuh

No.	Kabupaten/Kota	∑ Kelurahan/ Desa Kumuh	Luas Wilayah Kumuh	Persentase Luasan Kumuh
1	Sumbawa Barat	14	360,5	14,08%
2	Sumbawa	60	635,45	24,83%
3	Dompu	41	444,92	17,38%
4	Kab. Bima	73	960,873	37,55%
5	Kota Bima	32	147,08	5,74%
Jumlah		220	2.558,82	100%

Sumber: SK Kumuh Kota/Kabupaten di Pulau Sumbawa dan hasil olahan, 2023

1) Gambaran Umum Permukiman dan Kawasan Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat

Luas wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari luas daratan sekitar 184.902 Ha dengan batas administratif Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Kecamatan Alas Barat dan sebelah timur Kecamatan Batu lenteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa. Bagian Selatan Samudra Hindia dan Bagian Barat Selat Alas

Luas Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat seluas 360,5 Ha tersebar di 14 Desa, berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 188.4.45.527 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1075 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 4.31 Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
1	Taliwang	Arab Kenangan	18,55
		Telaga Bertong	18,75
		Dalam (Kawasan 1)	4,83
		Sampir	6,04
		Dalam (Kawasan 2)	0,49
		Bugis	7,33
		Menala	10,44
		Kuang	8,69
		Labuhan Lalar	24,35
		Kertasari	59,72
		Maluk	136,54
		Poto Tano	16,86
		Seteluk Tengah	29,4
		Seteluk Atas	18,51
Total Luasan Wilayah			360,5

Sumber: SK Nomor: 188.4.45.527 Tahun 2020

Peta 4.13 Peta Aministrasi Kabupaten Sumbawa Barat



Peta 4.14 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa Barat



2) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa

Secara astronomis, Kabupaten Sumbawa terletak antara posisi 116° 42' sampai dengan 118°22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan dengan luas wilayah 6.643,98 km². Luas Kumuh Kabupaten Sumbawa seluas 645,45 Ha tersebar di 58 Desa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 860 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 4.32 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Sumbawa

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Brang Biji	Brang Biji	15,48
2	Labuhan Sumbawa	Kawasan Jempol	41,30
3	Labuhan Sumbawa	Labuhan Sumbawa	24,78
4	Labuhan Mapin	Labuhan Mapin	16,10
5	Empang Bawah	Empang Bawah	15,90
6	Jotang	Jotang	22,97
7	Empang Atas	Empang Atas	26,00
8	Lape	Lape	26,80
9	Penyaring	Penyaring	20,10
10	Selante	Selante	17,60
11	Labuan Jambu	Labuan Jambu	22,50
12	Kerato	Kerato	17,80
13	Sukadamai	Sukadamai	15,28
14	Bugis	Bugis	13,78
15	Karang Dima	Karang Dima	14,50
16	Pulau Bungin	Pulau Bungin	13,14
17	Gontar	Gontar	12,60
18	Langam	Langam	10,40
19	Maronge	Maronge	13,20
20	Moyo Mekar	Moyo Mekar	14,40
21	Sebewe	Sebewe	12,30
22	Plampang	Plampang	14,30
23	Labuan Aji	Labuan Aji	13,80
24	Nijang	Nijang	12,10
25	Uma Beringn	Uma Beringin	12,90
26	Jorok	Jorok	11,20
27	Sampe	Sampe	10,71

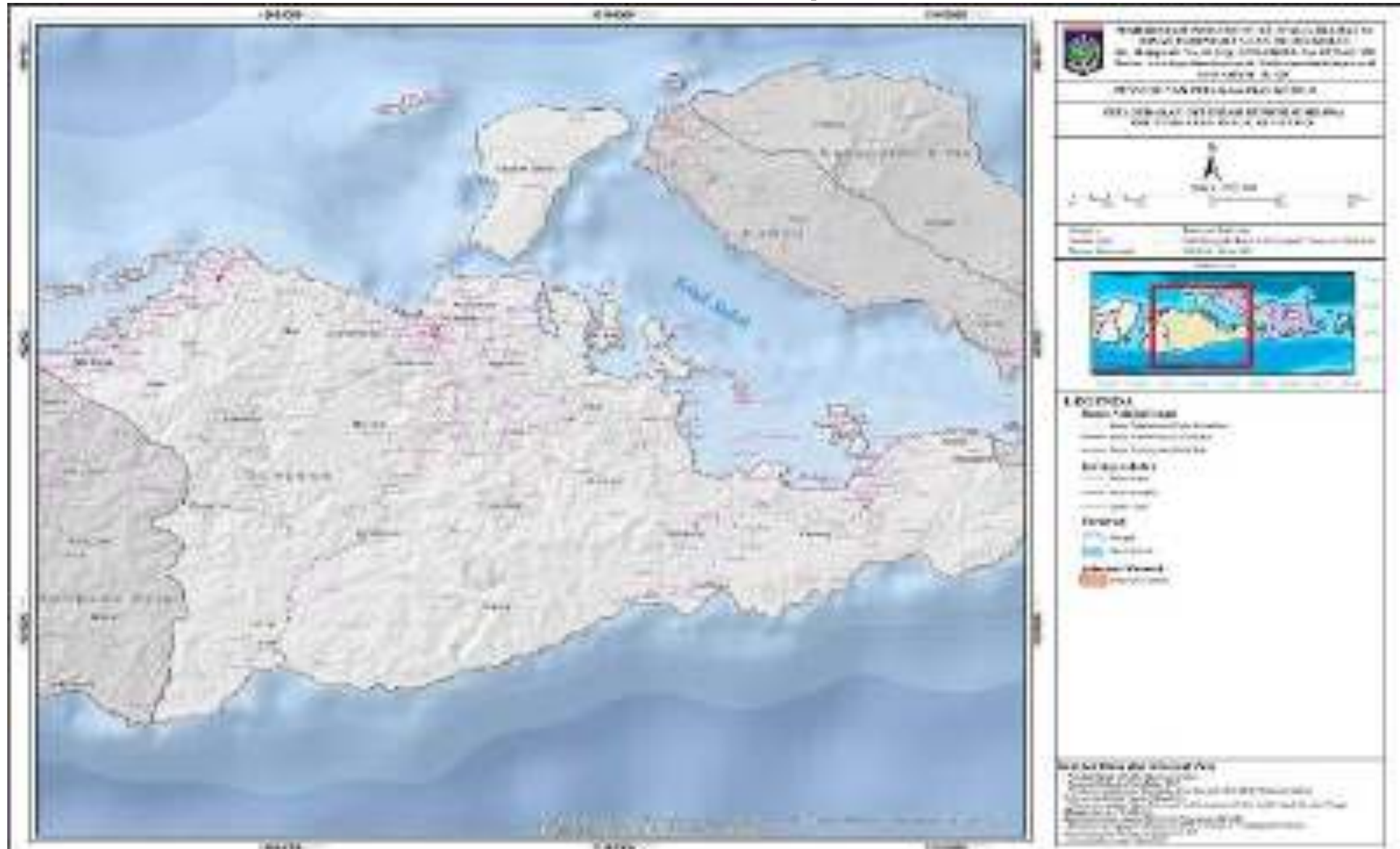
No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
28	Lenangguar	Lenangguar	11,43
29	Tatebal	Tatebal	10,06
30	Samapuin	Samapuin	1,91
31	Seketeng	Sekeleng	3,53
32	Pekat	Pekat	5,15
33	Brang Rara	Brang Rara	4,65
34	Lempeh	Lempeh	2,17
35	Umasima	Umasima	4,11
36	Marente	Marente	1,80
37	Labuhan Alas	Labuhan Alas	4,30
38	Baru	Baru	5,40
39	Dalam	Dalam	5,80
40	Juran Alas	Juran Alas	6,70
41	Kalimango	Kalimango	7,10
42	Luar	Luar	8,30
43	Labuhan Burung	Labuhan Burung	7,50
44	Lopok	Lopok	9,30
45	Simu	Simu	7,40
46	Kakiang	Kakiang	5,10
47	Pungkit	Pungkit	10,00
48	Rhee	Rhee	6,90
49	Jorok	Jorok	6,60
50	Pungka	Pungka	6,90
51	Stowe Brang	Stowe Brang	4,00
52	Motong	Motong	4,40
53	Orong Bawah	Orong Bawah	7,10
54	Tengah	Tengah	7,30
55		Poto	2,05
56		Kelungkung	1,44
57		Berora	2,93
58		Banda	2,16
59		Batu Bangka	4,81
60		Labuan Aji	5,21
Total Luasan Wilayah			645,45

Sumber: SK Bupati Nomor: 860 Tahun 2022

Peta 4.15 Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa



Peta 4.16 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Sumbawa



3) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Dompu

Secara astronomis, Kabupaten Dompu terletak antara posisi 117° 42' sampai dengan 118°30' Bujur Timur dan 5°54' sampai dengan 5°54''-8° 04' Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.324,55 km². Batas administrasi Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bima. Sebelah Utara Laut Flores dan Kabupaten Bima dan Sebelah Selatan Samudra Hindia.

Luas Kumuh Kabupaten Dompu seluas 444,92 Ha tersebar di 38 desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/97/DPKP/2023 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Dompu.

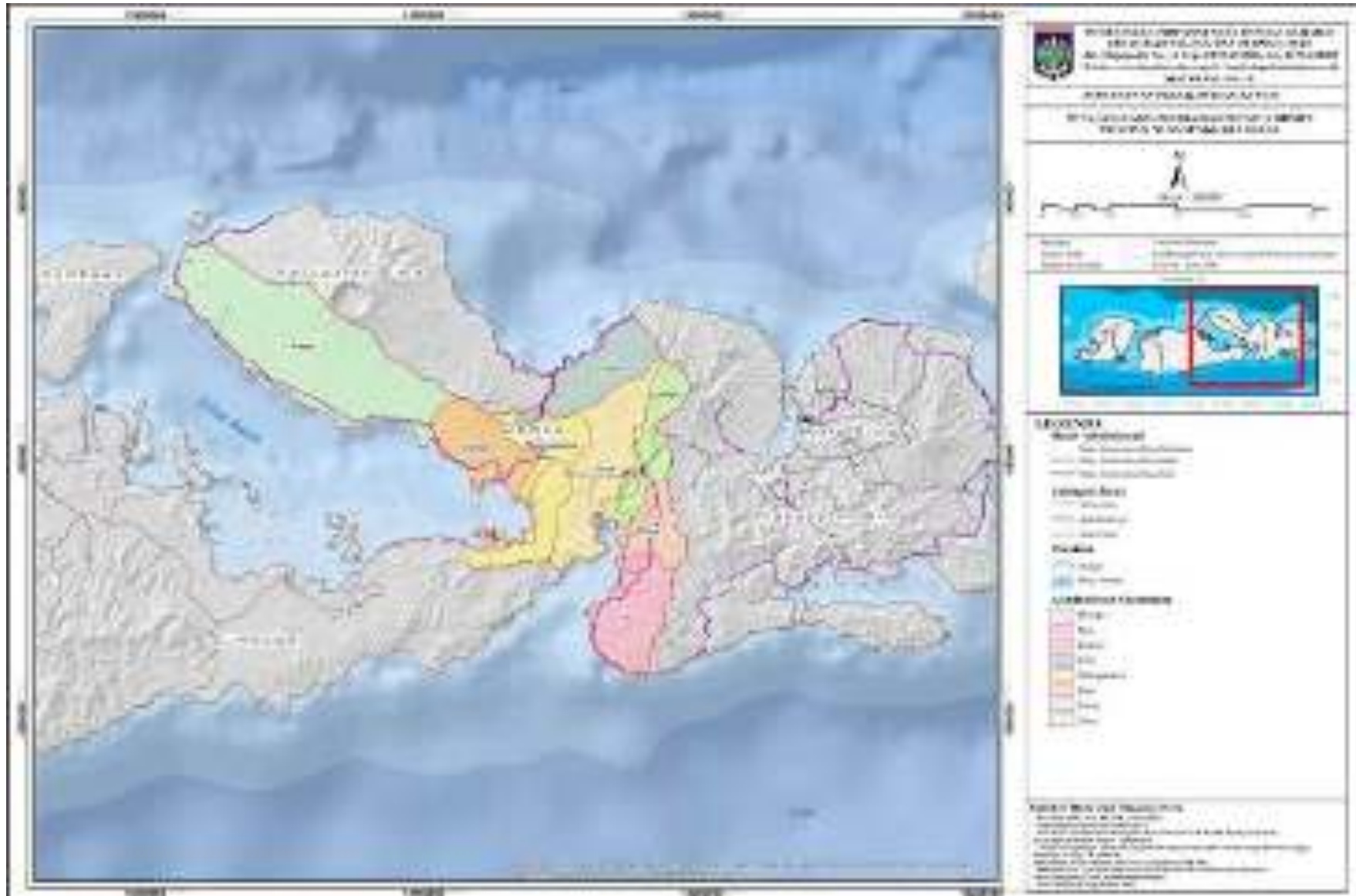
Tabel 4.33 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Dompu

No	Desa / Kelurahan	Lokasi	Luas Kumuh (Ha)
1	Bada	Sori Silo I	30,46
2	Bali		
3	Karijawa		
4	Dorotangga	Doromangge I	30,79
5	Manggeasi		
6	Kandai Satu	Sorilaju I	29,19
7	Kereke		
8	Potu		
9	Kandai Dua	Sambimboko I	44,18
10	Simpasai		
11	Montabaru	Meciangi I	29,73
12	Baka Jaya	Doronowa I	29,32
13	Matua		
14	Nowa		
15	Ranggo	Lananga	17,84
16	Tabelae		
17	Soro	Dorokarama	16,07
18	Soro Barat		
19	Kramat	Rastakilo	19,40
20	Lasi		
21	Malaju		
22	Dorebara	Tolomba'a	14,93
23	Mbawi		
24	Wawonduru	Meciangi II	13,17

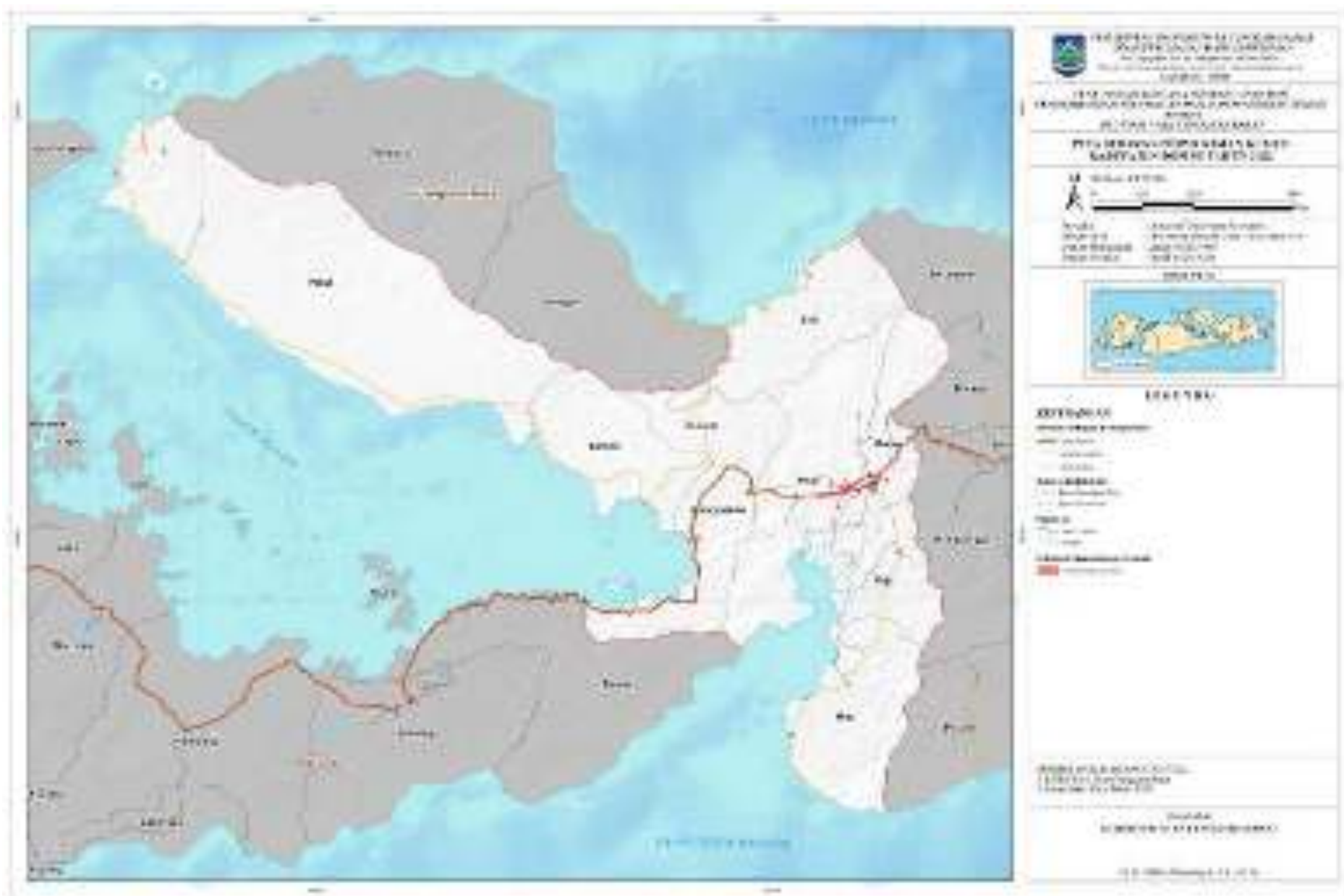
No	Desa / Kelurahan	Lokasi	Luas Kumuh (Ha)
25	Matua	Doronowa II	14,64
26	Madaparama	Madarutu I	10,15
27	Kadindi	Kaldera I	14,94
28	Calabai	Kaldera II	13,46
29	Kadindi Barat	Kaldera III	10,61
30	Bada	Sori Silo II	5,24
31	Manggeasi	Doromangge II	4,91
	O'o		
32	O'o	Doromangge III	0,66
33	Kandai Satu	Sorilaju II	3,13
34	Wawonduru	Tolomba'a II	2,45
	Wawonduru	Sambimboko II	8,41
	Wawonduru	Sambimboko III	6,92
	Wawonduru	Sambimboko IV	9,08
	Wawonduru	Meciangi III	2,30
35	Baka Jaya	Doronowa III	1,02
36	Bara	Madarutu II	7,58
	Bara	Madarutu III	1,45
	Bara	Puma I	5,20
	Bara	Puma II	8,85
	Bara	Puma III	2,20
	Bara	Puma IV	3,85
	Bara	Manggera'a I	3,85
	Bara	Manggera'a II	3,76
37	Soriutu	Manggera'a III	7,43
38	Lasi	Rastakilo II	7,86
39	Kiwu	Rastakilo III	4,25
40	Lasi		
41	Kiwu	Rastakilo IV	5,64
TOTAL LUASAN WILAYAH			444,92

Sumber: SK Bupati Nomor: 800/97/DPKP/2023

Peta 4.17 Peta Administrasi Kabupaten Dompu



Peta 4.18 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Dompu



4) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kabupaten Bima

Adapun luas wilayah Kabupaten Bima seluas 4385 Km², sedangkan Luas Kumuh Kabupaten Bima seluas 960,873 Ha tersebar di 69 Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/201/07.1 Tahun 2022, penetapan lingkungan perumahan permukiman kumuh di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut.

Tabel 4.34 Sebaran dan Luasan Kumuh Kabupaten Bima

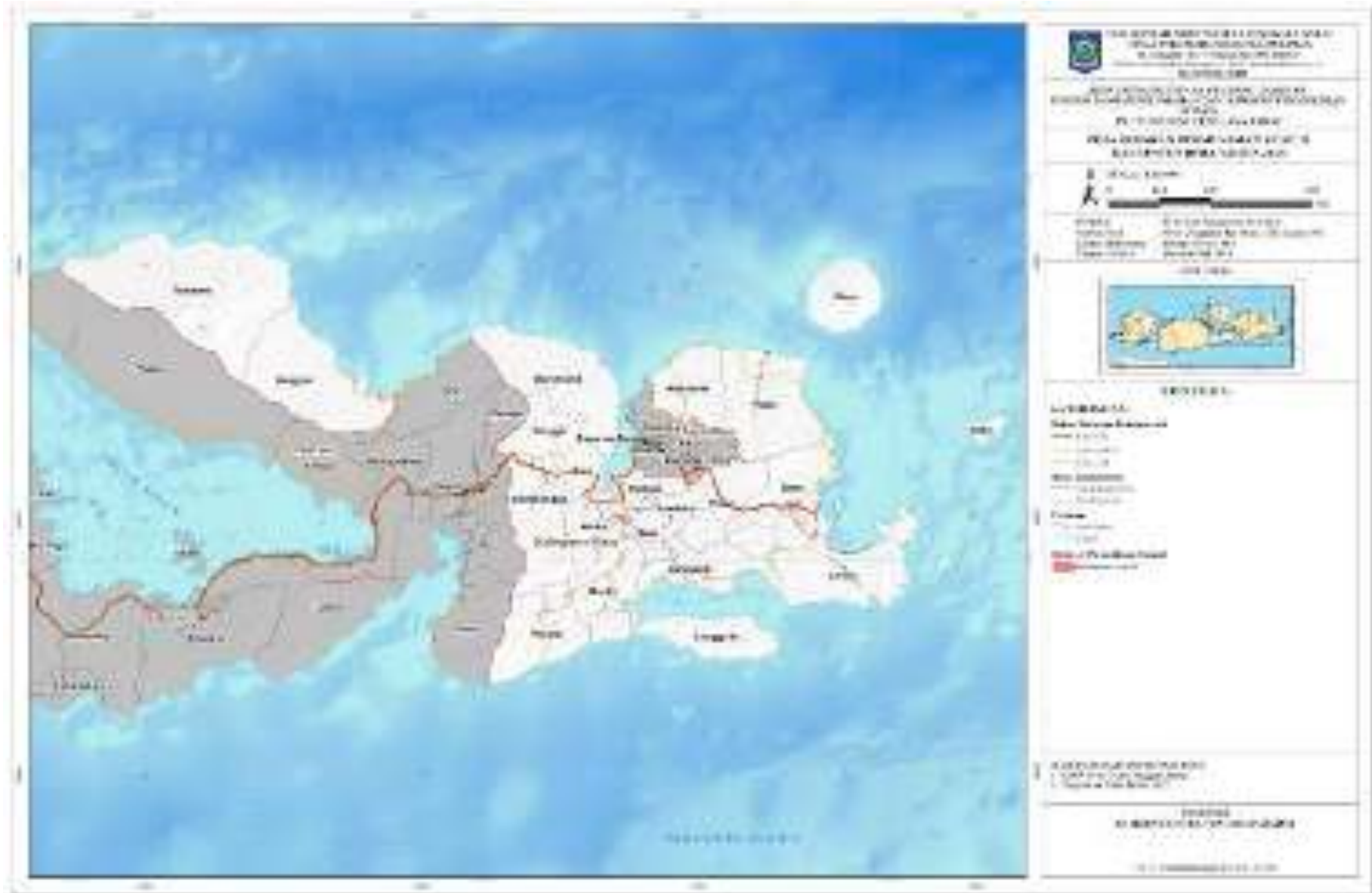
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
1	Bolo	Sondosia 1	6,47
2	Bolo	Sondosia 2	2,18
3	Bolo	Ngembe	4,56
4	Bolo	Darussalam	13,92
5	Bolo	Tambe dan Rasabou	42,90
6	Bolo	Sanolo 1	20,42
7	Bolo	Sanolo 2	5,33
8	Bolo	Rato, Timu, Leu & Kananga	81,02
9	Bolo	Tumpu	4,41
10	Woha	Nisa	17,66
11	Woha	Penapali	7,66
12	Woha	Tente	29,97
13	Woha	Rabakodo	24,56
14	Woha	Naru	21,06
15	Woha	Samili	21,04
16	Woha	Kalampa	30,01
17	Woha	Dadibou 1	8,03
18	Woha	Dadibou 2	3,8
19	Woha	Donggobolo 1	4,63
20	Woha	Donggobolo 2	12,99
21	Woha & Palibelo	Talabiu & Padolo	35,47
22	Palibelo	Belo	9,71
23	Palibelo	Teke	25,61
24	Palibelo	Bre	8,39
25	Palibelo	Tonggondoa	8,17
26	Palibelo	Tonggorisa	9,40
27	Palibelo	Ragi	6,69
28	Palibelo	Nata	23,60

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
29	Palibelo	Panda	12,00
30	Belo	Cenggu	16,77
31	Belo	Ngali	32,21
32	Belo	Renda	29,44
33	Sape	Bugis	55,01
34	Sape	Rasabou	15,54
35	Sape	Naru & Naru Barat	21,60
36	Sape	Nae	14,36
37	Sape	Oi Maci	20,97
38	Sape	Sangia	11,29
39	Sape	Rai Oi	17,33
40	Sape	Paranggina	19,17
41	Madapangga	Dena	7,209
42	Madapangga	Rade	7,21
43	Madapangga	Bolo	6,408
44	Lambu	Soro	24,322
45	Lambu	Lanta	6,529
46	Lambu	Lanta Barat	2,171
47	Lambu	Kaleo	6,642
48	Lambu	Sumi	6,80
49	Lambu	Simpasai	1,515
50	Wawo	Maria Utara	3,649
51	Wawo	Raba	1,276
52	Langgudu	Karumbu	2,133
53	Langgudu	Rompo	1,847
54	Lambitu	Sambori	6,588
55	Wera	Tawali	17,456
56	Wera	Sangiang	6,698
57	Ambalawi	Nipa	6,506
58	Ambalawi	Rite	7,048
59	Donggo	Mbawa	20,411
60	Donggo	O'o	6,48
61	Donggo	Kala	6,578
62	Soromandi	Punti	6,474
63	Soromandi	Sai	7,695
64	Soromandi	Bajo	7,301

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
65	Sanggar	Kore	7,032
66	Sanggar	Sandue	6,42
67	Sanggar	Oisaro	6,438
68	Tambora	Labuan Kananga	1,74
69	Monta	Tangga	1,888
70	Monta	Sie	1,033
71	Monta	Simpasai	1,172
72	Parado	Parado Rato	1,789
73	Parado	Parado Wane	1,065
Total Luasan Wilayah			960,873

Sumber: SK Kumuh No. 188.45/201/07.1/2022

Peta 4.20 Peta Sebaran Kumuh Kabupaten Bima



5) Gambaran Umum Permukiman Kumuh di Kota Bima

Secara astronomis, Kota Bima terletak antara 8 20'–8 30' Lintang Selatan dan antara 118 41'–118°48' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bima memiliki batas-batas: Utara – Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, Laut Flores; Selatan – Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; Barat –Teluk Bima; Timur –Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Luas Kumuh Kabupaten Bima seluas 147,08 Ha tersebar di 34 Desa. Berdasarkan Keputusan Walikota Bima Provinsi NTB Nomor: 188.45/492/650/XII/2021, penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Bima adalah sebagai berikut.

Tabel 4.35 Sebaran dan Luasan Kumuh Kota Bima

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
1	Jatibaru	Kawasan Sapaga	0,79
	Jatibaru		0,64
	Jatibaru		2,60
	Jatibaru		1,30
	Jatibaru		0,55
	Jatibaru		1,16
	Jatibaru		0,82
	Jatibaru		1,01
	Jatibaru		1,08
	Jatibaru Timur		0,97
	Jatibaru Timur		0,82
	Jatibaru Timur		0,64
	Jatibaru Timur		0,58
	Jatibaru Timur		0,35
	Jatibaru Timur		0,79
	Jatibaru Timur		0,56
	Jatibaru Timur		0,37
	Jatibaru Timur		0,43
	Jatibaru Timur		0,53
	Jatibaru Timur		0,44
Jatibaru Timur	0,32		
2	Kolo	Kawasan Kolo	1,44
	Kolo		1,59
	Kolo		1,39
	Kolo		1,52

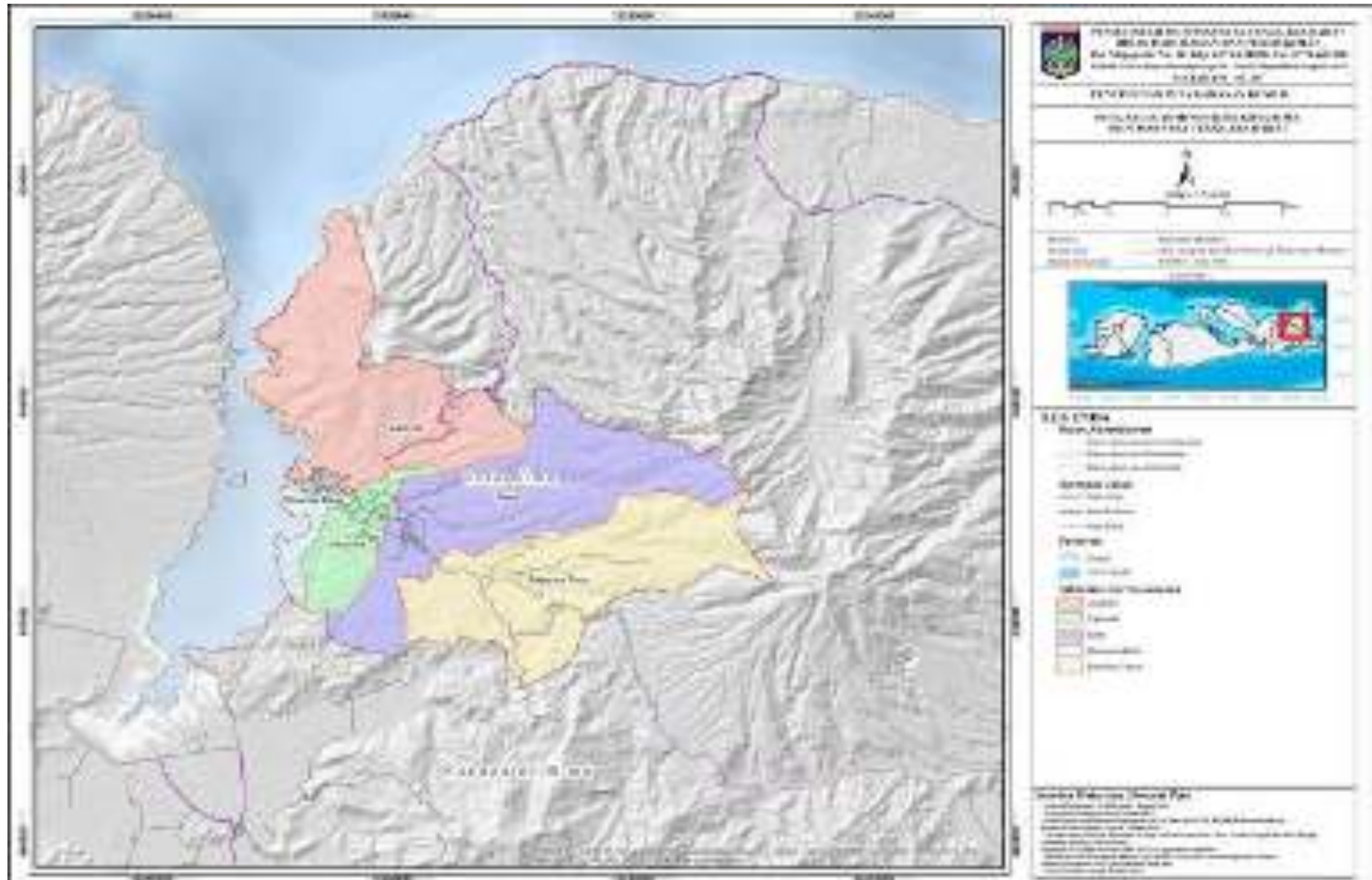
No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
	Kolo		1,17
	Kolo		0,98
	Kolo		1,08
	Ule		2,45
	Ule		1,42
	Ule		1,70
	Ule		1,43
	Ule		1,26
3	Dara		Dana Taraha
	Dara	1,84	
	Dara	1,78	
	Dara	2,49	
	Dara	1,09	
	Dara	0,71	
	Paruga	0,51	
	Paruga	0,67	
	Paruga	0,72	
	Paruga	0,78	
	Paruga	0,92	
	Paruga	0,83	
	Melayu	0,98	
	Melayu	1,03	
	Melayu	1,80	
	Melayu	1,72	
	Melayu	1,09	
	Tanjung	1,21	
	Tanjung	0,93	
4	Dodu	Dodu	0,76
	Dodu		0,91
	Dodu		1,28
	Dodu		2,27
	Dodu		0,97
	Dodu		1,08
	Dodu		1,41
	Dodu		1,21
	Kodo		0,66

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
	Kodo		0,68
	Lampe		0,80
	Kumbe		2,27
	Kumbe		1,47
	Kumbe		1,81
	Oi Mbo		1,65
	Oi Mbo		1,90
	Oi Mbo		0,74
	Rasabaou Timur		0,88
	Rasabaou Timur		0,45
	Rasabaou Timur		0,78
5	Matakando	Matakando	0,77
	Matakando		0,87
	Penatoi		2,05
	Penatoi		1,38
	Penatoi		0,72
	Rite		1,04
	Rite		0,79
	Ntobo		0,42
	Ntobo		0,90
	Ntobo		0,61
	Ntobo		0,99
	Ntobo		0,76
	Penanae		1,01
	Penanae		1,47
	Penanae		1,66
	Penanae		1,42
	Penanae		3,48
	Kendo		0,82
	Kendo		0,98
	Kendo		1,00
	Nungga		1,44
	Nungga		0,77
6	Jatiwangi	Kawasan Ranggo	1,02
	Jatiwangi		0,94
	Jatiwangi		0,89

No	Desa/Kelurahan	Lokasi / Kawasan	Luas Kumuh (Ha)
	Jatiwangi		1,09
	Jatiwangi		0,71
	Nae		1,89
	Nae		1,61
	Nae		1,67
	Sarae		0,27
	Sarae		0,70
	Sarae		1,52
7	Mande		Kawasan Sambimaci
	Mande	1,11	
	Mande	0,51	
	Manggemaci	1,42	
	Manggemaci	1,26	
	Manggemaci	1,72	
	Sambinae	1,98	
	Sambinae	1,40	
	Rabangodu Selatan	1,04	
	Rabangodu Selatan	1,16	
8	Penaraga	Kawasan Kotabaru	1,09
	Penaraga		3,21
	Rabangodu Utara		2,23
	Rabangodu Utara		2,02
9	Nitu	Kawasan Nitu	1,04
10	Lelamase	Kawasan Lelamase	0,62
	Lelamase		0,59
	Lelamase		1,15
	Lelamase		1,27
	Lelamase		1,42
	Lelamase		1,03
SUB TOTAL			147,08

Sumber: Keputusan Walikota Bima Provinsi NTB Nomor: 188.45/492/650/XII/2021

Peta 4.21 Peta Administrasi Kota Bima





Gambar 4.10 Gambaran Permukiman Kumuh

4.2.4 Budaya Bermukim

1) Permukiman di pesisir

Permukiman pesisir/nelayan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar di sepanjang pesisir yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Potensi kelautan dan perikanan serta wisata yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat mempengaruhi perkembangan kawasan terutama tumbuhnya permukiman.

Permukiman nelayan merupakan permukiman dengan penduduk yang bermata pencaharian di perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Terdapat juga tambak di sekitar permukiman tersebut. Kondisi kawasan permukiman di pesisir sebagian merupakan permukiman kumuh seperti di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Lombok Tengah serta Kabupaten Lombok Utara. Kondisi kualitas permukimannya masih rendah dan minim akan prasarana lingkungan.

Peta 4.23 Peta Permukiman Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat



2) Permukiman Adat

Permukiman adat merupakan permukiman khusus yang hanya ada di beberapa tempat. Permukiman adat memiliki ciri khas bentuk dan pola permukiman tersendiri. Keberadaan permukiman adat dapat menjadi potensi wisata yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Permukiman adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

1. Permukiman Adat Bayan

Permukiman Adat Bayan merupakan salah satu desa tradisonal di Kabupaten Lombok Utara yang masih menjalankan dan menjaga adat istiadat kehidupan asli suku sasak-bayan. Untuk pola permukiman adat bayan yaitu mengelompok dan terbentuk oleh kondisi alam yang berbukit-bukit dan berdasarkan system keakraban yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Permukiman Sade

Permukiman Sade merupakan permukiman adat yang terletak di Desa Rambitan Kabupaten Lombok Tengah. Permukiman adat yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadat yang sudah ada dan menjadi daya tarik wisata berupa keunikan dari bangunan rumah yang berpola prukiman linear dengan bentuk masa bangunan yang didominasi atap berpenutup daun alang-alang dan kesenian berupa kerajinan tangan serta tarian adat. Hal ini yang menjadikan permukiman sade merupakan potensi wilayah yang berada di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Permukiman Limbungan

Permukiman adat limbungan merupakan permukiman tradisonal yang berada di Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur, permukiman adat yang masih mempertahankan local wisdom dan masih memertahankan pemerintahan tradisonal. Pola permukiman adat limbungan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu mengelompok dan Linear mengikuti jalan dan material dari bangunan adat limbungan berbahan dari ilalang, tanah liat, dan getah tumbuh – tumbuhan.

4. Permukiman Adat Segenter

Permukiman adat segenter merupakan permukiman tradisional yang berada di Desa Segenter Kabupaten Lombok Utara, permukiman adat yang masih mempertahankan local wisdom dan masih memertahankan pemerintahan tradisional. Pola permukiman adat segenter yaitu mengelompok. Strukur bangunan yang masih memertahankan ketradiosonal dari bangunan dengan bentuk umum bangunan 6x7 meter, Dinding bangunan yang terbuat dari anyaman bambu dan bentuk atap limas dengan material Atap ilalang.

5. Permukiman tradisional suku bajo - Pulau Bungin

Permukiman tradisional suku bajo Pulau bungin merupakan permukiman yang berada di Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa. Permukiman adat yang masih mempertahankan budaya dan adat-istiadat yang sudah ada dan menjadi daya tarik wisata dan berupa keunikan akan kepadatannya dalam bermukim dengan pola permukiman yang berada di Pulau bungin terbentuk dengan pola mengelompok serta kesenian berupa tarian adat, serta memiliki tradisi yang mengharuskan pihak laki-laki untuk membangun rumah panggung yang merupakan rumah khas masyarakat bungin yaitu dengan memperluas wilayah daratan melalui penambahan gugusan karang di areal lahan yang akan mereka dirikan rumah panggung sebagai modal pernikahan.

6. Permukiman Desa Hu`u

Permukiman Desa Hu`u merupakan Permuiman yang berada di Kabupaten Dompu, Konsep awal dari pemukiman Desa Hu`u didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik dasar berupa; Aspek topografi, dimana areal datar untuk kawasan pemukiman dan pertanian, areal bergelombang untuk kebun, ladang dan padang penggembalaan. Sedangkan areal terjal untuk dipertahankan kawasan hutan. Tanah yang subur dijadikan areal pertanian. Mata air dan sungai dipertahankan keberadaanya dengan membuat ruang imajiner disekelilingnya.

Berdasarkan pola penggunaan lahan yang ada, masjid merupakan pusat desa, yang dibangun ditengah-tengah kawasan pemukiman. Kemudian areal tempat tinggal yang membentuk kelompok-kelompok kecil yang dibatasi oleh gang biasanya masih dalam satu hubungan keluarga, dengan struktur bangunan adalah rumah panggung, orientasi

arah hadap adalah utara-selatan, halaman yang tidak memiliki pagar. Di luar kawasan pemukiman dibangun ruang terbuka berupa lapangan, kemudian areal dimana masyarakat melaksanakan kegiatan bercocok tanam berupa sawah, ruang terbuka berupa kuburan, padang penggembalaan serta kawasan hutan.

Pola ruang yang ada pada pemukiman Desa Hu`u merupakan perwujudan dari tiga bentuk budaya yaitu; Sistem Religi, dengan pola ruang yang dibentuk berkembang dalam dua masa yaitu sebelum Islam dan setelah Islam. Sebelum Islam, keyakinan masyarakat adalah parafu, dimana rumah kepala suku (ncuhi) adalah pusat pemukiman, terdapat ruang imajiner pada mata air, muara, sungai dan tepi pantai yang dijadikan tempat persembahan. Setelah Islam masuk, maka masjid dijadikan pusat desa, konsep leka dana (seleksi lahan) dikembangkan, ruang terbuka pada kawasan pemukiman lebih dikembangkan sebagai bentuk interaksi dengan sesama, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan, dengan mempertahankan ruang imajiner pada sumber-sumber air.

7. Permukiman Tradisional Uma Lengge

Permukiman tradisional uma lengge merupakan permukiman yang berada di Desa Maria, Kecamatan Wawo - Kabupaten Bima. Permukiman Tradisional Uma Lengge memiliki budaya lokal serta adat istiadat yang masih dipegang masyarakat sekitar dan Permukiman yang memiliki kompleks bangunan peninggalan budaya yang sudah berumur ratusan tahun dan menjadi objek wisata dan cagar alam Kabupaten Bima. Bangunan uma lengge memiliki beberapa fungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Pola permukiman yang berada di Permukiman Tradisional Uma Lengge yaitu berpola homogen dengan bangunan rumah panggung yang berada di kawasan permukiman dengan pola jalan yang dimiliki yaitu berpola grid.

Peta 4.24 Peta Sebaran Permukiman Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat



3) Perumahan Yang Ada Berada di Lintas Kabupaten/Kota

Perumahan Lintas Kabupaten/Kota yaitu hamparan Perumahan yang terletak berada di 2 Kabupaten/Kota. Perumahan yang berada di lintas Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu terdapat 226 Perumahan teridentifikasi yang berada dilintas Kabupaten/Kota yaitu :

1. Perumahan Griya Perembun Asri berada di perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram
2. Perumahan Vila Mataram Damai berada di perbatasan antara Kabupaten Lombok Barat-Kecamatan Labuapi dan Kota Mataram- Kecamatan Sekarbela.
3. Perumahan Lingkar Mahkota dan Lingkar Permata berada di perbatasan antara Kota Mataram dan Lombok Barat yang berada pada Jalan Lingkar Selatan.

Berikut lokasi dan lebih detailnya :



Gambar 4.11 Perumahan Lingkar Mahkota dan Lingkar Permata

Tabel 4.36 Sebaran Perumahan di Lintas Kabupaten/Kota

No.	Nama	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Koordinat	
					x	y
1	Mertak penjelok udang bumbang	Teruwai	Pujut	Lombok Tengah	116.3718	-8.8884
2	Perumahan amroul	Desa Pene	Kecamatan Jerowaru	Lombok Timur	116.4089	-8.8289
3	Perumahan Montong Tengah	Ranggagata	Praya Barat Daya	Lombok Tengah	116.1803	-8.7194
4	Perumahan Green Gunung Sasak	Kuripan	Kuripan	Lombok Barat	116.1612	-8.6785
5	Perumahan Rindasta	Desa Santong	Kecamatan Terara	Lombok Timur	116.4194	-8.6666
7	Perumahan Roemah Jelantik	Jelantik	Jonggat	Lombok Tengah	116.2167	-8.6656
8	perumnas LA resort	Telagawaru	Labuapi	Lombok Barat	116.1033	-8.6402
9	GRIYA PEREMBUN ASRI	Perampuan	Labuapi	Lombok Barat	116.0888	-8.6392
10	Perumahan Mavila Renggenis	Bajur	Labuapi	Lombok Barat	116.0908	-8.6284
11	Green Layari	Bebuak	Kopang	Lombok Tengah	116.3630	-8.6188
13	Sembung Palace	Badrain	Narmada	Lombok Barat	116.1646	-8.6186
14	Komplek Perumahan Mekar Sari		Mataram	Kota Mataram	116.1200	-8.6184
15	Lingkar Permata Residence		Sekarbela	Kota Mataram	116.0999	-8.6178
16	Perumahan Lingsar Permai	Lingsar	Lingsar	Lombok Barat	116.1780	-8.5783
18	Perumahan Rumah Kita (By Matahati Properti)	Sesele	Gunungsari	Lombok Barat	116.0962	-8.5537
19	Perumahan Bumi Selaparang Asri	Midang	Gunungsari	Lombok Barat	116.1165	-8.5528
20	Perum Royal Zaitun	Mambalan	Gunungsari	Lombok Barat	116.1237	-8.5521
21	Perumahan Mahkota Graha	Jatisela	Gunungsari	Lombok Barat	116.0793	-8.5520
22	Perumahan javana garden	Sesele	Gunungsari	Lombok Barat	116.0947	-8.5517
23	Perumahan Ayodhia Palace Blok T	Meninting	Batu Layar	Lombok Barat	116.0793	-8.5475
24	Perum Gubernuran	Taman Sari	Gunungsari	Lombok Barat	116.1271	-8.4873
25	Perumahan Lingkar Mahkota	Jempong Baru	Sekarbela	Kota Mataram	116.0499	-8.5178
26	Perumahan Panda Village	Panda	Palibelo	Kabupaten Bima	118.7062	-8.5110

Sumber : Dokumen Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB tahun 2021

Tabel 4.37 Daftar Penerima Bantuan PSU Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampai Dengan Tahun 2022

No	Perumahan	Pengembang	Nilai Bantuan(Rp)	Unit Rumah BantuanPSU	Panjang Jalan (meter)	TipeLPA	
Tahun 2016			Total	710	unit		
Kabupaten Lombok Barat							
1	1	Bumi Harapan Permai	PT. Lambang Sejati	531.690.000	100	535	Beton
2	2	Green Mulia Asri	PT. Anugrah Dasar Mulia	584.860.000	110	535	Paving
Kabupaten Lombok Utara							
3	1	Sigar Penjalin Residence	PT. Permata Biru Property	1.063.390.000	200	1071	Beton
Kabupaten Lombok Tengah							
4	1	Elje/ Tanggak Pratama	PT. Tripainti Sejahtera	626.190.000	120	643	Beton
Kabupaten Lombok Timur							
5	1	Griya Pesona Madani	PT. Varindo Lombok Inti	911.440.000	180	773	Paving
Tahun 2017			Total unit	425			
Kabupaten Lombok Barat							
1	1	Taman Ayu	PT. Daya Cipta Perdana	301.580.000	60	268	Beton
2	2	Pesanggaran Indah	PT. Citra Jaya Graha	275.480.000	55	246	Beton
3	3	Griya Menang Asri	PT. Varindo Lombok Inti	752.400.000	150	673	Paving
4	4	Griya Reyan Indah	PT. Lambang Sejati	357.080.000	80	318	Beton
Kabupaten Sumbawa							
5	1	Baiti Jannati Sumbawa	PT. Baiti Jannati Lombok	369.890.000	80	362	Paving
Tahun 2018			Total unit	1.236			
Kabupaten Lombok Barat							
1	1	Amaris Green Hill Wadon	PT. Amaris Raya Group	267.725.000	50	268	Paving
2	2	Muhajirin Asri 2	PT. Anugrah Alam Property	513.909.000	150	517	Paving
3	3	Royal Zam Zam 2	PT. Lombok Royal Property	567.135.000	130	562	Paving
4	4	Griya Perembun Asri	PT. Varindo Lombok Inti	297.826.000	50	295	Paving
5	5	Taman Ayu	PT. Daya Cipta Perdana	275.808.000	50	256	Beton
6	6	Pesanggaran Indah	PT. Citra Jaya Graha	272.985.000	50	254	Beton
7	7	Griya Reyan Indah	PT. Lambang Sejati	239.940.000	50	222	Beton
8	8	Citra Persada Dawung	PT. Surya Jaya Persada	540.716.000	100	523	Beton
9	9	Lentana Garden	PT. Hissto Perkasa Nusantara Jaya	477.847.000	140	457	Beton
10	10	Bhayangkara Residence	PT. Zenith Lombok Property	673.147.000	166	678	Paving
Kabupaten Sumbawa							
11	1	Baiti Jannati Sumbawa	PT. Baiti Jannati Lombok	726.849.000	150	777	Baton
12	2	Puri Citra Samawa	PT. Citra Mulia Property	680.853.000	150	728	Beton
Tahun 2019			Total unit	854			
Kabupaten Lombok Barat							
13	1	Pondok Indah	PT. Longgon Cipta Indah	206.958.000	50	213	Paving
14	2	Grand Muslim 2	PT. Salva Inti Property	487.984.000	80	479	Paving
15	3	Hissto Granada Residence	PT. Hissto Perkasa Nusantara Jaya	584.018.000	140	574	Paving
16	4	Griya Taman Sari	PT. Varindo Lombok Inti	608.541.000	120	598	Paving
17	5	Bukit Citra Kencana	PT. Lambang Sejati	269.942.000	70	288	Beton
18	6	Griya Pesona Alam	PT. Varindo Lombok Inti	1.080.553.000	240	1.064	Paving
Kabupaten Lombok Utara							
19	1	Jambianom Harmoni	PT. Mitra Harmoni Properti	245.371.000	50	239	Paving
Kabupaten Sumbawa							
20	1	Bumi Samawa Damai	PT. Tahta Kasih Karunia	273.098.000	50	285	Paving
21	2	Graha Manasa	PT. Graha Manasa Property	316.634.000	54	331	Paving
No	Perumahan	Pengembang	Nilai Bantuan(Rp)	Unit Rumah BantuanPSU	Panjang Jalan (meter)	TipeLPA	

		Tahun 2020		Total unit	1.249		
Kabupaten Lombok Barat							
1	1	Griya Pesona Alam	PT. Varindo Lombok Inti		150		Paving
2	2	Griya Taman Sari	PT. Varindo Lombok Inti		157		Paving
3	3	Sudak Palace	PT. Maulana Raya Lombok		50		Paving
4	4	Bellpark 2	PT. Salva Inti Property		310		Paving
5	5	Alam Tembesi Asri	PT. Alam Asri Property		50		Paving
6	6	Muhajirin Asri 3	PT. Anugrah Alam Property		87		Paving
7	7	Ayodhya Palace	PT. Bangun Lombok Internusa		60		Paving
8	8	Royal Madinah	PT. Lombok Royal Property		310		Paving
Kabupaten Sumbawa Barat							
9	1	Baiti Jannati Taliwang	PT. Baiti Jannati Lombok		75		Paving
Tahun 2021							
1	1	Green Asia	PT. Meka Asia Properti	274,173,000	60	210	Paving
2	2	Grand Madani Labuapi	PT. Anugrah Alam Property	229,002,000	50	175	Paving
3	3	Bale Agung 2	PT. Bale Lombok Agung	239,829,000	60	204	Paving
4	4	Sembung Palace	PT. Maulana Raya Lombok	206,627,000	50	157.5	Paving
5	5	Terong Tawah Regency	PT. Mandasari Putri	354,101,000	80	272	Paving
6	6	Green Asia Tahap 2	PT. Meka Asia Properti	229,006,000	50	175	Paving
7	7	Dasan Baru Asri	PT. Alam Asri Properti	297,296,000	70	227.5	Paving
8	8	Griya Pesona Alam	PT. Varindo Lombok Inti	682,436,000	150	525	Paving
9	9	Perumahan Bellpark 2	PT. Salva Inti Property	823,244,000	200	640	Paving
Kabupaten Lombok Timur							
10	1	Sekar Anyer	PT. Daya Cipta Perdana	481,318,000	92	368	Paving
Kabupaten Sumbawa							
11	1	Baiti Jannati Sumbawa	PT. Baiti Jannati Lombok	488,304,000	80	400	Paving
Tahun 2022							
Kota Mataram							
1	1	Perumahan Graha Asami	PT. Citra Jaya Graha		58		Paving
Kabupaten Lombok Barat							
2	1	Kila Rengganis	PT. Satria Garuda Muda		50		Paving
3	2	Ayodhya Palace Tahap 3	PT. Bangun Lombok Internusa		90		Paving
4	3	Bellpark 2 Tahap 2	PT. Salva Inti Property		150		Paving
5	4	Sudak Palace 2	PT. Maulana Raya Lombok		70		Paving
6	5	Griya Pesona Alam	PT. Varindo Lombok Inti		150		Paving
7	6	Amala Residence	PT. Ahmada Lombok Properti		50		Paving
8	7	Mambalan Harmoni	PT. Mitra Harmoni Property		50		Paving
Kabupaten Sumbawa							
9	1	Samota Residence	PT. Mitra Harmoni Properti		128		Paving
				TOTAL	6.212	unit	

Sumber : Data Capaian BP2PNT-1 Tahun 2022

Tabel 4.38 Data tentang PSU Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang Berbatasan

NO	PERUMAHAN	PENGEMBANG	NILAI BANTUAN	UNIT RUMAH BANTUAN PSU	PANJANG JALAN (M)	TIPE LPA
1	Griya Perembun Asri	PT. Varindo Lombok Inti	297.826.000,00	50	295	Paving
2	Sembung Palace	PT. Maulana Raya Lombok	206.627.000,00	50	157,5	Paving

Sumber : Data Olahan Disperkim Provinsi NTB Tahun 2023

Tabel 4.39. Data KKPR yang Telah Diterbitkan Oleh Lembaga OSS Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA PEMOHON /NAMA PERUSAHAAN	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Lombok Barat	PT. Bale Indah Property	1204000711099	68111	Peruntukan rumah subsidi dan komersil
2	Lombok Tengah	Gading Utama Grup	0222010212896	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
3	Lombok Tengah	Gading Utama Grup	0222010212896	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
5	Sumbawa	ASIATA ALBAAFAZ GRUP	0402220033202	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
6	Sumbawa	M FARIED WADJDI	1507220057199	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
7	Sumbawa	M FARIED WADJDI	1507220057199	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
8	Sumbawa	LUNYUK AQUATAMA NUSANTARA	1209220109385	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
9	Sumbawa	LUNYUK AQUATAMA NUSANTARA	1209220109385	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
10	Sumbawa	MEGA UTAMA GROUP	1102220007256	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
11	Sumbawa	ASIATA ALBAAFAZ GRUP	0402220033202	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
12	Kota Bima	MUHAMMAD HABIB PROPERTY	2009220120195	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
13	Kota Bima	SYAMSURIH	1602230077975	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
14	Kota Bima	KONSTRUKSI TIANG MAS	1274000302567	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
15	Sumbawa Barat	KARYA ARTHA LOKA	9120003362273	68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
16	Lombok Utara	PT. ORISA KULA GEMILANG		68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan
17	Lombok Utara	PT. GEANETKHA CTPTA PRATAMA		68111	Kegiatan Pembangunan Perumahan

Sumber : Data DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023

Tabel 4.40 Data Perizinan Pembangunan PKP Tahun 2022 Yang Telah Diterbitkan Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Berada Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH	JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Mataram	PT. Varindo Lombok Inti	-	`Grand Natura	Jl. Terusan Bung Hatta, Kr. Baru Selatan, Kr. Baru Selaparang	114.726,382	78,28/41.957	-	103
2	Kota Mataram	PT. Rizqi Agung Putra	-	Aravindo	Jl. Lalu Mesir, Babakan Timur, Babakan Sandubaya	100.237,844	91,2/44.95	-	24
3	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Mataram	-	-	-	25
4	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Selaparang	-	-	-	12
5	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Ampenan	-	-	-	8
6	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Sekarbela	-	-	-	3
7	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Cakranegara	-	-	-	12
8	Kota Mataram	-	Perorangan	-	Kecamatan Sandubaya	-	-	-	11
9	Kota Bima	PT. Konstruksi Tiang Mas	-	Perumahan Grand City Tolotongga	Lingk. Ngaro Te RT.001 RW.001 Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima	-	Type 30	12	-
10	Kota Bima	PT. Konstruksi Tiang Mas	-	Perumahan Grand City Tolotongga	Lingk. Ngaro Te RT.001 RW.001 Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima	-	Type 30	12	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Kota Bima	PT. Hakka Properti Lombok	-	Perumahan Amari Green House Kobi	Jl. Gajah Mada RT.001 RW.001 Kel. Rabangodu Barat Kec. Raba Kota Bima	-	Type 28	57	-	
12	Kota Bima	PT. Konstruksi Tiang Mas	-	Perumahan Grand City Tolotonga	Lingk. Ngaro Te RT.001 RW.001 Kel. Ule Kec. Asakota Kota Bima	-	Type 30	29	-	
13	Kab. Lombok Barat	PT. Bale Indah Property	-	Perumahan Subsidi dan Komersil	Desa Telagawaru Kec. Labuapi	-	-	-	-	
14	Kab. Lombok Utara	PT. ORISA KULA GEMILANG	-	Perumahan	Karang Sobor, Desa Sokong, Kec. Tanjung, kab. Lombok Utara	-	600	-	-	
15	Kab. Lombok Utara	PT. GEANETKHA CTPTA PRATAMA	-	Perumahan Ganggaratu Residence	Dusun Karang Jurang, Desa Ganggelang, Kec. Gangga Kab. Lombok Utara	4281	1280/4281	-	-	
16	Kab. Lombok Utara	PT. PRIMA GRAHA LOBOK	-	Perumahan Tanjung Regency	Dusun Orong Kelas, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara	19364	810/19.364	-	-	
17	Kab. Lombok Utara	PT. SURYA JAYA PROPERTY	-	Perumahan Graha Sigar Penjalin	Dusun Lendang Berora, Desa Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara	31533	7.500/31.533	-	-	
18	Kabupaten Bima	-	Perorangan	RATNA DEWI	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Naru Kec. Woha	-	-	-	1	
19	Kabupaten Bima	-	Perorangan	RATNA DEWI	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Talabiu Kec. Woha	-	-	-	1	
20	Kabupaten Bima	-	Perorangan	ST. ASNI	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Tangga Kec. Monta	-	-	-	1	
21	Kabupaten Bima	-	Perorangan	MARIANI	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Panda Kec. Palibelo	-	-	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Kabupaten Bima	-	Perorangan	NURRIZKI SAFITRI	Hunian RumahTinggal Di Ds. Poja Kec. Sape	-	-	-	1	
23	Kabupaten Bima	-	Perorangan	SAFRUDIN	Hunian RumahTinggal Di Ds. Bugis Kec. Sape	-	-	-	1	
24	Kabupaten Bima	-	Perorangan	MARIYANI	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Panda Kec. Palibelo	-	-	-	1	
25	Kabupaten Bima	-	Perorangan	MAK'RUF	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Rai Oi Kec. Sape	-	-	-	1	
26	Kabupaten Bima	-	Perorangan	FUAD	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Tente Kec. Woha	-	-	-	1	
27	Kabupaten Bima	-	Perorangan	SUSMARITA	Hunian Rumah Tinggal Di Ds. Bugis Kec. Sape	-	-	-	1	
28	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	USMAN	RT.008 Rw.002 Lingk.Kenangan Atas Kel.ArabKenangan Taliwang	254	191/254	-	1	
29	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	DETI KUSUMAWATI	RT.001 Rw.001 Dsn.Sapugara Desa Sapugara Bree Kec.Brang Rea	318	68/318	-	1	
30	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	SRIATUN	Lingk.Telaga Baru A.RT.002/001 Desa Telaga Bertong Kec.Taliwang	152	55/152	-	1	
31	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	ZAKI BAWAZIR	Lingk.Arab Rt.006/001 Kel.Arab Kenangan	189	174/189	-	1	
32	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	MARZUKI	Dusun Sejongong RT.006/003 Desa Tongo Kec.Sekongkang KSB	478	199/478	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	Kab. Sumbawa Barat	-	Perorangan	NURWAHIDAH	Dsn.Nangka Lamung RT.08/04 DEsa Benete kec.Maluk KSB	140	44/140	-	1	
34	Sumbawa	-	Perorangan	SYARAFUDDIN	Rt 001 Rw 001 Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes	216	108/216	-	1	
35	Sumbawa	-	Perorangan	AGUS DIANTO	Karang Jangkrik Rt.004 Rw.006 Kel.Brang Bara Kec.Sumabawa	198	105/198	-	1	
36	Sumbawa	-	Perorangan	ABD RAHIM	Dusun Olat Rarang Rt.001 Rw.006 Desa Lab.Sumbawa Kec.Lab Badas	120	80,11/120	-	1	
37	Sumbawa	-	Perorangan	NURWAHIDA	Dusun Serading Rt.002 Rw.001 Desa Serading Kec.Moyo Hilir	671	174,04/671	-	1	
38	Sumbawa	-	Perorangan	DETTY FEBRIANTI	Jl. Dr.Sutomo Rt.002 Rw.006 Kel.Pekat Kec.Sumbawa	450	310,5/450	-	1	
39	Sumbawa	-	Perorangan	PUTRIANTI	Dusun Tanjung Pengamas Rt.003 Rw.002 Karang Dima Kec.Lab Badas	210	121/210	-	1	
40	Sumbawa	-	Perorangan	EVA ASTUTI	Dusun Baru A Rt.001 Rw.002 Desa Baru Tahan Kec.Moyo Utara	135	135/135	-	1	
41	Sumbawa	-	Perorangan	NYOMAN EDDY SASTRAWAN	Rt.003 Rw.008 Kel.Uma Sima Kec.Sumbawa	264	82/264	-	1	
42	Sumbawa	-	Perorangan	KURNIAWATI	Panto Daeng Rt.004 Rw.007 Kel.Brang Bara Kec.Sumbawa	328	140/328	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Sumbawa	-	Perorangan	BULAN PUTRI MASTARI	Jl. Lintas Sumabawa Bima Dusun Ai Nunuk Rt.002 Rw.005 Desa Serading Kec.Moyo Hilir	281	200/281	-	1	
44	Sumbawa	-	Perorangan	AHMAD IZHAN	Jl. Garuda Gg Karya 11 Lempeh Sumbawa, Kel.Lempeh Kec.Sumbawa	696	70/696	-	1	
45	Sumbawa	-	Perorangan	MUKHLIS	Dusun Berare A Rt.002 Rw.001 Kel.Berare Kec.Moyo Hilir	208	78/208	-	1	
46	Sumbawa	-	Perorangan	ANGGUN INDRAWATY	Btn Olat Rarang Blok E Nomor 08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas	120	80,11/120	-	1	
47	Sumbawa	-	Perorangan	NURUL HIDAYAT	Dusun Pemangong A Rt 001 Rw 008 Desa Lenaguar Kecamatan Lenaguar	357	30/357	-	1	
48	Sumbawa	-	Perorangan	KOESWARDONO HENDRO	Dusun Pendemen Desa Caturharjo Kecamatan Sleman	232	227/232	-	1	
49	Sumbawa	-	Perorangan	DARMAWATI	Rt 003 Rw 007 Dusun Karya Mulya Desa Plampang	423	132,25/423	-	1	
50	Sumbawa	-	Perorangan	LENNY WIJAYA	Jalan Manggis No 21 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	101	100/101	-	1	
51	Sumbawa	-	Perorangan	DWI NURWAHYUNNISA	Btn Griya Idola Rt 002 Rw 018 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	10482	2450/10482	-	1	
52	Sumbawa	-	Perorangan	HABIBA	Dusun Bukit Tinggi Rt 003 Rw 010 Desa Dete Kecamatan Lape	662	110/662	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Sumbawa	-	Perorangan	DEWI RAHAYU	Kampung Rinjani Rt 002 Rw 004 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	196	159/196	-	1	
54	Sumbawa	-	Perorangan	RA'YAN HUSAIN	Dusun Semamung Rt 002 Rw 001 Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu	264	55/264	-	1	
55	Sumbawa	-	Perorangan	SUMIRAH	Jalan Dr Cipto Rt 001 Rw 002 Kecamatan Sumbawa	300	172,26/300	-	1	
56	Sumbawa	-	Perorangan	JARIYATIN	Kampung Rinjani Rt 002 Rw 004 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	203	63/203	-	1	
57	Sumbawa	-	Perorangan	LUKMAN	Kampung Rinjani Rt 002 Rw 004 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	107,5	105/107,5	-	1	
58	Sumbawa	-	Perorangan	SUPARMAN	Dusun Penam Raya Desa Langam Kecamatan Lopok	94	90,02/94	-	1	
59	Sumbawa	-	Perorangan	NAFILA	Jlan Sudirman No 25 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa	240	134.30/240	-	1	
60	Sumbawa	-	Perorangan	SYAHIBUDDIN	Dusun Sumer Payung Rt 003 Rw 003 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas	270	270/270	-	1	
61	Sumbawa	-	Perorangan	LALU DIDIK SUANTO YUSUF	Ry 01 Rw 03 Desa Sekokat Kecamatan Labangka	7500	55/7500	-	1	
62	Sumbawa	-	Perorangan	AGUS	Dusun Jorok Dalam Rt 002 Rw 001 Desa Jorok Kecamatan Utan	295	104/295	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Sumbawa	-	Perorangan	PARAKKASI	Dusun Teluk Santong Rt 003 Rw 001 Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang	289	217/289	-	1	
64	Sumbawa	-	Perorangan	HENDRIK SUHENDI	Dusun Talemo Rt 001 Rw 003 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang	4484	343,50/4484	-	1	
65	Sumbawa	-	Perorangan	ALVIATUSSAHRIA	Dusun Propok Rt 001 Rw 001 Desa Buin Baru Kecamatan Buer	169	115,20/169	-	1	
66	Sumbawa	-	Perorangan	ROSIDI	Dusun Brang Kolong Rt 001 Rw 001 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang	540	126/540	-	1	
67	Sumbawa	-	Perorangan	NOVAN WIRAWAN	Jalan Garuda No 11 Rt 1 Rw 007 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa	297	96/297	-	1	
68	Sumbawa	-	Perorangan	AKHMAD P	Jalan Bungur Rt 002 Rw 007 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa	297	62,75/297	-	1	
69	Sumbawa	-	Perorangan	MUHAMMAD MUKHLISH	Griya Idola Blok N 15 Rt 002 Rw 018 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Sumbawa	366	115,64/366	-	1	
70	Sumbawa	-	Perorangan	AHMAD IZHAN	Jalan Garuda Gg Karya Ii Rt 002 Rw 004 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa	219	120/219	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71	Sumbawa	-	Perorangan	UI MERRY	Undaan Wetan 5/22 Rt 005 Rw 010 Desa Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya Jawa Timur	400	108,5/400	-	1	
72	Sumbawa	-	Perorangan	SRI MASJIANA	Bukit Berlian Jalan Lintas Raberan Rt 004 Rw 011 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa	296	112,5/296	-	1	
73	Sumbawa	-	Perorangan	HADIJAH	Jalan Bungur Rt 002 Rw 007 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa	186	130/186	-	1	
74	Sumbawa	-	Perorangan	ABDUL RAZAK	Lingkungan Kota Baru Rt 004 Rw 005 Desa Dalam Taliwang Desa Dalam Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	140	87/140	-	1	
75	Sumbawa	-	Perorangan	I KETUT SUJANA	Asrama Kodim Rt 001 Rw 001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	177	127/177	-	1	
76	Sumbawa	-	Perorangan	MUH IKBAL PRATAMA	Btn Puri Citra Samawa Blok B No 02 Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir	118	80/118	-	1	
77	Sumbawa	-	Perorangan	MAIMUNAH HARYANI	PANTO DAENG RT 003 RW 007 DESA KELURAHAN BRANG BARA KECAMATAN SUMBAWA	40	40/125	-	1	
78	Sumbawa	-	Perorangan	SRI HIDAYATI	Dusun Griya Idola Blok P-23 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	405	300/405	-	1	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
79	Sumbawa	-	Perorangan	PAKE	Dusun Lebawa Rt 002 Rw 003 Desa Jaya Maknur Kecamatan Labangka	2500	144/2500	-	1	
80	Sumbawa	-	Perorangan	ABDUL RAZAK	Lingkungan Kota Baru Rt 004 Rw 005 Desa Dalam Taliwang Desa Dalam Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	140	87/140	-	1	
81	Sumbawa	-	Perorangan	FATMAWATI	Dusun Penam Raya Rt 001 Rw 005 Desa Langam Kecamatan Lopok	490.70	358/490,70	-	1	
82	Sumbawa	-	Perorangan	MUH IKBAL PRATAMA	Btn Puri Citra Samawa Blok B No 02 Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir	118	80/118	-	1	
83	Sumbawa	-	Perorangan	I KETUT SUJANA	Asrama Kodim Rt 001 Rw 001 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa	177	127/177	-	1	
84	Sumbawa	-	Perorangan	MAIMUNAH HARYANI	Panto Daeng Rt 003/Rw007 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa	40	40/125	-	1	
85	Sumbawa	-	Perorangan	ST HALIMAH	Jalan Osap Sio Rt 004 Rw 004 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa	274	89/274	-	1	
86	Sumbawa	PT. PESONA ARTHA NUSANTARA	-	PERUMAHAN	Jalan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa	-	227/232	-	70	
87	Sumbawa	PT SAMAWA NUSANTARA INDAH	-	PERUMAHAN GREEN SAMAWA RESIDENCE TYPE 32,TYPE 36 DAN	Dusun Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas	-	227/232	-	35	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				TYPE 45						
88	Sumbawa	PT ASIATA ALBAAFAZ GRUP	-	PERUMAHAN TYPE 36	Dusun Sanggarahan Rt 003 Rw 002 Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat	11753	1944/11753	-	34	
89	Sumbawa	GANJAR KUSMANEGARA	-	PERUMAHAN TYPE 34 TYPE 40 DAN TYPE 80 PERUMAHAN BHUANA PERMATA HIJAU	Jalan Samota Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa	19215	5364/19215	-	42	
90	Sumbawa	PT BUKIT HIJAU INDAH	-	PERUMAHAN GRAHA TAMAN KOTA	Unter Ketimis Kelurahan Jma Sima Kecamatan Sumbawa	10895	1891/10895	-	61	
91	Sumbawa	PT BUKIT HIJAU INDAH	-	PERUMAHAN	Jalan Lintas Sumbawa Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir	18385	3379/18385	-	109	
92	Sumbawa	PT ALAM ASRI PROPERTI	-	PERUMAHAN TYPE 30 DAN TYPE 40	Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kelurahan Lempeh	24201	7390/24201	-	239	
93	Sumbawa	PT ARIF GUMILANG SEJATI	-	PERUMAHAN	DESA PERNEK KECAMATAN MOYO HULU	13260	3420/13260	-	-	
94	Kab. Lombok Timur	PT. Riyad Balqi Mandiri	-	Perumahan	Karang Anyar Kelurahan Kembang Sari Selong		Type 30	10		
95	Kab. Lombok Timur	PT. Daya Cipta Perdana	-	Perumahan	Kelurahan Sekarteje Selong		Type 27	119		

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH	JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Kab. Lombok Timur	PT. Graha Nurlaela Lombok	-	Perumahan	Dusun Lendang Bedurik, Kel Sekarteje Selong		Type 30	26	
97	Kab. Lombok Timur	PT. Mitra Bum Nusa Sejati	-	Perumahan	Lingkungan Dasan Ketangga, Kel Kembang Sari Selong		Type 42 dan Type 29	34	
98	Kab. Lombok Timur	Muhamad Mashadi	-	Perumahan	Kelurahan Sekarteje Selong		Type 28	98	
99	Kab Dompu	-	Perorangan	A. Rasyid	Dusun Sigi RT. 002 RW. 002 Desa Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu	770	-	-	-
100	Kab Dompu	-	Perorangan	J.A Tobu	Dusun Ta'a Desa Lune Kec. Pajo Kab. Dompu	561	-	-	-
101	Kab Dompu	-	Perorangan	ST. Aminah	Lingk. Dorongao RT. 003 RW. 001 Kel. Kandai Satu	167	-	-	-
102	Kab Dompu	-	Perorangan	Suparman	Kec. Dompu Kab. Dompu	404	-	-	-
103	Kab Dompu	-	Perorangan	Muhammad Ihsan	Dusun Nata RT. 003 RW. 001 Desa Lune Kec. Pajo	404	-	-	-
104	Kab Dompu	-	Perorangan	Lis Andriani	Kab. Dompu	204	-	-	-
105	Kab Dompu	-	Perorangan	Budi Suciadin	Lingk. Bukit Larema RT. 023 RW. 018 Kel. Simpasai	501	-	-	-
106	Kab Dompu	-	Perorangan	A. Hafid	Kec. Woja Kab. Dompu	192	-	-	-
107	Kab Dompu	-	Perorangan	Dimas Alfian	Dusun Doridungga RT. 013 RW. 000 Desa	357	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
108	Kab Dompu	-	Perorangan	Abdul Murtalib	Madaprana Kec. Woja Kab. Dompu	216	-	-	-	
109	Kab Dompu	-	Perorangan	Syamsudin Fattah	Dusun Rasabou RT. 002 RW. 001 Desa Rasabou Kec.	131	-	-	-	
110	Kab Dompu	-	Perorangan	Yophi S.	Hu'u Kab. Dompu	200	-	-	-	
111	Kab Dompu	-	Perorangan	Ida Wahyuni	Lingk. Rasabou RT. 002 RW. 002 Kel. Kandai Dua	154	-	-	-	
112	Kab Dompu	-	Perorangan	Sarifuddin	Kecamatan Woja Kab. Dompu	194	-	-	-	
113	Kab Dompu	-	Perorangan	Tamrin	Lingk. Larema RT. 017 RW. 022 Kel. Simpasai	649	-	-	-	
114	Kab Dompu	-	Perorangan	Aminah	Lingk. Renda RT. 015 RW. 006 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu	205	-	-	-	
115	Kab Dompu	-	Perorangan	Yulianti	Dusun Sawe RT. 007 RW. 002 Desa Sawe Kec. Hu'u Kab. Dompu	216	-	-	-	
116	Kab Dompu	-	Perorangan	Fitriani Sonata	Lingk. Jalan Baru RT. 012 RW. 005 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	453	-	-	-	
117	Kab Dompu	-	Perorangan	Syahrudin	Dusun Adu RT. 004 RW. 004 Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompu	763	-	-	-	
118	Kab Dompu	-	Perorangan	Fahrudin	Lingk. Jalan Baru RT. 013 RW. 005 Kel. Karijawa	412	-	-	-	

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Kec. Dompu Kab. Dompu					
119	Kab Dompu	-	Perorangan	Sudarman	Jln. Pinus Lingk. Dorotoi II RT. 004 RW. 002 Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu	750	-	-	-	-
120	Kab Dompu	-	Perorangan	M. Hasan H. Harun	Lingk. Rasabou RT. 015 RW. 008 Kel. Potu Kec. Dompu	835	-	-	-	-
121	Kab Dompu	-	Perorangan	Zunaidin	Ds. Mangga Dua RT. 003 RW. 001 Ds. Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu	1.230	-	-	-	-
122	Kab Dompu	-	Perorangan	Muhammad Sofyan, S. Pd	Ds. Mangga Dua RT. 003 RW. 001 Ds. Ranggo	253	-	-	-	-
123	Kab Dompu	-	Perorangan	Nurjayanti, Skm	Jln. Baru Karijawa RT. 012 RW. 005 Lingk. Karijawa Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	710	-	-	-	-
124	Kab Dompu	-	Perorangan	Mahdin	Lingk. Polo RT. 002 RW. 001 Kel. Kandai II Kec. Woja Kab. Dompu	154	-	-	-	-
125	Kab Dompu	-	Perorangan	Raodah, SE	Dsn. Madarutu RT. 020 RW. 008 Ds. Bara Kec. Woja Kab. Dompu	109	-	-	-	-
126	Kab Dompu	-	Perorangan	Yati Wahdiyati, SE	Link. Karijawa Baru RT. 012 RW. 005 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	287	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Kab Dompu	-	Perorangan	Ida Rohayu	Link. Karijawa Baru RT. 013 RW. 005 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	381	-	-	-	-
128	Kab Dompu	-	Perorangan	Endang Astuti	Lingk. Sawete Barat RT. 000 RW. 000 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu	400	-	-	-	-
129	Kab Dompu	-	Perorangan	Sri Nurhayati, S.Pd	Lingk. Sawete Barat RT. 000 RW. 000 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu	400	-	-	-	-
130	Kab Dompu	-	Perorangan	Syahruil Ramadhan	Jln. Teuku Umar Lingk. Bali 2 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu	120	-	-	-	-
131	Kab Dompu	-	Perorangan	Nining Sri Wahyuti	Lingk. Rato RT. 009 RW. 004 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	180	-	-	-	-
132	Kab Dompu	-	Perorangan	Aden Dwi Prasetyo	Lingk. Rato RT. 009 RW. 004 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	171	-	-	-	-
133	Kab Dompu	-	Perorangan	Abdul Jakariah	Dusun O'o Barat Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu	477	-	-	-	-
134	Kab Dompu	-	Perorangan	Gufran	Dusun Dorokobo Desa Dorokobo Kec. Manggelewa Kab. Dompu	436	-	-	-	-
135	Kab Dompu	-	Perorangan	Ikhwanurrahman	Jln. Lintas Mbawi Lingk. I RT. 002 RW. 001 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu	408	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
136	Kab Dompu	-	Perorangan	H. Syamsudin	Dusun Daha Barat RT. 007 RW. 003 Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu	154	-	-	-	-
137	Kab Dompu	-	Perorangan	Syaiful, ST	Dusun Daha Barat RT. 007 RW. 003 Desa Daha Kec. Hu'u Kab. Dompu	155	-	-	-	-
138	Kab Dompu	-	Perorangan	Demmy Lahillah, SST	Lingk. Rato RT. 010 RW. 004 Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	194	-	-	-	-
139	Kab Dompu	-	Perorangan	Kasmir, S.Kep	Jln. Dr. Sutoyo Lingk. Rasabou Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu	182	-	-	-	-
140	Kab Dompu	-	Perorangan	Suwardin	Lingk. Sawete Barat RT. 008 Rw. 004 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu	95	-	-	-	-
141	Kab Dompu	-	Perorangan	Cahya Fitriya	Lingk. Seratalaka RT. 007 RW. 003 Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu	196	-	-	-	-
142	Kab Dompu	-	Perorangan	Zulkifli	Dusun Soro RT. 006 RW. 000 Desa Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu	264	-	-	-	-
143	Kab Dompu	-	Perorangan	Murniati	Lingk. Dorongao RT. 003 RW. 001 Kel. Kandai Satu Kec. Dompu Kab. Dompu	243	-	-	-	-
144	Kab Dompu	-	Perorangan	Arifin	Dusun Mangga Dua RT. 002 RW. 001 Desa Ranggo Kec. Pajo Kab. Dompu	3927	-	-	-	-
145	Kab Dompu	-	Perorangan	Wahyudin	Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec. Hu'u Dompu	1026	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
146	Kab Dompu	-	Perorangan	Tibyan	Lingk. IV RT. 014 RW. 006 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu	180	-	-	-	-
147	Kab Dompu	-	Perorangan	Silvi Dwi Listyowati	Dusun Samada RT. 010 RW. 004 Desa Soriutu Kec. Manggelewa Kab. Dompu	299	-	-	-	-
148	Kab Dompu	-	Perorangan	Yunita Amalia Dewi	Dusun Ncangga Desa Hu'u Kec. Hu'u Dompu	600	-	-	-	-
149	Kab Dompu	-	Perorangan	Ahyani Rahmatullah	Lingk. I RT. 002 RW. 001 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu	211	-	-	-	-
150	Kab Dompu	-	Perorangan	Diah Putri Daninggar	Dusun Sigi RT. 002 RW. 002 Desa Hu'u Kec. Hu'u Kab. Dompu	1250	-	-	-	-
151	Kab Dompu	-	Perorangan	Muhammad Arman, ST	Jln. Syeh Muhammad Lingk. Sawete Barat RT. 011 RW. 005 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu	180	-	-	-	-
152	Kab Dompu	-	Perorangan	Lilis Manati	Lingk. I RT 003 RW. 002 Kel. Montabaru Kec. Woja Kab. Dompu	400	-	-	-	-
153	Kab Dompu	-	Perorangan	Dian Sari	Lingk. Seratalaka RT. 006 RW. 002 Kel. Dorotangga Kec. Dompu Kab. Dompu	55	-	-	-	-
154	Kab Dompu	-	Perorangan	dr. Suryani Malik	Jln. Baru Karijawa Lingk. Jalan Baru Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu	314	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
155	Kab Dompu	-	Perorangan	Misbah	Dusun Timah RT. 007 RW. 004 Desa Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu	1339	-	-	-	-
156	Kab Dompu	-	Perorangan	Burhanuddin	Jln. Lintas Wawonduru RT. 000 RW. 000 Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompu	400	-	-	-	-
157	Kab Dompu	-	Perorangan	Rahayu Liana, SH. MKn	Jln. Lele No. 94 Lingk. Sawete Timur RT. 016 RW. 007 Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu	300	-	-	-	-
158	Kab Dompu	-	Perorangan	Nurmala	Lingk. Rasabou RT. 005 RW. 003 Kel. Kandai Dua Kec. Woja Kab. Dompu	277	-	-	-	-
159	Kab Dompu	-	Perorangan	Ferawati	Dusun Padamara Desa Kempo Kec. Kempo Kab. Dompu	1246	-	-	-	-
160	Kab Dompu	-	Perorangan	Sagaf	Dusun Katua RT. 002 RW. 001 Desa Katua Kec. Dompu Kab. Dompu	86	-	-	-	-
161	Kab Dompu	-	Perorangan	Supratman	Lingk. Renda RT. 014 RW. 005 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu	238	-	-	-	-
162	Kab Dompu	-	Perorangan	Jakariah	Lingk. Renda RT. 016 RW. 005 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu	162	-	-	-	-

NO	KABUPATEN/KOTA	PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		NAMA PERUMAHAN/ PERORANGAN	ALAMAT LOKASI	LUAS LAHAN (M2)	TIPE RUMAH		JUMLAH UNIT	
		PENGEMBANG PERUMAHAN	PERORANGAN				LB/LT	MBR	NON MBR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
163	Kab Dompu	-	Perorangan	Mauluddin, SP	Lingk. Karijawa Selatan RT. 012 RW. 005 Kel. Karijawa Kec. Dompu	413	-	-	-	

Sumber : Data DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2023

Tabel 4.41 Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembangunan Terkait Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Berbatasan

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Sumber Pendanaan
I	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
A	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Lintas daerah Kabuapten / Kota				
A.1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Lintas Kab. Lombok Barat dan Kota Mataram	Kec. Sandubaya (Kota Mataram) dan Kec. Lingsar (Kab. Lombok Barat)	3,76	Ha	APBD
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Lintas Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah	Kec. Kopang (Lombok Tengah) dan Kec. Terara (Kab. Lombok Timur)	0,72	Ha	APBD

4.2.5 Permukiman Rawan Bencana

Permukiman rawan bencana adalah permukiman yang berada pada kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana. Apabila dilihat dari kondisi fisik wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan topografi yang sangat bervariasi, kondisi iklim, kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang debit airnya tidak stabil, dan material alluvial pembentuk tanah, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi terhadap terjadinya berbagai macam jenis bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunungapi, epidemi dan wabah penyakit, konflik / kerusuhan sosial, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Tidak menutup kemungkinan karena letaknya dikelilingi oleh selat, laut, dan samudera, maka bencana tsunami pun dapat terjadi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk hasil identifikasi Permukiman rawan bencana di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi :

1) Permukiman Yang Berada Di Daerah Rawan Banjir

Permukiman rawan banjir biasanya ada dibantaran sungai, yaitu permukiman yang terletak di area sempadan sungai dengan jarak sekitar 0-10 meter dan memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami banjir (Mononimbar, 2014). Selain Daerah bantaran sungai, Kawasan dengan elevasi rendah, Kawasan permukiman dengan system jaringan drainase yang buruk, dan permukiman dengan Kepadatan bangunan yang tinggi . Selain itu Daerah pesisir juga salah satu Kawasan yang memiliki potensi rawan Banjir.

Adapun Permukiman yang memiliki potensi rawan banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42 Sebaran lokasi Bahaya Banjir di Pulau Lombok Tahun 2020

Lokasi	Kawasan Rawan Banjir
Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kabupaten Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di

Lokasi	Kawasan Rawan Banjir
	Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kabupaten Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kabupaten Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalikh, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2010

Tabel 4.43 Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	26.348	Sedang
2. Lombok Tengah	71.251	Tinggi
3. Lombok Timur	77.888	Sedang
4. Sumbawa	130.482	Tinggi
5. Dompu	59.996	Sedang
6. Bima	54.114	Sedang
7. Sumbawa Barat	20.944	Sedang
8. Lombok Utara	20.074	Tinggi
9. Mataram	6.112	Tinggi
10. Kota Bima	2.317	Sedang
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	469.526	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Tabel 4.43 memperlihatkan hasil potensi luas bahaya banjir di Provinsi NTB. Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 10 kabupaten/kota adalah 469.526 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya banjir yaitu tinggi. Sedangkan untuk bahaya banjir bandang, seperti yang diperlihatkan pada tabel 4.44 yaitu total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 10 kabupaten/kota adalah 79.274 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya banjir bandang juga tinggi.

Tabel 4.44 Potensi Luas Bahaya Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	3.867	Tinggi
2. Lombok Tengah	2.007	Tinggi
3. Lombok Timur	9.746	Tinggi
4. Sumbawa	22.901	Tinggi
5. Dompu	7.985	Tinggi
6. Bima	19.127	Tinggi
7. Sumbawa Barat	6.780	Tinggi
8. Lombok Utara	5.722	Tinggi
9. Mataram	242	Tinggi
10. Kota Bima	897	Tinggi
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	79.274	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Untuk lebih jelasnya Kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dapat dilihat pada Gambar dan peta berikut:

Potret Banjir Di Kekalik Jaya_Kota Mataram Tahun 2021 Dikarenakan Curah hujan yang Tinggi sehingga terjadinya luapan sungai ancar.



Sumber: Dokumentasi Suara NTB

Potret Banjir Di Kebon Roek_Ampenan diakibatkan oleh buruknya drainase dan tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Ampenan dan sekitarnya



Sumber: Dokumentasi Antara News Tahun 2020

Potret Banjir di Tampes Desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jembatan terputus akibat derasnya luapan air sungai dikarenakan hujan mengguyur sejumlah kawasan di KLU



Sumber: Detik.com Tahun 2020

Potret Banjir Di Dusun Telaga Wareng Desa Pemenang Barat. Banjir terjadi karena derasnya curah hujan di Lombok Utara dan sekitarnya



Sumber: Dokumentasi Lombok Post Tahun 2020

Potret Banjir Lombok Barat, terjadi di 3 kecamatan Selain curah hujan yang cukup tinggi, perencanaan pembangunan yang kurang baik, serta kurangnya peran masyarakat dan pema menjaga hutan menjadikan dampak banjir lebih parah



Sumber: Detik.com Tahun 2021

Potret Banjir Di Dusun Kebeng, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. banjir yang terjadi diduga karena banjir kiriman yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah



Sumber: Dok. tribunnew.com Tahun 2021

Potret Banjir di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, disebabkan tumpukan sampah yang menutupi saluran pengendali banjir



Sumber: Tempo.com Tahun 2021

Potret Banjir di Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. banjir terjadi menyusul hujan disertai angin kencang di wilayah itu



Sumber: Dok. CNN Indonesia Tahun 2019

Potret Banjir Bandang di Desa Obel-obel, Kecamatan Sambelia Lombok Timur, banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi serta penggundulan hutan yang cukup masiif di hutan setempat



Sumber: antaranews.com Tahun 2019

Potret Banjir di Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Akibat kejadian tersebut, ratusan rumah diterjang banjir dan dua orang warga meninggal dunia



Sumber: Dokumentasi Kompas.com Tahun 2017

Potret Banjir di Desa Tepas Kabupaten Sumbawa Barat, banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dengan waktu yang cukup lama di pulau Sumbawa



Sumber: antaranews.com Tahun 2019

Potret Banjir di Banjir menggenangi tujuh kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Banjir tersebut disebabkan oleh luapan sungai akibat selama lima hari terakhir hujan deras berlangsung terus menerus



Sumber: tempo.com Tahun 2017

Potret Banjir di Desa Kandai II, Kecamatan Simpasai dan Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Dompu mengakibatkan meluapnya Sungai Laju dan Sungai Silo sehingga terjadi banjir bandang yang merendam ratusan rumah



Sumber: merdeka.com Tahun 2012

Potret Banjir di Kecamatan Sekongkang tepatnya di Desa Sekongkang Atas, banjir terjadi karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Kejadian tersebut mengakibatkan beberapa rumah warga terendam oleh air dan merusak tembok pagar rumah warga, serta merusak saluran irigasi, dengan jumlah warga terdampak 321 jiwa dan 107 rumah



Sumber: Dokumentasi BPPD NTB Tahun 2020

Potret Banjir di Desa Dalam dan Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air sungai meningkat dan menyebabkan penguatan pada tebing sungai tidak mampu menahan debit air hujan sehingga mengakibatkan banjir bandang



Sumber: Dokumentasi BPBD NTB Tahun 2021

Potret Banjir di antaranya Kelurahan Kota Baru, Kampo, Samporo, dan Lingkungan Mantro Bawah Kabupaten Dompu. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air sungai silo meningkat dan menyebabkan Air meluap membanjiri permukiman warga, terutama di bantaran sungai



Sumber: Dokumentasi BPBD NTB Tahun 2021

Potret Banjir di Kecamatan Sape dan Wawo di Kabupaten Bima. Banjir yang disebabkan oleh hujan deras dan menyebabkan satu korban meninggal dunia



Sumber: CNN Indonesia Tahun 2017

Potret Banjir di Kabupaten Bima. Banjir menyebabkan dua warganya meninggal dunia serta tercatat kurang lebih 27.808 jiwa terdampak, lebih 9.245 unit rumah warga terendam, empat jembatan juga ikut terputus, 294 hektare lahan pertanian, dan 25 hektare lahan perikanan warga ikut terdampak.



Sumber: Dokumentasi BPBD NTB Tahun 2021

Potret Banjir di Kecamatan Rasanae Timur, Asakota, Rasanae Barat dan Mpunda, Kota Bima. Banjir bandang yang melanda Kota Bima, Rabu (21/12/2016), disebut sebagai banjir terparah di Bima dalam beberapa tahun terakhir. Banjir diakibatkan oleh intensitas tinggi dan penggundulan hutan secara massif untuk penanaman jagung



Sumber: Dokumentasi Kompas.com Tahun 2016

Potret Banjir bandang di Kecamatan Rasanae barat Kota Bima. Banjir bandang dipicu hujan deras yang berlangsung selama satu jam



Sumber: Dokumentasi Kompas.com Tahun 2021

Gambar 4.12 Potret Banjir di Permukiman Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peta 4.25 Permukiman Rawan Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 4.26 Permukiman Rawan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Barat



2) Permukiman Yang Berada Di Daerah Rawan Longsor

Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya longsor terdapat di semua kota/kabupaten di Provinsi NTB.

Tabel 4.45 Sebaran lokasi bahaya tanah longsor

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
Rawan Tanah Longsor Tipe A		
1	Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
2	Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
3	Kabupaten Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
4	Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
5	Kabupaten Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
6	Kabupaten Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
7	Kabupaten dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
8	Kabupaten Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang
Rawan Tanah Longsor Tipe B		
1	Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
2	Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
3	Kabupaten Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
4	Kabupaten Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
5	Kabupaten Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2010

Tabel 4.46 Potensi Luas Bahaya Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	41.138	Tinggi
2. Lombok Tengah	16.424	Tinggi
3. Lombok Timur	52.614	Tinggi
4. Sumbawa	360.898	Tinggi
5. Dompu	90.516	Tinggi
6. Bima	267.316	Tinggi
7. Sumbawa Barat	124.621	Tinggi
8. Lombok Utara	36.746	Tinggi
9 Kota Bima	14.443	Tinggi
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.004.716	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 9 (sembilan) kabupaten/kota adalah 1,004 juta Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya tanah longsor berada pada kelas tinggi.

Potret Longsor di Lingkungan Nyanget, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram. Longsor yang diakibatkan talud di Jalan Gora tidak kuat menopang air kiriman dari hulu



Sumber: Dokumentasi Suara NTB Tahun 2018

Potret Longsor di Dusun Dompu Indah, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Longsor dipicu oleh gempa besar yang terjadi sesaat sebelum longsor.



Sumber: Dokumentasi liputan6.com Tahun 2018

Tanah Longsor Yang terjadi di Jalur Wisata Senggigi_.



Secara Typologi Kabupaten Lombok Barat memiliki typology perbukitan sehingga banyak permukiman yang tumbuh diarea tersebut. Sehingga salah satu dampak yang terjadi yaitu terjadi tanah longsor akibat daya dukung tanah yang tidak stabil. Seperti halnya desa kekait salah satu desa dari 118 desa yang sering mengalami peristiwa tanah longsor. Baik pada peristiwa gempa bumi pada tahun 2018 maupun debit hujan yang tinggi pada Tahun 2021.



Potret Longsor di Dusun Pancordao Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Longsor terjadi setelah curah hujan yang tinggi menyebabkan longsor dan mengakibatkan akses jalan penghubung Dusun Pancordao dan Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara tertimbun

Potret Longsor di Dusun Asmalang Utara, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Penyebabnya adalah karena hujan deras dan tebing yang memang sudah retak karena gempa bumi 2018 lalu



Sumber: Dokumentasi BPBD NTB Tahun 2021



Sumber: Dokumentasi Lombok Post Tahun 2021

Potret Longsor di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Longsor mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dilokasi kejadian dan 10 orang terluka karena tertimbun tanah



Sumber: Dokumentasi BPBD NTB Tahun 2013

Potret Longsor di Dusun Lemak Nanga dan Dusun Nong Ular Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh. Longsor terjadi setelah curah hujan yang cukup tinggi di beberapa wilayah Sumbawa Barat



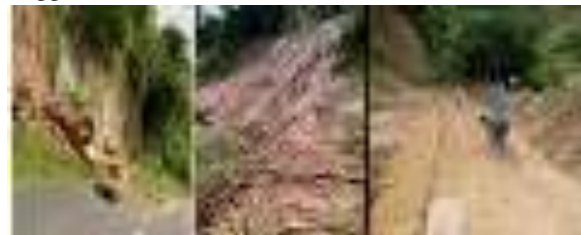
Sumber: Dokumentasi Lombok Post Tahun 2019

Potret Longsor di Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa. Hujan deras yang melanda Kabupaten Sumbawa menyebabkan terjadi Tanah longsor yang terjadi di beberapa titik membuat jalan dan rumah warga ambruk



Sumber: Dokumentasi Pulau Sumbawa News Tahun 2020

Potret Longsor di 20 titik yang longsor di antaranya Brang Liang dan Salomak Kabupaten Sumbawa. Longsor tiap tahun sering terjadi jika intensitas hujan tinggi di Sumbawa



Sumber: Dokumentasi Pulau Sumbawa News Tahun 2018

Potret Bangunan rumah yang roboh akibat longsor di lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.



Sumber: Dokumentasi topikbidom.com Tahun 2021

Potret Longsor di lahan jagung di So Sori Mango Desa Suka Damai Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, longsor terjadi akibat Hujan deras dengan intensitas cukup tinggi.



Sumber: Dokumentasi bersatu.com Tahun 2019

Potret 2 rumah roboh tertimpa batu besar akibat longsor Desa Cenggu Kabupaten Bima. Longsor terjadi karena lokasi permukiman yang berada dibawah tebing dan intensitas hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Bima



Sumber: Dokumentasi kahaba.net Tahun 2021

Potret Longsor di Desa Sondosia kecamatan Bolo kabupaten Bima. Longsor terjadi karena banjir di Sungai Desa Sondosia dan merusak bronjong penahan tebing



Sumber : Dokumentasi Pilar Bima Tahun 2021

Potret Bangunan rumah yang roboh akibat longsor di lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.



Sumber: Dokumentasi hariannusa.com Tahun 2019

Potret bukit sepanjang 10 meter dengan ketinggian delapan meter di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima longsor. Akibat longsor tersebut, tujuh rumah yang berada di bawahnya tertimbun



Sumber: Dokumentasi hariannusa.com Tahun 2018

Gambar 4.13 Potret Kejadian Longsor di Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peta 4.27 Peta Permukiman Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Nusa Tenggara Barat



3) Permukiman Yang Berada Di Daerah Rawan Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim termasuk bencana yang terjadi akibat fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi). Fenomena tersebut merupakan fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer.

Permukiman di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat yang rawan bencana Cuaca Ekstrim yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram. Untuk lebih jelasnya sebaran lokasi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 4.47 Sebaran lokasi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
1	Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
2	Kabupaten Lombok Timur	Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk dan Sambelia dsk
3	Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
4	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
5	Kabupaten Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
6	Kabupaten Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk
7	Kota Mataram	Seluruh wilayah Kota Mataram
8	Kota Bima	Seluruh wilayah Kota Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2010

Tabel 4.48 Potensi Luas Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	66.378	Sedang
2. Lombok Tengah	106.159	Sedang
3. Lombok Timur	118.833	Sedang
4. Sumbawa	329.246	Sedang
5. Dompu	145.794	Tinggi
6. Bima	281.044	Sedang
7. Sumbawa Barat	57.217	Sedang
8. Lombok Utara	49.316	Tinggi
9. Mataram	6.124	Sedang
10. Kota Bima	18.763	Sedang
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.178.874	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Potret dari bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Dongpu, telah menewak sejumlah rumah warga serta menumbangkan pohon di beberapa titik jalan yang mengakibatkan kemacetan. Dejangan angin puting beliung terjadi sebagai dampak dari badai yang terjadi di Sumatra Utara



Sumber: Dokumentasi koran merah Tahun 2020

Angin puting beliung disertai hujan deras dan menesak atap rumah-rumah warga di Kecamatan Waha, Kabupaten Bira, Tak hanya itu, angin ribut juga menumbangkan sejumlah pohon



Sumber: Dokumentasi republiko.com Tahun 2020

Potret Angin puting beliung kembali menghantam wilayah Kabupaten Dongpu. Setelah beberapa waktu yang lalu menghantam puluhan rumah warga di empat desa di Kecamatan Manggelewa, hari ini, Senin (30/11/2020) angin puting beliung kembali menghantam di Desa Lare, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dongpu



Sumber: Dokumentasi Warta NTB Tahun 2020

Potret 11 lapak pedagang di lokasi objek wisata Pantai Lareta, Kota Bira, disapa angin puting beliung.



Sumber: Dokumentasi Bir-Mataram tahun 2019

Potret dari angin kencang kembali menerjang Kabupaten Sumbawa Barat, kali ini angin yang datang disertai ujan dan petir yang cukup dahsyat merusak puluhan rumah di kelurahan Kuang, Menala, dan Arab Kenangan



Sumber: Dokumentasi koran merah Tahun 2020

Potret Angin puting beliung melanda di sejumlah wilayah kabupaten sumbawa barat, tepatnya pada hari Sabtu (17/1/2019) petang. Puluhan rumah dilaporkan mengalami rusak berat dan rusak dalam peristiwa itu. Total ada 38 rumah yang rusak. Angin puting beliung juga merusak sejumlah fasilitas umum lainnya



Sumber: Dokumentasi Lombok post Tahun 2019

Potret Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di empat kecamatan di Kabupaten Sumbawa, empat kecamatan yang terdampak, yaitu Kecamatan Alas Barat terdiri dari 12 rumah, satu sekolah dan satu puskesmas di Desa Lekong, 23 rumah di Desa Usar Mapin, 30 rumah di Desa Labuhan Mapin, 17 rumah di Desa Gontar, serta 15 rumah, satu masjid, satu mushalla di Desa Gontar Baru. Bahkan di Desa Usar Mapin terdapat dua rumah roboh



Sumber: Dokumentasi kompas.com Tahun 2020

Potret Bencana alam Angin Kencang Puting Beliung memporak-porandakan puluhan rumah di wilayah kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa



Sumber: Dokumentasi Baranews Tahun 2020

Potret dari bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Dompu, telah merusak sejumlah rumah warga serta menumbangkan pohon di beberapa titik jalan yang mengakibatkan kemacetan. Terjangan angin puting beliung terjadi sabagai dampak dari badai yang berada di Samudra Hindia



Sumber: Dokumentasi koran merah Tahun 2020

Potret Angin puting beliung kembali menghantam wilayah Kabupaten Dompu. Setelah beberapa waktu yang lalu menghantam puluhan rumah warga di empat desa di Kecamatan Manggelewa, hari ini, Senin (30/11/2020) angin puting beliung kembali mengamuk di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu.



Sumber: Dokumentasi Warta NTB Tahun 2020

Angin puting beliung disertai hujan deras dan merusak atap rumah-rumah warga di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Tak hanya itu, angin ribut juga menumbangkan sejumlah pohon



Sumber: Dokumentasi republika.co.id Tahun 2020

Potret 11 lapak pedagang di lokasi obyek wisata Pantai Lawata, Kota Bima, disapu angin puting beliung.



Sumber: Dokumentasi RRI Mataram tahun 2019

Gambar 4.14 Potret Kejadian Cuaca Ekstrim di Nusa Tenggara Barat

Peta 4.28 Peta Permukiman Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat



4) Permukiman Yang Berada Di Daerah Rawan Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan. Selain itu, kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul.

Dampak dari bahaya kekeringan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan mata pencaharian. Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berikut adalah sebaran bahaya kekeringan di Pulau Lombok :

Tabel 4.49 Sebaran lokasi Bahaya Kekeringan di Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
1	Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, LiukKayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
2	Kabupaten Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
3	Kabupaten Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
4	Kabupaten Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok-Punik, AlasPenyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, LenangguarSemongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-LopokLape-kalaning-Tanjungberu-Pungkit, Plampang-Empang
5	Kabupaten Dompu	Kempe, Hu'u, Kilo dan Mbawi
6	Kabupaten Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang
7	Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-TepasSeteluk-Labuhan Sepakeh
8	Kota Mataram	Seluruh wilayah Kota Mataram
9	Kota Bima	Seluruh wilayah Kota Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2010

Tabel 4.50 Potensi Luas Bahaya Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	89.656	Tinggi
2. Lombok Tengah	109.503	Tinggi
3. Lombok Timur	123.076	Tinggi
4. Sumbawa	664.398	Tinggi
5. Dompu	232.662	Tinggi
6. Bima	340.563	Tinggi
7. Sumbawa Barat	179.176	Tinggi
8. Lombok Utara	77.625	Tinggi
9. Mataram	6.124	Tinggi

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
10. Kota Bima	21.509	Sedang
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.844.292	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Potret dari bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Barat sudah beranjak status, dari awalnya siaga menjadi tanggap darurat. Resolusi status terjadi karena bertambahnya jumlah kecamatan dan desa yang mengalami kekeringan



Sumber: Dokumentasi Mitras NIS Tahun 2019

Potret grup masyarakat klat kekeringan menyalak di Lombok Timur, jaringan pipa air rusak sehingga pasokan air tanah berkurang



Sumber: Dokumentasi Mitras Mitrasid Tahun 2018

Potret bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah, empat kecamatan terdampak adalah kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat daya, dan Praya Timur



Sumber: Dokumentasi Mitras NIS Tahun 2020

Potret kekeringan di 7 kecamatan dan 37 desa Lombok Timur, Bupati Lombok Timur H. M. Sulaiman Azmy menyalakan status penanganan kekeringan dari siaga menjadi tanggap darurat



Sumber: Dokumentasi Mitras NIS Tahun 2019

Potret dari bencana kekeringan di Moyo Hilir, Lape, Labuhan Badas, dan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.



Sumber : Dokumentasi Radar Sumbawa Tahun 2020

Potret Ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Sumbawa gagal panen karena bencana kekeringan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya pasokan air irigasi ke sawah-sawah petani. El Nino yang melanda kawasan Indonesia bagian timur termasuk Kabupaten Sumbawa berdampak secara langsung terhadap ratusan hektar lahan pertanian.



Sumber: Dokumentasi PS News Tahun 2015

Potret Kabupaten Sumbawa dilanda kekeringan. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, sebanyak 18 kecamatan mengalami kekeringan, dampak musim kemarau.



Sumber: Dokumentasi samawa rea Tahun 2016

Potret kekeringan di Sumbawa Barat, terjadi lantaran fenomena El Nino (memanasnya suhu muka laut di Samudera pasifik bagian tengah hingga timur) bertepatan dengan musim kering dan curah hujan rendah di wilayah Indonesia.



Sumber: Dokumentasi Suara NTB Tahun 2019

Potret dari bencana kekeringan Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu yang berdampak terhadap berkurangnya hasil pertanian. Penggundulan hutan menjadi penyebab kekeringan dan berkurangnya cadangan mata air, seiring dengan meluasnya areal peladangan jagung, terutama di titik kemiringan ekstrem.



Sumber : Dokumentasi info dompu Tahun 2019

Potret Sekitar 1.022 ha tanaman padi di Kabupaten Dompu terkena dampak kekeringan akibat rendahnya curah hujan. Wilayah Kecamatan Huu yang paling banyak dampak kekeringan yaitu seluas 997 ha dan Kecamatan Manggelewa seluas 25 ha.



Sumber: Dokumentasi Suara NTB Tahun 2019

Potret Kekeringan mulai melanda Kota Bima. Akibatnya, ribuan penduduk kesulitan mendapatkan air bersih. Setidaknya 38 kelurahan dari 5 Kecamatan di wilayah tersebut mengalami kekeringan akibat kemarau panjang, kekeringan terparah terjadi di antaranya, Kelurahan Dara,

Potret kekeringan di dusun Nando Ndere, Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Warga yang bermukim di dusun itu kerap mengalami krisis air tiap memasuki musim kemarau, kekeringan yang terjadi di wilayah itu disebabkan kondisi geografis yang berpotensi mengalami kekeringan rutin saat kemarau.

Monggonao, Tanjung, Sarae, dan Melayu.



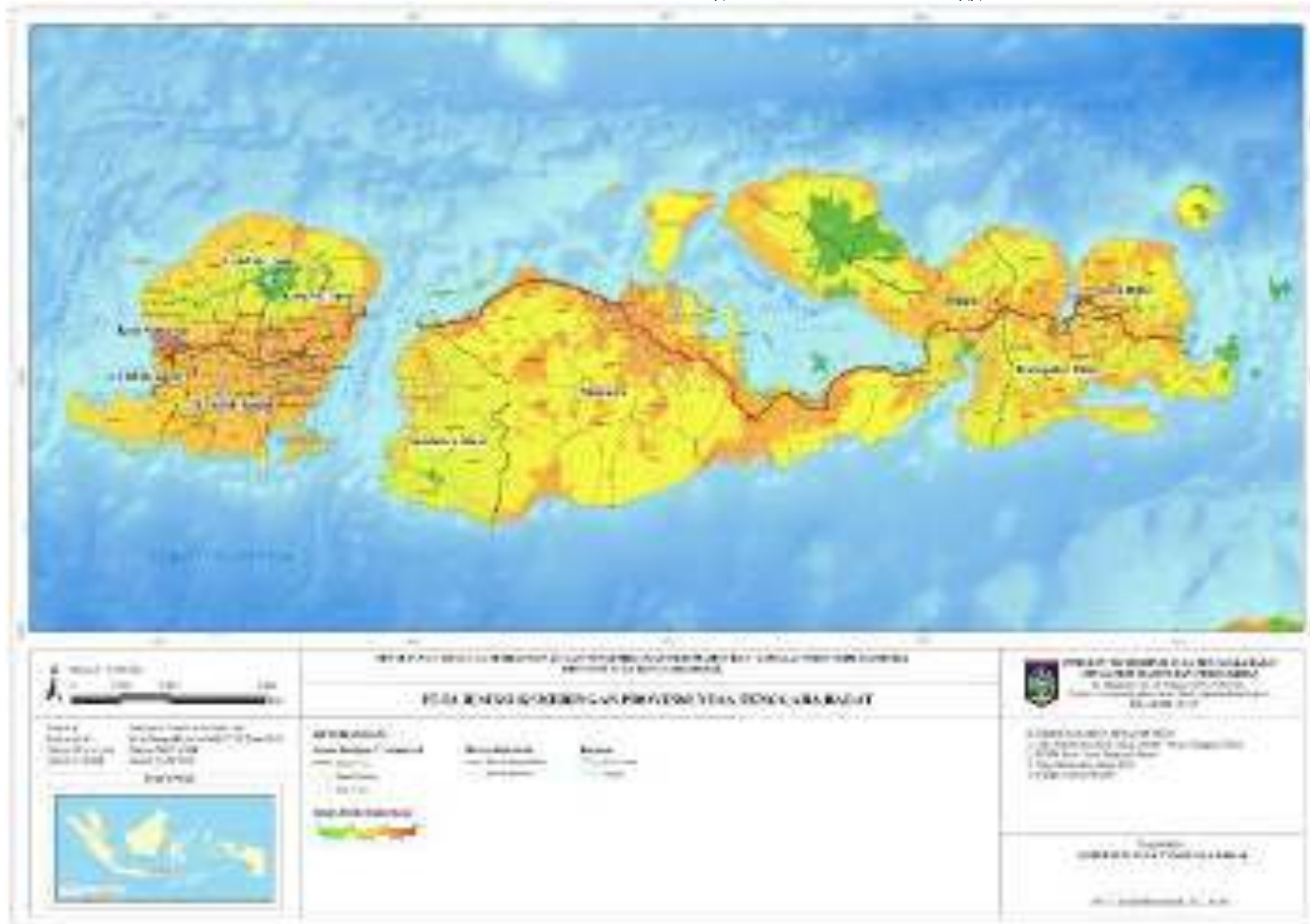
Sumber: Dokumentasi Kontan.co.id Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi kompas.com Tahun 2017

Gambar 4.15 Potret Kejadian Kekeringan di Nusa Tenggara Barat

Peta 4.29 Permukiman Rawan Bencana Kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



5) Permukiman Di Daerah Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Area sekitar keberadaan gunung berapi aktif merupakan wilayah rawan terhadap bencana letusan gunungapi.

Permukiman pada area sekitar Gunung Berapi Aktif yang rawan akan bencana letusan gunung berapi yaitu yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram pada kawasan gunung rinjani. Berikut kejadian bencana gunung berapi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya sebaran lokasi bencana gunung berapi dapat dilihat pada tabel, dan peta berikut :

Tabel 4.51 Sebaran lokasi Bahaya Gunung Berapi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
Gunung Rinjani		
1	Kabupaten Lombok Utara	Daerah Bahaya : Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
2	Kabupaten Lombok Timur	Daerah Bahaya : Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora		
3	Kabupaten Dompu	Daerah Bahaya : Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
4	Kota Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
5	Kabupaten Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang		
6	Kabupaten Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sori Panda, Sori Iso dan Sori Berano
		Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
		Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB Tahun 2010

Tabel 4.52 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunung Api Rinjani di Provinsi NTB

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Tengah	3.893	Rendah
2. Lombok Timur	11.964	Rendah
3. Lombok Utara	7.739	Tinggi
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	23.596	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Tabel diatas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya letusan Gunungapi Rinjani di Provinsi NTB. Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 3 (tiga) kabupaten/kota adalah 23.596 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu tinggi.

Tabel 4.53 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunung Api Tambora di Provinsi NTB

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Dompu	6.067	Rendah
2. Bima	16.685	Sedang
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	22.752	SEDANG

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Tabel diatas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya letusan Gunungapi Tambora di Provinsi NTB. Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 2 (dua) kabupaten/kota adalah 22.752 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya letusan Gunungapi Tambora berada pada kelas sedang.

Tabel 4.54 Potensi Luas Bahaya Bencana Letusan Gunungapi Tambora di Provinsi NTB

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
Bima	15.703	Rendah
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	15.703	RENDAH

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Tabel diatas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya letusan Gunungapi Sangeangapi di Provinsi NTB. Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari satu kabupaten/kota adalah 15.703 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya letusan Gunungapi Sangeangapi berada pada kelas rendah.

Peta 4.30 Permukiman Rawan Bencana Gunung Berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat



6) Permukiman Di Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Penyebab terjadinya gempabumi karena pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Selain itu, gempabumi dapat terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunungapi meletus. Tingginya aktivitas gunungapi menyebabkan timbulnya ledakan yang merupakan pemicu gempabumi dan dirasakan untuk area sekitar gunung.

Permukiman di kawasan rawan bencana gempa bumi di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pada area patahan-patahan tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di Pulau Lombok. Berikut uraian mengenai bencana gempa bumi di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.55 Sebaran lokasi Bahaya Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (modified mercally intensity)

Sumber : RTRW Prov. NTB

Tabel 4.56 Potensi Luas Bahaya Bencana Gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	89.656	Sedang
2. Lombok Tengah	109.503	Sedang
3. Lombok Timur	123.076	Sedang
4. Sumbawa	664.398	Tinggi
5. Dompu	232.659	Tinggi
6. Bima	340.563	Tinggi
7. Sumbawa Barat	179.176	Sedang
8. Lombok Utara	77.625	Tinggi
9. Mataram	6.124	Sedang
10. Kota Bima	21.509	Tinggi
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.844.289	TINGGI

Sumber : BNPB, Kajian Risiko Bencana 2015-2020

Tabel di atas memperlihatkan hasil potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi NTB. Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 10 kabupaten/kota adalah 1,844 juta Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas bahaya gempa bumi berada pada kelas tinggi.

Potret Bencana Gempa Kota Mataram (Tahun 2018)



Potret Bencana Gempa Lombok Barat (Tahun 2018)



Potret Bencana Gempa Lombok Utara (Tahun 2018)



Potret Bencana Gempa Lombok Tengah (Tahun 2018)



Potret Bencana Gempa Lombok Timur (Tahun 2018)



Potret Bencana Gempa dan Tsunami di Desa Awang dan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1977



Serangkaian bencana gempa di Pulau Lombok terjadi dari bulan Juli s/d September 2018, mengakibatkan kerusakan rumah sebanyak 32.016 rusak berat, 3.173 rusak sedang, dan 36.773 rusak ringan. Kerusakan fisik lainnya terdapat 671 unit fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan, 20 unit perkantoran, 6 unit jembatan, dan jalan-jalan rusak dan ambles akibat gempa.

Potret dari bencana gempa yang Kabupaten Sumbawa tahun 2018, mengakibatkan kerusakan rumah di Kecamatan Alas total yang rusak sebanyak 2.231 rumah, di Kecamatan Alas Barat sebanyak 3.328 rumah, dan di Kecamatan Buer sebanyak 1.305 rumah.

Potret bencana Gempa di Sumbawa Barat Sebanyak 15.361 Rumah warga rusak akibat gempa bermagnitudo 7,0 SR yang berpusat di timur laut Lombok Timur. Dari 15.361 rumah yang rusak tersebar di delapan Kecamatan di KSB, sebanyak 2.326 mengalami rusak berat, 5.955 rusak sedang dan 7.080 tergolong rusak ringan.



Sumber: Dokumentasi Sumbawa News Tahun 2018



Sumber: Dokumentasi kicknews today Tahun 2020

Potret dari bencana Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 di Kabupaten Dompu, mengakibatkan sekitar 137 unit rumah rusak. Gempa berpusat di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu .



Sumber : Dokumentasi kompas.com Tahun 2016

Potret warga berhamburan keluar rumah di Kota Bima setelah terjadi gempa berkekuatan 6,6 skala richter, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan.



Sumber: Dokumentasi kahaba.net Tahun 2016

Gambar 4.16 Potret Kejadian Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat

Peta 4.31 Peta Permukiman Rawan Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat



7) Permukiman Di Daerah Rawan Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang. "tsu" berarti pelabuhan, "nami" berarti gelombang sehingga secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami biasanya ditandai dengan gempa bumi dasar laut yang menimbulkan gelombang laut yang besar. Permukiman di rawan tsunami yaitu permukiman yang berada di wilayah pesisir. Berikut uraian mengenai bencana tsunami di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4.57 Sebaran lokasi Bahaya Tsunami di Provinsi NTB

No.	Lokasi	Kawasan Rawan
1	Kabupaten Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
2	Kabupaten Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
3	Kabupaten Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
4	Kabupaten Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
5	Kabupaten Dompu	Wilayah pesisir bagian selatan dan utara Kabupaten Dompu
6	Kabupaten Bima	Wilayah pesisir bagian selatan dan utara Kabupaten Bima
7	Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejongong dan Sekongkong
8	Kota Mataram	Wilayah pesisir Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela
9	Kota Bima	Wilayah pesisir bagian timur, selatan, dan utara Kota Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB 2010

Tabel 4.58 Potensi Luas Bahaya Bencana Tsunami di Provinsi NTB

KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. Lombok Barat	6.303	Tinggi
2. Lombok Tengah	2.435	Tinggi
3. Lombok Timur	6.377	Tinggi
4. Sumbawa	26.014	Tinggi
5. Dompu	2.397	Tinggi
6. Bima	17.888	Tinggi
7. Sumbawa Barat	6.131	Tinggi
8. Lombok Utara	2.943	Tinggi
9. Mataram	1.274	Tinggi
10. Kota Bima	630	Tinggi
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	72.392	TINGGI

Sumber : BNPB, *Kajian Risiko Bencana 2015-2020*

Total luas bahaya yang berpotensi secara keseluruhan dari 10 kabupaten/kota adalah 72.392 Ha. Dari pengkajian tersebut didapatkan kelas berada pada kelas tinggi.

Peta 4.32 Peta Permukiman Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat



4.2.6 Wilayah Terlarang (Negative List)

Wilayah terlarang untuk pengembangan permukiman merupakan wilayah yang tidak layak untuk pengembangan permukiman, yaitu kawasan lindung. Kriteria kawasan lindung yang menjadi wilayah terlarang pengembangan permukiman, dapat mengacu pada Keppres No.32 Tahun 1990 mengenai Penetapan Kawasan Lindung, jenis kawasan lindung berikut:

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Suaka Alam & Cagar Budaya (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional)
- Kawasan rawan bencana alam (rawan letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang dan banjir)
- Waduk / danau / bendungan dan sekitar mata air
- Sungai & sempadannya
- Kawasan pesisir

Berdasarkan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2023, maka wilayah terlarang untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

1. Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Lokasi kawasan hutan lindung tersebar di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

2. Kawasan sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional, kriteria penetapan sempadan pantai meliputi:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Sempadan pantai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:
 - wilayah pesisir kepulauan Nusa Tenggara Barat

- sempadan pantai utara Nusa Tenggara Barat
- sempadan pantai barat Nusa Tenggara Barat
- sempadan pantai timur Nusa Tenggara Barat
- sempadan pantai selatan Nusa Tenggara Barat

Untuk kawasan pantai yang merupakan daerah rawan tsunami penetapan sempadan pantai ditekankan pada penetapan zona bahaya tsunami. Kawasan pada daerah rawan banjir tidak diizinkan mendirikan Permukiman pada zona ini. Zona bahaya ini dibagi menjadi beberapa zona yang berfungsi mengurangi kecepatan dan ketinggian gelombang, terdiri dari:

- Zona mangrove
- Zona perikanan darat/tambak
- Zona perkebunan

3. Kawasan sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai yang dilarang untuk pengembangan permukiman yaitu:

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

4. Kawasan sempadan Danau/Waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk adalah daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi atau daratan sepanjang tepian waduk atau danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk atau danau.

5. Kawasan sempadan Mata air

Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan sekitar mata air meliputi:

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

6. Kawasan Suaka Margasatwa

Kawasan suaka margasatwa di Provinsi NTB yaitu Dataran Tinggi Yang terletak di Gunung Tambora Selatan – Kabupaten Dompu dengan luasan 21674,68 Ha.

7. Kawasan cagar alam

Kawasan cagar alam harus tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan tidak diijinkan untuk alih fungsi lahan. Lokasi cagar alam antara lain:

- Cagar alam Pulau Panjang terletak di Kabupaten Sumbawa;
- Cagar alam Pulau Sangiang terletak di Kecamatan Wera- Kabupaten Bima;
- Cagar alam Tambora Selatan terletak di Kabupaten Dompu;
- Cagar alam Tanah Pedauh terletak di Kabupaten Sumbawa;
- Cagar alam Tofo Kota Lambu terletak di Desa Labu – Kabupaten Bima;
- Cagar alam Pedauh terletak di Kabupaten Sumbawa

8. Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir dan laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai. Kriteria penetapan kawasan pantai berhutan bakau berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional adalah koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

9. Kawasan Taman Nasional

Taman Nasional Gunung Rinjani (TN-GR) memiliki luas area kurang lebih 117.940Ha dengan lokasi mencakup wilayah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur. TN-GR memiliki fungsi sebagai taman nasional yang dikelola perhutani disamping sebagai daerah tujuan wisata andalan Nusa Tenggara Barat.

10. Kawasan Taman Hutan Rakyat

Taman Hutan Raya yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah Nurasa memiliki luas area kurang lebih 2.735 Ha terdapat di empat wilayah yaitu di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur.

4.3 Profil Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

4.3.1 Jaringan Jalan/ Transportasi

Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Panjang jalan nasional dan Provinsi di NTB sampai akhir 2021 mencapai 2,418.98 km. Berdasarkan klasifikasi jalan, 934,55 km merupakan jalan nasional dan 1.484,43 km merupakan jalan Provinsi. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, jalan yang kondisinya baik mencapai 54,96 persen dengan kelas jalan terpanjang adalah Kelas III. Jumlah jembatan Negara dan jembatan provinsi pada tahun 2021 mencapai 1.395 unit dengan panjang mencapai 22.404,9 Kilometer.

Tabel 4.59 Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

No.	Keadaan	Status	
		Jalan Negara (Km)	Jalan Provinsi (Km)
1.	Jenis Permukaan		
	Diaspal	934,55	1.289,9
	Kerikil	0,00	23,6
	Tanah	0,00	170,9
	Tidak Dirinci	0,00	
	Jumlah/Total	934,55	1.484,43
2.	Kondisi Jalan		
	Baik	303,20	1.026,47
	Sedang	614,19	220,53
	Rusak Ringan	6,16,56	21,82
	Rusak Berat	0,60	215,61
	Tidak Dirinci	0,00	0,00
	Jumlah/Total	934,55	1.484,43
3.	Kelas Jalan		
	Kelas I/MST 10 Ton	0,00	0,00
	Kelas II/MST 10 Ton	567,08	0,00
	Kelas IIIA/MST 10 Ton	367,47	1.289,91
	Kelas IIIB/MST 10 Ton	0,00	0,00
	Kelas IIIC/MST 10 Ton	0,00	0,00
	Kelas Tidak Dirinci	0,00	194,52

No.	Keadaan	Status	
		Jalan Negara (Km)	Jalan Provinsi (Km)
	Jumlah/Total	934,55	1.484,43

Sumber : NTB Satu data, 2022

Tabel 4.60 Panjang Jalan Menurut Status di kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Status Jalan Kabupaten		Status Jalan Desa	
		Nomor SK	Panjang (Km)	Nomor SK	Panjang (Km)
1	Kab Lombok Barat				
2	Kab Lombok Tengah	Nomor 208a Tahun 2017	809,879		
3	Kab Lombok Timur	188.45/PU/2017	1.018,835		
4	Kab. Sumbawa	Nomor 1468 Tahun 2012	951,51		
5	Kab. Dompu	Nomor 142 Tahun 2012	534,900		
6	Kab. Bima	Nomor 188.45/388/06.9/2017	831,611		
7	Kab. Sumbawa Barat	Nomor 1350 Tahun 2015	338,690		
8	Kab Lombok Utara	622/DPU-PR/2017	400,070	622/DPU-PR/2017	99,75
9	Kota Mataram	535 / II / 2018	369,849		
10	Kota Bima	Nomor 381 tahun 2016	203,390	Nomor 381 tahun 2016	52,765

Sumber : Dinas PUPR masing-masing kabupaten/kota



Gambar 4.17 Kondisi Jalan dan Jembatan di beberapa titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam pengelolaan jembatan di provinsi NTB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB melalui Bidang Binamarga telah melaksanakan pengelolaan jembatan diawali dengan perencanaan dan pembuatan program penanganan jembatan, yang berfungsi untuk menjamin pengalokasian biaya pemeliharaan jembatan dilakukan secara optimal. Hal ini dilakukan dengan skrining teknis dan evaluasi ekonomi, untuk menentukan prioritas penanganan suatu jembatan.

Berdasarkan panjang jembatan menurut keadaan dan status di Prov. NTB dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.61 Panjang Jembatan Menurut Keadaan dan Status di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

No	Keadaan	Bentang <6 meter		Bentang >6 meter		Jumlah	
		Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang
1.	Jembatan Negara						
	Beton	147,00	636,00	397,00	5737,3	544,00	6.373,3
	Komposit	2,00	7,6	35,00	711,7	37,00	719,3
	Rangka Baja	0,00	0,00	30,00	1.556,7	30,00	1.556,7
	Gelagar Baja Lantai Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gelagar Baja Lantai Seng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baja Gantung	0,00	0,00	2,00	174,70	2,00	174,70
	Belum Ada Jembatan	0,00	0,00	1,00	45,2	1,00	45,2
	Lintasan Basah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah/ Total	151,00	615,5	465,00	8.225,6	614,00	8.869,2
2.	Jembatan Provinsi						
	Beton	160,00	647,50	414,00	5.927,5	574,00	6.575,00
	Komposit	4,00	16,10	26,00	633,5	30,00	649,60
	Rangka Baja	0,00	0,00	35,00	1994,4	35,00	1994,4
	Gelagar Baja Lantai Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gelagar Baja Lantai Seng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baja Gantung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belum Ada Jembatan	6,00	28,00	120,00	3.901	126,00	3.929,00

No	Keadaan	Bentang <6 meter		Bentang >6 meter		Jumlah	
		Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang
	Lintasan Basah	0,00	0,00	16,00	387,7	16,00	387,7
	Jumlah/ Total	170,00	691.6	611,00	12.844,1	781,00	13.535,7

Sumber : NTB Satu data, 2022

4.3.2 Jaringan Drainase

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem saluran ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Jumlah lokasi tempat dibangunnya saluran drainase dan panjang saluran drainase di Kabupaten dan Kota se-NTB yaitu sebanyak 56 lokasi dengan panjang saluran 48.948 meter yang dibangun dengan sumber dana APBD Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2020. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian lokasi dan panjang drainase di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.62 Panjang Saluran Drainase di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi	Panjang (m)
1	Kabupaten Lombok Barat	2	1.223
2	Kabupaten Lombok Tengah	17	9.918
3	Kabupaten Lombok Timur	8	11.049
4	Kabupaten Sumbawa	11	12.284
5	Kabupaten Dompu	1	227
6	Kabupaten Bima	5	1.124
7	Kabupaten Sumbawa Barat	1	166
8	Kabupaten Lombok Utara	1	3.749
9	Kota Mataram	6	8.252
10	Kota Bima	4	956
	Jumlah	56	48.948

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

4.3.3 Jaringan Listrik

Pada tahun 2020 di tercatat presentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 99,56% dimana Kota Mataram memiliki presentase rumah tangga pengguna listrik PLN terbanyak sebesar 100% dan Kabupaten Dompu memiliki presentase rumah tangga pengguna listrik PLN terendah yaitu sebesar 99,08%.

Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi rumah tangga pengguna listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 4.18 Salah satu PLTU yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 4.63 Distribusi Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	PLN (%)	Listrik Non PLN (%)	Bukan Listik (%)	Jumlah
1	Kab. Lombok Barat	98,91	1,09	-	100,00
2	Kab. Lombok Tengah	100,00	-	-	100,00
3	Kab. Lombok Timur	99,58	0,24	0,18	100,00
4	Kab. Sumbawa	100,00	-	-	100,00
5	Kab. Dompu	99,88	-	0,12	100,00
6	Kab. Bima	99,87	-	0,13	100,00
7	Kab. Sumbawa Barat	100,00	-	-	100,00
8	Kab. Lombok Utara	98,98	0,93	0,09	100,00
9	Kota Mataram	100,00	-	-	100,00
10	Kota Bima	100,00	-	-	100,00
Total		99.68	0.26	0.06	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka 2023

4.3.4 Jaringan Air Minum

Tahun 2020, jumlah pelanggan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.574.687 pelanggan. Yang tersebar di wilayah perkotaan sejumlah 913.252 jiwa dan wilayah perdesaan berjumlah 3.574.687 jiwa. Berdasarkan sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat berasal dari air minum kemasan, PDAM, sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tak terlindung, dan air sungai/hujan/ lainnya. Persentase Air dalam kemasan tahun 2021 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 27,80 % dan yang terendah adalah leding sebesar 14,43 %. Jumlah pelanggan dan air yang disalurkan dan sumber air minum menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.64 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Akses Air Minum Layak Tahun 2022 (%)	Jumlah Jiwa
1	Kab. Lombok Barat	83,08	726.228
2	Kab. Lombok Tengah	92,52	971.182
3	Kab. Lombok Timur	90,40	1.343.901
4	Kab. Sumbawa	99,86	518.828
5	Kab. Dompu	96,57	230.030
6	Kab. Bima	90,46	453.802
7	Kab. Sumbawa Barat	96,35	144.538
8	Kab. Lombok Utara	94,95,	237.799
9	Kota Mataram	74,09	319.338
10	Kota Bima	99,23	154.997
Total		91,75	5.100.653

Sumber: Disperkim Kabupaten/Kota Tahun 2023

Tabel 4.65 Distribusi Presentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	Kab. Lombok Barat	11,59	13,39	28,59	26,66	1,53	10,92	3,77	-	-	0,55	100,00
2	Kab. Lombok Tengah	7,72	20,47	24,23	38,05	6,91	2,05	0,57	-	-	-	100,00
3	Kab. Lombok Timur	9,12	12,84	17,13	27,04	0,42	33,03	0,42	-	-	-	100,00
4	Kab. Sumbawa	11,89	16,73	58,46	5,22	1,35	5,81	0,34	0,05	-	0,15	100,00
5	Kab. Dompu	6,98	53,74	14,85	5,69	0,48	17,51	0,60	0,15	-	-	100,00
6	Kab. Bima	4,03	62,36	11,25	7,77	0,46	12,80	0,21	1,12	-	-	100,00
7	Kab. Sumbawa Barat	4,06	15,77	72,71	7,04	-	0,33	-	-	-	0,08	100,00
8	Kab. Lombok Utara	24,83	12,41	6,40	14,37	0,34	32,74	3,18	5,18	-	0,56	100,00
9	Kota Mataram	31,48	9,37	48,75	7,44	-	2,96	-	-	-	-	100,00
10	Kota Bima	4,94	34,58	53,83	3,67	-	2,51	0,47	-	-	-	100,00
Total		11,81	21,53	28,22	20,88	1,88	14,24	0,98	0,34	-	0,12	100,00

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka 2023

Tabel 4.66 Jumlah Penduduk Terlayani Menurut Kabupaten/Kota di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		Perkotaan	Perdesaan
1	Lombok Barat	19.643	578.933
2	Lombok Tengah	71.472	757.630
3	Lombok Timur	91.372	994.517
4	Sumbawa	55.643	352.121
5	Kabupaten Dompu	45.573	170.932
6	Kabupaten Bima	146.596	0
7	Sumbawa Barat	33.747	92.154
8	Lombok Utara	0	189.250
9	Mataram	449.206	0
10	Kota Bima	0	439.150
Jumlah		913.252	3.574.687

Sumber: Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

4.3.5 Sanitasi dan Air Limbah

Pada tahun 2020, capaian persentase rata – rata tingkat pelayanan air limbah di Nusa Tenggara Barat sebesar 89,94% di antaranya yaitu pelayanan pada wilayah perkotaan mencapai 92,34% dan wilayah perdesaan mencapai 87,54%. Dengan meningkatnya pelayanan air limbah maka tingkat kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Sedangkan berdasarkan kepemilikan jamban terdiri dari jamban milik sendiri, bersama, umum, dan lainnya. Sebagian besar masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki jamban sendiri dengan persentase sebesar 73,32%, namun masih ada yang tidak memiliki jamban masih menggunakan jamban umum dengan persentase sebesar 10,22%. Kondisi pelayanan air limbah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 67 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah Di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
1	Lombok Barat	89.61	85.73
2	Lombok Tengah	89.29	84.95
3	Lombok Timur	86.30	81.77
4	Kabupaten Sumbawa	96.37	93.55
5	Kabupaten Dompu	89.58	87.68
6	Kota Bima	-	84.86
7	Kabupaten Sumbawa Barat	96.01	94.32

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
8	Lombok Utara	-	87.49
9	Kota Mataram	96.10	-
10	Kabupaten Bima	95.49	-
Nusa Tenggara Barat		92,34	87,54

Sumber: Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Tabel 4. 68 Jumlah Akses Fasilitas Sanitasi Yang Layak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Sarana Sharing/ Komunal	Jumlah Kk Pengguna Untuk Sharing/ Komunal	Jumlah Sarana Jssp	Jumlah Kk Pengguna Jssp	Jumlah Saran Jsp	Jumlah Kk Pengguna Jsp	Jumlah Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	Presentase keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) (%)
1	Lombok Barat	16.547	57.690	25.888	76.325	112.001	358..900	492915	84,29
2	Lombok Tengah	106	284	17.059	14.930	194.372	268.836	284050	88,26
3	Lombok Timur	13.543	22.458	19.571	36.783	167.547	245.619	304860	86,00
4	Sumbawa	952	16.438	2.094	2.094	104.721	104.721	123253	94,12
5	Dompu	5.476	8.385	12.525	13.354	31.546	32.012	53751	87,48
6	Bima	24.602	24.602	11.669	11.669	81.673	81.673	117944	95,77
7	Sumbawa Barat	72	72	653	653	3.655	36.911	37636	100,00
8	Lombok Utara	1.424	13.242	11.417	11.417	40.464	40.464	65123	90,77
9	Kota Mataram	1.091	5.451	5.346	5.346	103.802	103.802	114599	99,31
10	Kota Bima	3.095	9.566	343	343	25.886	25.886	35795	91,74
Jumlah		66.908	15.8188	106.565	172.914	865.667	1.298.824	1.629.926	91,77

Sumber: Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Tabel 4. 69 Persentase Kepemilikan Jamban Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Sendiri (%)	Bersama (%)	MCK Umum (%)	Tidak Menggunakan (%)	Tidak Ada (%)	Jumlah (%)
1	Kab. Lombok Barat	60,0	20,0	2,1	0,9	19,6	100,00
2	Kab. Lombok Tengah	69,67	15,41	1,07	0,59	13,26	100,00
3	Kab. Lombok Timur	92,85	7,15	0	0	0	100,00
4	Kab.Sumbawa	88,52	0	0	0	11,48	100,00
5	Kab.Dompu	73,28	8,61	4,04	0,32	13,75	100,00
6	Kab.Bima	78,3	8,87	0,8	0,4	11,63	100,00
7	Kab.Sumbawa Barat	93,2	5,23	0,61	0	0,96	100,00
8	Kab. Lombok Utara	71,43	16,24	1,46	0,34	10,52	100,00
9	Kota Mataram	77,51	18,64	1,08	0	2,78	100,00
10	Kota Bima	79,08	13,45	3,35	0	4,12	100,00
Total		78,38	11,36	1,45	0,25	8,81	100,00

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten/Kota Tahun 2022

4.3.6 Persampahan

Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya sampah merupakan produk yang sebetulnya tidak dapat diharapkan dalam keberadaannya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat, cair, gas, dan lain sebagainya. Permasalahan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kurangnya kesadaran dari masyarakat atas perilaku masih banyaknya membuang sampah disembarang tempat. Selain itu masih sulitnya masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan demi kenyamanan lingkungan. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan. Kurangnya TPA untuk menampung kapasitas sampah yang semakin bertambah.

Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 kurang lebih sebanyak 5.390.000 jiwa. Diasumsikan di Tahun 2021 sampah yang dihasilkan sebesar 2637,75 ton per hari. Masalah persampahan yang timbul kompleks antara lain penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan. Masyarakat yang semakin tidak memperhatikan lingkungan sehingga terlihat kumuh dimana-mana.

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menggunakan sistem Open Dumping, daur ulang dan composting masih menggunakan system yang sederhana. Pengelolaan sampah dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pengangkutan sampah dilakukan menggunakan sistem HCS (Hauled Container System) dimana saat datang ke lokasi Penampungan Sampah Sementara (TPS) lalu dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Saat ini, cakupan capaian layanan persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 sebesar 39.68%, dengan jumlah penanganan 1.046,6 ton/hari. Persentase pelayanan persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 70 Persentase Pelayanan Persampahan di Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	2019			2020			Keterangan
		Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Penanganan (Ton/Hari)	%	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Penanganan (Ton/Hari)	%	
1	Lombok Barat	494,1	88,45	17,9	501,46	88,27	17,60	s.d Desember
2	Lombok Tengah	349,74	149,45	42,73	353,24	149,45	42,31	s.d Desember
3	Lombok Timur	496,11	137,26	27,67	506,03	145,23	28,70	s.d Desember
4	Kab.Sumbawa	185,34	111,65	60,24	187,04	95,29	50,95	s.d Desember
5	Kab.Dompu	99,8	63	63,13	101,35	63	62,16	s.d Desember

No.	Kabupaten/Kota	2019			2020			
		Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Penanganan (Ton/Hari)	%	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Penanganan (Ton/Hari)	%	Keterangan
6	Kab.Bima	378,36	45,78	12,1	382,48	45,78	11,97	s.d Desember
7	Kab.Sumbawa Barat	89,55	48,28	53,91	88,42	48,28	54,60	s.d Desember
8	Lombok Utara	87,28	39,95	45,77	88,94	56,46	63,48	s.d Desember
9	Kota Mataram	338,39	234,81	69,39	340,49	260,84	76,61	s.d Desember
10	Kota Bima	86,56	61,7	71,28	88,3	94	100,00	s.d Desember
Total Provinsi NTB		2605,23	980,33	46,41	2637,75	1046,6	39,68	s.d Desember

Sumber : NTB Satu data, 2022

4.3.7 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan merupakan perlengkapan yang dipergunakan dan menunjang proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Fasilitas pendidikan dalam publikasi ini dikhususkan pada jumlah sekolah.

Berdasarkan Tabel 4.47 terlihat bahwa jumlah sekolah mengalami peningkatan, kecuali SMA dan SMK. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki pertumbuhan jumlah sekolah yang paling tinggi di antara jenjang sekolah lainnya yaitu sebesar 0,63 persen. Kemudian diikuti oleh MA di urutan kedua dengan pertumbuhan sebesar 0,54 persen, dan MI di urutan ketiga sebesar 0,47 persen. Sebaliknya pada jenjang SMA dan SMK terjadi penurunan jumlah sekolah, yaitu masing-masing sebesar 2,70 persen dan 2,46 persen.

Tabel 4. 71 Jumlah Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun ajaran 2019/2021, dan 2020/2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Persentase Pertumbuhan Sekolah
		2019/2020	2020/2021	
1	SD	3.223	3.234	0,34
2	SMP	958	964	0,63
3	SMA	333	324	-2,70
4	SMK	325	317	-2,46
5	MI	857	861	0,47
6	MTs	883	886	0,34
7	MA	559	562	0,54

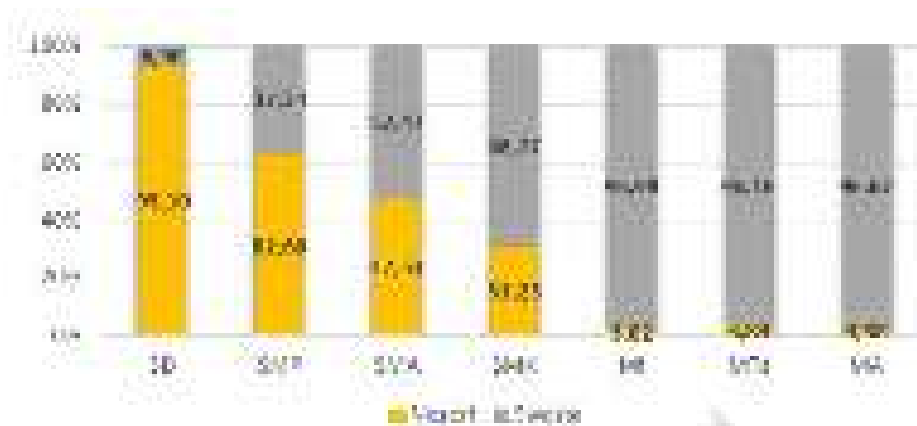
Sumber data : Statistik Pendidikan Prov. NTB Tahun 2021

Penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak swasta berperan penting dalam memperluas akses pendidikan Indonesia bagi

para pelajar di seluruh Indonesia yang belum dijangkau oleh pemerintah, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendidikan.

Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa kontribusi pihak negeri dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia cukup tinggi. Persentase sekolah negeri terbanyak ada di SD dan SMP yaitu sebesar 93,10 persen dan 62,66 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase sekolah swasta semakin tinggi. Persentase sekolah swasta pada jenjang SMA sebesar 52,47 persen, dan SMK sebesar 68,77 persen.

Selain itu, pada sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, jumlah sekolah yang dikelola oleh swasta mendominasi pada semua jenjang. Persentase sekolah swasta pada MI sebesar 96,98 persen, MTs sebesar 96,16 persen, dan MA sebesar 96,62 persen.



Gambar 4.19 Persentase Sekolah di Provinsi NTB Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021

4.3.8 Fasilitas Kesehatan

Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu program pembangunan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan berkaitan dengan kemudahan penduduk dalam mengakses layanan kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu dimensi yang menentukan kualitas SDM adalah kesehatan.

Jika melihat fasilitas kesehatan di Provinsi NTB pada tahun 2020, jumlahnya meningkat cukup banyak dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 ada sebanyak 39 rumah sakit di Provinsi NTB, bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang ada sebanyak 37 rumah sakit. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan juga terjadi pada Puskesmas dan Posyandu. Sedangkan jumlah Klinik Pratama di Provinsi NTB pada tahun 2020 justru mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 4. 72 Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Pulau Lombok - Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Kab. Lombok Barat	2	21	11	59	40
2	Kab. Lombok Tengah	8	29	18	87	59
3	Kab. Lombok Timur	6	35	19	83	67
4	Kab.Sumbawa	3	26	3	84	32
5	Kab.Dompu	3	10	2	35	21
6	Kab.Bima	1	21	1	84	34
7	Kab.Sumbawa Barat	1	9	2	31	9
8	Kab. Lombok Utara	2	8	4	28	10
9	Kota Mataram	15	11	15	15	38
10	Kota Bima	4	7	7	19	19
Total		45	177	82	525	329

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

4.3.9 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan adalah fasilitas pelayanan peribadatan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan aktifitas beribadah masyarakat. Sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Fasilitas peribadatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari masjid sejumlah 5.348 unit, Gereja sejumlah 34 unit, Gereja Katholik sejumlah 9 unit, Pura sejumlah 50 unit, dan Vihara sejumlah 429 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran fasilitas peribadatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4. 73 Jumlah Fasilitas Peribadatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)				
		Masjid	Gereja	Gereja Katholik	Pura	Vihara
1	Kab. Lombok Barat	659	0	0	6	161
2	Kab. Lombok Tengah	1.460	2	1	0	18
3	Kab. Lombok Timur	1.345	2	1	0	3
4	Kab.Sumbawa	493	4	1	1	37
5	Kab.Dompu	266	3	2	0	22
6	Kab.Bima	289	3	1	0	2
7	Kab.Sumbawa Barat	187	3	0	0	5
8	Kab. Lombok Utara	232	13	2	11	163
9	Kota Mataram	126	4	1	0	4
10	Kota Bima	291	0	0	32	14
Total		5.348	34	9	50	429

Sumber data : Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 2021

4.3.10 Fasilitas Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau

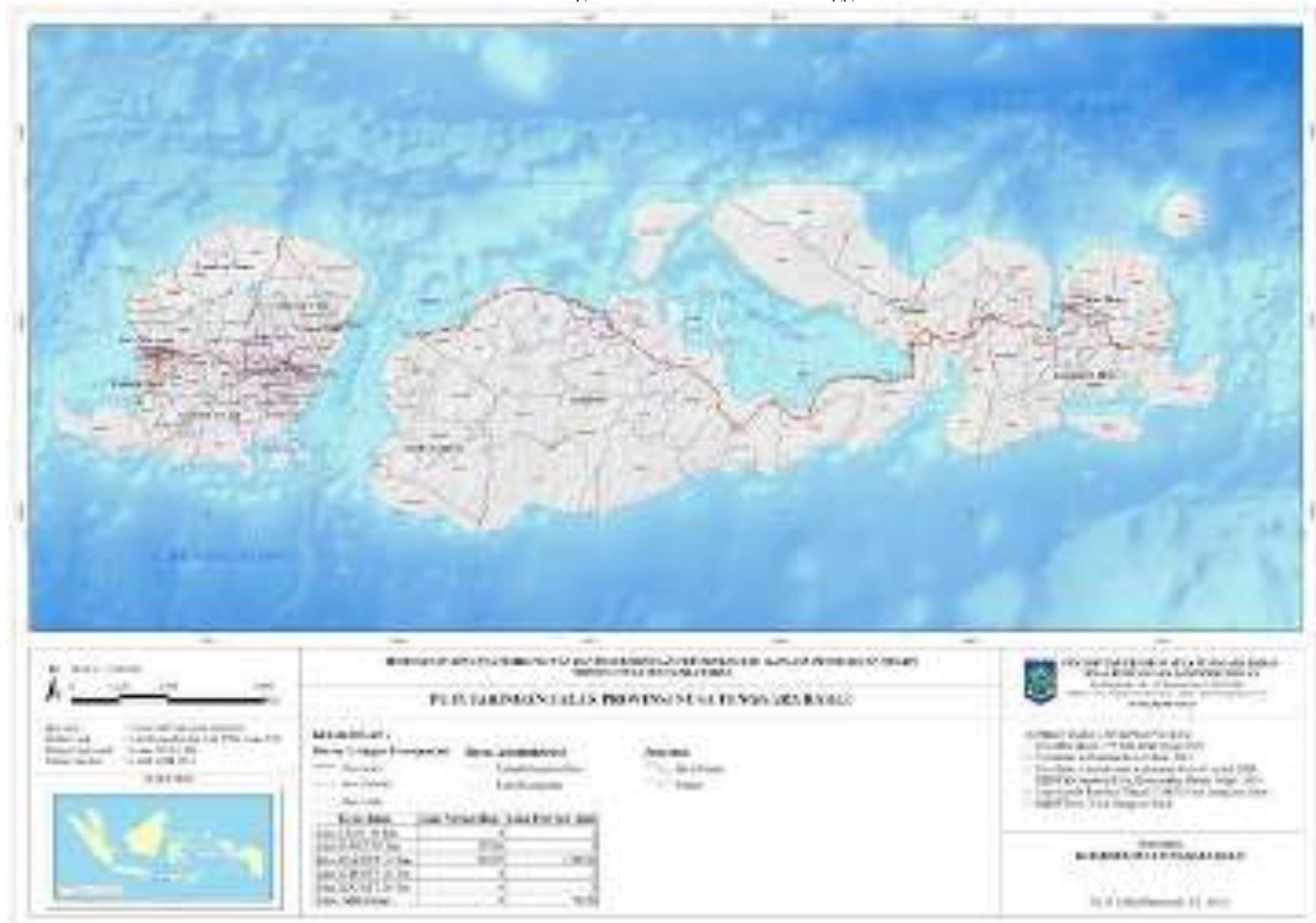
Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ruang terbuka hijau yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Sebaran ruang terbuka yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung dan RTH Binaan, Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan yang tersebar diantaranya seperti RTH Sangkareang – Kota Mataram, Alun – Alun Muhajirin dan Taman Biao– Kabupaten Lombok Tengah, Taman kota sandik dan gerung – Kab.Lombok Barat, Taman Karang Kates dan Taman Bunga Matahari – Kab. Lombok Utara, serta Taman Kota Selong dan Taman Rinjani – Kab. Lombok Timur, Taman Tiangnam, Tanam Baleong, Danau Lebo Taliwang, Taman Simpang Taliwang, -Kab. Sumbawa Barat, Taman Mangga, Taman Bugis, Taman Kerato, Taman Lembi, Taman Kota Alas, Taman Sangaria Utan – Kab. Sumbawa. Taman Ria, Taman Amahami, Taman Kota Monggonao, Taman Surasuba dan Taman Manggemaci – Kota Bima, Taman Panda dan Taman Kalaki – Kabupapten Bima serta Taman Kota Dompu, untuk pemanfaatan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya yaitu:

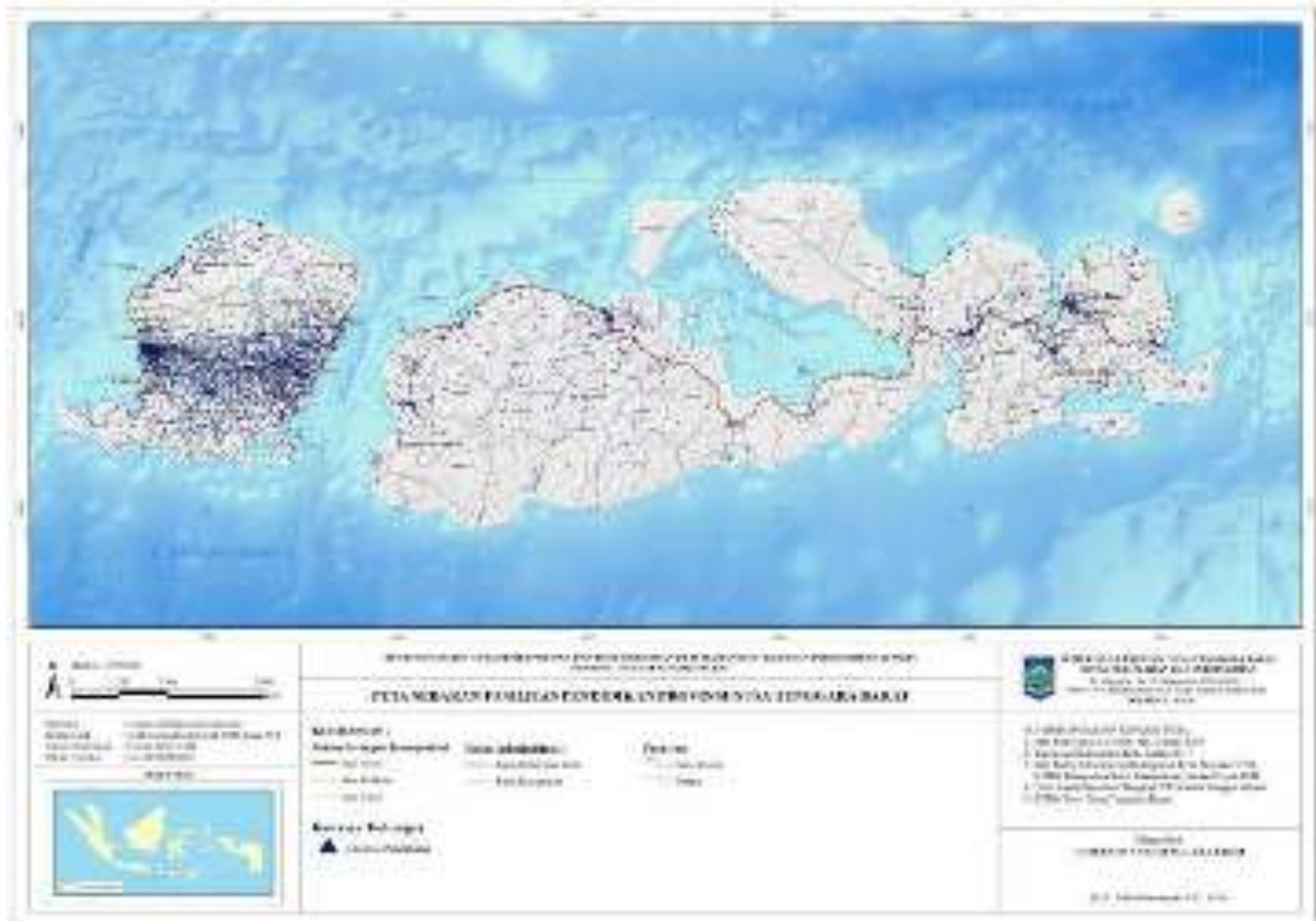
1. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
2. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

3. Area pengembangan keanekaragaman hayati;
4. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
5. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
6. Tempat pemakaman umum;
7. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
8. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
9. Penyediaan ruang terbuka hijau bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan;
10. Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
11. Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama ruang terbuka hijau tersebut.

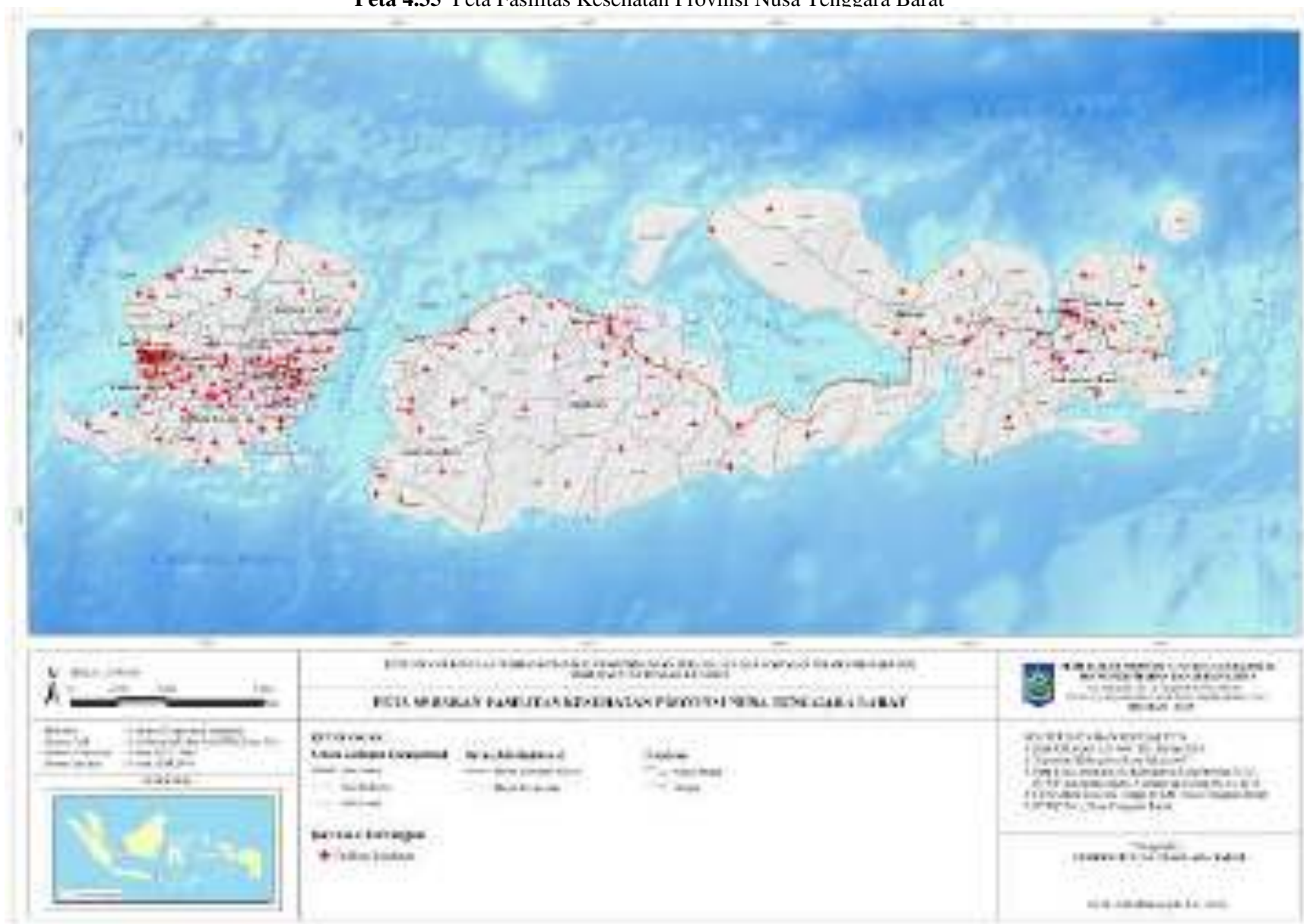
Peta 4.33 Peta Jaringan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 4.34 Peta Fasilitas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 4.35 Peta Fasilitas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat



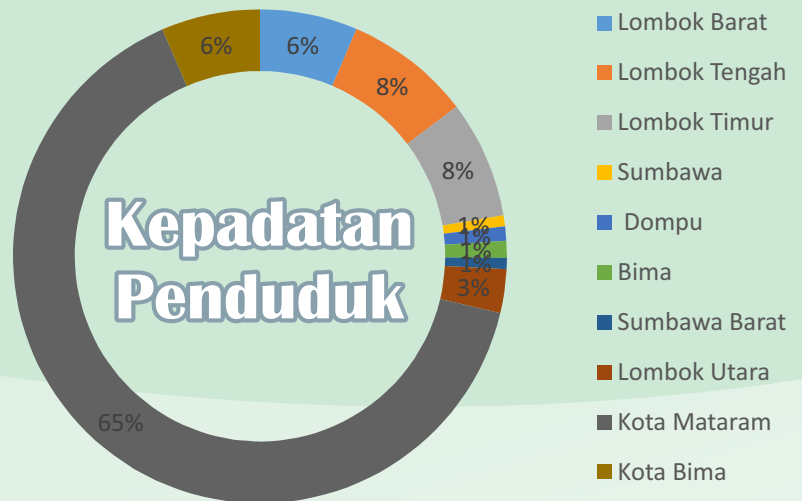


PENDUDUK DAN JUMLAH RUMAH PROV. NTB



- Lombok Timur
- Lombok Tengah
- Lombok Utara
- Sumbawa
- Dompu
- Bima
- Sumbawa Barat
- Lombok Selatan
- Kota Mataram
- Kota Bima

Sebaran penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat paling tinggi berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.343.900 atau 24,93% dari total penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk terkecil adalah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebanyak 148.500 jiwa (2,75%).



Kepadatan Penduduk

- Lombok Barat
- Lombok Tengah
- Lombok Timur
- Sumbawa
- Dompu
- Bima
- Sumbawa Barat
- Lombok Utara
- Kota Mataram
- Kota Bima

Tingkat kepadatan penduduk yang paling tertinggi terdapat di Kota Mataram yaitu sebesar 7.048 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 80 jiwa/km².



- Lombok Timur
- Lombok Tengah
- Lombok Utara
- Sumbawa
- Dompu
- Bima
- Sumbawa Barat
- Lombok Selatan
- Kota Mataram
- Kota Bima

Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Se-Provinsi NTB diketahui jumlah rumah Ideal tahun 2022 sebesar 1.603.257 unit. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah rumah tertinggi yaitu 395.265 unit dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki jumlah rumah paling sedikit yakni 35.208 unit.





5.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Penataan Ruang Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan pembangunan PKP dalam kerangka kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, serta rencana sektor lainnya adalah mendukung tersedianya pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan hunian yang terjangkau serta ditunjang dengan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.



Gambar 5.1 Kebijakan Pembangunan PKP Provinsi NTB

Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 11, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (Aman, Inklusif, Tanggap Bencana, dan Berkelanjutan). Sejalan dengan tujuan tersebut arah Kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu mewujudkan *smart living* yang meliputi: (1) perwujudan permukiman layak huni (*livable settlement*); 2) penerapan bangunan gedung hijau; 3) pembangunan permukiman tahan bencana; dan 4) penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Gagasan *smart living* dalam konteks Direktorat Jenderal Cipta Karya dimaknai sebagai Permukiman Cerdas yaitu cara mencapai target pembangunan permukiman berkelanjutan (*sustainability*).

Arah kebijakan Dirjen Cipta Karya untuk mewujudkan Smat Living Tahun 2020-2024, Gagasan *smart living* dalam konteks Direktorat Jenderal Cipta Karya dimaknai sebagai permukiman cerdas salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (Aman, Inklusif, Tanggap Bencana, dan Berkelanjutan), yang meliputi 4 aspek yaitu :

1. perwujudan permukiman layak huni (*livable settlement*);
2. penerapan bangunan gedung hijau;
3. pembangunan permukiman tahan bencana; dan
4. penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.



Gambar 5.2 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024

Berbagai kebijakan dan peraturan perundangan baik yang bersifat nasional maupun daerah, memberikan implikasi dalam penerapannya di provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, yang akan menjadi pedoman maupun panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sebagai kawasan budi daya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya. Kawasan peruntukan permukiman di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari permukiman perdesaan, perkotaan dan permukiman pada kawasan khusus. Bentuk pengelolaan kawasan permukiman antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan.

Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung). Arahan bagi perluasannya sebatas tidak mengganggu pengembangan kegiatan lindung dan pertanian sawah irigasi teknis di sekitarnya. Secara umum lokasi kawasan permukiman perdesaan tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah kabupaten/kota mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Rencana pengembangan permukiman perdesaan direncanakan tersebar di seluruh kawasan perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi :

- a. pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada;
- b. pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif;
- c. penanganan kawasan permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni;
- d. pengembangan kawasan permukiman adat sebagai sektor wisata dan menetapkan sebagai cagar budaya.

Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang mencakup wilayah administrasi kota dan wilayah pengembangan kota. Selain itu, beberapa wilayah yang memiliki indek kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan. Rencana pengembangan permukiman perdesaan direncanakan tersebar di seluruh

kawasan perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi :

- a. pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru;
- b. pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan;
- c. penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun (rusun);
- d. menyusun dokumen RP2PKPKPK;
- e. menetapkan batas lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- f. menyusun program pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
- g. penyusunan baseline data kawasan permukiman kumuh;
- h. menata kawasan permukiman menuju 0% kumuh pada tahun 2024;
- i. menyusun konsep perencanaan lingkungan hunian permukiman yang tangguh bencana;
- j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian permukiman yang layak huni;
- k. mewujudkan kawasan permukiman yang tanggap terhadap penurunan konsumsi karbon dan efek rumah kaca dalam mendukung program penanganan kasus perubahan iklim.

Arahan Alokasi Ruang pada PKP Lintas Kabupaten/Kota dan PKP Kewenangan Provinsi

Secara umum kawasan permukiman yang berada di Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada namun perizinan pembangunan perumahannya tidak dalam kewenangan Provinsi. Artinya perumahan yang dibangun berupa swadaya masyarakat dan juga yang dibangun oleh pengembang yang lahan/kawasannya tidak berada pada lintas daerah kabupaten/kota. Permasalahan yang biasanya timbul untuk meningkatkan interaksi antar perumahan dan Kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota adalah prasarana penghubung jalan permukiman atau jalan antar lingkungan hunian. Dalam perkembangan ke depan, permasalahan aksesibilitas yang tinggi dan cepat biasanya akan menjadi isu utama. Oleh karenanya keterpaduan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum penting dipertimbangkan sebelum mendapat izin mendirikan bangunan gedung permukiman. Selain itu keterpaduan dalam penetapan rencana pola ruang di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian penting pemerintah, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan serta peran serta masyarakat. Sedangkan tujuan dari pengendalian pemanfaatan ruang provinsi adalah:

1. Mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di Provinsi NTB untuk menjamin pembangunan berkelanjutan;
2. Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna, daerah dan provinsi.

Untuk lebih jelasnya mengenai daerah lintas kabupaten/kota dan kawasan kumuh lintas kabupaten/kota dapat dilihat pada peta yang ditampilkan berikut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

- a. menghindari pembangunan kawasan permukiman pada lahan irigasi teknis;
- b. mempertimbangkan keamanan dari bencana yang mungkin timbul dengan memperhatikan aspek geologi tata lingkungan yang diperlukan untuk mitigasi bencana;
- c. mempertimbangkan aksesibilitas yaitu kemudahan pencapaian dari dan ke Kawasan;
- d. mempertimbangkan kompatibilitas yaitu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya;
- e. melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- f. membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan;
- g. pembatasan pengembangan ruang fisik perumahan secara horisontal khususnya di kawasan perkotaan dan kawasan berkepadatan tinggi;
- h. adapun ketentuan zonasi kawasan permukiman, peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialih fungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- j. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
- l. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;

- m. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- n. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- o. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- p. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (Koefisien Dasar Bangunan maksimum sebesar 70%, Koefisien Luas Bangunan maksimum sebesar 2.1–3.1, Koefisien Dasar Hijau minimal 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan lain sebagainya);
- q. pengaturan kawasan sempadan sungai di dalam kawasan permukiman perkotaan adalah paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter; serta
- r. menetapkan ketentuan mengenai RTH minimal 30 % (tiga puluh persen) meliputi ruang milik pribadi 10 % (sepuluh persen) dan milik umum 20 % (dua puluh persen) yang disediakan oleh pemerintah pada kawasan permukiman.

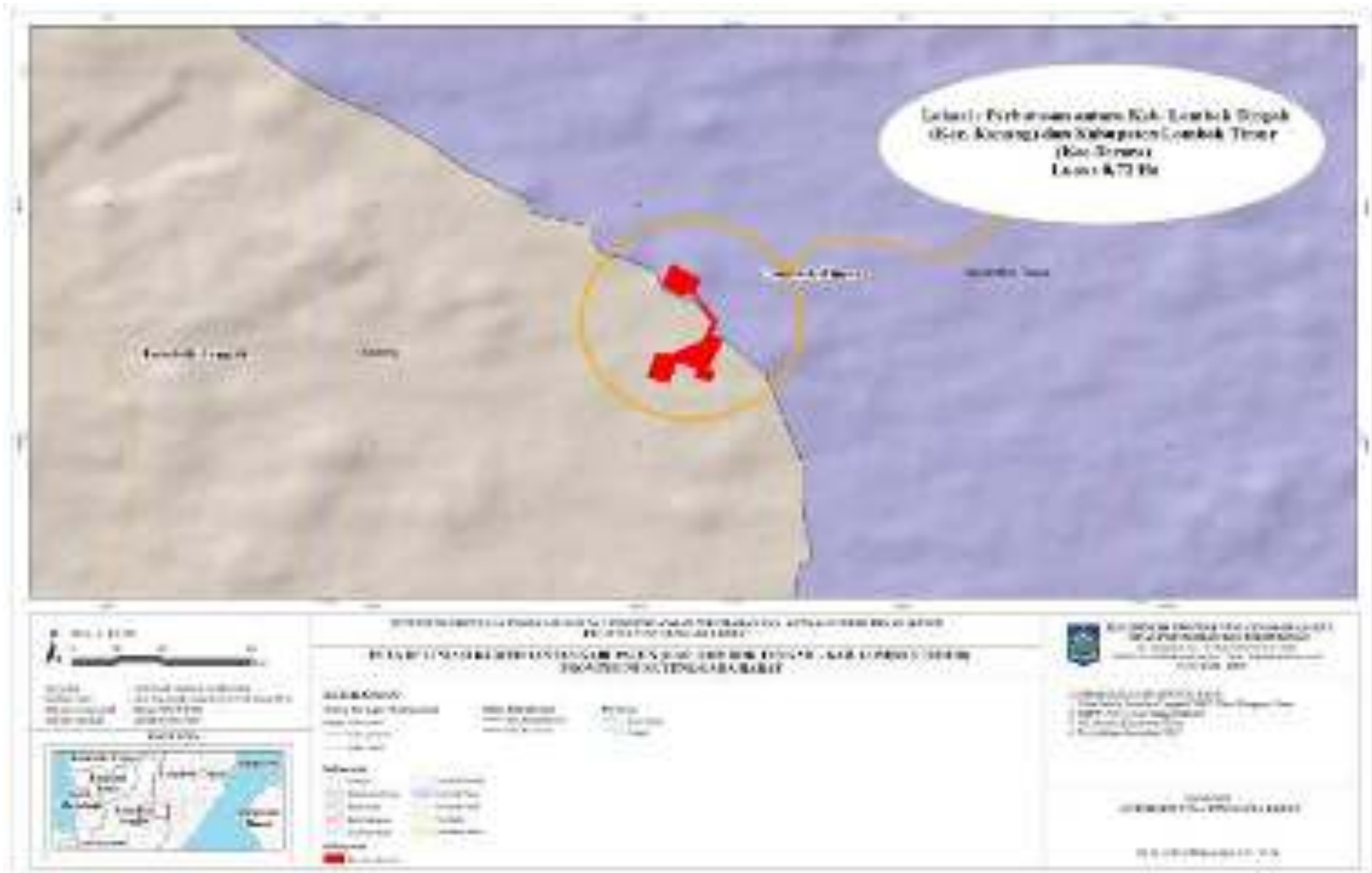
Pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, komprehensif, dan inklusif terdiri dari :

- a. menyusun konsep pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, komprehensif, dan inklusif;
- b. melakukan pelatihan terkait penerapan teknologi infrastruktur permukiman yang terbaru dan modern;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur permukiman pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. perbaikan kualitas layanan infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman kumuh;
- e. pembangunan infrastruktur permukiman yang ramah terhadap lingkungan.

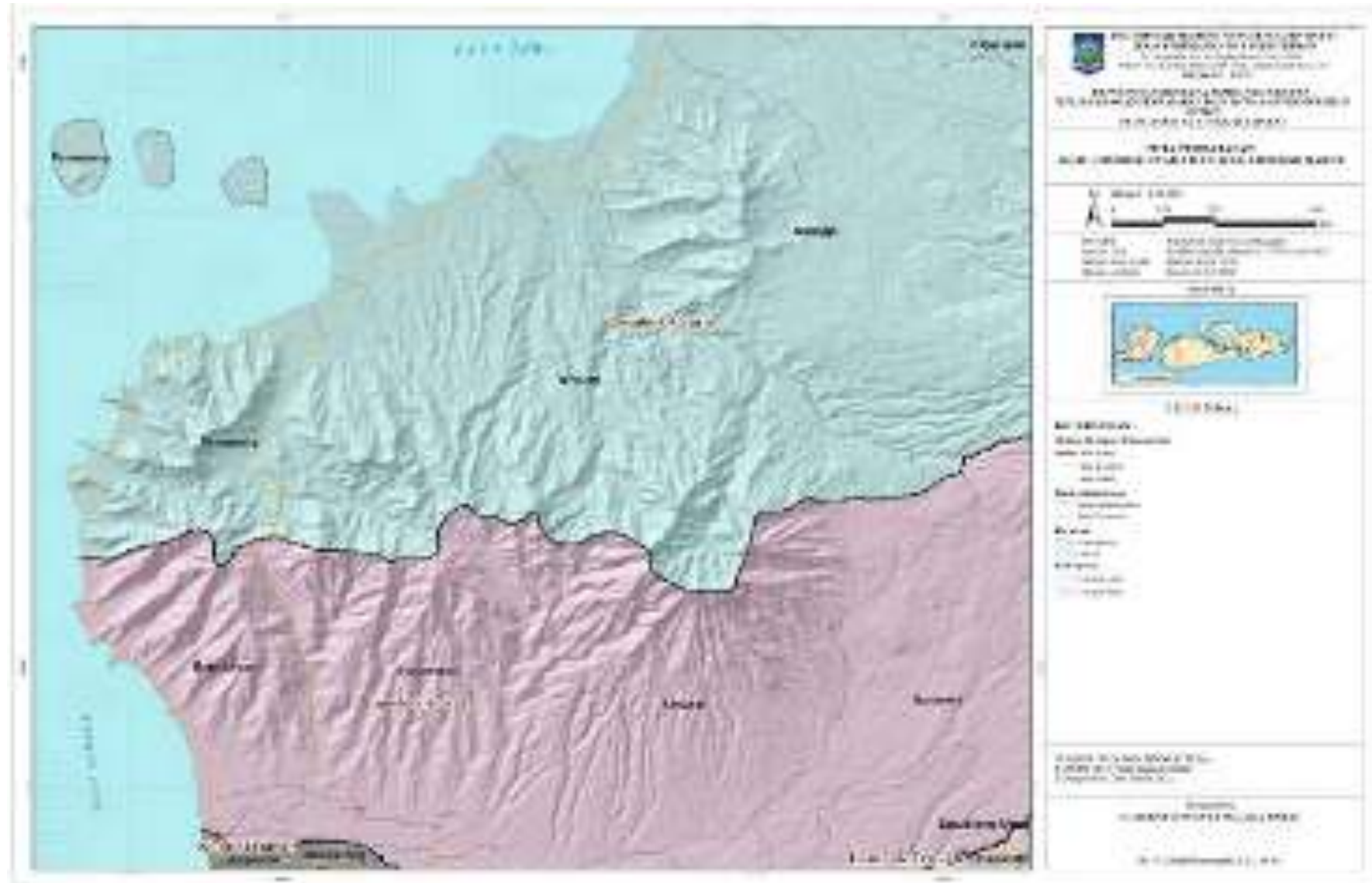
Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan permukiman terdiri dari :

- a. melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan permukiman dengan sektor lainnya;
- b. melakukan pendataan kawasan permukiman (kondisi fisik, kondisi infrastruktur, dan kondisi perumahan);
- c. meningkatkan peran pokja PKP Kabupaten/Kota.

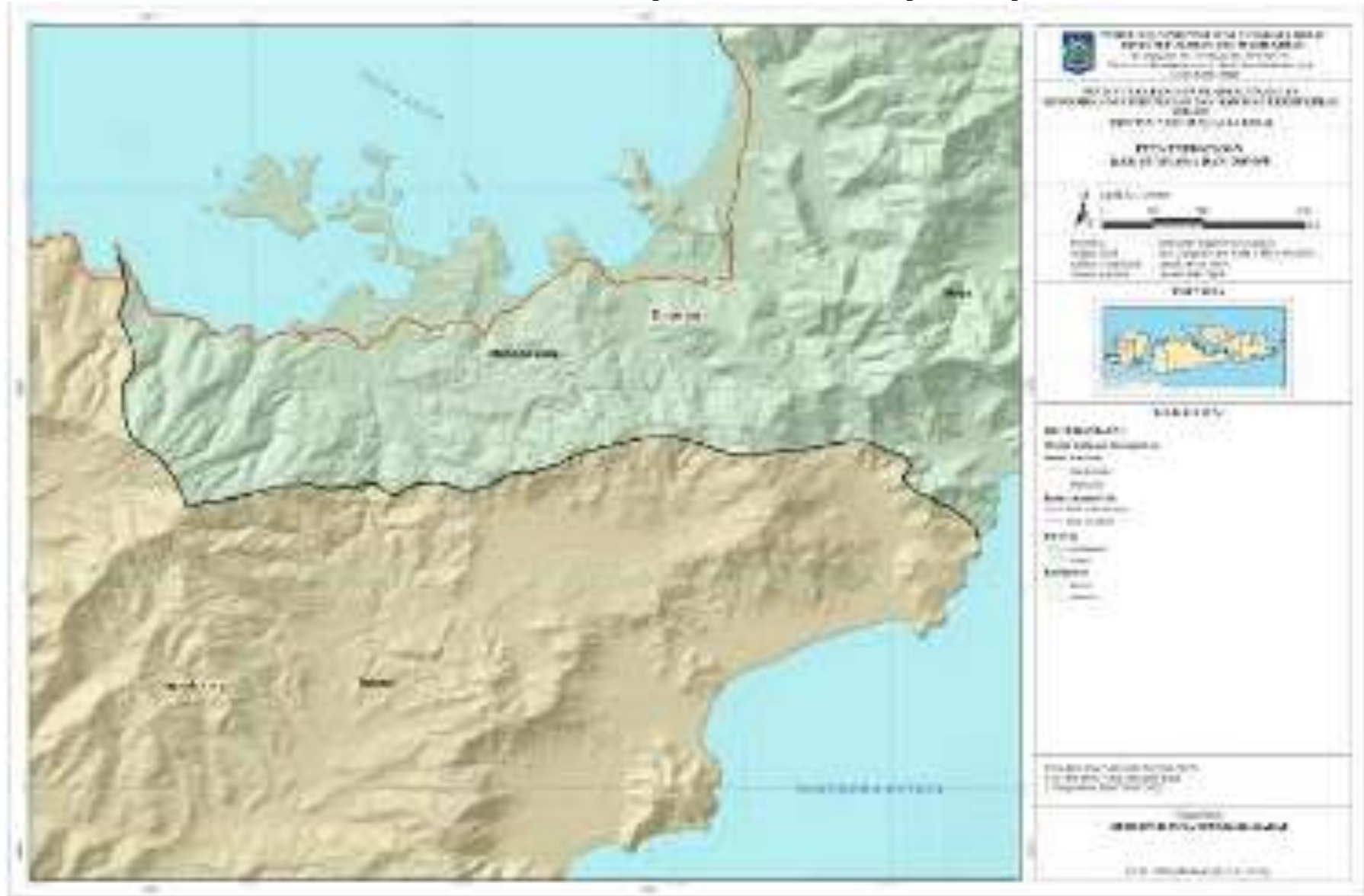
Peta 5.2 Peta Delinasi Kumuh Lintas Kabupaten (Lombok Tengah-Lombok Timur) Provinsi NTB



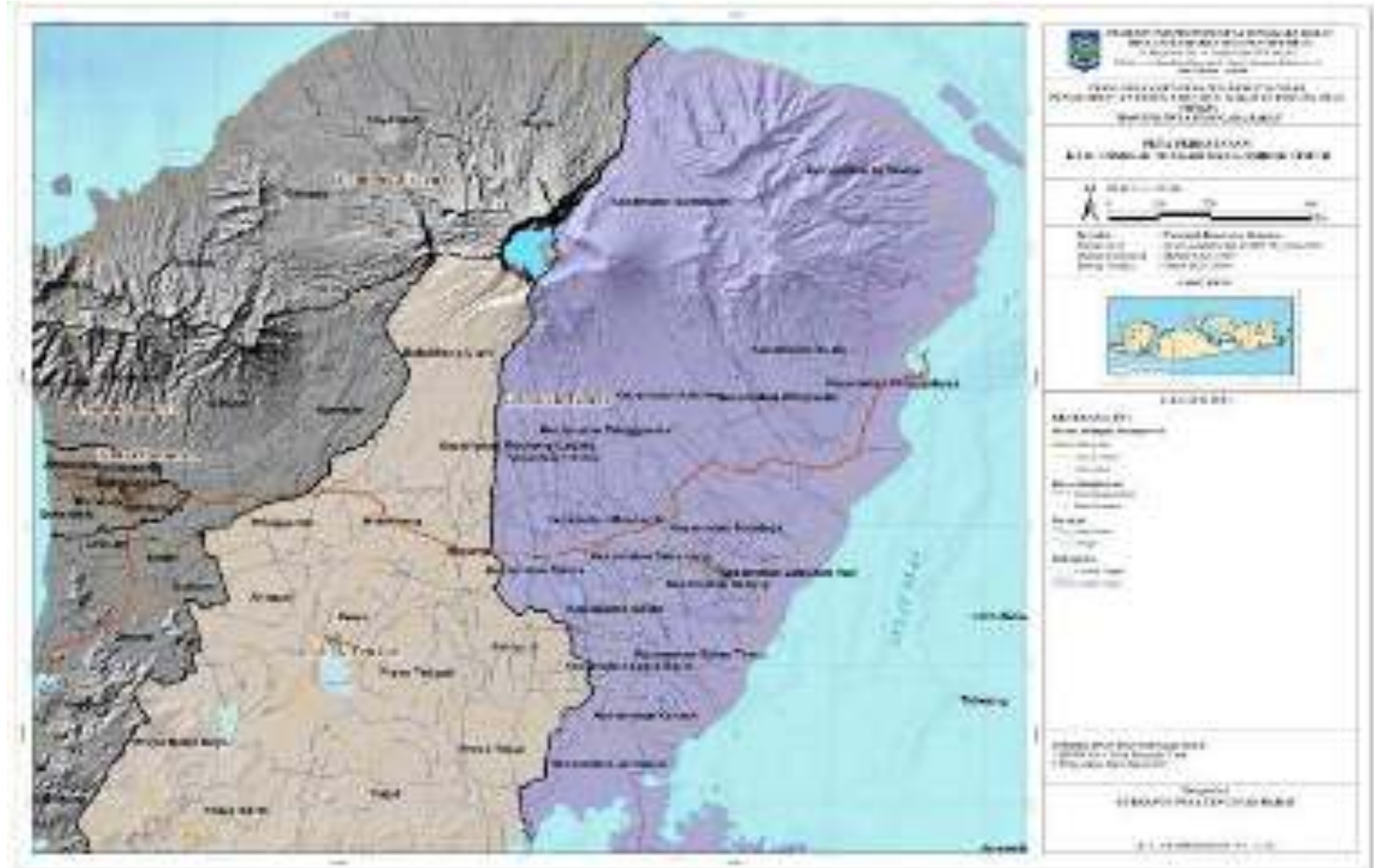
Peta 5.4 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat



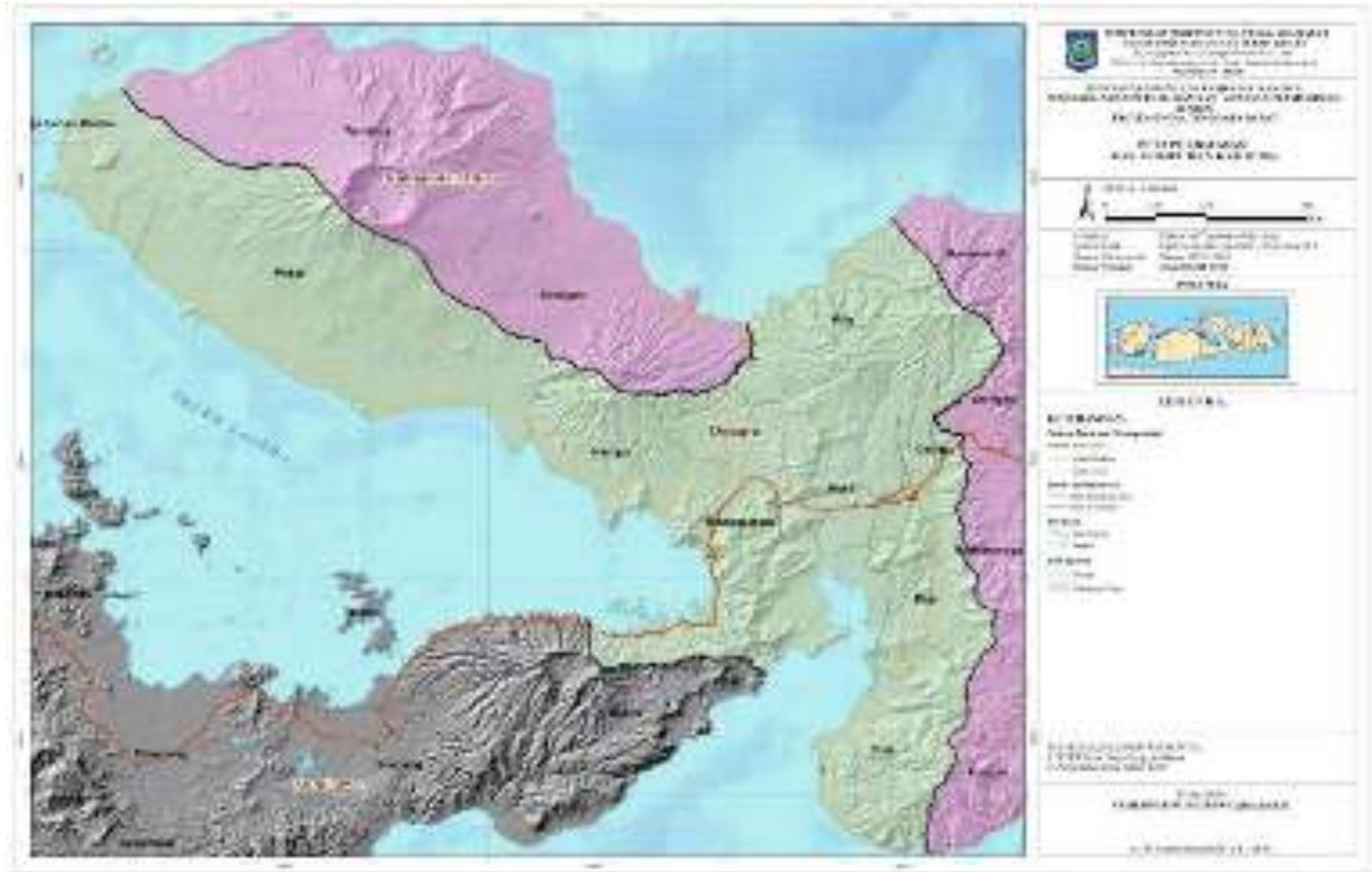
Peta 5.6 Peta Perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu



Peta 5.9 Peta Perbatasan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur



Peta 5.11 Peta Perbatasan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima



Berikut implikasi dan kajian kebijakan tata ruang terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Tabel 5.1 Implikasi Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Provinsi Terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kebijakan Tata Ruang	Pengaruh Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.	<p>RPJM Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pemerintah dalam mengelola sektor perumahan dan permukiman • Penyempurnaan sistem pembiayaan perumahan dan pola subsidi bagi MBR yang kebanyakan bermukim di kawasan kumuh • Peningkatan peran BUMN dalam penyediaan perumahan untuk MBR • Integrasi penyediaan layanan air minum dan sanitasi dengan perumahan • Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang layak • Pengembangan perumahan dan permukiman untuk MBR • Penanganan kawasan permukiman kumuh • Peningkatan kelembagaan penyediaan perumahan yaitu BUMN • Peningkatan PSU umum permukiman
2	<p>RPJP-D Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas akses layanan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat peningkatan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan ▪ Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, ▪ Pembangunan rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana, ▪ Pengembangan teknologi tepat guna bidang permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang layak ▪ Bekerjasama dengan swasta untuk membiayai pembangunan perumahan ▪ Melakukan relokasi pada rumah-rumah yang berada di tepi sungai, pantai, pegunungan atau permukiman kumuh yang ada di tengah-tengah kota dengan memberikan penyediaan sarana dan prasarana

No	Kebijakan Tata Ruang	Pengaruh Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	<p>RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Sistem kepusatan yang terdapat pada RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKN berada di Mataram dan PKW berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba. 2. PKWp berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. 3. PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memicu perkembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama pada kawasan perkotaan ▪ Tumbuhnya industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memicu tumbuhnya rencana-rencana perumahan pada beberapa kawasan ▪ Meningkatnya minat investasi terhadap perumahan, kegiatan industri memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap sektor lainnya (perdagangan dan jasa)
	<p>Kawasan industri berada di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan prioritas pengembangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, 	

No	Kebijakan Tata Ruang	Pengaruh Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan Rasanac.	

Sumber : Analisa Disperkim Provinsi NTB, 2021

Tabel 5.2 Kajian Implikasi Kebijakan Pembangunan Terhadap PKP di Provinsi NTB

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi), dan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal), KSP (Kawasan Strategi Provinsi) dan Kawasan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kantong-kantong permukiman kumuh terutama pada kawasan pusat kota, di pusat perekonomian , daerah sempadan sungai dan kawasan pesisir pantai ▪ Tingginya angka defisit rumah (backlog) tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat ▪ Terdapatnya banyak RTLH ▪ Tumbuhnya permukiman <i>squatter</i> di sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan wisata dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah ▪ Pembangunan rusunawa dan rusunami ▪ Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman terutama di kawasan rawan bencana dan pesisir ▪ Perbaikan RTLH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PKN berada di Mataram dan PKW berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba. ▪ PKWp berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha. ▪ PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Lab. Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape. ▪ KSP meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mataram Metro Kec. Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, . Labuapi dan Kec. Kediri dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
	<p>kawasan militer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimnya lahan di Perkotaan (perbandingan jumlah penduduk dengan lahan permukiman) sedangkan kebutuhan rumah meningkat ▪ Tumbuh rumah kaveling- kaveling yang tidak terkelola berpotensi menyebabkan kumuh. ▪ Terdapatnya permukiman rawan bencana. ▪ Rendahnya pelayanan PSU terutama pada PKW dan PKWp ▪ Masih banyak penduduk yang berada pada tingkat kemiskinan ▪ Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat untuk perumahan dan permukiman terutama MBR ▪ Belum terbangunnya sistem kelembagaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan dan pengurangan luasan permukiman kumuh terutama di kawasan <i>squatter</i> ▪ Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan konsep pemugaran dan permukiman kembali ▪ Program fasilitasi penyediaan rumah bagi yang terkena relokasi permukiman kumuh dan <i>squatter</i> ▪ Pencegahan perubahan fungsi lahan ▪ Peningkatan fasilitasi Pemerintah dalam penyediaan kebutuhan rumah dan bekerjasama dengan swasta dalam pemenuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya di Kab. Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan; 3. Agropolitan Rasimas di Kab. Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata; 4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan; 5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri; 6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; 7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata; 8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
	tata kelola perumahan.	kebutuhan perumahan formal dan PSU <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong kemudahan Perizinan untuk Pembangunan perumahan formal ▪ Fasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan 	unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; <p>9. Agropolitan Manggalewa berada di Kab. Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;</p> <p>Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan;</p> <p>Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kab. Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industry ;</p> <p>Waworada-Sape dan sekitarnya beradan di Kab. Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industry.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Pengembangan meliputi : Kawasan Gili Indah dan sekitarnya , Kws. Senggigi dan sekitarnya , Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya , Kawasan Gili Gede dan sekitarnya . Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya , Kawasan Kuta dan sekitarnya. Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya, Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya, Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya, Kawasan Maluk dan sekitarnya , Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya, Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya, Kawasan Teluk Sanggar

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
			dan sekitarnya, Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya, Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya, Kawasan Sape dan sekitarnya serta Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.
Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan rumah untuk pendukung industri masih rendah ▪ Tumbuhnya permukiman kumuh di sekitar kawasan industri ▪ Terdapat permukiman yang berada dekat dengan peruntukan industri polutan ▪ Minimnya PSU pada kawasan industri sebagai pendukung kawasan permukiman ▪ Minimnya lahan di sekitar Kawasan Industri sedangkan kebutuhan rumah meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan kebutuhan rumah pekerja industri ▪ Kawasan industry harus menyediakan perumahan formal bagi pekerja sesuai aturan perundangan ▪ Pembangunan rusunawa ▪ Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman ▪ Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat , Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh , Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompou, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE ▪ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang , Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompou, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
Kawasan Lindung	Masih terdapat permukiman yang berada di Kawasan Lindung (kawasan hutan, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan suaka alam)	Regulasi dari Pemerintah terkait penetapan negalif list (kawasan yang dilarang) untuk permukiman di kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan hutan lindung ▪ Kawasan perlindungan setempat : kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, danau, sempadan mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal ▪ kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA) ▪ Kawasan Rawan bencana Alam ▪ Kawasan Lindung geologi : kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi ▪ kawasan lindung nasional lainnya adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan

	Permasalahan Yang Mungkin Dan Atau Telah Timbul	Kebutuhan Program Pembangunan Dan Pengembangan PKP	Lokasi
Kawasan Rawan Bencana	Terdapat permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan gempa, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan gelombang pasang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan perumahan di kawasan rawan longsor dan rawan gempa ▪ Perbaikan sarana dan prasarana dasar Permukiman ▪ Program fasilitasi penyediaan rumah bagi yang terkena relokasi permukiman rawan bencana ▪ Penanganan Rehabilitasi rumah akibat bencana 	Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat

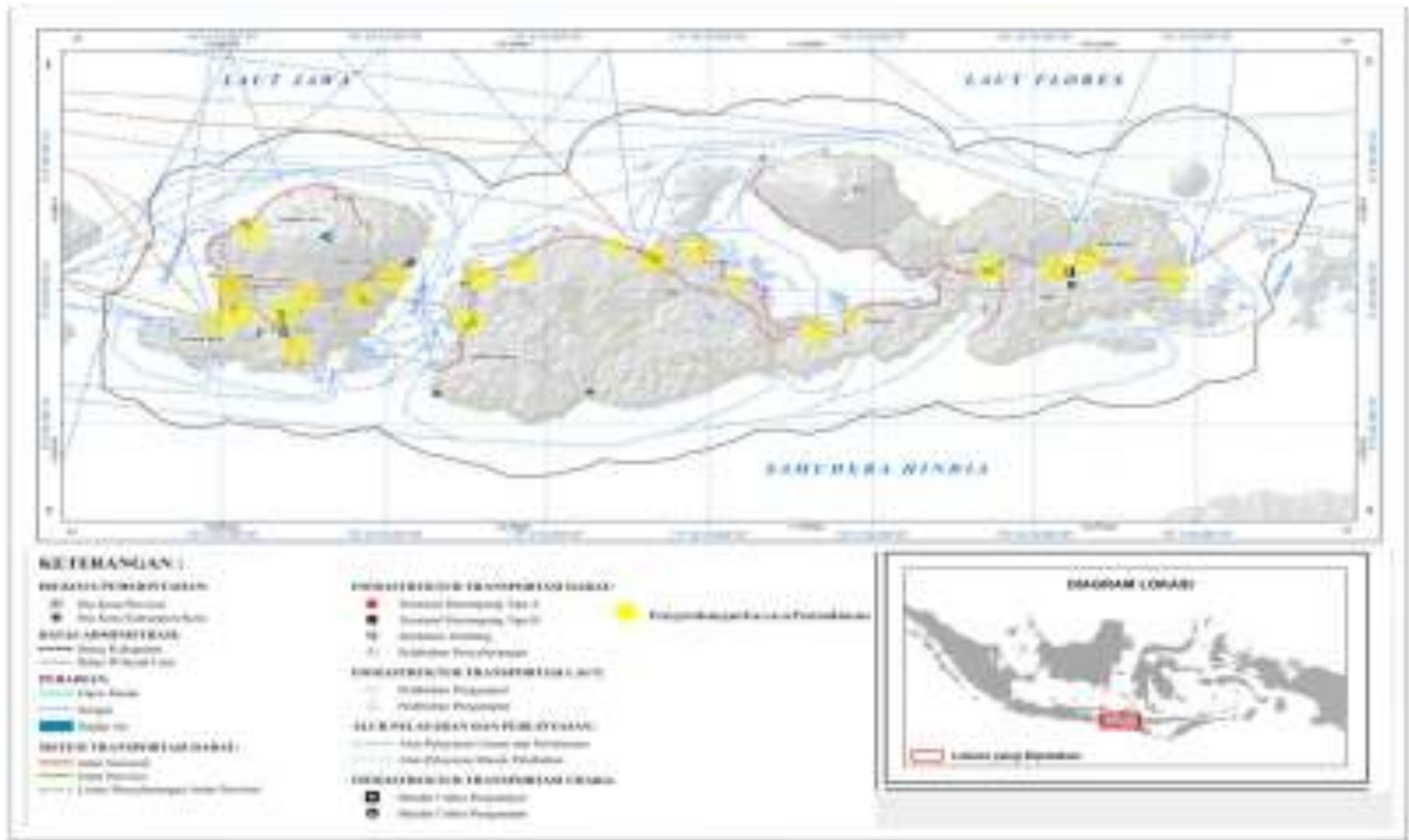
Sumber : Analisa Disperkim Provinsi NTB, 2021

Dapat dilihat pada **Peta 5.12**, Rencana pengembangan jalan nasional yang tertuang dalam RTRWN memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan permukiman di sekitar koridor jalan yang akan direncanakan. Rencana Jalan Nasional mempengaruhi karakteristik spasial di kawasan tersebut dengan semakin luasnya kenampakan fisik dengan ditandai bertambahnya lahan terbangun di kawasan tersebut untuk kedepannya. Pola sebaran lahan terbangun di kawasan ini biasanya akan membentuk pola linier yang mengikuti jalan utama dimana lahan terbangun terpusat pada setiap simpul perempatan jalan.

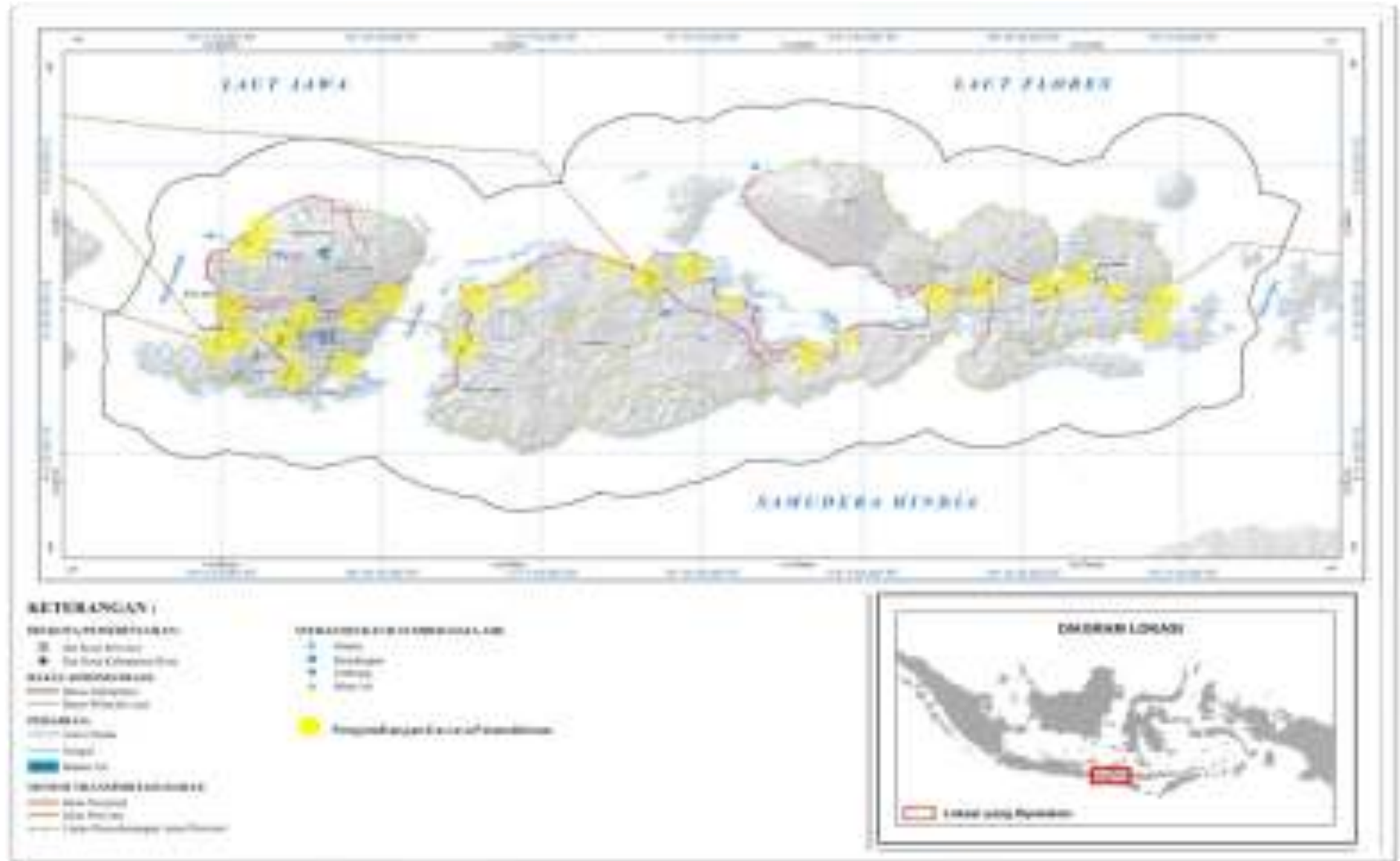
Selanjutnya pada **Peta 5.13**, Rencana pengembangan Industri akan menjadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya kegiatan perdagangan/jasa disepanjang kanan-kiri jalan. Keberadaan kegiatan industri yang sudah terlebih dahulu dimana kegiatan tersebut memiliki efek pengganda sehingga semakin banyak kegiatan industri di kawasan tersebut. Faktor yang kedua adalah aksesibilitas, dengan lokasi yang strategis serta mudah untuk di jangkau dengan

fasilitas yang baik tentunya akan semakin meningkatkan kegiatan perindustrian di kawasan tersebut. Keberadaan permukiman yang menjadi konsumen atau pembeli dari kegiatan industri juga memiliki pengaruh yang besar dan akan muncul permukiman-permukiman baru di sekitar lokasi rencana industri tersebut. Kemudian keramaian lalu lintas dan kebijakan pemerintah secara tidak langsung mendorong pertumbuhan kegiatan, karna dengan kemudahan perijinan yang diberikan oleh pemerintah akan mempermudah para pelaku kegiatan perindustrian.

Peta 5.12 Analisa Pengaruh Rencana Jalan Nasional terhadap Pengembangan Permukiman



Peta 5.13 Analisa Pengaruh Rencana Kawasan Industri terhadap Pengembangan Permukiman



5.2 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang Disasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan yang Ada di Wilayah Perencanaan

Berdasarkan Perda RTRW Provinsi NTB Nomor 03 Tahun 2010 sistem pusat-pusat pelayanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi PKN, PKW, PKWp dan PKL sebagai berikut:

1. Sistem pusat pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Mataram
2. Sistem pusat pelayanan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba
3. Sistem pusat pelayanan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha
4. Sistem pusat pelayanan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, dan Sape
5. Sistem pusat pelayanan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila, Tangga, Wawo, Wera, dan Sape

5.3 Analisis Kependudukan

Jumlah penduduk pada suatu wilayah menjadi salah satu indikasi bagi tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah. Konsentrasi penduduk yang tinggal di suatu tempat akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Proyeksi penduduk merupakan cara memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang, dimana hasil dari proyeksi penduduk menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan fasilitas pelayanan pada masa mendatang dan kebutuhan luas yang akan direncanakan.

Berdasarkan Buku Pedoman Penghitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja yang dikeluarkan oleh BPS, ada beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk masa yang akan datang diantaranya menggunakan metode matematik dan metode komponen. Metode matematik ini sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk (*Growth*

Rates), metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, baik untuk model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk. Sedangkan metode komponen berbasis pada pengertian bahwa perubahan penduduk suatu wilayah pada periode tertentu merupakan akumulasi dari kejadian kelahiran dan kematian (*natural increase*) serta net migrasi. Dalam dokumen RP3KP ini data yang digunakan sebagai input dalam perhitungan proyeksi penduduk ialah kompilasi jumlah penduduk pada wilayah perencanaan selama 10 tahun terakhir dengan menggunakan metode aritmatik. Pemilihan metode aritmatik ini karena setelah dilakukan analisa maka metode ini yang paling sering digunakan diantara metode matematik yang lain.

a. Metode Aritmatik

Metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Bentuk matematis metode aritmatik adalah :

$$P_t = P_0 (1+rt)$$

Keterangan:

- P_t : Jumlah penduduk tahun proyeksi
- P_0 : Jumlah penduduk tahun dasar
- r : Laju pertumbuhan penduduk
- t : Periode waktu antar tahun t dengan 0

b. Metode Geometrik

Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Laju pertumbuhan penduduk dianggap sama untuk setiap tahun. Metode geometrik adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

Keterangan:

- P_t : Jumlah penduduk tahun proyeksi
- P_0 : Jumlah penduduk tahun dasar

- r : Laju pertumbuhan penduduk
t : Periode waktu antar tahun t dengan o

c. Metode Eksponensial

Metode eksponensial menggambarkan penambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa penambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Formula yang digunakan pada metode eksponensial sebagai berikut :

$$P_t = P_0 e^{rt}$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar

r = laju pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

e = bilangan pokok dari sistem logaritma natural (ln) yang besarnya adalah 2,7182818

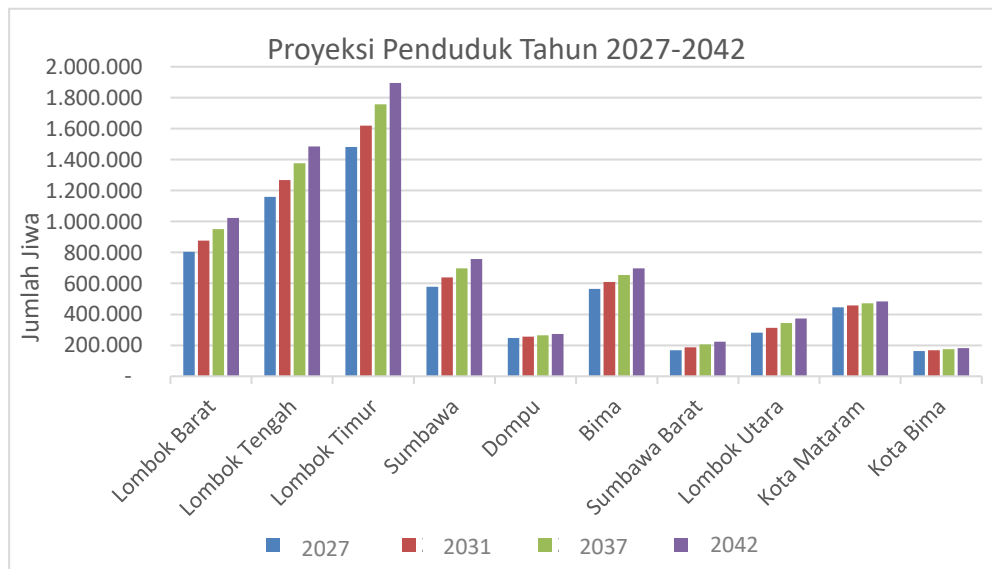
Rata-rata pertumbuhan penduduk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar (0,019%) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. Terkait perhitungan proyeksi jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai 20 tahun kedepan.

Tabel 5.3 Proyeksi Penduduk 2027-2042 Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Eksisting		Proyeksi Jumlah Penduduk			
		2022	Pertumbuhan	2027	2032	2037	2042
1	Lombok Barat	731.810	0,02	804.613	877.415	950.218	1.023.021
2	Lombok Tengah	1.049.700	0,02	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592
3	Lombok Timur	1.343.901	0,02	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400
4	Sumbawa	519.780	0,02	580.086	640.393	700.699	761.006
5	Dompu	238.201	0,01	246.961	255.721	264.481	273.241
6	Bima	520.444	0,02	564.821	609.198	653.575	697.953
7	Sumbawa Barat	144.548	0,03	162.985	181.422	199.859	218.295
8	Kab.Lombok Utara	251.451	0,02	282.057	312.663	343.269	373.875
9	Kota Mataram	432.000	0,01	445.033	458.066	471.099	484.132

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Eksisting		Proyeksi Jumlah Penduduk			
		2022	Pertumbuhan	2027	2032	2037	2042
10	Kota Bima	156.200	0,01	162.593	168.986	175.379	181.771
Jumlah		5.388.035	0,0173	5.889.348	6.390.661	6.891.974	7.393.287

Sumber : Hasil Analisa, 2023



Gambar 5.3 Proyeksi Penduduk Tahun 2027 Sampai Tahun 2042

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2020, rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 3 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 sebanyak 4,12 pada tahun 2019 sebanyak 3,60 dan pada tahun 2020 sebanyak 3,44 dan pada tahun 2021 sebanyak 3,59. Untuk mengetahui jumlah Rumah Tangga (RT) pada akhir tahun perencanaan, maka di dalam dokumen RP3KP ini dilakukan perhitungan dengan menggunakan pendekatan 1 rumah tangga terdiri atas 3-4 penduduk, sehingga digunakan sebanyak 3,5 penduduk (1 rumah tangga = 3,5 jiwa). Kondisi tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah perencanaan, yaitu rata-rata 1 rumah tangga memiliki 3-4 anggota keluarga.

$$P_t = P_n / 3,5$$

Keterangan:

P_t : jumlah rumah tangga tahun proyeksi

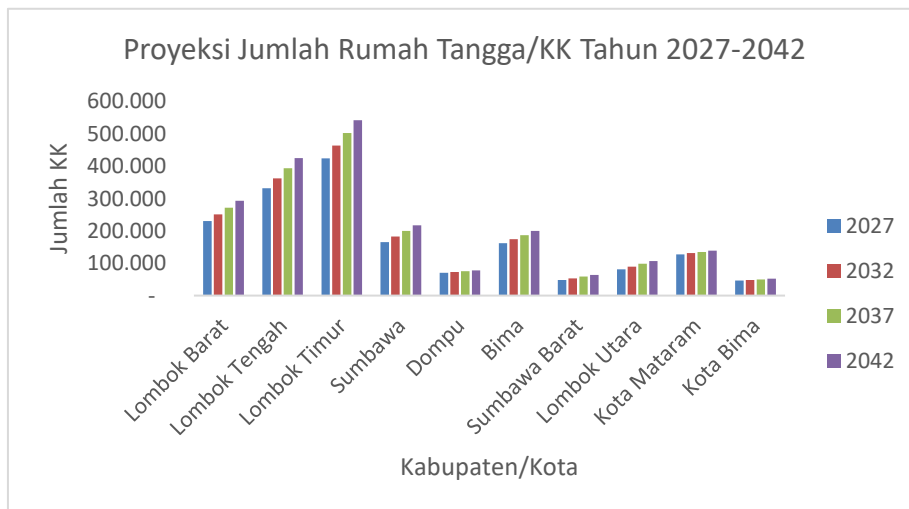
P_n : jumlah penduduk tahun proyeksi

Angka 3,5 merupakan nilai asumsi jumlah anggota rumah tangga (jiwa) di dalam 1 KK

Tabel 5.4 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga/KK Tahun 2027-2042

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Rumah Tangga/KK			
		2027	2032	2037	2042
1	Kab Lombok Barat	229.889	250.690	271.491	292.292
2	Kab Lombok Tengah	330.978	362.042	393.105	424.169
3	Kab Lombok Timur	423.365	462.757	502.150	541.543
4	Sumbawa	165.739	182.969	200.200	217.430
5	Dompu	70.560	73.063	75.566	78.069
6	Bima	161.377	174.057	186.736	199.415
7	Sumbawa Barat	46.567	51.835	57.102	62.370
8	Kab Lombok Utara	94.019	104.221	114.423	124.625
9	Kota Mataram	127.152	130.876	134.600	138.323
10	Kota Bima	46.455	48.282	50.108	51.935
Jumlah		1.696.102	1.840.792	1.985.482	2.130.171

Sumber : Hasil Analisa, 2023



Gambar 5.4 Proyeksi KK tahun 2027-2042

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, didapatkan proyeksi kepadatan penduduk wilayah perencanaan hingga tahun 2042 adalah dengan perhitungan jumlah penduduk (jiwa) tahun proyeksi dibagi dengan luas wilayah (Km²). Sehingga diketahui kepadatan penduduk seperti ditampilkan dalam tabel 5.5 berikut ini.

$$P_t = P_n / L_w$$

Keterangan:

P_t : kepadatan penduduk tahun proyeksi

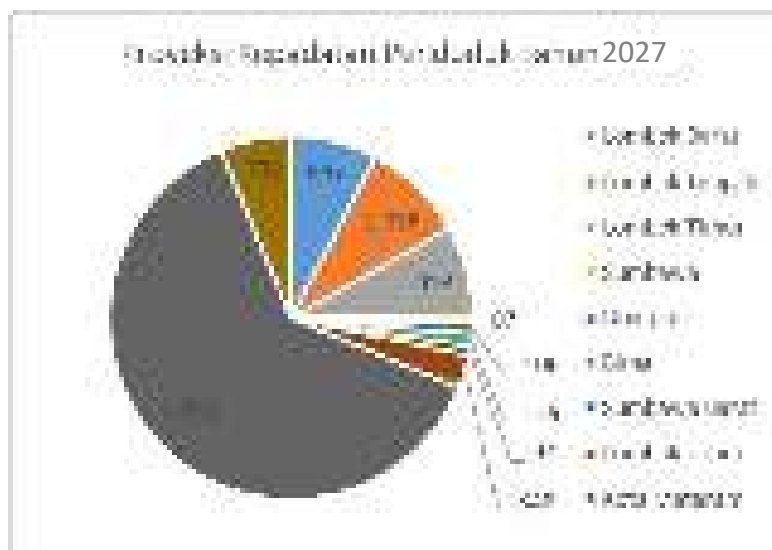
P_n : jumlah penduduk tahun proyeksi

L_w : Luas wilayah

Tabel 5.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2027-2042

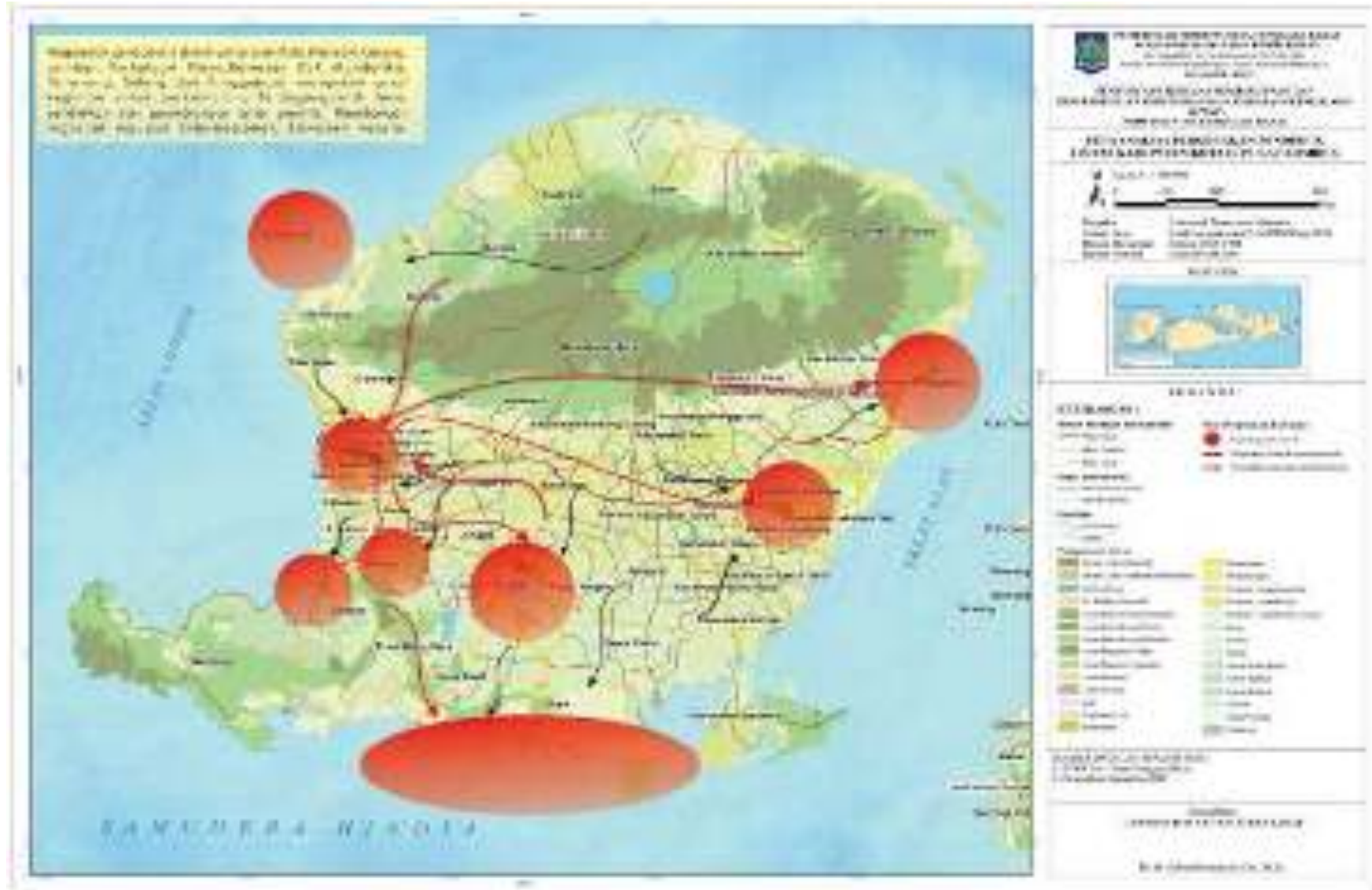
No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk			
			2027	2033	2037	2042
1	Kab Lombok Barat	896,56	897	979	1.060	1.141
2	Kab Lombok Tengah	1.095,03	1.058	1.157	1.256	1.356
3	Kab Lombok Timur	1.605,55	923	1.009	1.095	1.181
4	Sumbawa	6.643,98	87	96	105	115
5	Dompu	2.324,55	106	110	114	118
6	Bima	4.389,00	129	139	149	159
7	Sumbawa Barat	1.742,27	94	104	115	125
8	Kab Lombok Utara	809,53	348	386	424	462
9	Kota Mataram	61,3	7.260	7.473	7.685	7.898
10	Kota Bima	222,25	732	760	789	818
Jumlah		19.790,02	11.634	12.213	12.792	13.371

Sumber : Hasil Analisa, 2023

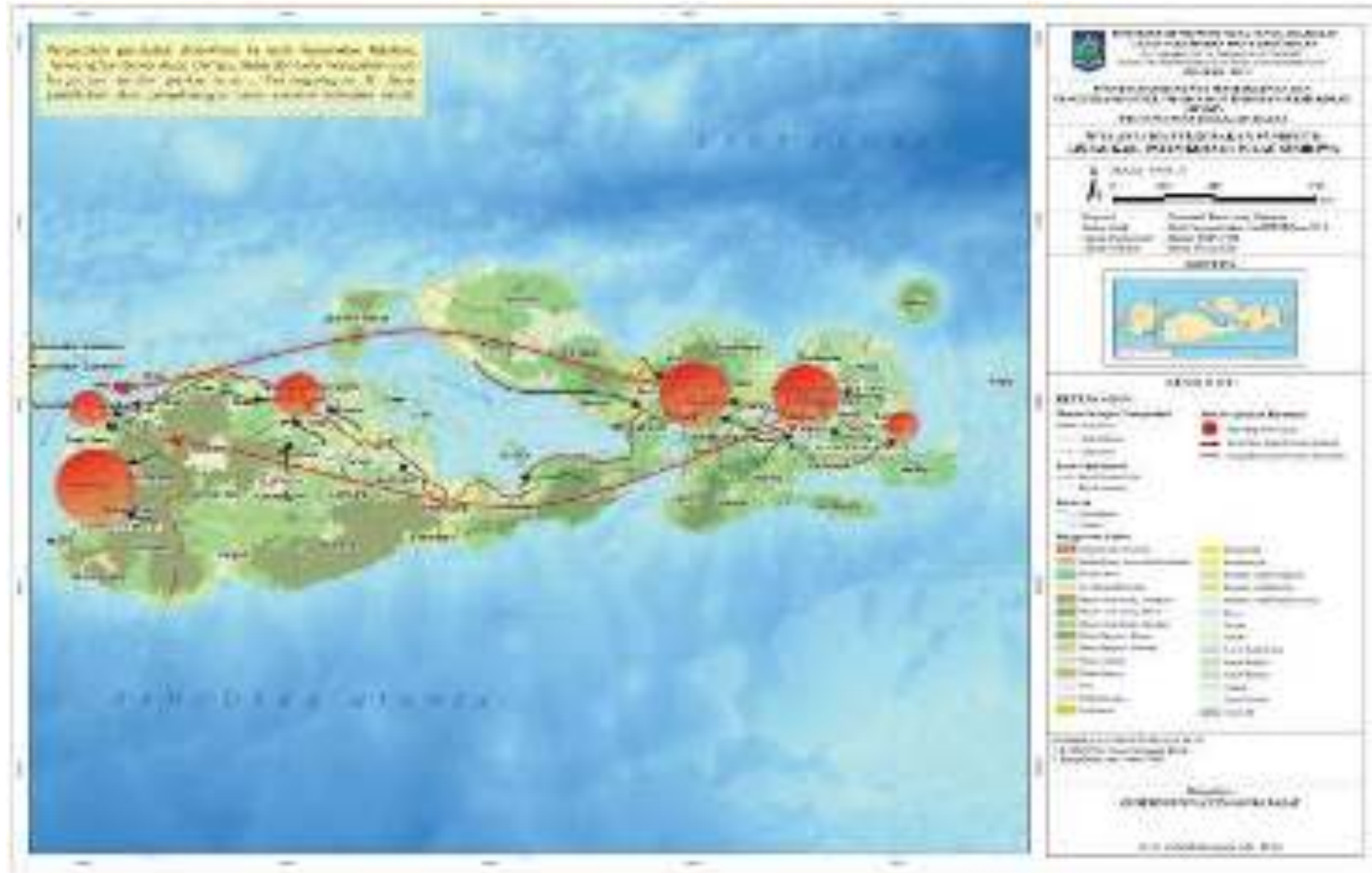


Gambar 5.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk tahun 2027

Peta 5.14 Peta Pola Pergerakan Pulau Lombok Provinsi NTB



Peta 5.15 Peta Pola Pergerakan Pulau Sumbawa Provinsi NTB



Peta 5.16 Analisa Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat



Jika dilihat pada Peta 5.16, dapat diketahui bahwa dari hasil proyeksi kepadatan penduduk dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2042, kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten di provinsi NTB didominasi oleh kepadatan penduduk rendah dengan kriteria nilai kepadatan yaitu 277-2.906 jiwa/km². Namun demikian hanya Kota Mataram yang memiliki kepadatan penduduk tinggi yaitu dengan nilai kepadatan >7.260 jiwa/km² pada tahun 2027.

5.4 Analisis Karakter PKP

5.4.1 Karakteristik dan Tipologi PKP

Karakteristik dan Tipologi Rumah Berdasarkan Preferensi Masyarakat

Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat unik dan menyesuaikan dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Provinsi NTB yang terdiri dari 2 pulau yaitu pulau Lombok dengan suku Sasak dan pulau Sumbawa dengan suku Mbojo dan Samawa masing-masing memiliki tipologi rumah yang berbeda. Jika mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipologi PKP dapat dibagi atas dua, yaitu rumah tapak dan rumah susun. Lebih jauh diatur dalam pasal 21 UU 1/2011 tentang Jenis dan Bentuk Rumah dijelaskan bahwa jenis rumah terdiri atas rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah Negara. Rumah panggung dan rumah tepi sungai dan pantai merupakan karakteristik rumah swadaya yang ada di provinsi NTB. Rumah-rumah panggung ini tersebar di Kabupaten di Provinsi NTB dengan arsitektural lokal masih sangat kuat dengan kondisi lokalnya. Arsitektur lokal tersebut terlihat terutama pada bangunan sosial dan publik termasuk fasilitas lingkungan seperti tempat berkumpul warga, gapura dan bangunan lainnya. Pola bermukim penduduk di NTB pun sangat dipengaruhi oleh kultur budaya, morfologi, topografi, dan jenis tanah yang ada.

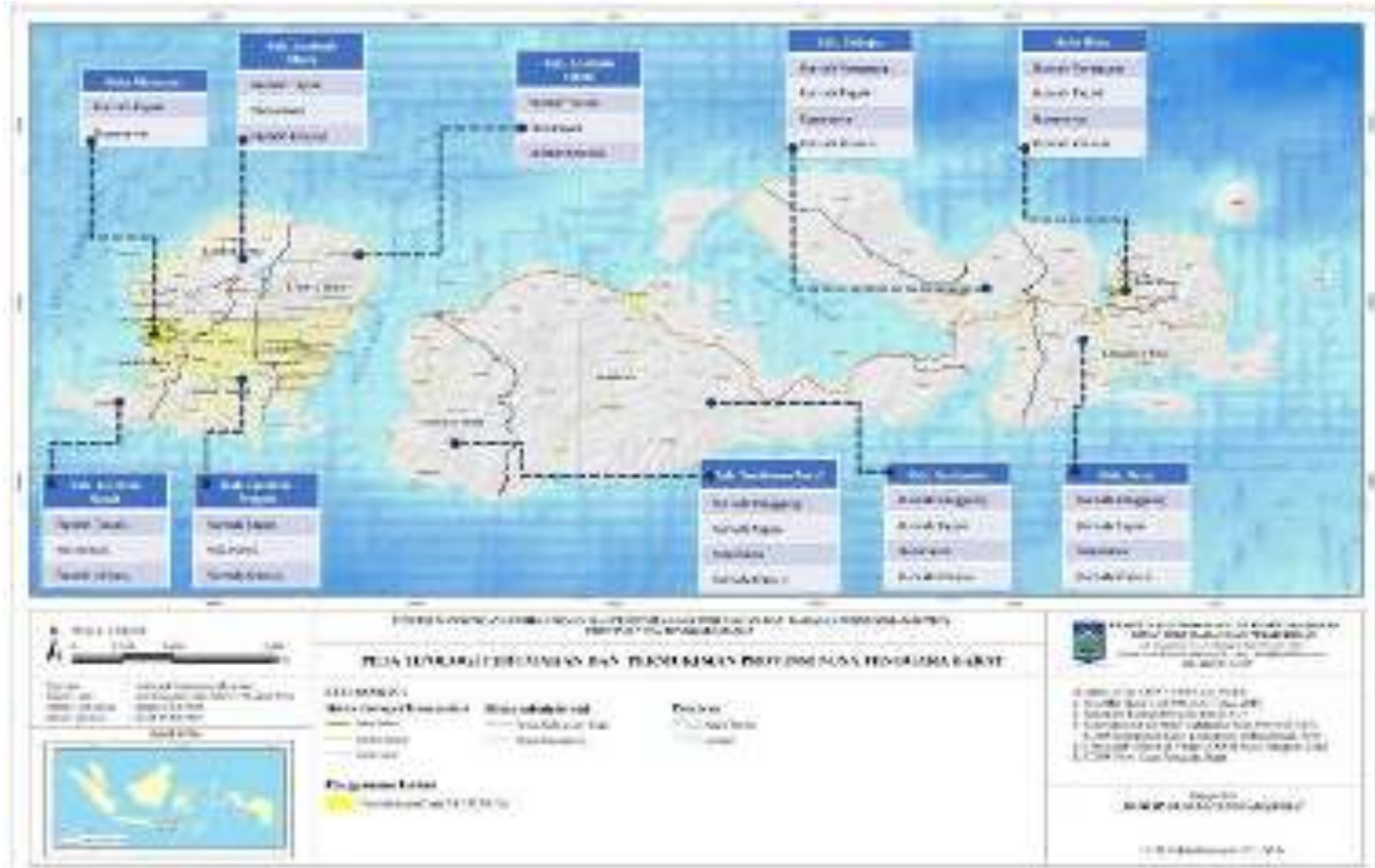
Tabel 5.6 Tipologi Perumahan di Provinsi NTB

Tipologi	Lokasi	Bentuk Permukaan Tanah	Ekologi / Budaya
Rumah Tapak	Semua Kabupaten/Kota	Tanah Lunak, Tanah Keras	Modern, Minimalis, Clustering, Berkelompok, Sprawl, Simetris Jalan Eksisting

Tipologi	Lokasi	Bentuk Permukaan Tanah	Ekologi / Budaya
Rumah Susun	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, kab Bima dan Kota Bima	Tanah Lunak, Tanah Keras	Modern dan berarsitektur lokal
Rumah Panggung	Sumbawa, Sumbawa Barat, Kab. Bima, Kota Bima dan Dompu.	Tanah Lunak	Panggung menggunakan material kayu

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Peta 5.17 Peta Tipologi Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat



Indikasi Harga Rumah Yang Bisa di Jangkau Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/Kpts/M/2020 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Besaran Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Lama Masa Subsidi Dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah Dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak, Luas Lantai Satuan Rumah Susun Umum Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Maka ditetapkan beberapa hal terkait keputusan diatas :

1. Batasan penghasilan kelompok sasaran, suku bunga/margin pembiayaan bersubsidi, masa subsidi, dan jangka waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi;
2. Batasan harga jual rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum; dan
3. Batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak serta luas lantai satuan rumah susun umum;

Didalam Kepmen PUPR Nomor 242/Kpts/M/2020, diatur juga tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Dan Jangka Waktu KPR Bersubsidi.

a. Kelompok Sasaran KPR Sejahtera

Batasan penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp)	Suku Bunga/Margin Pembiayaan Paling Tinggi	Masa Subsidi Paling Lama (Tahun)	Jangka Waktu KPR Paling Lama (Tahun)
8.000.000,-	5%	20	20

Sumber : Kepmen PUPR No.242/Kpts/M/2020

b. Kelompok Sasaran KPR Sejahtera

Batasan penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp)	Suku Bunga/Margin Pembiayaan Yang Dibayar Debitur / Nasabah Paling Tinggi	Masa Subsidi Paling Lama (Tahun)	Jangka Waktu KPR Paling Lama (Tahun)
8.000.000,-	5%	10	20

Sumber : Kepmen PUPR No.242/Kpts/M/2020

Batasan harga jual rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.

1. Wilayah Nusa Tenggara Barat harga jual paling banyak Rp. 168.000.000,- untuk Rumah Umum Tapak
2. Wilayah Provinsi NTB. Harga jual /M² paling banyak Rp. 7.400.000,- dan Harga jual/unit paling banyak Rp.266.400.000,- untuk Satuan Rumah Susun Umum,

Tabel 5.7 Batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak serta luas lantai satuan rumah susun umum

No	Jenis Rumah	Luas Tanah (M ²)		Luas Lantai Rumah (M ²)	
		Paling Rendah	Paling Tinggi	Paling Rendah	Paling Tinggi
1	Rumah Umum Tapak	60	200	21	36
2	Satuan Rumah Susun Umum	-	-	21	36

Sumber : Kepmen PUPR No.242/Kpts/M/2020

5.4.2 Analisis Identifikasi Permasalahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahan berdasarkan profil perumahan dan kawasan permukiman dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.8 Identifikasi Permasalahan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Identifikasi Permasalahan
1	Kabupaten Lombok Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 11.503 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Terdapat permukiman lintas kabupaten/Kota antara Kota Mataram dan Lombok Barat yang berada di sekitaran kawasan jalan lingkar yang memerlukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan longsor
2	Kabupaten Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 26.864 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir, area KEK Mandalika dan Bandara ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan tsunami

No	Kabupaten/Kota	Identifikasi Permasalahan
3	Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 31.217 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Terdapatnya permukiman rawan banjir di sekitar Irigasi Sangkon ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir dan sempadan sungai ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan longsor
4	Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 34.285 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir dan sempadan sungai ▪ Terdapatnya permukiman kumuh di sekitar kawasan pasar ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan banjir
5	Kabupaten Dompu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 25.733 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Terdapat permukiman sempadan sungai yang memerlukan penataan dan peningkatan kualitas ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar sempadan sungai ▪ Terdapat permukiman rawan banjir di sekitar sungai sori rababaka dan sori labolaju ▪ Merupakan rawan bencana Banjir
6	Kabupaten Bima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 35.991 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Terdapat permukiman sempadan sungai dan pantai yang memerlukan penataan dan peningkatan kualitas ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar kawasan pasar, pelabuhan, pesisir dan sempadan sungai ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan banjir
7	Kabupaten Sumbawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 4.319 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar sempadan sungai
8	Kabupaten Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 16.466 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Terdapat permukiman yang tidak tertata di sekitar Kawasan Gunung Rinjani tepatnya berada di Kecamatan Bayan ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh
9	Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 5.987 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Terdapatnya permukiman rawan banjir di sekitar sempadan Sungai Jangkok dan Ancar yang berada di Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Mataram ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir dan sempadan sungai ▪ Terdapatnya permukiman kumuh di sekitar kawasan pasar ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi dan banjir
10	Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat RTLH sebanyak 11.233 Berdasarkan data Disperkim Kab/Kota Tahun 2023 ▪ Mulai tumbuh pengembangan tanah kaveling yang berpotensi terjadi kumuh ▪ Terdapat permukiman sempadan sungai dan pantai yang memerlukan penataan dan peningkatankualitas ▪ Terdapat permukiman rawan banjir di sekitar Sempadan Sungai Padolo,

No	Kabupaten/Kota	Identifikasi Permasalahan
		<p>Rontu, Sadia dan sori ntobo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya permukiman di sekitar pesisir dan sempadan sungai ▪ Terdapatnya permukiman kumuh di sekitar kawasan pasar dan pelabuhan ▪ Rawan gelombang pasang, abrasi, longsor dan banjir

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka permasalahan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- Masih ada permukiman kumuh;
- Terdapat permukiman pesisir;
- Permukiman pada kawasan rawan bencana;
- Permukiman pada kawasan sempadan sungai dan pantai; dan
- Permukiman kumuh pada kawasan pelabuhan, industri dan pasar.

Hal-hal yang menjadi permasalahan utama yaitu:

- Masalah lingkungan;
- Kondisi bangunan;
- Perilaku masyarakat; dan
- Kondisi fisik lahan.

5.4.2.1 Analisis Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 5,896.23 Ha. Hal ini didasarkan dari masing-masing SK tentang permukiman kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kewenangan Provinsi dalam menangani Permukiman Kumuh yaitu pada Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha dengan total luasan yaitu 612,83 Ha yang tersebar di 48 lokasi/kawasan. Untuk permasalahan permukiman kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

a. Kondisi Bangunan

- Masih banyak terdapat permukiman yang berada di sempadan sungai, pantai/pesisir;
- Pada permukiman perkotaan terdapat ketidakteraturan bangunan dan jarak antar bangunan sangat dekat sehingga rawan akan kebakaran; dan
- Masih banyak rumah tidak layak huni dan rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis khususnya penghawaan, sanitasi dan pencahayaan.

b. Kondisi Jalan Lingkungan

- Beberapa lokasi masih belum terlayani jalan lingkungan dengan kondisi perkerasan tanah; dan
- Masih terdapat jalan lingkungan yang kondisinya buruk dan jalan kurang dari 1,5 meter (<1,5 m).

c. Drainase Lingkungan

- Kondisi saluran drainase tidak terawat banyak dipenuhi sampah;
- Sebagian besar Dimensi saluran drainase kurang memadai;
- Saluran drainase juga menjadi lokasi penempatan jaringan perpipaan air bersih yang berpengaruh ketidak lancar aliran air; dan
- Rawan Banjir atau genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2jam

d. Air Limbah

- Sarana dan prasarana air limbah terbatas, belum seluruhnya memiliki akses terhadap MCK yang layak dan aman;
- Masih ada masyarakat yang BAB di pesisir dan sungai atau tidak pada tempatnya; dan
- Aliran limbah rumah tangga langsung dialirkan menuju sungai dan laut

e. Air Minum

- Minimnya sumber air minum;
- Belum terjangkau pelayanan PDAM;
- Masih buruknya kualitas air bersih yang dikonsumsi; dan
- Rendahnya pelayanan air minum yang layak minimal 60 lt/jiwa/hari.

f. Persampahan

- Belum terjangkau sistem pelayanan persampahan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah; dan
- Sarana dan prasarana sampah terbatas.

g. Prasarana Kebakaran

- Belum adanya sarpras kebakaran;

- Rendahnya pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
- Masih banyak permukiman dengan jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran (kurang dari 3,5 meter).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka analisis kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

Tabel 5.9 Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/Kota	Lokasi	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
1	Munculnya kantong-kantong kumuh Perkotaan akibat perkembangan hunian yang tidak diiringi dengan infrastruktur permukiman yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Kumuh di Perkotaan ▪ Kawasan strategis Ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ▪ Kawasan Pengembangan ▪ Kawasan Perlindungan Setempat seperti di sempadan pantai, sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, ruang terbuka hijau kota dan SUTT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang ▪ Regulasi terkait ijin mendirikan bangunan sertamenyediakan regulasi bangunan gedung ▪ Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Organisasi Masyarakat dalam pemeliharaan dan Pemanfaatan infrastruktur permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatkan infrastruktur dasar permukiman ▪ Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan berkepadatan sedang sampai tinggi dengan konsep PEMUGARAN ▪ Penataan Kawasan Kumuh Nelayan dan Pesisir dengan konsep PEMUGARAN dan PERMUKIMAN KEMBALI ▪ Penataan Kawasan Kumuh Perbukitan dengan konsep PEMUGARAN
2.	Tumbuhnya permukiman di sempadan pantai dan sungai	Wilayah Pesisir dan sempadan sungai pada Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota dan Kawasan Kumuh	Penegakan aturan perijinan di kawasan sempadan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan tanggul sempadan ▪ Pembuatan jalur hijau
3.	Kawasan permukiman di kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan longsor	Kawasan permukiman kumuh perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sosialisasi mitigasi/tanda-tanda terjadinya bencana serta evakuasi bencana letusan gunung api dan tanah longsor ▪ sosialisasi mitigasi/tanda-tanda terjadinya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan jalur evakuasi dan titik kumpul ▪ Pembentukan perda bangunan gedung ▪ Pembangunan bangunan gedung di kawasan rawan letusan gunung berapi harus sesuai dengan standar teknis BG di kawasan rawan bencana gunung

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/Kota	Lokasi	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
			kebencanaan serta evakuasi kebencanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang ▪ Sosialisasi terkait dengan persyaratan bangunan gedung di kawasan Dataran tinggi 	berapi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan BG di kawasan rawan longsor dengan memperhatikan struktur bangunan sesuai dengan standar teknis BG pada bangunan rawan longsor
4.	Permasalahan rawan banjir serta ketidakterhubungan saluran drainase tersier hingga primer	Seluruh kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase terkait sistem biopori ▪ Action Plan/Rencana aksi pencegahan ▪ pemeliharaan dan Pemanfaatan Drainase Lingkungan sesuai ketentuan berlaku ▪ Adanya regulasi dalam mendirikan bangunan pada kawasan rawan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normalisasi saluran drainase dari sistem hulu kehilir ▪ Menghubungkan sistem drainase perkotaan secara hirarki ▪ Pembangunan sistem biopori dalam Kawasan permukiman padat perkotaan
5.	Permasalahan air minum pada kawasan permukiman kumuh yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum meratanya cakupan layanan PDAM ▪ Mayoritas belum mendapatkan akses air yang aman dan belum terpenuhi kebutuhan air minum ▪ Belum terdapatnya kelompok HIPPAM 	Seluruh kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan air bersih ▪ Adanya regulasi mengenai aturan dalam mendirikan bangunan pada kawasan sumber air (mata air) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jaringan perpipaan dan penambahan SR di seluruh kawasan ▪ Pembentukan kelompok HIPPAM di area dekat sumber air ▪ Pemeliharaan BJP terlindungi
6.	Permasalahan persampahan pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terdapat 	Seluruh kawasan permukiman kumuh	Sosialisasi kepada Masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R dan bank sampah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan system pengangkutan sampah ▪ Peningkatan kualitas TPA menjadi contoh landfill ▪ Penambahan di lokasi TPS 3R dan pengembangan 1

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/Kota	Lokasi	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
	<p>pengelolaan sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terdapat sistem pengangkutan sampah ▪ Mayoritas tidak memiliki TPS ▪ Kapasitas TPA sudah tidak memenuhi dan masih menggunakan sistem open dumping 			desa 1 bank sampah
7.	Kebiasaan dan Perilaku masyarakat yang masih sangat rendah terhadap pemahaman pola hidup sehat dan bersih.	Seluruh kawasan permukiman kumuh.	Sosialisasi PHBS dan edukasi tentang lingkungan hidup sehat dan layak huni.	

Sumber: Hasil Analisa Provinsi NTB, 2021

Tabel 5.10 Analisis Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan Kebutuhan Infrastruktur

Aspek yang diamati	Kebutuhan Penanganan	
	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi terkait Penerapan peraturan KDB, KLB pada bangunan baru ▪ Sosialisasi Pengaturan dan pengendalian GSB ▪ Sosialisasi tentang garis sempadan pantai dan sempadan sungai serta kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan pada kawasan tersebut ▪ Penyesuaian dan penegakan aturan kesesuaian bangunan terhadap lahan serta tuntutan bagi keteraturan ▪ Sosialisasi dan advokasi Masyarakat terhadap budaya hidup rapi, teratur dan sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan RTH privat dengan potisasi tanaman ▪ Pengembangan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan sungai ▪ Perbaikan rumah tidak layakhuni: ▪ Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur ▪ Peningkatan kualitas dan Kapasitas bangunan hunian sesuai persyaratan teknis
Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala ▪ Pemeriksaan berkala terhadap usia pakai jalan/Vitalitas ▪ Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Organisasi Masyarakat dalam pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas permukaan jalan tanah ke lapen aspal, paving atau rabat beton sesuai dengan karakteristik lokasi. ▪ Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan lingkungan sesuai persyaratan teknis baik dari segi akses jangkauan maupun syarat teknis jalan yang layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi hemat air dan menjaga sumber air ▪ Penyediaan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru oleh PDAM ▪ Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam ▪ Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan penggunaan air 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum melalui penambahan jaringan pipanisasi PDAM ▪ Optimalisasi layanan eksisting ▪ Mencari/meningkatkan sumber-sumber air baru. ▪ Pembangunan tandon air dan bangunan pendukung untuk layanan kepada masyarakat
Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase ▪ Melakukan sosialisasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat bencana banjir dan cara menanggulangnya ▪ Pemeliharaan saluran drainase eksisting ▪ Pelibatan masyarakat dalam memelihara keberlanjutan fungsi drainase ▪ Mengajak dan melibatkan seluruh masyarakat agar menutup semua saluran limbah rumah tangga yang menuju 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun saluran drainase ▪ Normalisasi sungai ▪ Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala ▪ Pengembangan saluran drainase pada gang sempit dengan model U-Gutter di sepanjang jalan lingkungan yang berdimensi $\leq 1m$ ▪ Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase ▪ Peningkatan kualitas dan kapasitas/ kemampuan fungsi drainase (konstruksi) ▪ Pembuatan saringan drainase untuk penyaringan sampah

Aspek yang diamati	Kebutuhan Penanganan	
	Pencegahan	Peningkatan
	Drainase	
Pengolahan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kampanye dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat ▪ Peningkatan sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau <i>Septic Tank</i> yang memenuhi syarat teknis ▪ Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat ▪ Pengawasan limbah rumah tangga yang masuk ke drainase lingkungan ▪ Mengajak keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengendalian limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jambanisasi yang dilengkapi dengan tangka septic ▪ Pembangunan IPAL komunal ▪ Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah ▪ Pembangunan unit perpipaan menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah
Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R ▪ Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah ▪ Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan ▪ Membuat program <i>clean, green and healthy</i> sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan ▪ Sosialisasi dan advokasi kesadaran PHBS masyarakat. ▪ Pelembagaan system pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan sarana persampahan yang sudah ada ▪ Peningkatan TPS eksisting menjadi TPS 3R ▪ Peningkatan sistem pengangkutan sampah yang melayani seluruh kawasan ▪ Penambahan sarana dan prasarana persampahan termasuk sarana gerobak/mobil/motor pengangkut sampah dari hunian menuju TPS dan TPA
Sistem Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran kepada masyarakat dan siswa sekolah ▪ Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat ▪ Penyediaan alat pemadam kebakaran <i>portable</i> ▪ Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama ▪ Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)

Sumber: Hasil Analisa Provinsi NTB, 2021

5.4.2.2 Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman

Kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas yaitu permukiman di kawasan rawan bencana, permukiman di pesisir, permukiman kumuh, permukiman adat, dan permukiman di pedesaan. Berikut upaya peningkatan kualitas permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman

No	Kondisi Eksisting	Permasalahan Utama	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
1.	Permukiman Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perilaku masyarakat ▪ Ketersediaan PSU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai kebersihan lingkungan permukiman dan kawasan perumahan ▪ Penyediaan PSU
2.	Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepadatan tinggi ▪ Sampah ▪ Air bersih ▪ Banjir (fisik) ▪ Sanitasi ▪ Jalan dan Drainase ▪ Perilaku masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian dan penataan kepadatan bangunan perumahan ▪ Pengelolaan sistem persampahan ▪ Penataan sistem drainase dan aturan tambahan terhadap bangunan perumahan ▪ Penyediaan layanan air bersih layak ▪ Peningkatan kualitas jalan ▪ Penyediaan MCK komunal ▪ Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat setempat tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan ▪ Pemberdayaan masyarakat
3.	Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampah ▪ Air bersih ▪ Sanitasi ▪ Jalan dan Drainase ▪ Perilaku masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan masyarakat ▪ Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat pesisir ▪ Penyediaan air bersih ▪ Pengelolaan Sistem persampahan ▪ Penataan sistem drainase dan aturan tambahan terhadap bangunan perumahan ▪ Peningkatan kualitas jalan ▪ Penyediaan MCK komunal
4.	Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banjir ▪ Longsor ▪ Gelombang Pasang ▪ Tsunami ▪ Gunung Berapi ▪ Gempa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan sistem drainase dan aturan tambahan terhadap bangunan ▪ Pelarangan pendirian permukiman di sempadan sungai ▪ Pelarangan pendirian permukiman di sempadan pantai ▪ Pelarangan pendirian rumah di atas kelerengan >40%
5	Permukiman Adat	Penurunan Kualitas Lingkungan dan vitalitas lingkungan	Konservasi dan pelestarian permukiman adat (dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata)
6	RTLH	231.055 unit (Sumber E-RTLH tanggal 2 Juni 2022)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Renovasi RTLH ▪ Program RS-Rutilahu (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) ▪ program DAK Perumahan

Sumber : Hasil Analisa, 2021

5.4.2.3 Analisis Penanganan Permukiman Di Kawasan Rawan Bencana

Permukiman rawan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi permukiman rawan bencana banjir, banjir bandang, rawan longsor, gelombang pasang dan gelombang ekstrim, bencana kekeringan, bencana letusan gunung berapi aktif, bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Analisis penanganan permukiman di kawasan rawan bencana pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Analisis Penanganan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana

No	Rawan Bencana	Lokasi	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
1.	Rawan banjir	Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Mataram dan Kota Bima.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan sistem drainase dan aturan tambahan terhadap bangunan ▪ Pelarangan pendirian permukiman di sempadan sungai ▪ Pelarangan pendirian permukiman di atas saluran irigasi ▪ Pengendalian aturan intensitas KDB minimal 70% dan penyediaan RTH minimal 10% ▪ reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan ▪ Penyediaan RTH minimal 30 % (tiga puluh persen) meliputi ruang milik pribadi 10 % (sepuluh persen) dan milik umum 20 % (dua puluh persen) yang disediakan oleh pemerintah sebagai ruang serap air ▪ Pembuatan sumur resapan dalam, sumur resapan dangkal, dan biopori di daerah rawan bencana banjir ▪ Pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat arus aliran air yang memiliki daya rusak pada daerah yang dilewatinya ▪ Penyiapan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “plotting” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir / ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir
2.	Bencana banjir bandang	Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Mataram dan Kota Bima.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir (kecuali untuk taman dan fasilitas olah raga), dan dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan. ▪ revitalisasi fungsi resapan tanah; ▪ pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana

No	Rawan Bencana	Lokasi	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
3.	Rawan longsor	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai RTH, ▪ Penegakan Peraturan Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup, serta pengetatan izin mendirikan bangunan dan fasilitas utama lainnya di daerah rawan longsor. ▪ Penghijauan dengan tanaman yang akarnya dalam dan jarak tanam yang tepat ▪ Pembangunan terasering dengan sistem drainase yang tepat ▪ Pemasangan sistem peringatan dini bencana dengan Keterpaparan informasi peringatan dini bencana Tanah Longsor kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya bencana. ▪ Pembangunan sarana dan prasarana evakuasi masyarakat pada daerah rawan tanah longsor ▪ Peningkatan daerah resapan air dengan melakukan Penghijauan di kawasan lahan tandus, membuat sumur resapan, dan biopori ▪ Pembangunan Infrastruktur Pengaman Lereng di daerah rawan bencana tanah longsor dengan membangun talud pengaman lereng di daerah aliran sungai maupun di daerah yang rawan longsor pada bahaya kelas tinggi
4.	Rawan gelombang pasang dan gelombang ekstrim	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelarangan pendirian permukiman di sempadan pantai ▪ Pengembangan permukiman dengan jarak minimal 100 meter dari sempadan pantai ▪ Pembangunan break water pada daerah yang terancam abrasi dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengambilan material pembangunan dalam setiap tahun ▪ Pengembangan kawasan hutan bakau .
5	Kekeringan	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan wilayah yang tinggi kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan RTH di Kawasan Permukiman ▪ Rehabilitasi Lahan Kritis menjadi RTH, ▪ Pengembangan resapan air di Kawasan Permukiman ▪ Pelestarian sumber daya air ▪ Pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan
6	Rawan akan bencana letusan gunung berapi	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penghindaran kegiatan budi daya di kawasan risiko bencana letusan gunung api; ▪ penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api; ▪ pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana; ▪ penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan risiko bermukim di kawasan sekitar gunung api, mitigasi bencana, dan tindakan dalam menghadapi bencana gunung

No	Rawan Bencana	Lokasi	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
			<p>api; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan kesiapan dan koordinasi segenap pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana gunung api. ▪ Pemberlakuan dan Pengetatan Ijin mendirikan bangunan di kawasan KRB 1 yang paling rawan bencana gunung api ▪ Pembangunan saluran dan jalur aliran lahar untuk mengantisipasi aliran lahar ke kawasan permukiman penduduk ▪ Pemasangan rambu-rambu bahaya dan rambu-rambu evakuasi di daerah gunung api terutama pada jalur pendakian ▪ Pemasangan sistem peringatan dini bencana Letusan Gunung Api dengan Keterpaparan informasi peringatan dini kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya Letusan. ▪ Sosialisasi rencana evakuasi bencana Letusan Gunung Api bagi masyarakat di kawasan rawan bencana Letusan.
7	Bencana gempa bumi	Pada area patahan-patahan di 10 Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital (seperti : rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan sebagainya) di wilayah yang aman dari gempa bumi. ▪ Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana; ▪ penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan upaya dalam menghadapi gempa ▪ Pengembangan teknik konstruksi tahan gempa, baik bangunan untuk fasilitas umum maupun permukiman ▪ Pemetaan zona daerah rawan gempa bumi dan melakukan penyesuaian penggunaan lahan sesuai dengan zonasi tersebut ▪ Penerapan peraturan tata guna lahan dan IMB berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi ▪ Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa ▪ Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan dampaknya kepada siswa-siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah secara simultan berkelanjutan di daerah rawan bencana ▪ Sosialisasi pengetahuan tentang cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi di daerah rawan bencana ▪ Penyusunan rencana pemukiman baru untuk mengurangi tingkat kepadatan

No	Rawan Bencana	Lokasi	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
			hunian di daerah rawan bencana gempa bumi
8	Rawan tsunami	Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan daerah penyangga dan peredam dampak bencana Tsunami dengan melakukan penanaman mangrove sepanjang 10 km dengan ketebalan 100 meter per tahun di garis pantai berpotensi terkena tsunami. Pembatasan pembangunan fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran) di zona rawan tsunami ▪ Perkuatan bangunan agar tahan terhadap tekanan gelombang dan arus kuat, antara lain dengan merekonstruksi pondasi struktur agar dapat menahan erosi dan penggerusan oleh arus ▪ Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan IMB di wilayah pesisir pantai ▪ Proteksi kawasan terumbu karang 2-3 km dari pantai di zona prioritas tsunami ▪ Pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko. ▪ Pemasangan sistem peringatan dini bencana dengan keterpaparan informasi peringatan dini bencana tsunami kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya bencana.

Sumber : Hasil Analisa, 2021

5.4.2.4 Analisis Backlog

Backlog merupakan permasalahan utama Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Backlog* rumah dari perspektif kependudukan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal yaitu 1 keluarga menghuni 1 rumah. Rumus yang digunakan untuk menghitung *backlog* rumah dari perspektif kependudukan adalah:

$$\text{Backlog} = \sum \text{Keluarga} - \sum \text{Rumah}$$

Konsep menghuni dalam perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*).

Backlog Kepemilikan dihitung berdasarkan angka *home ownership rate* atau persentase

rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Fakto-faktor yang mempengaruhi angka *backlog* perumahan adalah jumlah rumah tangga (RT) yang mencerminkan jumlah kebutuhan rumah oleh rakyat dan jumlah rumah yang dapat disediakan/dibangun. Jumlah rumah tangga setiap tahun akan mengalami pertumbuhan, dengan data yang tersedia, pertumbuhan rumah tangga dapat diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan. Sedangkan jumlah rumah yang tersedia sangat dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan, yang sangat menentukan seberapa banyak rumah yang dapat dibangun baik oleh pemerintah maupun sektor swasta (pengembang). Apabila intervensi pemerintah melalui kebijakan bidang perumahan maupun langsung membangun rumah tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga, maka angka *backlog* perumahan semakin bertambah setiap tahunnya.

Tabel. 5.13 Perhitungan proyeksi backlog kepemilikan rumah tahun 2027 – 2042

No	Kabupaten/Kota	Data eksisting tahun 2022	2027	2032	2037	2042
1	Kab Lombok Barat	27.376	25.780	28.112	30.445	32.777
2	Kab Lombok Tengah	31.074	32.850	35.933	39.016	42.099
3	Kab Lombok Timur	67.005	71.768	78.446	85.124	91.802
4	Sumbawa	11.938	12.003	13.251	14.499	15.747
5	Dompu	7.671	8.552	8.855	9.158	9.462
6	Bima	12.746	14.243	15.363	16.482	17.601
7	Sumbawa Barat	6.209	8.212	9.141	10.070	10.999
8	Kab Lombok Utara	4.991	5.461	6.054	6.647	7.239
9	Kota Mataram	27.887	30.010	30.889	31.768	32.647
10	Kota Bima	7.595	9.058	9.414	9.770	10.126
Total		204.492	217.938	235.458	252.979	270.499

Sumber : Hasil analisa, 2023

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa :

- Backlog rumah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2022 sebesar 204.492 unit rumah
- Backlog tertinggi yaitu pada Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram
- Backlog terendah yaitu pada Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara

Adapun strategi Pemerintah Provinsi menangani backlog yaitu dengan :

- Penyediaan Data Base bidang Peumahan;
- Fasilitasi pemanfaatan lahan di kabupaten/Kota untuk pembangunan Rumah Susun Sewa;
- Fasilitasi pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin;

Peta 5.18 Backlog Kepemilikan Provinsi Nusa Tenggara Barat



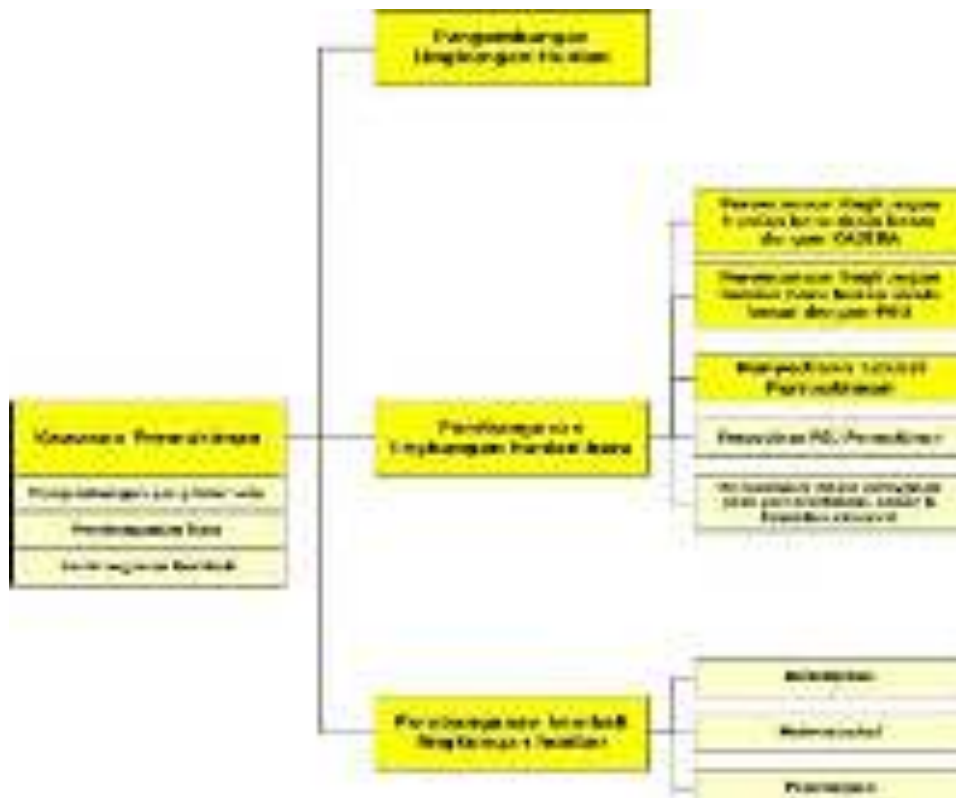
Pada Peta 5.18 dijelaskan dari hasil proyeksi backlog kepemilikan rumah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2027 sampai dengan tahun 2042 diketahui bahwa backlog kepemilikan rumah di seluruh kabupaten/Kota di provinsi NTB memiliki nilai backlog rendah yang ditandai dengan area warna hijau dengan kriteria nilai backlog 3.500-90.000 unit.

5.5 Analisis Arah Pengembangan PKP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, substansinya menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Dalam regulasi tersebut, pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, yang sekaligus mewujudkan permukiman yang berkelanjutan (*sustainable human settlements*) melalui aturan pola penanganan perumahan sebagai salah satu upaya akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pembangunan perumahan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan akan rumah layak pada dasarnya merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya merupakan pihak yang mendukung proses tersebut melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhan rumah layak huni dan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan kehidupan dan berpenghidupan dilingkungan PKP.

Arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum sebagai berikut:



Gambar 5.6 Arah Pengembangan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sedangkan arahan pengembangan perumahan terutama untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7 Arah Pengembangan Perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Arah Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Dukungan Potensi Wilayah,

Serta Kemampuan Penyediaan Rumah Dan Jaringan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum adalah sebagai berikut:

- Penyediaan perumahan real estate pada Kawasan perkotaan
- Penyediaan perumahan MBR pada Kawasan perdesaan
- Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pendukung Kawasan wisata
- Penyediaan rumah susun untuk kawasan industri

Tabel 5.14 Matriks Potensi Wilayah

No	Kabupaten	Wilayah	Potensi Wilayah
1	Sumbawa	Samota, Pernek, Pulau Moyo, Semongkat	Pariwisata
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Alas	Perikanan
2	Sumbawa Barat	Mantar, Kalela, Pulau Kenawa	Pariwisata
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Maluk, Labuan Lalar	Perikanan
		Maluk	Pertambangan
3	Kab.Bima	Waworada, Sape	Perikanan
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Belo, Woha, Bolo, Wawo, Sape	Agro Industry
4	Dompu	Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Teluk Sanggar, Teluk Cempi	Perikanan
		Hu'u	Pariwisata
5	Kota Bima	Rasane Barat, Asa Kota	Pariwisata
		Teluk Bima	Perikanan
		Rasane Barat, Raba	Perdagangan Dan Jasa
6	Lombok Timur	Sembalun	Pariwisata, Agro Industry
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Tanjung Luar	Perikanan
		Pringgabaya, Labuan Haji, Jerowaru	Agro Industry
7	Lombok Tengah	Kute	Pariwisata, Perikanan
		Rembitan-Sade, Selong Blanak, Batukliang Utara	Pariwisata
		Batukliang, Jonggat, Praya Timur	Agro Industry
		Seluruh Kecamatan	Pertanian

No	Kabupaten	Wilayah	Potensi Wilayah
8	Lombok Barat	Narmada, Sengigi, Sekotong	Pariwisata
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
		Sekotong	Pertambangan
		Lingsar, Narmada	Agro Industry
9	Lombok Utara	Pemenang, Malaka, Gangga	Pariwisata
		Seluruh Kecamatan	Pertanian
10	Mataram	Ampenan, Tanjung Karang, Mayura, Bintaro	Pariwisata
		Cakra Negara, Ampenan, Sandubaya	Perdagangan Dan Jasa

5.6 Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Regional atau Rencana Induk Sistem dan PSU di Kawasan Lintas

Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi PSU Regional dan Lintas adalah terkait dengan adanya kebijakan, pengembangan jalan tol, pengembangan industri dan permasalahan PSU di kawasan lintas kabupaten/kota. Adapun analisis PSU untuk di kawasan lintas Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan jaringan utilitas regional adalah:

- a. Rencana investasi prasarana, sarana: adanya *bypass* dan rencana *bypass* baru
 - Memicu pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan tersedianya akses baru
 - Akan terjadi *urban sprawl*
 - Memanfaatkan akses *bypass*, untuk tempat bermukim (kemudahan menuju tempat kerja dan tujuan lainnya)
- b. Air Bersih Regional (SPAM regional pulau Lombok dan pulau Sumbawa)
- c. Penyediaan dan perbaikan PSU di lintas kabupaten/kota seperti jaringan drainase, jaringan air minum dan jalan lingkungan

5.7 Analisis Kebutuhan Penyediaan Rumah

Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Pertumbuhan Rumah Tangga (*Backlog*) dan Berdasarkan Konsep Hunian Berimbang, Tujuan penerapan konsep hunian berimbang ialah:

- Menjamin tersedianya rumah mewah, menengah, dan sederhana
- Mewujudkan kerukunan antar golongan masyarakat (proforsi, ekonomi, dan status

sosial)

- Mewujudkan subsidi silang (PSU, Pembiayaan, dan Pengelolaan)
- Menciptakan keserasian tempat bermukim (secara sosial dan ekonomi)
- Efisiensi pendayagunaan lahan

Pada prinsipnya, hunian berimbang didasarkan dari proyeksi kebutuhan rumah hingga tahun perencanaan yang selanjutnya kebutuhan jumlah rumah diklasifikasikan berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan proporsi masing-masing 1:2:3. Asumsi kebutuhan rumah dapat dihitung menggunakan data hasil proyeksi KK dan standar kebutuhan rumah sesuai ketentuan hunian berimbang dengan perbandingan 1:2:3 (Permenpera No 10/2012 tentang hunian berimbang). Dengan pendekatan tersebut maka dapat diketahui kebutuhan penambahan rumah hingga tahun 2042 di Provinsi NTB. Hunian berimbang menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersil atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum. Kebutuhan lahan untuk pembangunan rumah baru dihitung berdasarkan luasan kavling dari tipe kecil maksimal luas lahan yang diarahkan minimal 75 m², sedang 150 m² dan besar 200 m² sesuai dengan SNI No 03-6981 tahun 2004. Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 pasal 9 A (2) dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. Dalam hal membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah sederhana sekurang-kurangnya 1,5 kali jumlah rumah menengah yang akan di bangun. Diperoleh perbandingan rumah sederhana, menengah dan mewah yaitu 50%, 33% dan 17%. Penerapan pembangunan hunian berimbang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Analisis Kebutuhan Rumah Tahun 2027 sd 2042

NO	KABUPATEN	Demand/Kebutuhan Rumah															
		Tahun 2027				Tahun 2032				Tahun 2037				Tahun 2042			
		Jumlah Kebutuhan rumah	Kecil (50%)	Sedang (33%)	Besar (17%)	Jumlah kebutuhan rumah	Kecil (50%)	Sedang (33%)	Besar (17%)	Jumlah Kebutuhan Rumah	Kecil (50%)	Sedang (33%)	Besar (17%)	Jumlah kebutuhan rumah	Kecil (50%)	Sedang (33%)	Besar (17%)
1.	Lombok Barat	13.140	6.570	4.336	2.234	33.941	16.971	11.201	5.770	54.742	27.371	18.065	9.306	75.543	37.771	24.929	12.842
2.	Lombok Tengah	48.966	24.483	16.159	8.324	80.030	40.015	26.410	13.605	111.093	55.547	36.661	18.886	142.157	71.079	46.912	24.167
3.	Lombok Timur	95.105	47.552	31.384	16.168	134.497	67.249	44.384	22.865	173.890	86.945	57.384	29.561	213.283	106.641	70.383	36.258
4.	Sumbawa	12.840	6.420	4.237	2.183	30.070	15.035	9.923	5.112	47.301	23.650	15.609	8.041	64.531	32.266	21.295	10.970
5.	Dompu	14.936	7.468	4.929	2.539	17.439	8.720	5.755	2.965	19.942	9.971	6.581	3.390	22.445	11.222	7.407	3.816
6.	Bima	29.712	14.856	9.805	5.051	42.392	21.196	13.989	7.207	55.071	27.535	18.173	9.362	67.750	33.875	22.358	11.518
7.	Sumbawa Barat	17.568	8.784	5.797	2.987	22.836	11.418	7.536	3.882	28.103	14.052	9.274	4.778	33.371	16.686	11.012	5.673
8.	Lombok Utara	13.089	6.544	4.319	2.225	23.291	11.645	7.686	3.959	33.493	16.746	11.053	5.694	43.695	21.847	14.419	7.428
9.	Kota Mataram	36.883	18.442	12.171	6.270	40.607	20.304	13.400	6.903	44.331	22.165	14.629	7.536	48.054	24.027	15.858	8.169
10.	Kota Bima	15.097	7.549	4.982	2.567	16.924	8.462	5.585	2.877	18.750	9.375	6.188	3.188	20.577	10.288	6.790	3.498
Jumlah		297.337	148.669	98.121	50.547	442.027	221.013	145.869	75.145	586.717	293.358	193.616	99.742	731.406	365.703	241.364	124.339

Sumber : Hasil Analisis , 2023

Berdasarkan perhitungan di atas:

- Kebutuhan rumah Tahun 2042 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar **731.406** unit berdasarkan perspektif *backlog* kepemilikan
 - Total luas lahan perumahan pada tahun 2042 yang dibutuhkan seluas **8.850** Ha

Tabel 5.16 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pengembangan Permukiman berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Rumah Tahun 2027 sd 2042

No	Kabupaten	Kebutuhan Lahan Pengembangan PKP Tahun 2027							Total m ²
		Kebutuhan Rumah	Kavlingan Kecil 50%		Kavlingan Sedang 33%		Kavlingan Besar 17%		
			Unit	75 m ²	Unit	150 m ²	Unit	200 m ²	
1.	Lombok Barat	13.140	6.570	492.763	4.336	650.448	2.234	446.772	1.589.983
2.	Lombok Tengah	48.966	24.483	1.836.225	16.159	2.423.817	8.324	1.664.844	5.924.887
3.	Lombok Timur	95.105	47.552	3.566.419	31.384	4.707.674	16.168	3.233.554	11.507.647
4.	Sumbawa	12.840	6.420	481.499	4.237	635.579	2.183	436.559	1.553.638
5.	Dompu	14.936	7.468	560.112	4.929	739.348	2.539	507.835	1.807.294
6.	Bima	29.712	14.856	1.114.218	9.805	1.470.767	5.051	1.010.224	3.595.209
7.	Sumbawa Barat	17.568	8.784	658.804	5.797	869.621	2.987	597.316	2.125.741
8.	Lombok Utara	13.089	6.544	490.837	4.319	647.904	2.225	445.025	1.583.766
9.	Kota Mataram	36.883	18.442	1.383.124	12.171	1.825.723	6.270	1.254.032	4.462.879
10.	Kota Bima	15.097	7.549	566.141	4.982	747.307	2.567	513.302	1.826.750
Provinsi		297.337	148.669	11.150.142	98.121	14.718.188	50.547	10.109.462	35.977.793

No	Kabupaten	Kebutuhan Lahan Pengembangan PKP Tahun 2032							Total m ²
		Kebutuhan Rumah	Kavlingan Kecil 50%		Kavlingan Sedang 33%		Kavlingan Besar 17%		
			Unit	75 m ²	Unit	150 m ²	Unit	200 m ²	
1.	Lombok Barat	33.941	16.971	1.272.793	11.201	1.680.086	5.770	1.153.999	4.106.877
2.	Lombok Tengah	80.030	40.015	3.001.115	26.410	3.961.472	13.605	2.721.011	9.683.597
3.	Lombok Timur	134.497	67.249	5.043.650	44.384	6.657.617	22.865	4.572.909	16.274.176
4.	Sumbawa	30.070	15.035	1.127.640	9.923	1.488.485	5.112	1.022.393	3.638.518
5.	Dompu	17.439	8.720	653.970	5.755	863.240	2.965	592.933	2.110.143

No	Kabupaten	Kebutuhan Lahan Pengembangan PKP Tahun 2032							Total m ²
		Kebutuhan Rumah	Kavlingan Kecil 50%		Kavlingan Sedang 33%		Kavlingan Besar 17%		
			Unit	75 m ²	Unit	150 m ²	Unit	200 m ²	
6.	Bima	42.392	21.196	1.589.687	13.989	2.098.387	7.207	1.441.316	5.129.390
7.	Sumbawa Barat	22.836	11.418	856.342	7.536	1.130.371	3.882	776.417	2.763.129
8.	Lombok Utara	23.291	11.645	873.411	7.686	1.152.902	3.959	791.892	2.818.205
9.	Kota Mataram	40.607	20.304	1.522.764	13.400	2.010.048	6.903	1.380.639	4.913.450
10.	Kota Bima	16.924	8.462	634.637	5.585	837.720	2.877	575.404	2.047.761
Provinsi		442.027	221.013	16.576.006	145.869	21.880.328	75.145	15.028.912	53.485.247

No	Kabupaten	Kebutuhan Lahan Pengembangan PKP Tahun 2037							Total m ²
		Kebutuhan Rumah	Kavlingan Kecil 50%		Kavlingan Sedang 33%		Kavlingan Besar 17%		
			Unit	75 m ²	Unit	150 m ²	Unit	200 m ²	
1.	Lombok Barat	54.742	27.371	2.052.822	18.065	2.709.725	9.306	1.861.225	6.623.772
2.	Lombok Tengah	111.093	55.547	4.166.004	36.661	5.499.126	18.886	3.777.177	13.442.307
3.	Lombok Timur	173.890	86.945	6.520.880	57.384	8.607.561	29.561	5.912.264	21.040.705
4.	Sumbawa	47.301	23.650	1.773.780	15.609	2.341.390	8.041	1.608.227	5.723.398
5.	Dompu	19.942	9.971	747.828	6.581	987.133	3.390	678.031	2.412.992
6.	Bima	55.071	27.535	2.065.156	18.173	2.726.006	9.362	1.872.408	6.663.571
7.	Sumbawa Barat	28.103	14.052	1.053.880	9.274	1.391.121	4.778	955.517	3.400.518
8.	Lombok Utara	33.493	16.746	1.255.985	11.053	1.657.900	5.694	1.138.759	4.052.644
9.	Kota Mataram	44.331	22.165	1.662.403	14.629	2.194.372	7.536	1.507.246	5.364.022
10.	Kota Bima	18.750	9.375	703.132	6.188	928.134	3.188	637.506	2.268.771
Provinsi		586.717	293.358	22.001.870	193.616	29.042.468	99.742	19.948.362	70.992.700

No	Kabupaten	Kebutuhan Lahan Pengembangan Pkp Tahun 2042							Total m ²
		Kebutuhan Rumah	Kavlingan Kecil 50%		Kavlingan Sedang 33%		Kavlingan Besar 17%		
			Unit	75 m ²	Unit	150 m ²	Unit	200 m ²	
1.	Lombok Barat	75.543	37.771	2.832.851	24.929	3.739.364	12.842	2.568.452	9.140.667
2.	Lombok Tengah	142.157	71.079	5.330.894	46.912	7.036.780	24.167	4.833.344	17.201.018
3.	Lombok Timur	213.283	106.641	7.998.110	70.383	10.557.505	36.258	7.251.620	25.807.235
4.	Sumbawa	64.531	32.266	2.419.921	21.295	3.194.295	10.970	2.194.061	7.808.277
5.	Dompu	22.445	11.222	841.686	7.407	1.111.026	3.816	763.129	2.715.841
6.	Bima	67.750	33.875	2.540.626	22.358	3.353.626	11.518	2.303.501	8.197.752
7.	Sumbawa Barat	33.371	16.686	1.251.417	11.012	1.651.871	5.673	1.134.618	4.037.907
8.	Lombok Utara	43.695	21.847	1.638.559	14.419	2.162.898	7.428	1.485.627	5.287.083
9.	Kota Mataram	48.054	24.027	1.802.043	15.858	2.378.697	8.169	1.633.853	5.814.593
10.	Kota Bima	20.577	10.288	771.627	6.790	1.018.547	3.498	699.608	2.489.782
Provinsi		731.406	365.703	27.427.734	241.364	36.204.609	124.339	24.867.812	88.500.154

Sumber : Hasil analisis, 2023

Dari hasil perhitungan analisa dan proyeksi kebutuhan akan total luas lahan perumahan pada tahun 2042 mendatang, dibutuhkan seluas 8.850 Ha. Dan berdasarkan pengolahan data tahun 2022, lokasi potensial dan luas tanah untuk rencana pengembangan permukiman dan untuk pembangunan rumah didasarkan pada rencana pola ruang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Data Lokasi Potensial dan Luas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sederhana dan Rencana Pengembangan Lahan Permukiman

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kab. Lombok Barat	Batu Layar, Gerung, Gunungsari, Kediri, Kuripan, Labuapi, Lembar, Lingsar, Narmada, Sekotong	2.037,16
2	Kab. Lombok Tengah	Batukliang, Batukliang Utara, Janapria, Jonggat, Kopang, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Praya Timur, Pringgarata, Pujut	1.490,70
3	Kab. Lombok Timur	Aikmel, Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji, Masagik, Montong Gading, Pringgabaya, Pringgasela, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Sambelia, Selong, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Terara, Wanasaba	1.865,83
4	Sumbawa	Alas, Alas Barat, Batulanteh Buer, Empang, Labangka, Labuhan Badas, Lantung, Lape, Lenangguar, Lopok, Lunyuk, Maronge, Moyo Utara, Moyohilir, Moyohulu, Orong Telu, Plampang, Poto Tano, Rhee, Ropang, Sumbawa, Tarano, Unter Iwes, Utan	5.172,77
5	Dompu	Dompu, Hu'u, Kempo, Kilo, Manggalewa, Pajo, Pekat, Woja	2.752,99
6	Bima	Ambalawi, Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, Lambu, Langgudu, Madapangga, Monta, Palibelo, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Tambora, Wawo, Wera, Woha	5.754,53
7	Sumbawa Barat	Brang Ene, Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, Sekongkang, Seteluk, Taliwang	321,60
8	Kab. Lombok Utara	Bayan, Gangga, Pemenang, Tanjung	578,30
9	Kota Mataram	Cakranegara, Sandubaya, Selaparang	387,99
10	Kota Bima	Asakota, Mpunda, Palibelo, Raba. Rasanae Barat, Rasanae Timur	1.026,15
Luas Total (Ha)			21.388,02

Sumber : Hasil Analisa 2022

Tabel 5.18 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
1	Kota Mataram	Cakranegara	Sayang Sayang	95,67169
			Selagalas	59,3475
			Cakranegara Utara	12,0569
			Karang Taliwang	2,482
			Mayura	0,2832
			Cakranegara Selatan Baru	0,8369
		Sandubaya	Mandalika	99,479
			Turida	59,58694
			Dasan Cermen	15,0693
			Bertais	9,3139
			Babakan	9,4073
			Abian Tubuh Baru	2,0691
		Selaparang	Monjok	2,011
			Karang Baru	14,42103
			Rembiga	4,7066
2	Kabupaten Lombok Utara	Bayan	Senaru	55,2501
			Gangga	Rempek
		Gelanggang		129,8761
		Gondang		67,3522
		Bentek		24,5845
		Tanjung	Jenggala	0,355
			Tanjung	0,8081
			Sokong	109,5825
			Medana	44,3563
			Sigar Penjalin	32,5032
		Pemenang	Pemenang Timur	4,5393
		3	Kabupaten Lombok Barat	Sekotong
Buwun Mas	17,9278			
Kedaro	37,2897			
Sekotong Tengah	3,2041			
Taman Baru	5,8972			
Cendi Manik	11,8599			
Lembar	Mareje			24,3623
	Eat Mayang			12,0708
	Mareje Timur			12,7697
	Sekotong Timur			22,7121
	Labuan Tereng			26,0895
	Jembatan Gantung			2,5807

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
		Gerung	Banyu Urip	79,5145
			Giri Tembesi	35,4868
			Babussalam	77,8748
			Dasan Geres	89,6219
			Beleke	52,1264
			Dasan Tapen	111,5706
		Kuripan	Giri Sasak	10,1945
			Kuripan Selatan	3,4064
			Kuripan	58,0456
			Kuripan Timur	11,3114
			Jagaraga	58,0456
		Kediri	Ombe Baru	18,6849
			Jagaraga Indah	55,9984
			Montong Are	55,845
			Kediri Selatan	9,9699
			Kediri	5,4968
			Rumak	0,7212
			Gelogor	13,4955
		Labuapi	Merembu	11,6771
			Bagik Polak	25,9976
			Bagik Polak Barat	11,0609
			Labuapi	10,274
			Bengkel	45,947
		Narmada	Sembung	4,9862
			Badrain	9,1542
			Mekarsari	5,378
			Kramat Jaya	9,1296
			Dasan Tereng	13,0829
			Grimax Indah	18,9517
			Batu Kuta	5,6156
			Lembuak	44,3555
			Nyur Lembang	6,4391
			Narmada	27,9248
			Selat	28,4015
			Tanah Beak	12,1346
			Peresak	15,972
			Golong	21,3925
			Keru	20,8216
			Suranadi	39,2695
			Buwun Sejati	6,7426
			Sesaot	10,6444

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Pakuan	1,7222
			Sedau	11,0123
		Lingsar	Batu Mekar	12,0755
			Karang Bayan	4,7106
			Langko	10,1867
			Batu Kumbang	26,9572
			Giri Madya	7,8896
			Gegerung	1,8408
			Duman	35,5409
			Dasan Geria	23,7627
			Sigerongan	69,8265
			Saribaye	5,5258
			Lingsar	22,9981
			Gontoran	67,7531
			Gegelang	23,3737
			Peteluan Indah	59,1377
			Bug-Bug	17,8633
		Gunung Sari	Bukit Tinggi	3,644
			Mekar Sari	13,6182
			Jeringo	13,4857
			Gelangsar	1,1378
			Dopang	5,9483
			Guntur Macan	11,5122
			Taman Sari	24,5048
			Kekait	23,0013
			Ranjok	13,656
			Penimbung	7,5822
			Mambalan	26,8776
			Kekeri	40,206
			Midang	5,2175
		Batu Layar	Lembah Sari	1,9518
			Bengkaung	10,916
			Sandik	0,8287
Batulayar	12,4121			
Senteluk	0,3303			
Batu Layar Barat	0,6984			
Senggigi	1,5856			
4	Kabupaten Lombok Tengah	Pujut	Teruwai	43,3432
			Pengembur	26,2916
			Tanah Awu	4,7227
			Rembitan	25,6226

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Sengkol	56,9479
			Sukadana	175,1908
			Gapura	18,3072
			Mertak	45,749
			Tumpak	81,3465
			Bangkit Parak	11,8888
			Segala Anyar	0,0998
			Kuta	3,1595
			Segala Anyar	5,186
			Prabu	5,3026
			Ketara	3,60204
			Pengengat	12,3387
		Praya Barat	Selong Belanak	9,4798
			Mangkung	6,0523
			Banyu Urip	10,175
			Kateng	25,0676
			Bonder	11,3436
			Tanak Rarang	0,5829
			Setanggor	1,8186
			Penunjak	0,012
			Batujai	15,2149
		Praya Barat Daya	Montong Ajan	3,9609
			Batu Jangkih	3,7173
			Montong Sapah	2,1505
			Kabul	51,0815
			Pandan Indah	1,8508
			Pelambik	39,2447
			Teduh	1,2752
			Ranggagata	4,765
			Ungga	4,7915
		Darek	3,2986	
		Praya Timur	Sukaraja	7,2453
			Marong	4,7942
			Mujur	12,2734
			Sengkerang	11,5437
			Landah	2,2044
			Beleka	0,8626
			Ganti	17,3942
			Semoyang	3,0177
			Kidang	23,5046
		Bilalendo	0,7217	

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
		Janapria	Lekor	4,2652
			Saba	5,7596
			Loangmaka	4,0312
			Langko	4,4604
			Kerebong	0,4124
			Setuta	1,5912
			Pendem	6,5049
			Selebung Rembiga	1,8115
			Bakan	5,1104
			Durian	4,1579
			Janapria	5,5631
			Jango	1,5378
		Praya Tengah	Sasake	5,9971
			Lajut	5,6571
			Pejanggik	3,0354
			Kelebu	9,8495
			Batunyala	7,6501
			Jontlak	2,6862
			Gerantung	7,0967
			Jurang Jaler	4,408
			Prai Meke	3,7761
			Pengandang	8,1163
			Beraim	5,1648
			Dakung	1,4329
		Jonggat	Labulia	4,3984
			Sukarara	5,4204
			Puyung	8,2484
			Nyerot	1,814
			Batutulis	2,3926
			Gemel	3,0152
			Barejulat	3,1816
			Bunkate	0,3873
			Perina	0,3327
			Jelantik	2,2429
			Ubung	2,4796
			Bonjeruk	0,6128
		Pengenjek	1,6074	
		Praya	Jago	4,4767
			Renteng	19,5162
			Leneng	1,4728
Mekar Damai	3,0067			

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Montong Terep	4,2944
			Bunut Baik	19,8021
			Aikmual	2,6247
			Mertak Tombok	3,0954
			Gonjak	9,0247
			Gerunung	4,1448
			Panji Sari	0,6375
			Praya	2,6203
			Prapen	0,7218
			Tiwugalih	0,3842
			Semayan	2,6977
		Kopang	Monggas	7,124
			Muncan	4,7139
			Darmaji	1,2097
			Semparu	4,6368
			Dasan Baru	11,2554
			Kopang Rembiga	14,8595
			Montong Gamang	10,3406
			Bebuak	3,9892
			Lendang Are	2,404
			Wajageseng	7,2847
		Batuliang	Barabali	17,8779
			Bujak	5,9996
			Pagutan	7,7052
			Beber	4,0414
			Mantang	1,1329
			Peresak	5,6694
			Tampak Siring	2,0466
			Selebung	6,1991
			Aik Darek	5,6561
			Mekar Bersatu	0,237
		Pringgarata	Taman Indah	2,8556
			Pringgarata	1,6711
			Sisik	1,0039
			Menemeng	1,5587
			Bilebente	3,6671
Bagu	0,9454			
Situng	2,2865			
Arjangka	1,1803			
Murbaya	0,5578			
Sepakek	39,7029			

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
5	Kabupaten Lombok Timur	Batuliang Utara	Pemempek	143,4725
			Teratak	3,9278
			Aik Bukak	2,542
			Mas-Mas	2,6864
			Lantan	6,7301
			Tanak Beak	2,3124
			Karang Sidemen	51,2653
			Aik Berik	6,7689
			Setiling	60,7686
		Jerowaru	Kwang Rundun	6,3392
			Ekas Buana	12,4044
			Seriwe	9,0764
			Pene	2,6804
			Wakan	4,1285
			Sukadamai	0,1528
			Ekas Buana 2	9,0031
			Pandan Wangi	31,6565
			Jerowaru	3,9785
			Pene	2,514
Sukaraja	54,4336			
Keruak	Dane Rase	0,5539		
	Keruak	4,19		
	Selebung Ketangga	34,5416		
	Senyiur	43,934		
	Batu Putik	78,3233		
	Setungkep Lingsar	4,5616		
	Sepit	7,1454		
	Mendana Raya	8,029		
	Ketangga Jeraing	32,9574		
	Pijot	43,9716		
	Pijot Utara	23,0929		
	Montong Belae	6,1225		
	Ketapang Raya	0,0939		
Sakra Barat	Rensing Bat	1,0031		
	Rensing Raya	0,1172		
	Montong Beter	0,7441		
	Bungtiang	1,1923		
	Borok Toyang	1,6275		
Sakra Timur	Menceh	0,8268		
	Surabaya	0,5082		
	Gelanggan	0,4909		

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Lepak	0,7606
			Gereneng	0,1741
			Montong Tangi	0,0287
			Lenting	0,0114
		Sakra	Sakra selatan	0,8416
			Sakra	0,5109
			Rumbuk Timur	0,4299
			Keselet	0,0325
			Kabar	0,3879
		Terara	Terara	1,5791
			Pandan duri	0,0846
			Kalianyar	0,8426
			Suradadi	0,1196
			Selagik	7,02E-02
			Sukadana	1,4957
			Jenggik	3,4939
			Lando	0,1955
		Sikur	Darma Sari	1,3475
			Semaya	0,7593
			Sikur Barat	0,2841
			Montong Baan Selatan	0,7451
			Sikur	0,6119
			Montong Baan	0,0274
			Loyok	0,0172
			Kotaraja	3,2154
		Montong Gading	Pringgajurang	0,5473
		Masbagik	Kesik	1,1059
			Paok Montong	3,3003
			Danger	2,6101
			Masbagik Selatan	1,7705
			Masbagik Utara	0,9275
			Masbagik Timur	1,1724
Masbagik Utara Baru	0,4358			
Pringgasela	Rempung	0,4479		
	Pringgasela	0,3779		
Sukamulia	Dasan Lekong	0,4498		
	Nyiur Tebel	3,8943		
	Sukamulia	1,5087		
	Sukamulia Timur	6,6642		
	Setanggor Selatan	0,4746		
	Padamara	0,0225		

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
		Selong	Danggen	38,2369
			Danggen Timur	38,3516
			Kelayu Jorong	65,952
			Kembang Sari	123,6045
			Kelayu Selatan	90,9641
			Selong	21,7764
			Rakam	83,8345
			Majidi	73,0067
			Kelayu Utara	88,2161
			Pancor	8,7124
			Sandu Baya	92,6833
			Sekarteja	97,9913
		Labuan Haji	Kertasari	10,1339
			Peneda Gandor	20,1147
			Labuhan Haji	3,9093
			Banjarsari	29,174
			Teros	13,517
			Suryawangi	16,3968
			Tanjung	15,0687
			Geres	11,7558
			Ijobalit	1,8546
			Korleko Selatan	2,2616
			Korleko	2,8777
			Tirtanadi	1,9868
		Suralaga	Anjani	2,1435
			Suralaga	0,9967
			Paok Lombok	1,7849
			Tebaban	1,3512
			Kerongkong	2,4652
		Aikmel	Lenek Laut	4,7666
			Lenek Pasiraman	0,0136
			Kalijaga Selatan	0,3338
			Kalijaga Timur	1,7419
Bagik Nyaka santri	0,9673			
Wanasaba	Mamben Daya	1,6795		
Pringgabaya	Anggaraksa	0,3455		
	Kerumut	0,8269		
	Apit Aik	1,1932		
	Telaga Waru	0,1504		
	Tanak Gadang	0,6306		
	Batuyang	0,5302		

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Pringgabaya	0,0316
			Pringgabaya Utara	6,7016
			Labuhan Lombok	3,7141
			Seruni Mumbul	20,9764
			Gunung Malang	22,1632
		Sambelia	Senanggalih	9,1848
			Labuhan Pandan	12,9535
			Sambelia	14,0329
			Bagik Manis	16,384
			Dadap	23,7543
			Sugian	8,9739
			Darakunci	41,023
			Belanting	35,8803
			Obel-Obel	31,1857
			Madayin	138,7164
6	Kabupaten Sumbawa Barat	Sekongkang	Talonang Baru	48,4342
			Tongo	13,1615
			Tatar	43,0152
			Ai Kangkung	9,666
			Sekongkang Atas	39,5306
			Kemuning	0,0531
			Sekongkang Bawah	0,0149
		Maluk	Maluk	0,3894
			Bukit Damai	0,1375
			Benete	2,2469
		Jereweh	Belo	10,583928
		Brang Ene	Mataiyang	0,2984
			Mujahiddin	2,9825
			Kalimantong	3,8039
			Manemeng	0,1141
		Taliwang	Seloto	1,7385
			Telaga Bertong	5,8995
			Menala	12,7831
			Sermong	4,2632
			Batu Putih	12,529
			Dalam	7,8725
			Sampir	0,6886
			Lalar Liang	3,1038
		Seteluk	Meraran	0,0468
			Lamusung	1,0553
			Seran	3,7926

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Seteluk Tengah	9,0587
			Seteluk Atas	1,6476
			Rempe	3,1875
			Airsuning	1,2501
			Kelanir	7,3883
			Tapir	2,3368
		Brang Rea	Semnar Salit	3,5093
			Sapugara Bree	0,1523
			Moteng	1,0328
			Bangkatmonteh	1,3599
			Rarak Rongis	9,9242
			Beru	4,6149
		Poto Tano	Tepas	4,6031
			Tuananga	2,5291
			Mantar	4,6926
			Kiantar	0,1054
			Senayan	9,6068
			Tebo	0,3821
			UPT Tambak Sari	6,8066
			Kokar Lian	10,8017
		Alas Barat	Poto Tano	0,6546
Mapin Kebak	1,853			
Mapin Rea	0,3899			
Lekong	0,1984			
Alas	Dalam		24,0551	
	Labuhan Alas		83,6896	
	Juranalas		45,3575	
Batulanteh	Marenteh		2,6762	
	Batu Rotok		9,3595	
Orong Telu	Tankan Pulit	1,5039		
	Mungkin	2,7072		
	Kelawis	1,8741		
	Sebeok	1,8367		
Lunyuk	Senawang	1,3429		
	Emang Lestari	1,5218		
	Padasuka	0,0227		
	Perung	0,3855		
	Lunyuk Rea	6,1816		
Buer	Lunyuk Ode	15,2084		
	Terusa	0,5169		
			Jurumapin	1,6774

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Kalabeso	0,1553
			Buin Baru	0,2058
		Utan	Satowebrang	1,641
			Motong	38,6549
			Tengah	13,1941
			Sebedo	288,9906
			Bale Brang	17,5145
			Jorok	7,0336
			Rhee	Rhee Loka
		Sampe		0,2837
		Rhee		0,2379
		Luk		0,6613
		Labuhan Badas	Labuhan Badas	38,702
			Karang Dima	14,9789
			Labuhan Aji	33,8128
		Lenanguar	Tatebal	72,9092
			Telaga	190,9651
			Lenanguar	72,014
			Ledang	1,3565
		Ropang	Ranan	0,14
			Lebin	2,5751
		Lantung	Padesa	0,1171
			Ai Mual	0,0535
			Lantung	0,079
			Sepukur	1,196
		Moyo Hulu	Sempe	1,036
			Semamung	2,0908
			Berang Rea	0,0697
			Marga Karya	2,4038
			Sebasang	2,1109
			Batutering	1,1346
			Lito	2,8774
			Maman	7,8735
			Mokong	44,4179
			Pernek	165,1844
			Batubulan	57,2321
			Leseng	12,7751
		Unter Iwes	Pelat	63,2483
			Boak	48,3741
			Jorok	47,5011
			Pungka	0,3599

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Kerato	4,5117
			Uma Beringin	0,156
		Sumbawa	Samapuin	12,7223
			Seketeng	52,1961
			Pekat	0,1503
			Umasima	16,1296
			Brangbiji	46,8
			Lempeh	8,9508
			Moyo Utara	Penyaring
		Kukin		78,61
		Pungkit		0,6757
		Sebewe		0,145
		Moyohilir	Poto	84,2159
			Moyo	159,2033
			Serading	61,8844
			Kakiang	1,3126
			Olat Rawa	3,3402
			Labuan Ijuk	0,3855
			Batu Bangka	0,7947
		Lopok	Lopok	1,4164
			Lopok Beru	0,4175
			Tatede	1,8193
			Pungkit	0,071
			Mamak	0,3357
			Berora	79,8087
			Langam	28,2207
		Lape	Hijrah	123,7686
			Dete	77,5466
			Lape	111,7259
			Labuhan Kuris	107,2525
		Maronge	Pemasar	110,4629
			Simu	193,3372
Maronge	27,0958			
Labuhan Sangoro	43,7757			
Plampang	Brang Kolo	80,6914		
	Muer	50,2595		
	Selante	0,03		
	Plampang	200,1734		
	Sp I Prode	183,4281		
	Sepayung	161,0017		
	Teluk Santong	6,3703		

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)		
1	2	3	4	5		
		Labangka	Jaya Makmur	77,8493		
			Sekokat	159,055		
			Suka Damai	57,7429		
			Labangka	81,1985		
			Suka Mulya	134,0307		
		Empang	Boal	37,3405		
			Gapit	106,5268		
			Empang Bawah	42,0332		
			Pamanto	11,9317		
			Empang Atas	15,5672		
			Bunga Eja	0,2927		
			Jotang	49,536		
		Ongko	46,6364			
		Tarano	Labuhan Pontong	59,6248		
			Labuhan Aji	34,8126		
			Bantu Lanteh	107,5216		
			Mata	12,3934		
			Tolo' Oi	187,775		
		8	Kabupaten Dompu	Manggelewa	Kwangko	270,6043
					Nanga Tumpu	23,2761
Banggo	9,0572					
Anamina	11,2224					
Soriutu	3,5527					
Teka Sire	3,7773					
Sukadamai	48,8251					
Kempo	Ta'a			14,0198		
	Kempo			26,3196		
	Konte			1,9622		
Pekat	Doropeti			12,8443		
	Nangakara			1290,0208		
	Beringin Jaya			54,3174		
	Sorinomo			48,6434		
	Kadindi			3,951		
Woja	Simpasai			2,7864		
	Kandai Dua			7,1765		
	Monta Baru			34,675		
	Matua			23,4226		
	Baka Jaya			0,6232		
	Nowa			0,7864		
	Bara			15,6445		
Mada Prama	23,7435					

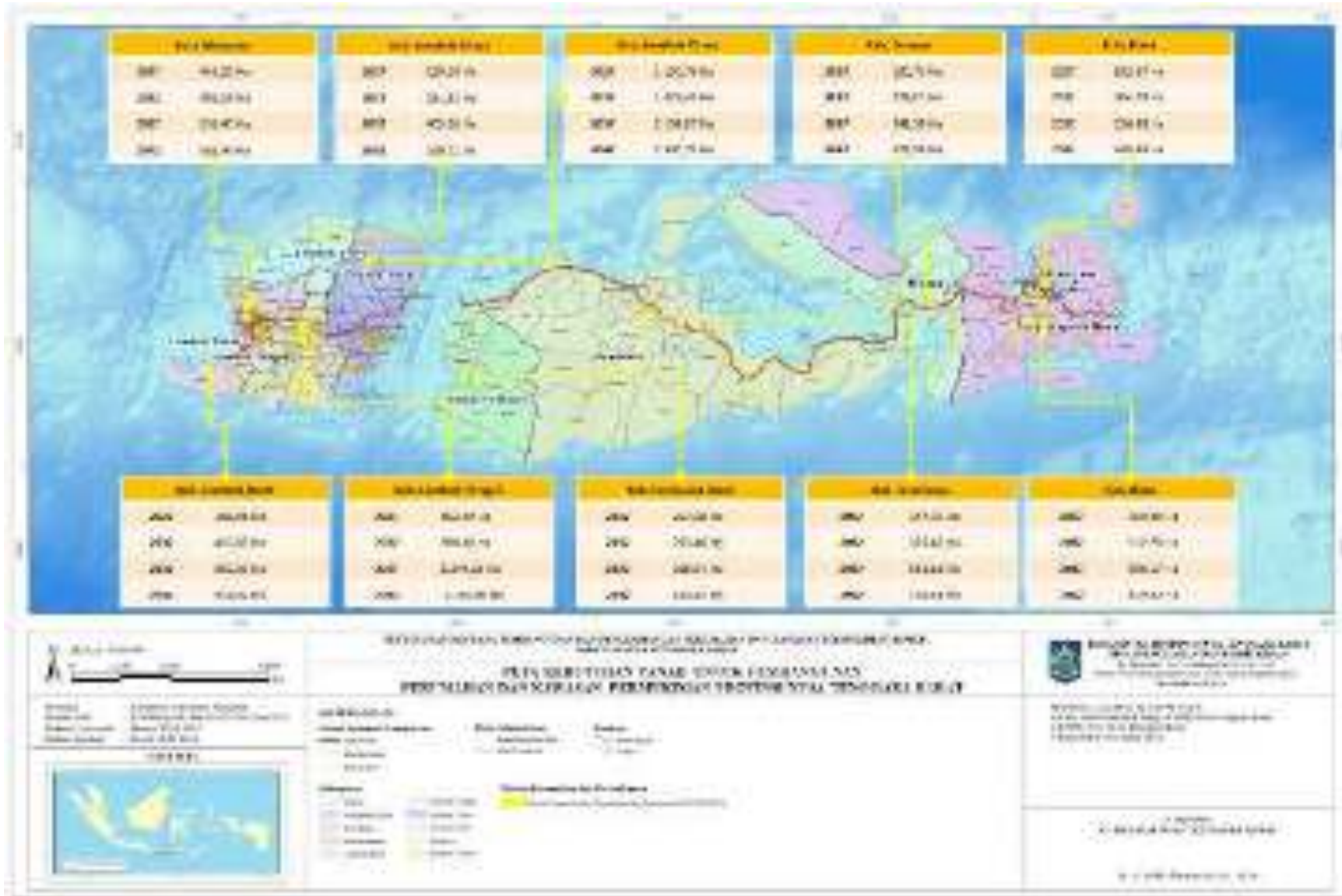
NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Mumbu	5,2173
			Riwo	3,3773
		Dompu	Mangge Na'e	2,5308
			Katua	7,4729
			O'o	1,6933
			Manggeasi	7,191
			Doro Tangga	4,4631
			Bali	2,9613
			Karijawa	1,3801
			Bada	1,438
			Potu	0,2203
			Kareke	12,4358
			Kandai Satu	4,194
			Dore Bara	10,5722
		Mbawi	4,422	
		Pajo	Woko	11,4288
			Jambu	4,9136
			Lune	0,5365
			Tembal Lae	16,6359
			Ranggo	194,2136
			Lepadi	40,4289
		Hu'u	Adu	6,3783
			Cempi Jaya	19,7985
			Jala	1,899
			Daha	40,0375
			Hu'u	416,3187
		9	Kabupaten Bima	Tambora
Kawinda Nae	0,6125			
Rasabou	1,3288			
Sanggar	Oi Saro			1,9749
	Piong			0,0932
	Kore			8,0037
Soromandi	Punti			30,2983
	Lewintana			0,5511
Donggo	Doridungga			4,4645
	Donggo			1,7945
	Ndano Nae			0,1338
Madapangga	Wadawau			5,2977
	Ndano			0,619
	Tonda			41,2772
	Mpuri			111,1006

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Campa	114,1917
			Woro	75,97
		Bolo	Tumpu	0,6389
			Rato	0,5092
			Rasabou	0,0634
			Nggembe	7,1017
			Sondosia	0,9743
			Parado	Kuta
		Parado Rato		0,759
		Woha	Pandai	16,1374
			Risa	79,9033
			Keli	370,6274
			Tenga	73,4941
			Dadibou	2,9754
		Monta	Sakuru	167,4265
			Monta	48,7504
			Tangga	57,5769
			Sie	26,9436
			Simpasai	15,9434
			Nontotera	39,9885
			Sondo	30,5759
			Wilamaci	7,1064
			Pela	4,7287
			Tolouwi	0,1785
			Waro	3,1375
			Palibelo	Belo
		Panda		169,6657
		Tolongondoa		33,7489
		Tonggorisa		105,002
		Ragi		188,8283
		Teke		490,7314
		Ntonggu		321,1917
		Roi		67,2225
		Belo	Roka	242,876
			Runggu	162,9819
			Cenggu	177,653
			Renda	468,7675
			Ngali	214,6092
			Lido	21,7588
			Soki	24,6967
			Ncera	10,3034

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
		Lambitu	Kabaro	17,4122
			Kuta	77,3702
			Kaowa	196,2053
			Teta	120,0511
			Sambori	19,7271
		Langgudu	Laju	18,7155
			Waworada	0,0327
			Karumbu	17,9352
			Rupe	30,5589
			Dumu	19,1757
			Kangga	12,9159
			Karampi	5,1262
		Wawo	Tarlawi	166,7791
			Kombo	45,8443
			Raba	6,0397
		Lambu	Hidirasa	18,3773
			Monta Baru	7,4917
			Sangga	0,5169
			Simpasai	5,5715
			Lanta Barat	11,4254
			Lanta	1,7836
			Mangge	48,2181
			Rato	42,9164
			Sumi	64,5934
			Soro	20,2453
			Nggelu	22,0885
		Sape	Sari	13,3336
			Tanah Putih	4,0099
			Boke	1,6372
			Jia	91,3135
			Parangina	12,2168
			Rai Oi	3,388
			Naru Barat	0,0264
			Kowo	49,8295
			Rasabau	4,7462
			Oi Maci	21,1229
			Bugis	2,7483
			Sangia	50,9405
			Buncu	5,2515
		Poja	18,3658	
		Wera	Pa'i	9,5296

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)
1	2	3	4	5
			Ntoke	8,1241
			Nunggi	13,9757
			Hidi Rasa	0,4654
			Bala	6,5624
			Rangga Solo	5,9162
			Sangiang	30,1947
			Oi Tui	1,6551
		Ambalawi	Wawu	21,8732
			Nipa	30,8113
			Tolo Wata	39,2345
			Rite	110,4545
			Kole	9,9419
			Tala Pati	0,7009
			Kota Bima	Asakota
Jatiwangi	89,274			
Jatibaru	34,6731			
Rasana'e Barat	Tanjung	8,5397		
	Paruga	8,3911		
	Dara	276,754		
Mpunda	Matakando	21,2747		
	Pena To'i	5,301		
	Santi	14,4186		
	Sambina'e	254,6005		
	Panggi	65,5027		
Raba	Rite	1,826		
	Ntobo	10,3985		
	Pena Na'e	6,4152		
	Penaraga	6,4203		
	Kendo	15,0158		
	Rabangodu Utara	0,0855		
	Raba Dompou Barat	7,8782		
	Raba Dompou Timur	0,845		
	Rontu	4,7221		
	Nitu	12,7635		
Rasana'e Timur	Nungga	14,5362		
	Lelamase	34,2884		
	Kodo	2,573		
	Dodu	7,9142		
	Lampe	1,0291		
	Kumbe	1,8056		
	Oi Fo'o	59,4093		
10				

Peta 5.19 Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman



5.8 Analisis Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data E-RTLH per tanggal 7 Desember 2021 Provinsi NTB memiliki sebaran RTLH sejumlah 206.980 Unit. Dan Jika dilihat dari laju pertumbuhan RTLH dari seris data 4 tahun (tahun 2018 sd 2021) memiliki rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,49%. Dari tabel 5.19 terlihat terjadi peningkatan jumlah RTLH sebesar 75,22% yaitu dari 101.765 unit pada tahun 2019 menjadi 178.318 unit pada tahun 2020 dan 206.980 unit pada tahun 2021. Namun sebaliknya penanganan terhadap RTLH terjadi penurunan, yaitu sebanyak 10.400 unit pada tahun 2017 dan terus menurun sampai tahun 2021 sebanyak 3.139 unit, sesuai dengan yang disajikan dalam tabel 5.21 berbagai hal yang dapat menyebabkan bertambahnya RTLH di provinsi NTB melihat data RTLH yang diinput melalui Aplikasi E-RTLH pada tahun 2021 dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV terus mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena pada saat tahun berjalan tersebut, masih dalam proses penginputan disamping itu kriteria RLH masih menyesuaikan dari kriteria sesuai dengan Permen PUPR 7/2018 (ketahanan bangunan, kecukupan luas, dan kesehatan penghuni) menjadi kriteria sesuai SDGs yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses sanitasi layak dan akses air minum layak.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) sampai dengan tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH 2018 (Unit)	Jumlah RTLH 2019 (Unit)	Jumlah RTLH 2020 (Unit)	Jumlah RTLH 2021 (Unit)	Rata-Rata Laju Pertumbuhan RTLH
1	Kab Lombok Barat	6.314	6.314	3.361	9.533	0,35
2	Kab Lombok Tengah	13.973	13.973	19.246	26.799	0,19
3	Kab Lombok Timur	35.208	35.208	47.120	47.686	0,09
4	Kab. Sumbawa	10.071	10.071	22.644	23.920	0,33
5	Kab. Dompu	8.006	8.006	25.460	25.972	0,55
6	Kab. Bima	10.070	10.070	35.069	35.675	0,62
7	Kab. Sumbawa Barat	3.631	3.631	1.921	3.213	0,05
8	Kab Lombok Utara	10.214	10.214	15.603	16.466	0,15
9	Kota Mataram	946	859	1.521	5.987	0,90
10	Kota Bima	3.419	3.419	6.373	11.729	0,42
Jumlah		101.852	101.765	178.318	206.980	0,49

Sumber: Data Statis RTLH Provinsi (tahun 2018 s.d 2020), E-RTLH per 7 Desember 2021.

Tabel 5.20 Jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kelurahan	Jumlah RTLH (Unit)
1.	Lombok Barat	10	119	11.503
2.	Lombok Tengah	12	139	26.864
3.	Lombok Timur	21	254	31.217
4.	Sumbawa	24	165	34.285
5.	Dompu	8	81	25.733
6.	Bima	18	143	35.991
7.	Sumbawa Barat	8	58	4.319
8.	Lombok Utara	5	33	16.466
9.	Kota Mataram	6	49	5.987
10.	Kota Bima	5	41	11.233
Jumlah		117	1082	203.598

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota Tahun 2023

5.9 Analisis Pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH)

Berdasarkan Buku Profil Penanganan Perumahan di Provinsi NTB Tahun 2021, sebaran penanganan RTLH yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan CSR dengan rentang waktu 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Penanganan RTLH Tahun 2015-2021 Per Sumber Anggaran

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SUMBER ANGGARAN					JUMLAH
		APBN/BSP S(2015- 2021)	APBD I (2017- 2021)	APBD II (2017- 2021)	APBN/DA K(2017- 2021)	CSR/BAZN AS(2017- 2021)	
1	Lombok Barat	3.119	599	400	1.763	150	6.031
2	Lombok Tengah	5.504	831	774	1.009	167	8.285
3	Lombok Timur	4.945	1.355	224	1.496	236	8.256
4	Sumbawa	3.054	503	1.666	1.591	128	6.942
5	Dompu	1.323	196	90	976	104	2.689
6	Bima	2.870	353	370	607	85	4.285
7	Sumbawa Barat	606	213	2.459	732	76	4.086
8	Lombok Utara	961	204	0	612	61	1.838
9	Kota Mataram	1.438	210	97	694	75	2.514
10	Kota Bima	2.212	153	303	1.166	70	3.904
Nusa Tenggara Barat		26.032	4.617	6.383	10.646	1.152	48.830

Sumber : Buku Profil Penanganan Perumahan di Provinsi NTB Tahun 2021

Tabel 5.22 Rincian penanganan RTLH tahun 2017 -2021

NO.	KABUPATEN / KOTA	SUMBER ANGGARAN APBN, APBD I, APBD II, APBN/DAK, CSR/BAZNAS					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lombok Barat	1.284	1.051	1.163	1.018	329	4.845
2	Lombok Tengah	992	2.135	1822	2.244	532	7.725
3	Lombok Timur	1.451	1.461	1305	1.672	941	6.830
4	Sumbawa	1.461	1427	1.326	1.314	427	5.955
5	Dompu	828	434	502	400	88	2.252
6	Bima	604	674	518	855	182	2.833
7	Sumbawa Barat	1.848	1.235	316	501	163	4.063
8	Lombok Utara	768	322	419	241	102	1.852
9	Kota Mataram	348	604	723	663	176	2.514
10	Kota Bima	816	809	699	611	199	3.134
Nusa Tenggara Barat		10.400	10.152	8.793	9.519	3.139	42.003

Sumber : Buku Profil Penanganan Perumahan di Provinsi NTB Tahun 2021

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemenuhan akan Rumah Layak Huni (RLH) melalui penanganan RTLH dengan sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dari total penanganan selama kurun waktu 7 tahun sejak 2015 sampai dengan tahun 2021 sejumlah 48.830 unit atau 23,59%.

Dalam skenario pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) karena keterbatasan data analisis tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan metode ‘Perbandingan’. yaitu rata-rata penanganan pertahun (RLH) dibagi dengan jumlah RTLH pertahun dan membandingkan jumlah total unit penanganan dibagi dengan jumlah unit pertahun.

Guna mendukung Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar terhadap agenda (Sustainable Development Goals) Tahun 2030 Goals 11.1.1 (akses rumah layak huni) maka salah satu strategi penuntasan yaitu menstrategikan penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Layak Huni. Jika dilihat dari arah kebijakan RPJMN target pemenuhan rumah layak huni 70% pada tahun 2024, maka berdasarkan data didalam dokumen RP3KP ini jumlah Rumah Layak Huni di Provinsi NTB telah mencapai 72,22% telah melampaui target RPJMN pada tahun 2024. Untuk lebih detail, persentase Rumah Layak Huni pada masing-masing kabupaten disajikan dalam tabel 5.19. Penyelesaian rumah layak Huni 100% pada tahun 2030 guna mendukung target SDG’s.

Tabel 5.23 Skenario penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH 2022 (Unit)	Persentase Penanganan	
			RPJMN (70%) Tahun 2024	SDG's (100% Tahun 2030)
1	Kab Lombok Barat	11.503	8.052	3.451
2	Kab Lombok Tengah	26.864	18.805	8.059
3	Kab Lombok Timur	31.217	21.852	9.365
4	Sumbawa	34.285	24.000	10.286
5	Dompu	25.733	18.013	7.720
6	Bima	35.991	25.194	10.797
9	Sumbawa Barat	4.319	3.023	1.296
7	Kab Lombok Utara	16.466	11.526	4.940
8	Kota Mataram	5.987	4.191	1.796
10	Kota Bima	11.233	7.863	3.370
Jumlah		203.598	142.519	61.079

Sumber: Analisis penanganan Rumah Tidak Layak Huni, 2023

Tabel 5.24 Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Jumlah RTLH	Jumlah Backlog	Jumlah RLH	Persentase RLH
1	Kab. Lombok Barat	244.125	11.503	27.376	205.246	84,07
2	Kab. Lombok Tengah	313.086	26.864	31.074	255.148	81,49
3	Kab. Lombok Timur	395.265	31.217	67.005	297.043	75,15
4	Sumbawa	164.837	34.285	11.938	118.614	71,96
5	Dompu	63.295	25.733	7.671	29.891	47,22
6	Bima	144.411	35.991	12.746	95.674	66,25
7	Sumbawa Barat	35.208	4.319	6.209	24.680	70,10
8	Kab. Lombok Utara	85.921	16.466	4.991	64.464	75,03
9	Kota Mataram	118.156	5.987	27.887	84.282	71,33
10	Kota Bima	38.953	11.233	7.595	20.125	51,66
Total		1.603.257	203.598	204.492	1.195.167	74,55

Sumber: Analisis perhitungan jumlah Rumah Layak Huni, 2023

5.10 Analisis Daya Dukung Permukiman

Analisis daya dukung pada suatu wilayah memiliki keterkaitan yang erat dengan ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada masa mendatang. Oleh karena itu, dalam penentuan kawasan yang sesuai untuk pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman terdapat beberapa kriteria yang akan digunakan, yaitu:

- 1) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 -25%);
- 2) Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 L/org/hari – 100 liter/org/hari;
- 3) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
- 4) Drainase baik sampai sedang;
- 5) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mataair/saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;
- 6) Tidak berada pada kawasan lindung;
- 7) Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;
- 8) Menghindari sawah irigasi teknis.

Kemampuan lahan merupakan salah satu teknik analisis fisik dan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007, terdapat sembilan satuan kemampuan lahan (SKL) yang dijadikan faktor pembatas untuk menentukan kelas kemampuan lahan, yaitu morfologi, kemudahan tanah untuk digarap, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, dan bencana alam.

5.10.1 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Tujuan analisis SKL Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Dalam analisis SKL Morfologi melibatkan data masukan berupa peta morfologi dan peta kelerengan dengan keluaran peta SKL Morfologi dengan penjelasannya. Hasil analisis SKL Morfologi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.25 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

No	Peta Morfologi	Kelerengan	SKL Morfologi	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	Kemampuanlahan dari morfologi tinggi	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	Kemampuanlahan dari morfologi cukup	2
3	Perbukitan Landai	15-25%	Kemampuan lahan dari morfologi sedang	3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	Kemampuanlahan dari morfologi kurang	4
5	Dataran Landai	0-2%	Kemampuanlahan dari morfologi rendah	5

Sumber : Permen PU No. 20/PRT/M/2007

SKL Morfologi berarti bentang alam, kemampuan lahan dari morfologi tinggi berarti kondisi morfologis suatu kawasan kompleks. Morfologi kompleks berarti bentang alamnya berupa gunung, pegunungan, perbukitan, dan bergelombang. Akibatnya, kemampuan pengembangannya sangat rendah sehingga sulit dikembangkan dan atau tidak layak dikembangkan. Lahan seperti ini sebaiknya direkomendasikan sebagai wilayah lindung atau budi daya yang tak berkaitan dengan manusia, contohnya untuk wisata alam. Morfologi tinggi tidak bisa digunakan sebagai pengembangan kawasan pelabuhan. Sedangkan kemampuan lahan dari morfologi rendah berarti kondisi morfologis tidak kompleks. Ini berarti tanahnya datar dan mudah dikembangkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan pelabuhan. Untuk kemampuan lahan dari morfologi kurang masih dapat dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan, namun dengan penerapan rekayasa teknologi.

5.10.2 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan pada suatu kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan atau pengembangan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan eksisting. Sebelum melakukan analisis SKL kemudahan dikerjakan, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa yaitu jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 5.20. Dalam analisis ini, akan ditinjau faktor pembentukan tanah dari aspek waktu pembentukannya di mana tanah merupakan benda alam yang terus menerus berubah, akibat pelapukan dan pencucian yang terus menerus. Oleh karena itu tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan sehingga tinggal mineral

yang sukar lapuk seperti kuarsa. Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah Muda ditandai oleh proses pembentukan tanah yang masih tampak pencampuran antara bahan organik dan bahan mineral atau masih tampak struktur bahan induknya. Contoh tanah muda adalah tanah aluvial, regosol dan litosol. Tanah Dewasa ditandai oleh proses yang lebih lanjut sehingga tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horison B. Contoh tanah dewasa adalah andosol, latosol, grumosol. Tanah tua proses pembentukan tanah berlangsung lebih lanjut sehingga terjadi proses perubahan-perubahan yang nyata pada horizon-horizon A dan B, akibatnya terbentuk horizon A1, A2, A3, B1, B2, B3. Contoh tanah pada tingkat tua adalah jenis tanah podsolik dan latosol tua (laterit).

Tabel 5.26 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kemudahan Dikerjakan

No.	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).	5
2	Andosol	Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smearly), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuf vulkanik.	3
3	Gleisol	Tanah yang baru terbentuk, perkembangan horison tanah belum Gleisol terlihat secara jelas. Tanah entisol umumnya dijumpai pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir, dan beberapa memperlihatkan horison diatas lapisan batuan dasar.	4
4	Grumosol	Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu kapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa. Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun.	2
5	Latosol	Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horison, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah	2

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
		beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik, breksi batuan bekuintrusi.	
6	Litosol	Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai curam.	4
7	Mediteran	Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedang hingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai horizon B argilik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanis bersifat basa. Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan, topografi Karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus tanah mediteran merah-kuning di daerah topografi Karst disebut terra rossa.	1
8	Non Cal		3
9	Regosol	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik mudatan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai.	4

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.27 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	2500-3672 m	Kemudahan tanah untuk digarap rendah	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	1500-2500 m	Kemudahan tanah untuk digarap kurang	2
3	Perbukitan Landai	15-25%	500-1500 m	Kemudahan tanah untuk digarap sedang	3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	100-500 m	Kemudahan tanah untuk digarap cukup	4
5	Dataran Landai	0-2%	0 - 100 m	Kemudahan tanah untuk digarap tinggi	5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

5.10.3 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL kestabilan lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan bencana gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta pola ruang eksisting, dengan keluaran peta SKL kestabilan lereng dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL kestabilan lereng, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa yaitu jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.28 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kestabilan Lereng

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).	2
2	Andosol	Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smeary), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuf vulkanik.	1
3	Gleisol	Tanah yang baru terbentuk, perkembangan horison tanah belum Gleisol terlihat secara jelas. Tanah entisol umumnya dijumpai pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir, dan beberapa memperlihatkan horison diatas lapisan batuan dasar.	2
4	Grumosol	Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agaktebal, tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu kapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa. Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun.	3
5	Latosol	Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik,	5

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
		breksi batuan beku intrusi.	
6	Litosol	Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai curam.	4
7	Mediteran	Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedang hingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai horizon B argilik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanis bersifat basa. Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan, topografi Karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus tanah mediteran merah-kuning di daerah topografi Karst disebut terrarossa.	3
8	Non Cal		3
9	Regosol	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik mudatan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai.	2

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.29 Nilai SKL Kestabilan Lereng

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan (mm/th)	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	2500-3672 m		>3000	rendah	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	1500-2500 m	Alluvial	2000-3000	kurang	2
3	Perbukitan Landai	15-25%	500-1500 m	Grumosol	1000-2000	sedang	3
4	Dataran	2-15%	100-500 m		<1000	tinggi	4

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan (mm/th)	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
	Bergelombang						
5	Dataran Landai	0-2%	0-100 m				5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisi lahannya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut kestabilan lerengnya rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk peruntukan kawasan pelabuhan. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan dan resapan air. Sedangkan, kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan peruntukan pelabuhan adalah dengan kestabilan lereng tinggi. Sebenarnya satu SKL saja tidak bisa menentukan untuk arahan peruntukkan pengembangan kawasan pelabuhan. Peruntukkan lahan didapatkan setelah dilakukan overlay terhadap semua SKL.

5.10.4 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan analisis SKL kestabilan pondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta SKL kestabilan lereng, peta jenis tanah, peta kedalaman efektif tanah, peta tekstur tanah, peta hidrogeologi dan peta pola ruang eksisting dengan keluaran peta SKL kestabilan pondasi dan penjelasannya. Sebelum melaksanakan analisis SKL kestabilan pondasi, harus diketahui terlebih dahulu sifat faktor pendukungnya terhadap analisis kestabilan pondasi meliputi jenis tanah.

Tabel 5.30 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Kestabilan Pondasi

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataranaluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).	1
2	Andosol	Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smeary), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tufvulkanik.	2
3	Gleisol	Tanah yang baru terbentuk, perkembangan horison tanah belum Gleisol terlihat secara jelas. Tanah entisol umumnya dijumpai pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir, dan beberapa memperlihatkan horison diatas lapisanbatuan dasar.	2
4	Grumosol	Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu kapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa. Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun.	3
5	Latosol	Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik, breksi batuan bekuintrusi.	5
6	Litosol	Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring-curam.	4
7	Mediteran	Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedanghingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai horizonB argilik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanis bersifat basa. Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan, topografi Karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus tanah mediteran merah-kuningdi daerahtopografiKarstdisebutterraossa.	3

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
8	Non Cal		8
9	Regosol	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik mudadan didaerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai.	9

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.31 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

No	SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
1	Kestabilan lereng rendah	Daya dukung dan kestabilan pondasi rendah	1
2	Kestabilan lereng kurang	Daya dukung dan kestabilan pondasi kurang	2
3	Kestabilan lereng sedang		3
4	Kestabilan lereng tinggi	Daya dukung dan kestabilan pondasi tinggi	4
			5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

Kestabilan pondasi artinya kondisi lahan/wilayah yang mendukung stabil atau tidaknya suatu bangunan atau kawasan terbangun. SKL ini diperlukan untuk memperkirakan jenis pondasi wilayah terbangun. Kestabilan pondasi tinggi artinya wilayah tersebut akan stabil untuk pondasi bangunan apa saja atau untuk segala jenis pondasi. Kestabilan pondasi rendah berarti wilayah tersebut kurang stabil untuk berbagai bangunan. Kestabilan pondasi kurang berarti wilayah tersebut kurang stabil, namun mungkin untuk jenis pondasi tertentu, bisa lebih stabil, misalnya pondasi cakar ayam. Lahan yang dapat dikembangkan sebagai peruntukan pelabuhan adalah kesetabilan pondasi tinggi.

5.10.5 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kelerengan, peta curah hujan, peta hidrogeologi, peta jenis tanah dan peta pola ruang eksisting dengan keluaran peta

SKL Ketersediaan Air dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL Ketersediaan Air, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa jenis tanah

Tabel 5.32 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Ketersediaan Air

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).	2
2	Andosol	Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smeary), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuf vulkanik.	5
3	Gleisol	Tanah yang baru terbentuk, perkembangan horison tanah belum gleisol terlihat secara jelas. Tanah entisol umumnya dijumpai pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir, dan beberapa memperlihatkan horison diatas lapisan batuan dasar.	4
4	Grumosol	Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu kapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa. Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun.	2
5	Latosol	Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.	1
6	Litosol	Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outcrop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit,	3

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
		pegunungan, lereng miring sampai curam.	
7	Mediteran	Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedang hingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai horizon B argilik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanis bersifat basa. Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan, topografi karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus tanah mediteran merah-kuning di daerah opografi karst disebut terra rossa.	3
8	Non Cal		2
9	Regosol	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik mudadan didaerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai.	3

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.33 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

No	Morfologi	Kelerengan	Curah Hujan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%		Ketersediaan air sangat rendah	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	<1000 mm/th	Ketersediaan air rendah	2
3	Perbukitan Landai	15-25%	1000- 2000 mm/th	Ketersediaan air sedang	3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	2000- 3000 mm/th	Ketersediaan air tinggi	4
5	Dataran landai	0-2%	>3000 mm/th	Ketersediaan air tinggi	5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

5.10.6 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta

morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta kedalaman efektif tanah, dan pola ruang eksisting dengan keluaran peta SKL untuk Drainase dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL untuk Drainase, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa yaitu jenistanah.

Tabel 5.34 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL drainase

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataranaluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).	1
2	Andosol	Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (smearly), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tufvulkanik.	4
3	Gleisol	Tanah yang baru terbentuk, perkembangan horison tanah belum Gleisol terlihat secara jelas. Tanah entisol umumnya dijumpai pada sedimen yang belum terkonsolidasi, seperti pasir, dan beberapa memperlihatkan horison diatas lapisanbatuan dasar.	2
4	Grumosol	Tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil, agak tebal, tekstur lempung berat, struktur kersai (granular) di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah, konsistensi bila basah sangat lekat dan plastis, bila kering sangat keras dan tanah retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhan basa, dan kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitas lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal daribatukapur, mergel, batuan lempung atau tuf vulkanik bersifat basa. Penyebarannya di daerah iklim sub humid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun.	1
5	Latosol	Jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 – 1000 meter, batuan induk dari tuf, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.	5
6	Litosol	Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai curam.	3

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
7	Mediteran	Tanah mempunyai perkembangan profil, solum sedang hingga dangkal, warna coklat hingga merah, mempunyai horizon B argilik, tekstur geluh hingga lempung, struktur gumpal bersudut, konsistensi teguh dan lekat bila basah, pH netral hingga agak basa, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang, permeabilitas sedang dan peka erosi, berasal dari batuan kapur keras (limestone) dan tuf vulkanis bersifat basa. Penyebaran di daerah beriklim sub humid, bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2500 mm/tahun, di daerah pegunungan lipatan, topografi Karst dan lereng vulkan ketinggian di bawah 400 m. Khusus tanah mediteran merah-kuning di daerah topografi Karst disebut terrarossa.	5
8	Non Cal		2
9	Regosol	Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik mudadan di daerah beting pantai dan guduk-guduk pasir pantai.	2

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.35 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) untuk Drainase

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan (mm/th)	SKL Drainase	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	2500-3672 m			Drainase tinggi	5
2	Perbukitan sedang	25-45%	1500-2500 m		<1000	Drainase cukup	4
3	Perbukitan Landai	15-25%	500-1500 m		1000-2000		3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	100-500 m		2000-3000	Drainase kurang	2
5	Dataran Landai	0-2%	0-100 m		>3000		1

Sumber: Permen PU No. 20/PRTM/2007

Drainase berkaitan dengan aliran air, serta mudah tidaknya air mengalir. Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang. Pada drainase rendah (kurang), dapat diterapkan pemanfaatan rekayasa teknologi.

5.10.7 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta tekstur tanah, peta curah hujan dan peta pola ruang eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap erosi dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL terhadap erosi, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa yaitu jenis tanah.

Tabel 5.36 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Erosi

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	<ul style="list-style-type: none">Jenis-jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi: Aluvial GleisolJenis tanah yang agak peka erosi: LatosolJenis tanah dengan kepekaan sedang: Non Cal, MediteranJenis tanah yang peka terhadap erosi: Andosol, GrumosolJenis tanah yang sangat peka erosi: Regosol, Litosol	5
2	Andosol		2
3	Gleisol		5
4	Grumosol		2
5	Latosol		4
6	Litosol		1
7	Mediteran		3
8	Non Cal		3
9	Regosol		1

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.37 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terhadap Erosi

No	Morfologi	Kelerengan	Curah Hujan (mm/th)	SKL Erosi	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	>3000	Erosi tinggi	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	2000-3000	Erosi cukup tinggi	2
3	Perbukitan Landai	15-25%	1000-2000	Erosi sedang	3
4	Dataran bergelombang	2-15%	<1000	Erosi sangatrendah	4
5	Dataran Landai	0-2%		Tidak adaerosi	5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

Erosi berarti mudah atau tidaknya lapisan tanah terbawa air atau angin. Erosi tinggi berarti lapisan tanah mudah terkelupas dan terbawa oleh angin dan air. Erosi rendah berarti lapisan tanah sedikit terbawa oleh angin dan air. Tidak ada erosi berarti tidak ada pengelupasan lapisan tanah. Lahan yang dapat dikembangkan sebagai peruntukan kawasan pelabuhan terminal khusus adalah kawasan yang aman dan/atau kawasan yang memiliki tingkat erosi sangat rendah.

5.10.8 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Tujuan analisis SKL Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui daerah- daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengeolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan, peta topografi, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan dan peta pola ruang eksisting dengan keluaran peta SKL Pembuangan Limbah dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL Pembuangan Limbah, terlebih dahulu harus diketahui penjelasan dari data yang terlibat dalam analisa yaitu jenistanah.

Tabel 5.38 Jenis Tanah dan Sifat Tanah dalam SKL Pembuangan Limbah

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
1	Alluvial	<ul style="list-style-type: none"> Jenis-jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi: Aluvial, Gleisol Jenis tanah yang agak peka erosi: Latosol 4 Jenis tanah dengan kepekaan sedang: Non Cal, Mediteran Jenis tanah yang peka terhadap erosi: Andosol, Grumosol 	5
2	Andosol		2
3	Gleisol		5
4	Grumosol		2

No	Jenis Tanah	Sifat	Bobot
5	Latosol	• Jenis tanah yang sangat peka erosi: Regosol, Litosol	4
6	Litosol		1
7	Mediteran		3
8	Non Cal		3
9	Regosol		1

Sumber : RTRW Prov. NTB, 2010

Tabel 5.39 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	Curah Hujan (mm/th)	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	2500-3672m	>3000	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang	1
2	Perbukitan Sedang	25-45%	1500-2500m	2000-3000		2
3	Perbukitan Landai	15-25%	500-1500 m	1000-2000	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang	3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	100-500 m	<1000	Kemampuan lahan untuk pembuangan Limbah cukup	4
5	Dataran Landai	0-2%	0-100 m			5

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

SKL pembuangan limbah adalah tingkatan untuk memperlihatkan wilayah tersebut cocok atau tidak sebagai lokasi pembuangan. Analisa ini menggunakan peta hidrologi dan klimatologi. Kedua peta ini penting, tapi biasanya tidak ada data rinci yang tersedia. SKL pembuangan limbah kurang berarti wilayah tersebut kurang/tidak mendukung sebagai tempat pembuangan limbah.

5.10.9 Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi,

peta jenis tanah, peta tekstur tanah, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta pola ruang eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Bencana Alam dan penjelasannya. Analisis SKL terhadap Bencana Alam juga mengikutsertakan analisis terhadap jenis tanah (sama dengan SKL terhadap erosi).

Tabel 5.40 Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam

No	Morfologi	Kelerengan	Ketinggian	Curah Hujan	Rawan Banjir	Rawan Gunung Berapi	Kerentanan Gerakan Tanah	SKL Bencana Alam	Nilai
1	Perbukitan Terjal	>45%	2500-3672m	>3000 mm/th	Zona 1 (sangat rawan)	Zona 1 (sangat rawan)	Zona 1 (sangat rawan)	Potensi bencana alam tinggi	5
2	Perbukitan Sedang	25-45%	1500-2500m	2000-3000 mm/th	Zona 2 (rawan)	Zona 2 (rawan)	Zona 2 (rawan)		4
3	Perbukitan Landai	15-25%	500-1500m	1000-2000 mm/th	Zona 3 (agak rawan)	Zona 3 (agak rawan)	Zona 3 (agak rawan)	Potensi bencana alam sedang	3
4	Dataran Bergelombang	2-15%	100-500m	<1000 mm/th	Zona 4 (aman)	Zona 4 (aman)	Zona 4 (aman)	Potensi bencana alam rendah	2
5	Dataran Landai	0-2%	0-100m						1

Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2007

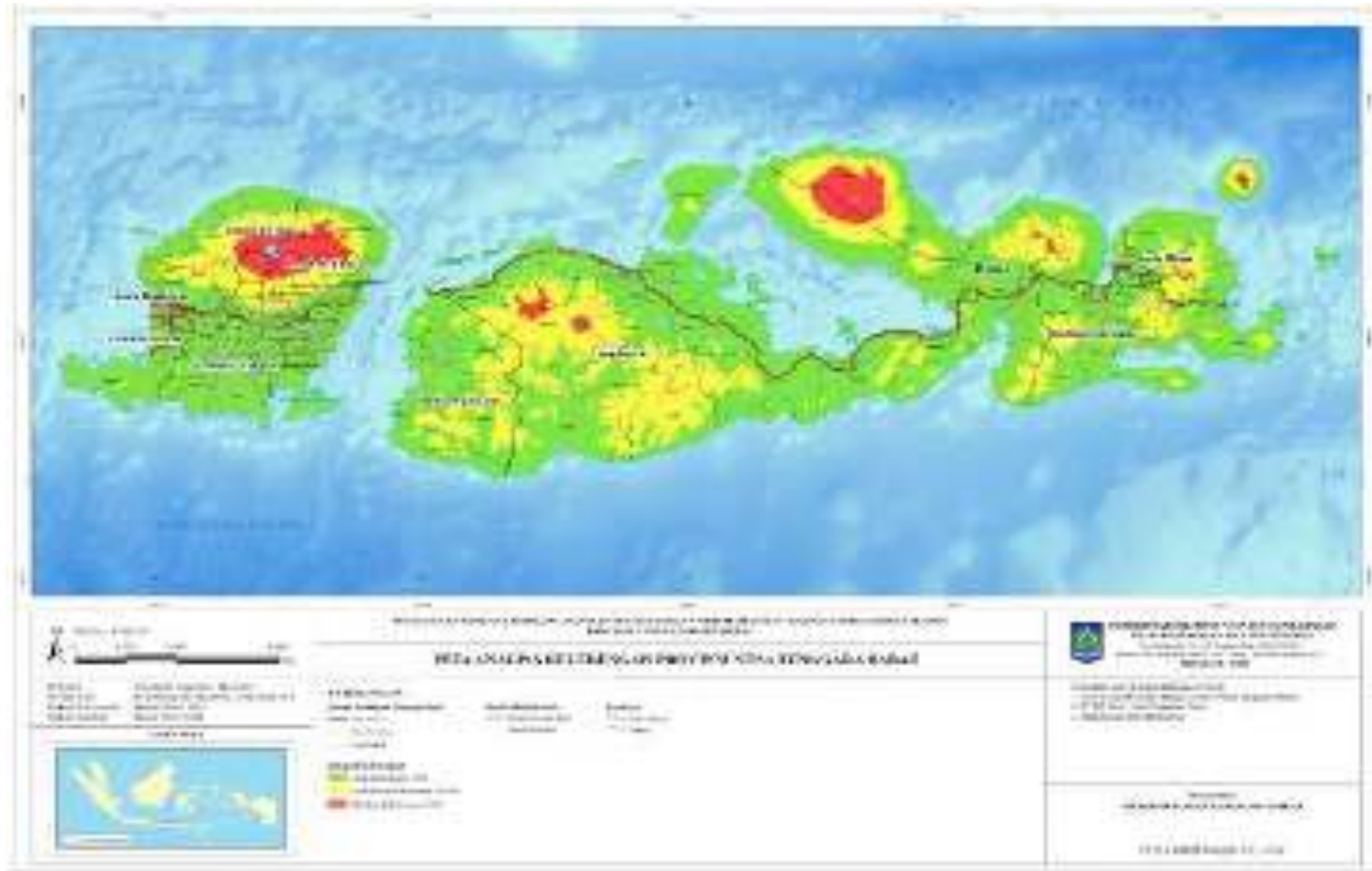
SKL bencana alam merupakan *overlay* dari peta-peta bencana alam, meliputi:

- Peta rawan bencana gunung berapi dan aliran lava
- Peta rawan longsor (kerentanan gerakan tanah)

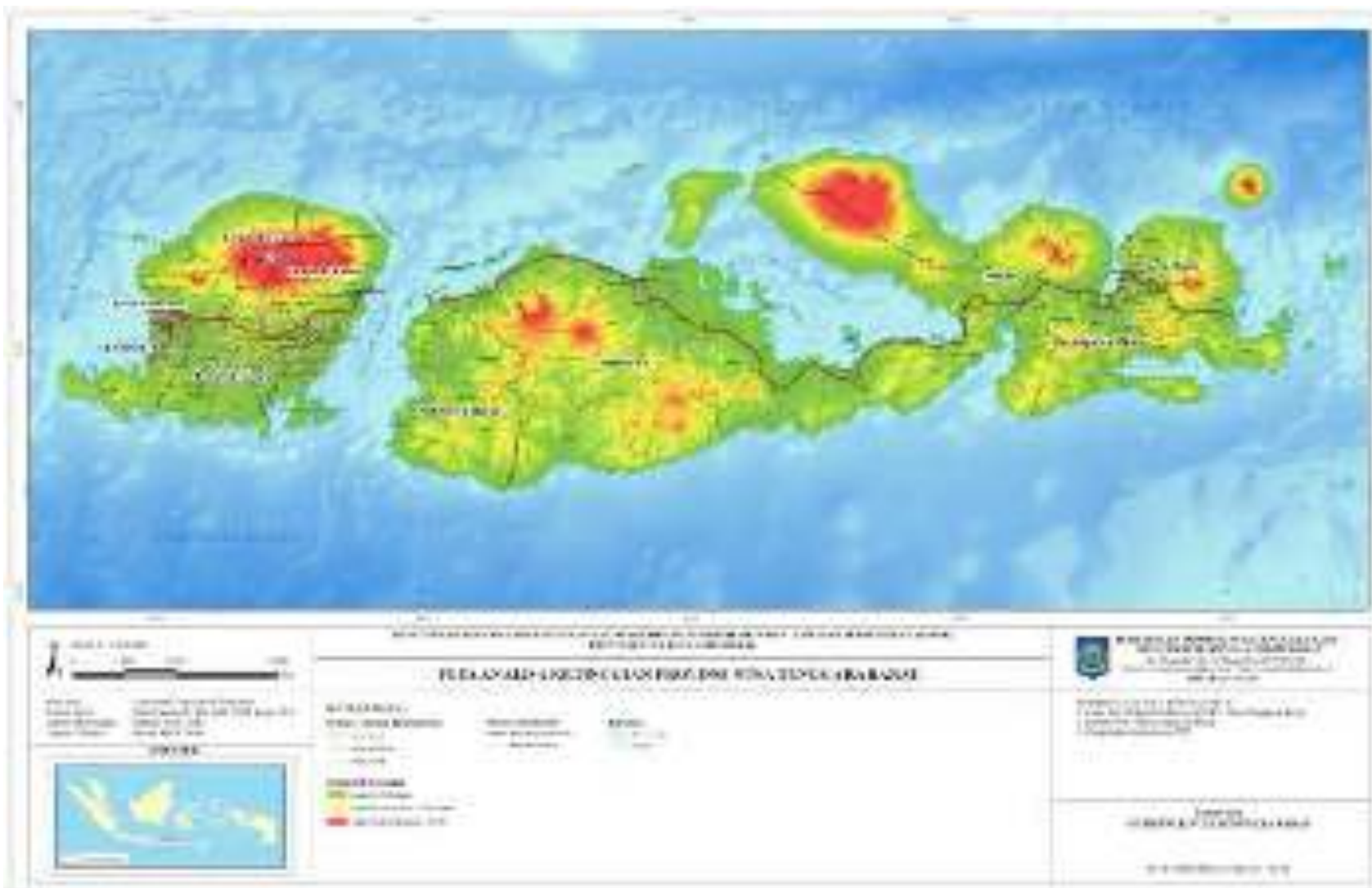
Jadi, morfologi gunung dan perbukitan dinilai tinggi ada peta rawan bencana gunung api dan longsor. Sedangkan lereng data yang dialiri sungai dinilai tinggi pada rawan bencana banjir. Penentuan kelas pada rawan bencana ini ada lima. Kelas 1 artinya rawan bencana alam dan kelas 5 artinya tidak/kurang rawan bencana alam. Kawasan yang cocok dikembangkan sebagai kawasan peruntukan pelabuhan adalah dengan potensi bencana alam kurang/tidak ada bencana.

Pada **Peta 5.20** dijelaskan dari hasil analisa kelerengan dimana di Provinsi Nusa Tenggara Barat wilayahnya terdiri dari 7 kelas kelerengan, dari 7 kelas tersebut dianalisis hingga dihasilkan 3 kriteria pengembangan lahan berdasarkan kelas kelerengan yang terdiri dari 3 kriteria yaitu layak untuk kelas kelerengan 0-15 %, layak bersyarat untuk kelas kelerengan 16-40% dan tidak layak untuk kelas kelerengan lebih dari 40%. Sama halnya dengan **Peta 5.21** yang menjelaskan tentang kelayakan lahan berdasarkan ketinggian wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah yang layak untuk dikembangkan digambarkan dengan area berwarna hijau dengan kriteria tinggi wilayah antara 0 sampai 500 mdpl, kemudian layak bersyarat ditandai dengan warna kuning dengan kriteria ketinggian antara 501-2000 mdpl dan tidak layak dengan warna merah yang memiliki ketinggian lebih dari 2000 mdpl.

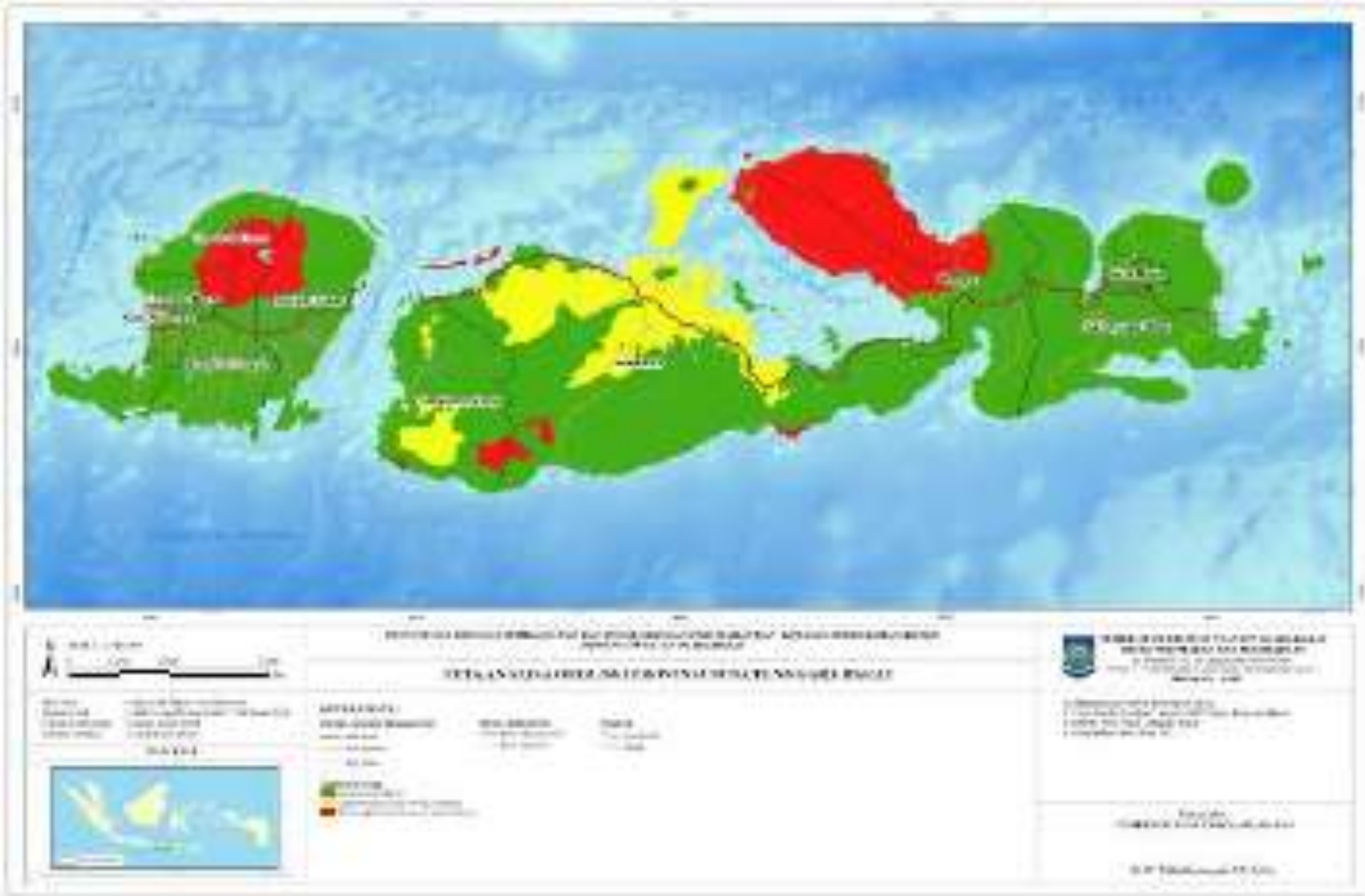
Peta 5.20 Peta Analisis Kelerengan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.21 Peta Analisis Ketinggian Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.22 Peta Analisa Geologi Provinsi Nusa Tenggara Barat



Pada **Peta 5.22** dijelaskan tentang pembagian kelayakan wilayah untuk dikembangkan berdasarkan jenis geologinya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembobotan berdasarkan jenis geologi. Dari pembobotan lahan tersebut dihasilkan 3 pembagian kriteria yaitu layak yg terdiri dari alluvial dan gleisol, kriteria layak bersyarat terdiri dari latosol, Non cal, Mediteran dan kriteria tidak layak yang terdiri dari andosol, grumosol, regosol, dan litosol.

Berdasarkan hasil analisa 9 satuan kemampuan lahan (SKL) sebelumnya, berikut hasil overlay SKL-SKL tersebut menjadi kemampuan pengembangan lahan untuk pengembangan permukiman. Berikut analisa kelayakan lahan untuk pengembangan permukiman:

Tabel 5.41 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Kelas	Klasifikasi Pengembangan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
KELAS 1	Kemampuan Lahan Tinggi	1.252.378	62.23
KELAS 2	Kemampuan Lahan Agak Tinggi	362.608	18.02
KELAS 3	Kemampuan Lahan Sedang	26.131	1.30
KELAS 4	Kemampuan Lahan Rendah	26.301	1.31
KELAS 5	Kemampuan Lahan Sangat Rendah	345.030	17.14
Luas Total (Ha)		2.012.448	100

Sumber : Analisa Disperkim Prov. NTB, 2021

Tabel 5.42 Luas Rencana Pengembangan Permukiman dan Pembangunan Rumah

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kab. Lombok Barat	2.037,16
2	Kab. Lombok Tengah	1.490,70
3	Kab. Lombok Timur	1.865,83
4	Sumbawa	5.172,77
5	Dompu	2.752,99
6	Bima	5.754,53
7	Sumbawa Barat	321,60
8	Kab. Lombok Utara	578,30
9	Kota Mataram	387,99

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
10	Kota Bima	1.026,15
Luas Total (Ha)		21.388,02

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Jika dilihat pada Peta 5.19-5.21, Tingkat kemampuan lahan di Provinsi NTB, berdasarkan hasil analisis digital pemetaan dengan membandingkan kemampuan lahan dan pemanfaatan ruang eksisting, perkembangan wilayah saat ini, masih memanfaatkan lahan-lahan dalam kategori kawasan dengan fungsi budidaya, meskipun beberapa pemanfaatan lahan, mulai menginvasi kawasan-kawasan lindung, akibat terbatasnya lahan pengembangan. Beberapa lahan yang berada di bentukan bentang alam yang relatif bergelombang, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya, sehingga mengancam kegiatan budidaya yang mereka lakukan.

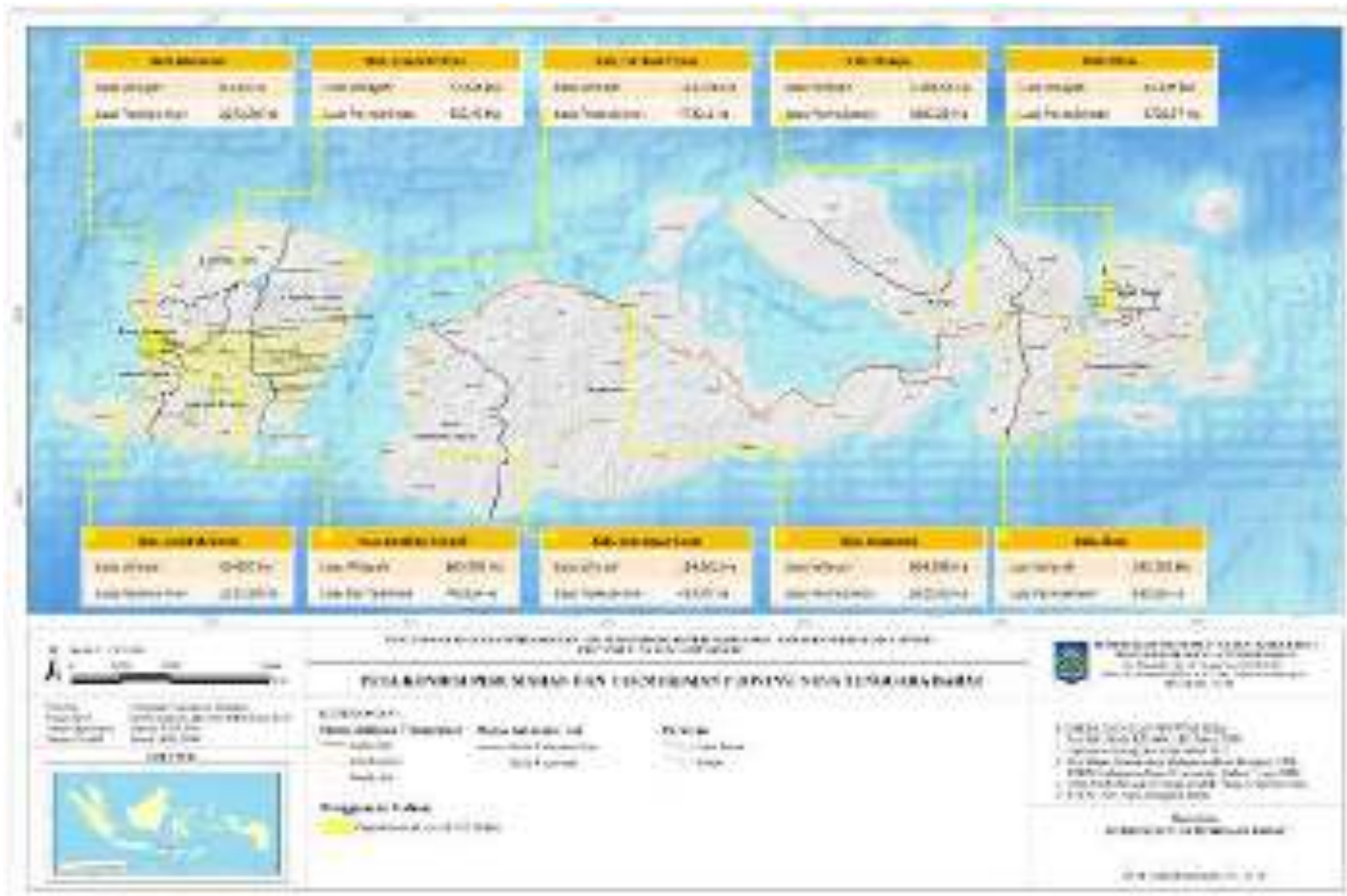
Dengan melihat trend perkembangan pemanfaatan lahan berdasarkan fenomena perkembangan wilayah di Provinsi NTB, diperoleh hasil perhitungan pada masing-masing wilayah utama, yaitu:

1. Pulau Lombok, diprediksi akan mengalami peningkatan pemanfaatan lahan yang sangat pesat, yang berdampak pada alih fungsi lahan yang akan terjadi, dan memanfaatkan lahan-lahan dengan kategori Kesesuaian Lahan tidak sesuai.
2. Pulau Sumbawa, diprediksi akselerasinya tidak sepesat yang terjadi di pulau Lombok, dimana pemanfaatan lahan yang terjadi, masih pada area-area tertentu, dimana kesesuaian lahannya masih memungkinkan.

Peta 5.23 Peta Sebaran Permukiman Provinsi NTB



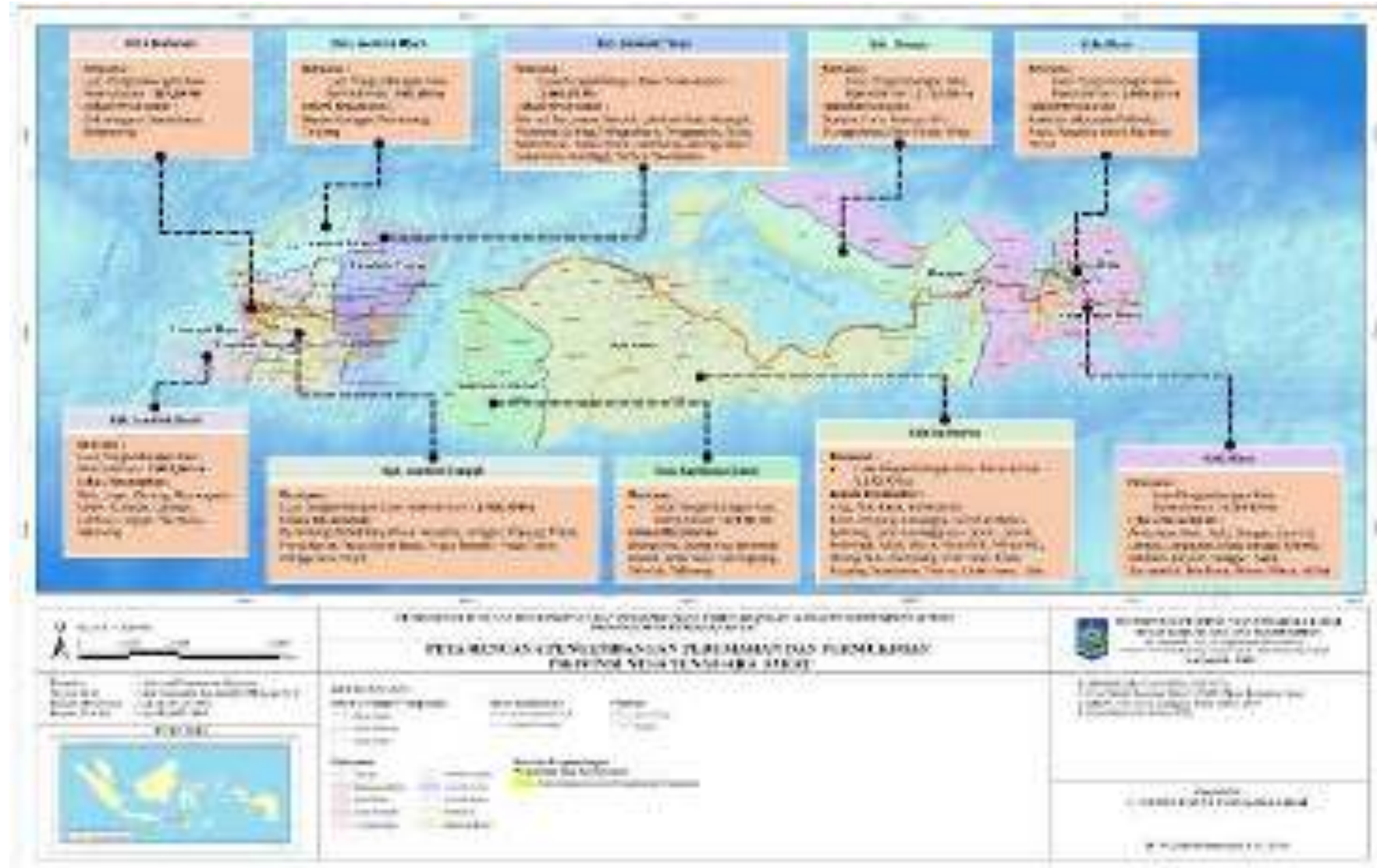
Peta 5.24 Peta Kondisi Prumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.25 Peta Rencana Pengembangan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat



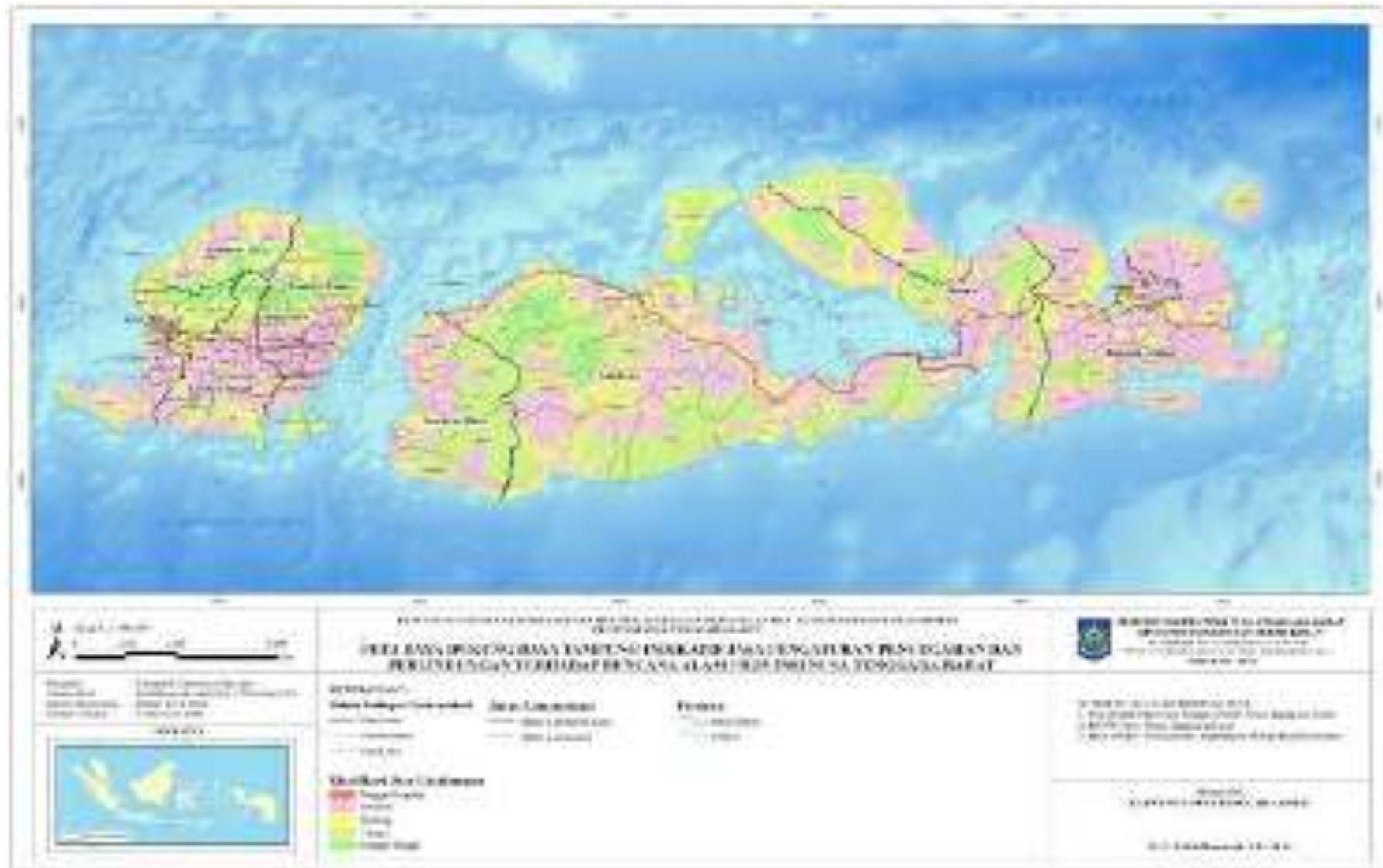
Peta 5.26 Peta Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.27 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Pengaturan Air Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.28 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat



Peta 5.29 Daya Dukung dan Daya Tampung Indikatif Jasa Penyediaan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat



5.11 Analisis Penyediaan Lahan untuk Kawasan Rawan Bencana dan yang Terkena Dampak Relokasi

Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu wajib menyediakan lahan untuk relokasi kawasan rawan bencana dan yang terkena dampak relokasi. Adapun lahan yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi baik untuk relokasi akibat rawan bencana dan relokasi akibat penggusuran adalah lahan pemerintah. Berikut sebaran dan luasan lahan pemerintah yang berpotensi untuk kawasan rawan bencana dan terkena dampak relokasi:

Tabel 5.43 Lahan pemerintah yang berpotensi untuk kawasan rawan bencana dan relokasi

No.	Kabupaten/Kota	Luasan Tanah Milik Pemerintah (Tahun 2020) Ha
1	Kab. Lombok Barat	380,73
2	Kab. Lombok Tengah	1007,87
3	Kab. Lombok Timur	389,56
4	Sumbawa	4146,51
5	Dompu	12158,19
6	Bima	5730,78
7	umbawa Barat	592,78
8	Kab. Lombok Utara	402,98
9	Kota Mataram	0,20
10	Kota Bima	213,32

Sumber: BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

5.12 Analisis Penyediaan PSU Permukiman

Menurut definisi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:

- a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
- b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, salah satunya pemerintah daerah wajib menyusun rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum. Penyusunan rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Rincinya.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis serta wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah. Disamping itu, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban Pihak ketiga, juga harus direncanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Rincinya.

Dalam perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada setiap rencana kawasan terbangun dengan fungsi perumahan, perdagangan-jasa, industri, dan berbagai peruntukan lainnya, maka harus ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut;
- Pada setiap lingkungan permukiman yang dikembangkan harus disediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
- Pada setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana sesuai dengan kemungkinan timbulnya bencana yang dapat muncul;
- Pada setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik juga harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
- Perubahan fungsi lahan boleh dilakukan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi tetapi fungsi utama zona harus tetap maksimum 25% dari luasan zona yang ditetapkan;
- Dalam pengaturan zona tidak boleh dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan;
- Khusus pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area

yang telah ditetapkan sebagai bagian dari rumija atau ruwasja, termasuk melebihi ketinggian bangunan seperti yang telah ditetapkan, kecuali diikuti ketentuan khusus sesuai dengan kaidah desain kawasan yang disepakati oleh *stake holder* terkait.

Untuk memberikan daya guna dan nilai guna yang optimal bagi kepentingan masyarakat, perencanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi standar pelayanan minimum prasarana sarana utilitas umum dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelesarian lingkungan di sekitar lokasi.

Izin membuka perumahan oleh pengembang maupun pengkaplingan tanah tidak dapat dikeluarkan jika belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Diantaranya, perumahan yang dibangun harus dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum. Perbandingan antara luas prasarana, sarana dan utilitas umum dengan luas permukiman adalah sekitar 40 banding 60, dengan dengan proporsi paling sedikit:

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar)

Meski begitu, perbandingan/ persentase tersebut tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang dibangun. Untuk perumahan kecil, yang luas arealnya kurang dari 5000 m², lahan fasum-fasos bisa 30 %. Kebanyakan digunakan untuk jalan, drainase, gorong- gorong, dan lahan terbuka.

Untuk pengkaplingan tanah, juga juga harus ditentukan standar pelayanan minimum prasarana sarana utilitas umum dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelesarian lingkungan di sekitar lokasi seperti halnya pembangunan perumahan oleh pengembang. Ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk pengkaplingan tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengkaplingan tanah dengan luas kurang dari 2.500 meter persegi wajib menyediakan jalan dengan lebar paling sedikit 6 (enam meter);
- b. Pengkaplingan tanah dengan luas lebih dari 2.500 meter persegi wajib menyediakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas lahan keseluruhan.

Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib disediakan oleh pengembang dalam Kawasan Perumahan dan Permukiman dapat disediakan dalam bentuk:

- a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas
- b. tanah siap bangun untuk sarana

Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana dinyatakan tertulis di dalam rencana induk/siteplan. Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di dalam kawasan perumahan dan permukiman berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan. Penyediaan sarana peribadatan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan.
 - Pengembang perumahan dengan luas kurang dari 1 ha (satu hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat:
 - terdapat rumah ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (lima ratus meter);
 - rumah ibadah dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman
 - Penyediaan sarana pendidikan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pengembang perumahan dengan luas lahan diatas 10 ha wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun dilokasi perumahan.
 - Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada sekolah dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud.
 - Pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtida'iyah.
- b. 2% (dua persen) dipergunakan sebagai sarana tempat pemakaman umum. Dalam penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman dilakukan dengan cara:
 - Membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan;

- Menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemerintah daerah.
 - Kompensasi berupa uang merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- c. Paling sedikit 5% (lima persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH. Penyediaan sarana RTH berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pengembang perumahan dan permukiman rumah wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman
 - Apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan
 - Menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 5% (dua persen) dari luas lahan dikalikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah di lokasi setempat, yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemerintah daerah.
- d. Paling sedikit 28% (dua puluh delapan persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pengembang wajib membangun prasarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan atau rencana tapak, dapat dilakukan:
- Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pembangunan prasarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. Masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh pengembang terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana dan utilitas.

Tabel 5.44 Analisis Evaluasi Daya Dukung Fasilitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Ket.
SARANA PENDIDIKAN							
1	Kab. Lombok Barat	TK/RA	721.481	545	577	0,94	Belum Memenuhi

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Ket.
		SD/MI		464	451	1,03	Memenuhi
		SMP/MTS		209	150	1,39	Memenuhi
		SMA		128	150	0,85	Belum Memenuhi
2	Kab. Lombok Tengah	TK/RA	1.034.859	574	828	0,69	Belum Memenuhi
		SD/MI		911	647	1,41	Memenuhi
		SMP/MTS		463	216	2,15	Memenuhi
		SMA		252	216	1,17	Memenuhi
3	Kab. Lombok Timur	TK/RA	1.325.240	495	1.060	0,47	Belum Memenuhi
		SD/MI		985	828	1,19	Memenuhi
		SMP/MTS		493	276	1,79	Memenuhi
		SMA		256	276	0,93	Belum Memenuhi
4	Kab. Sumbawa	TK/RA	509.753	233	408	0,57	Belum Memenuhi
		SD/MI		400	319	1,26	Memenuhi
		SMP/MTS		138	106	1,30	Memenuhi
		SMA		67	106	0,63	Belum Memenuhi
5	Kab. Dompu	TK/RA	236.665	142	189	0,75	Belum Memenuhi
		SD/MI		271	148	1,83	Memenuhi
		SMP/MTS		104	49	2,11	Memenuhi
		SMA		73	49	1,48	Memenuhi
6	Kab. Bima	TK/RA	514.105	138	411	0,34	Belum Memenuhi
		SD/MI		486	321	1,51	Memenuhi
		SMP/MTS		192	107	1,79	Memenuhi
		SMA		120	107	1,12	Memenuhi
7	Kab. Sumbawa Barat	TK/RA	145.798	151	117	1,29	Memenuhi
		SD/MI		114	91	1,25	Memenuhi
		SMP/MTS		44	30	1,45	Memenuhi
		SMA		22	30	0,72	Belum

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Ket.
							Memenuhi
8	Kab. Lombok Utara	TK/RA	247.400	99	198	0,50	Belum Memenuhi
		SD/MI		191	155	1,24	Memenuhi
		SMP/MTS		88	52	1,71	Memenuhi
		SMA		34	52	0,66	Belum Memenuhi
9	Kota Mataram	TK/RA	429.651	142	344	0,41	Belum Memenuhi
		SD/MI		196	269	0,73	Belum Memenuhi
		SMP/MTS		69	90	0,77	Belum Memenuhi
		SMA		37	90	0,41	Belum Memenuhi
10	Kota Bima	TK/RA	155.140	125	124	1,01	Memenuhi
		SD/MI		89	97	0,92	Belum Memenuhi
		SMP/MTS		35	32	1,08	Memenuhi
		SMA		20	32	0,62	Belum Memenuhi
No.	Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Keterangan
SARANA KESEHATAN							
1	Kab. Lombok Barat	Rumah Sakit	721.481	2	6	0,33	Belum Memenuhi
		Puskesmas		19	6	3,16	Memenuhi
		Poliklinik		9	289	0,03	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		59	24	2,45	Memenuhi
		Apotek		37	24	1,54	Memenuhi
2	Kab. Lombok Tengah	Rumah Sakit	1.034.859	4	9	0,46	Belum Memenuhi

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Ket.
		Puskesmas		28	9	3,25	Memenuhi
		Poliklinik		16	414	0,04	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		86	34	2,49	Memenuhi
		Apotek		45	34	1,3	Memenuhi
3	Kab. Lombok Timur	Rumah Sakit	1.325.240	3	11	0,27	Belum Memenuhi
		Puskesmas		36	11	3,26	Memenuhi
		Poliklinik		14	530	0,03	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		84	44	1,9	Memenuhi
		Apotek		63	44	1,43	Memenuhi
4	Kab. Sumbawa	Rumah Sakit	509.753	3	4	0,7	Belum Memenuhi
		Puskesmas		26	4	6,12	Memenuhi
		Poliklinik		5	204	0,02	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		92	17	5,41	Memenuhi
		Apotek		31	17	1,82	Memenuhi
5	Kab. Dompu	Rumah Sakit	236.665	2	2	1,01	Memenuhi
		Puskesmas		11	2	5,58	Memenuhi
		Poliklinik		4	95	0,04	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		35	8	4,44	Memenuhi
		Apotek		20	8	2,54	Memenuhi
6	Kab. Bima	Rumah Sakit	514.105	15	4	3,48	Memenuhi
		Puskesmas		11	4	2,57	Memenuhi
		Poliklinik		16	206	0,08	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		17	17	0,99	Memenuhi

No.	Kabupaten/Kota	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Ketersediaan	Kebutuhan Tahun 2021	Ddfi	Ket.
		Apotek		38	17	2,22	Memenuhi
7	Kab. Sumbawa Barat	Rumah Sakit	145.798	1	1	0,82	Belum Memenuhi
		Puskesmas		9	1	7,41	Memenuhi
		Poliklinik		-	58	0	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		32	5	6,58	Memenuhi
		Apotek		9	5	1,85	Memenuhi
8	Kab. Lombok Utara	Rumah Sakit	247.400	1	2	0,48	Belum Memenuhi
		Puskesmas		10	2	4,85	Memenuhi
		Poliklinik		3	99	0,03	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		30	8	3,64	Memenuhi
		Apotek		10	8	1,21	Memenuhi
9	Kota Mataram	Rumah Sakit	429.651	15	4	4,16	Memenuhi
		Puskesmas		11	4	3,07	Memenuhi
		Poliklinik		16	172	0,09	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		17	14	1,19	Memenuhi
		Apotek		38	14	2,65	Memenuhi
10	Kota Bima	Rumah Sakit	155.140	4	1	3,07	Memenuhi
		Puskesmas		6	1	4,64	Memenuhi
		Poliklinik		7	62	0,11	Belum Memenuhi
		Puskesmas Pembantu		18	5	3,48	Memenuhi
		Apotek		20	5	3,87	Memenuhi

Sumber : Hasil Analisa Provinsi NTB,2021

5.12.1 Analisis Kebutuhan Jaringan Jalan

Klasifikasi jalan di Indonesia menurut Bina Marga dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik Antar Kota (TPGJAK) No : 038/T/BM/1997 meliputi fungsi jalan arteri, kolektor dan lokal. Sedangkan kelas jalan terbagi kelas I, II, IIIA (masuk fungsi Arteri), kelas IIIA dan IIIB (fungsi kolektor), kelas IIIC (fungsi lokal). Muatan/beban sumbu terberat pada jalan arteri adalah ≥ 10 Ton, kolektor 8 ton, dan lokal tidak ditentukan. Kemiringan/superelevasi $< 3\%$ daerah datar, 3.25% daerah perbukitan dan $> 25\%$ daerah pegunungan.

Berdasarkan peraturan pemerintah, klasifikasi jalan menurut peranan jalan adalah sebagai berikut:

A. Jalan Arteri Primer

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 60 km/ jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter
- Kapasitas volume lalu-lintas diatas rata-rata
- Lalu lintas tidak dapat diganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan
- lokal, untuk itu persimpangan pada jalur ini sangat perlu dalam pengaturannya
- Jumlah jalan masuk menuju jalan arteri ini dibatasi
- Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki kota ataupun desa
- Dawasja tidak kurang dari 20 meter

B. Jalan Kolektor Primer

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 40 km/ jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter
- Kapasitas volume lalu-lintas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
- Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki desa
- DAWASJA tidak kurang dari 15 meter

C. Jalan Lokal Primer

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 20 km/ jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter
- Jalan arteri primer tidak terputus meskipun harus memasuki desa

- DAWASJA tidak kurang dari 10 meter

D. Jalan Arteri Sekunder

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 30 km/ jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter
- Kapasitas volume lalu-lintas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata
- Lalu lintas tidak dapat diganggu oleh lalu lintas lambat, untuk itu persimpangan pada jalur ini sangat perlu dalam pengaturannya

E. Jalan Kolektor Sekunder

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 20 km/ jam dan dengan
- lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter
- DAWASJA tidak kurang dari 7 meter

F. Jalan Lokal Sekunder

- Direncanakan berdasarkan kecepatan rencana, paling rendah 10 km/ jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter
- Persyaratan teknis seperti diatas diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih
- Jalan lokal sekunder yang diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar jalan tidak kurang dari 3,5 meter
- DAWASJA tidak kurang dari 4 meter

5.12.2 Analisis Sistem Drainase Kawasan

Komponen analisa drainase yang diperlukan pada kawasan, meliputi :

- a) Kebutuhan pengendalian banjir dan genangan,
- b) Sistem jaringan makro dan jaringan distribusi,
- c) Volume air hujan dan,
- d) Debit aliran dan kapasitas saluran yang tersedia.

Prinsip yang digunakan adalah menentukan daerah bertopografi tinggi kemudian daerah

pembuangan / *outlet* (pantai atau sungai) yang secara jelas ditunjukkan dengan kontur ketinggian (elevasi) permukaan tanah. Arah aliran ditentukan berdasarkan kemiringan dari daerah tinggi ke daerah rendah dengan memperhatikan kondisi daerah/lokasi yang dilalui saluran tersebut dan saluran drainase eksisting. Untuk menghitung debit aliran yang dibebankan pada setiap saluran ditentukan berdasarkan luas daerah tangkapan atau *Catchment Area*, analisis intensitas curah hujan rencana pada periode ulang tertentu dan koefisien pengaliran.

Tabel 5.45 Banyaknya Sungai di rinci menurut Wilayah Sungai

Kategori Wilayah Sungai	Wilayah Sungai	
	WS Lombok	WS Sumbawa
Sungai Kecil (Luas Daerah Aliran Sungai)		
≤ 10 km ²	127	289
10 km ² - ≤ 50 km ²	48	212
50 km ² - ≤ 100 km ²	12	29
100 km ² - ≤ 500 km ²	9	22
Sungai Besar (Luas Daerah Aliran Sungai)		
> 500 km ²	1	3

Sumber : BPS Provinsi NTB Dalam Angka, 2017

Pada prinsipnya perencanaan drainase adalah upaya mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga memberikan kenyamanan dan manfaat dalam berkegiatan. Memenuhi kebutuhan untuk mengalirkan air permukaan ke badan air penerima, agar terhindar dari genangan yang mengakibatkan pengikisan badan jalan, guna mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Penanganan sistem drainase direncanakan berdasarkan pada SNI:02-2406-1991 dan SNI:03-3424-1994 tentang perencanaan sistem drainase perkotaan. Penanganan sistem drainase tersebut, meliputi :

- Sistem drainase lokal, adalah sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian kecil warga masyarakat atau yang melayani kepentingan sebagian kecil masyarakat atau jaringan saluran dan perlengkapannya yang berfungsi mengumpulkan air hujan yang jatuh pada suatu kawasan/areal tertentu (daerah permukiman, perdagangan, industri, dll) yang akan dibawa ke sistem utama
- Sistem drainase terpisah, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang terpisah dengan air permukaan atau air limbah;
- Sistem drainase gabungan, adalah sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran

pembuangan yang sama, baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. Penanganan pada sistem jaringan drainase ini, terdiri dari :

- ✓ Saluran primer, melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya ;
- ✓ Saluran sekunder, saluran teknis dengan berbagai dimensi yang mengikuti system jaringan jalan baik on atau off run ;

Waduk penampungan, dapat berupa waduk/pond pengumpulan untuk pengendalian kawasan padat, kawasan pembangunan baru juga dapat berupa sumur resapan untuk skala lingkungan dan perumahan

5.12.3 Analisa Kebutuhan Air Bersih

Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam tingkat kesehatan lingkungan permukiman, dimana pemakaian air bersih sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat, dengan demikian maka air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia sehingga air yang di konsumsi manusia harus sesuai dengan standar kesehatan.

Untuk menunjang kegiatan pembangunan di suatu wilayah, pelayanan kebutuhan air bersih menjadi sangat penting dan mutlak untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk memenuhi kegiatan penunjang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Secara kualitas harus memenuhi persyaratan sebagai air minum baik secara fisik, kimia, dan biologis. Yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung bakteri yang dapat membahayakan kesehatan.
2. Secara kuantitatif kapasitas air harus dapat menjamin kontinuitas suplai air dan cadangan yang cukup terutama pada jam puncak dan hari maksimum serta cadangan air bagi kebutuhan pemadam kebakaran dan keperluan khusus lainnya.
3. Pendistribusian air dari instalasi dan reservoir ke daerah pelayanan harus dapat terjamin kontinuitasnya dengan tekanan yang cukup.

Agar kebutuhan air bersih di masa yang akan datang dapat tercukupi penyalurannya, maka di perlukan suatu proyeksi kebutuhan air bersih yang cermat dan matang sehingga kebutuhan air

bersih bagi masyarakat dapat tercukupi. Untuk lebih jelas mengenai proyeksi jumlah kebutuhan air di wilayah perencanaan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.46 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

AIR BERSIH											
No.	Kabupaten / Kota	Sarana	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Rumah Tangga	80Lt/Org	804.613	877.415	950.218	1.023.021	64.369.019	70.193.238	76.017.457	81.841.676
		Sosial	15% RT					9.655.353	10.528.986	11.402.619	12.276.251
		Komersial	20% RT					12.873.804	14.038.648	15.203.491	16.368.335
		Industri	10% RT					6.436.902	7.019.324	7.601.746	8.184.168
		Cadangan Kebocoran	10% RT					6.436.902	7.019.324	7.601.746	8.184.168
Jumlah								99.771.980	108.799.519	117.827.059	126.854.598
2	Kab. Lombok Tengah	Rumah Tangga	80Lt/Org	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	92.673.842	101.371.684	110.069.526	118.767.368
		Sosial	15% RT					13.901.076	15.205.753	16.510.429	17.815.105
		Komersial	20% RT					18.534.768	20.274.337	22.013.905	23.753.474
		Industri	10% RT					9.267.384	10.137.168	11.006.953	11.876.737
		Cadangan Kebocoran	10% RT					9.267.384	10.137.168	11.006.953	11.876.737
Jumlah								143.644.455	157.126.110	170.607.765	184.089.420
3	Kab. Lombok Timur	Rumah Tangga	80Lt/Org	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	118.542.065	129.572.050	140.602.035	151.632.020
		Sosial	15% RT					17.781.310	19.435.808	21.090.305	22.744.803
		Komersial	20% RT					23.708.413	25.914.410	28.120.407	30.326.404

AIR BERSIH

No.	Kabupaten / Kota	Sarana	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Industri	10% RT					11.854.207	12.957.205	14.060.204	15.163.202
		Cadangan Kebocoran	10% RT					11.854.207	12.957.205	14.060.204	15.163.202
Jumlah								183.740.201	200.836.678	217.933.155	235.029.632
4	Kab. Sumbawa	Rumah Tangga	80Lt/Org	580.086	640.393	700.699	761.006	46.406.915	51.231.430	56.055.946	60.880.461
		Sosial	15% RT					6.961.037	7.684.715	8.408.392	9.132.069
		Komersial	20% RT					9.281.383	10.246.286	11.211.189	12.176.092
		Industri	10% RT					4.640.692	5.123.143	5.605.595	6.088.046
		Cadangan Kebocoran	10% RT					4.640.692	5.123.143	5.605.595	6.088.046
Jumlah								71.930.719	79.408.717	86.886.716	94.364.714
5	Kab. Dompu	Rumah Tangga	80Lt/Org	246.961	255.721	264.481	273.241	19.756.888	20.457.696	21.158.503	21.859.311
		Sosial	15% RT					2.963.533	3.068.654	3.173.776	3.278.897
		Komersial	20% RT					3.951.378	4.091.539	4.231.701	4.371.862
		Industri	10% RT					1.975.689	2.045.770	2.115.850	2.185.931
		Cadangan Kebocoran	10% RT					1.975.689	2.045.770	2.115.850	2.185.931
Jumlah								30.623.176	31.709.428	32.795.680	33.881.932
6	Kab. Bima	Rumah Tangga	80Lt/Org	564.821	609.198	653.575	697.953	45.185.691	48.735.863	52.286.034	55.836.205
		Sosial	15% RT					6.777.854	7.310.379	7.842.905	8.375.431
		Komersial	20% RT					9.037.138	9.747.173	10.457.207	11.167.241

AIR BERSIH

No.	Kabupaten / Kota	Sarana	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Industri	10% RT					4.518.569	4.873.586	5.228.603	5.583.621
		Cadangan Kebocoran	10% RT					4.518.569	4.873.586	5.228.603	5.583.621
Jumlah								70.037.822	75.540.587	81.043.353	86.546.118
7	Kab. Sumbawa Barat	Rumah Tangga	80Lt/Org	162.985	181.422	199.859	218.295	13.038.789	14.513.738	15.988.688	17.463.637
		Sosial	15% RT					1.955.818	2.177.061	2.398.303	2.619.546
		Komersial	20% RT					2.607.758	2.902.748	3.197.738	3.492.727
		Industri	10% RT					1.303.879	1.451.374	1.598.869	1.746.364
		Cadangan Kebocoran	10% RT					1.303.879	1.451.374	1.598.869	1.746.364
Jumlah								20.210.123	22.496.294	24.782.466	27.068.637
8	Kab. Lombok Utara	Rumah Tangga	80Lt/Org	282.057	312.663	343.269	373.875	22.564.554	25.013.028	27.461.502	29.909.976
		Sosial	15% RT					3.384.683	3.751.954	4.119.225	4.486.496
		Komersial	20% RT					4.512.911	5.002.606	5.492.300	5.981.995
		Industri	10% RT					2.256.455	2.501.303	2.746.150	2.990.998
		Cadangan Kebocoran	10% RT					2.256.455	2.501.303	2.746.150	2.990.998
Jumlah								34.975.059	38.770.194	42.565.329	46.360.463
9	Kota Mataram	Rumah Tangga	80Lt/Org	445.033	458.066	471.099	484.132	35.602.644	36.645.288	37.687.932	38.730.576
		Sosial	15% RT					5.340.397	5.496.793	5.653.190	5.809.586
		Komersial	20% RT					7.120.529	7.329.058	7.537.586	7.746.115
		Industri	10% RT					3.560.264	3.664.529	3.768.793	3.873.058
		Cadangan Kebocoran	10% RT					3.560.264	3.664.529	3.768.793	3.873.058
Jumlah								55.184.098	56.800.196	58.416.294	60.032.393
10	Kota Bima	Rumah Tangga	80Lt/Org	162.593	168.986	175.379	181.771	13.007.430	13.518.859	14.030.289	14.541.719
		Sosial	15% RT					1.951.114	2.027.829	2.104.543	2.181.258

AIR BERSIH											
No.	Kabupaten / Kota	Sarana	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Komersial	20% RT					2.601.486	2.703.772	2.806.058	2.908.344
		Industri	10% RT					1.300.743	1.351.886	1.403.029	1.454.172
		Cadangan Kebocoran	10% RT					1.300.743	1.351.886	1.403.029	1.454.172
Jumlah								20.161.516	20.954.232	21.746.948	22.539.664
Total								730.279.148	792.441.956	854.604.764	916.767.572

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

5.12.4 Analisa Proyeksi Produksi dan Kebutuhan Fasilitas Pengelolaan Limbah Cair

Menurut standar pelayanan air limbah untuk wilayah perencanaan adalah 85% menggunakan sistem on-site baik dengan septic tank ataupun menggunakan sumur resapan sedangkan yang menggunakan sistem off-site hanya sebanyak 15%. Pada tahun akhir perencanaan penduduk yang dapat dilayani oleh sistem off-site.

Sebagian besar pelayanan sistem setempat adalah melalui tangki septik (septic tank) individual. Untuk daerah perumahan dengan ukuran kapasitas yang besar, seperti di Komplek Perumahan tangki septik ini ditempatkan di belakang atau samping bangunan, sedangkan untuk kaveling yang kecil, seperti di wilayah yang padat penduduknya, penempatan tangki septik umumnya di depan rumah / bangunan.

Aliran limbah dari tangki septik ini disalurkan ke bidang resapan, akan tetapi konstruksi bidang resapan umumnya kurang memadai sehingga limbah tangki septik akhirnya disalurkan ke saluran drainase, bercampur dengan limbah rumah tangga cair lainnya.

Dari hasil analisa perlu penanganan yang lebih untuk mengantisipasi banyaknya timbulan yang akan mencemari lingkungan apabila tidak segera ditangani. Ini berarti masyarakat telah mengelola air limbah dengan baik, meskipun belum dipastikan air limbah tersebut sudah memenuhi persyaratan standar dalam pengelolaannya. Untuk lebih jelas mengenai proyeksi jumlah produksi dan kebutuhan fasilitas pengelolaan limbah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.47 Proyeksi Produksi Limbah cair di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

LIMBAH CAIR											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Kebutuhan Air Bersih (Lt)				Produksi Limbah Cair (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Rumah tangga	75 % air bersih	99.770.616	108.798.032	117.825.449	126.852.865	74.827.962	81.598.524	88.369.087	95.139.649
		Fasilitas sosial	10 % LCD					7.482.796	8.159.852	8.836.909	9.513.965
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					14.965.592	16.319.705	17.673.817	19.027.930
		Perkantoran	10 % LCD					7.482.796	8.159.852	8.836.909	9.513.965
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					3.741.398	4.079.926	4.418.454	4.756.982
		Industri dan perdagangan	70 % LCD					52.379.574	57.118.967	61.858.361	66.597.754
Jumlah								160.880.119	175.436.827	189.993.536	204.550.245
2	Kab. Lombok Tengah	Rumah tangga	75 % air bersih	143.644.455	157.126.110	170.607.765	184.089.420	107.733.341	117.844.582	127.955.824	138.067.065
		Fasilitas sosial	10 % LCD					10.773.334	11.784.458	12.795.582	13.806.706
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					21.546.668	23.568.916	25.591.165	27.613.413
		Perkantoran	10 % LCD					10.773.334	11.784.458	12.795.582	13.806.706
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					5.386.667	5.892.229	6.397.791	6.903.353
		Industri dan perdagangan	70 % LCD					75.413.339	82.491.208	89.569.076	96.646.945
Jumlah								231.626.684	253.365.852	275.105.021	296.844.189

LIMBAH CAIR											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Kebutuhan Air Bersih (Lt)				Produksi Limbah Cair (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
3	Kab. Lombok Timur	Rumah tangga	75 % air bersih	183.740.064	200.836.528	217.932.993	235.029.457	137.805.048	150.627.396	163.449.744	176.272.093
		Fasilitas sosial	10 % LCD					13.780.505	15.062.740	16.344.974	17.627.209
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					27.561.010	30.125.479	32.689.949	35.254.419
		Perkantoran	10 % LCD					13.780.505	15.062.740	16.344.974	17.627.209
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					6.890.252	7.531.370	8.172.487	8.813.605
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					96.463.534	105.439.177	114.414.821	123.390.465
Jumlah								296.280.854	323.848.902	351.416.951	378.984.999
4	Kab. Sumbawa	Rumah tangga	75 % air bersih	71.656.713	79.106.225	86.555.738	94.005.251	53.742.534	59.329.669	64.916.803	70.503.938
		Fasilitas sosial	10 % LCD					5.374.253	5.932.967	6.491.680	7.050.394
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					10.748.507	11.865.934	12.983.361	14.100.788
		Perkantoran	10 % LCD					5.374.253	5.932.967	6.491.680	7.050.394
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					2.687.127	2.966.483	3.245.840	3.525.197
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					37.619.774	41.530.768	45.441.762	49.352.757
Jumlah								115.546.449	127.558.788	139.571.127	151.583.466
5	Kab. Dompu	Rumah	75 % air bersih	30.623.048	31.709.295	32.795.543	33.881.790	22.967.286	23.781.971	24.596.657	25.411.343

LIMBAH CAIR											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Kebutuhan Air Bersih (Lt)				Produksi Limbah Cair (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		tangga									
		Fasilitas sosial	10 % LCD					2.296.729	2.378.197	2.459.666	2.541.134
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					4.593.457	4.756.394	4.919.331	5.082.269
		Perkantoran	10 % LCD					2.296.729	2.378.197	2.459.666	2.541.134
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					1.148.364	1.189.099	1.229.833	1.270.567
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					16.077.100	16.647.380	17.217.660	17.787.940
Jumlah								49.379.664	51.131.238	52.882.813	54.634.387
6	Kab. Bima	Rumah tangga	75 % air bersih	70.031.900	75.534.201	81.036.501	86.538.801	52.523.925	56.650.650	60.777.376	64.904.101
		Fasilitas sosial	10 % LCD					5.252.393	5.665.065	6.077.738	6.490.410
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					10.504.785	11.330.130	12.155.475	12.980.820
		Perkantoran	10 % LCD					5.252.393	5.665.065	6.077.738	6.490.410
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					2.626.196	2.832.533	3.038.869	3.245.205
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					36.766.748	39.655.455	42.544.163	45.432.871
Jumlah								112.926.439	121.798.899	130.671.358	139.543.817
7	Kab. Sumbawa Barat	Rumah tangga	75 % air bersih	20.762.676	23.111.352	25.460.028	27.808.704	15.572.007	17.333.514	19.095.021	20.856.528

LIMBAH CAIR											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Kebutuhan Air Bersih (Lt)				Produksi Limbah Cair (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Fasilitas sosial	10 % LCD					1.557.201	1.733.351	1.909.502	2.085.653
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					3.114.401	3.466.703	3.819.004	4.171.306
		Perkantoran	10 % LCD					1.557.201	1.733.351	1.909.502	2.085.653
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					778.600	866.676	954.751	1.042.826
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					10.900.405	12.133.460	13.366.515	14.599.570
Jumlah								33.479.815	37.267.055	41.054.295	44.841.536
8	Kab. Lombok Utara	Rumah tangga	75 % air bersih	34.981.874	38.777.749	42.573.623	46.369.498	26.236.406	29.083.312	31.930.217	34.777.123
		Fasilitas sosial	10 % LCD					2.623.641	2.908.331	3.193.022	3.477.712
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					5.247.281	5.816.662	6.386.043	6.955.425
		Perkantoran	10 % LCD					2.623.641	2.908.331	3.193.022	3.477.712
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					1.311.820	1.454.166	1.596.511	1.738.856
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					18.365.484	20.358.318	22.351.152	24.343.986
Jumlah								56.408.272	62.529.120	68.649.967	74.770.815
9	Kota Mataram	Rumah tangga	75 % air bersih	55.184.098	56.800.196	58.416.294	60.032.393	41.388.074	42.600.147	43.812.221	45.024.294
		Fasilitas sosial	10 % LCD					4.138.807	4.260.015	4.381.222	4.502.429

LIMBAH CAIR											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Kebutuhan Air Bersih (Lt)				Produksi Limbah Cair (Lt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					8.277.615	8.520.029	8.762.444	9.004.859
		Perkantoran	10 % LCD					4.138.807	4.260.015	4.381.222	4.502.429
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					2.069.404	2.130.007	2.190.611	2.251.215
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					28.971.652	29.820.103	30.668.555	31.517.006
Jumlah								88.984.358	91.590.317	94.196.275	96.802.233
10	Kota Bima	Rumah tangga	75 % air bersih	20.161.516	20.954.232	21.746.948	22.539.664	15.121.137	15.715.674	16.310.211	16.904.748
		Fasilitas sosial	10 % LCD					1.512.114	1.571.567	1.631.021	1.690.475
		Perdagangan dan jasa	20 % LCD					3.024.227	3.143.135	3.262.042	3.380.950
		Perkantoran	10 % LCD					1.512.114	1.571.567	1.631.021	1.690.475
		Limbah pekat/ tinja	5 % LCD					756.057	785.784	815.511	845.237
		Industri dan pergudangan	70 % LCD					10.584.796	11.000.972	11.417.148	11.833.324
Jumlah								32.510.445	33.788.699	35.066.954	36.345.208
								49.899.752	51.861.724	53.823.696	55.785.668

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

Tabel 5.48 Proyeksi Fasilitas Pengelolaan Limbah cair di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

FASILITAS SANITASI											
No.	Kabupaten/ Kota	Fasilitas Sanitasi	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Septictank	25% Jumlah Penduduk	804.613	877.415	950.218	1.023.021	201.153	219.354	237.555	255.755
		MCK	100 Jiwa /Unit					8.046	8.774	9.502	10.230
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					268	292	317	341
2	Kab. Lombok Tengah	Septictank	25% Jumlah Penduduk	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	289.606	316.787	343.967	371.148
		MCK	100 Jiwa /Unit					11.584	12.671	13.759	14.846
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					386	422	459	495
3	Kab. Lombok Timur	Septictank	25% Jumlah Penduduk	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	370.444	404.913	439.381	473.850
		MCK	100 Jiwa /Unit					14.818	16.197	17.575	18.954
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					494	540	586	632
4	Kab. Sumbawa	Septictank	25% Jumlah Penduduk	580.086	640.393	700.699	761.006	145.022	160.098	175.175	190.251
		MCK	100 Jiwa /Unit					5.801	6.404	7.007	7.610
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					193	213	234	254
5	Kab. Dompu	Septictank	25% Jumlah Penduduk	246.961	255.721	264.481	273.241	61.740	63.930	66.120	68.310
		MCK	100 Jiwa /Unit					2.470	2.557	2.645	2.732
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					82	85	88	91
6	Kab. Bima	Septictank	25% Jumlah Penduduk	564.821	609.198	653.575	697.953	141.205	152.300	163.394	174.488
		MCK	100 Jiwa /Unit					5.648	6.092	6.536	6.980
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					188	203	218	233
7	Kab. Sumbawa Barat	Septictank	25% Jumlah Penduduk	162.985	181.422	199.859	218.295	40.746	45.355	49.965	54.574
		MCK	100 Jiwa /Unit					1.630	1.814	1.999	2.183
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					54	60	67	73

FASILITAS SANITASI											
No.	Kabupaten/ Kota	Fasilitas Sanitasi	Standar	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
8	Kab. Lombok Utara	Septictank	25% Jumlah Penduduk	282.057	312.663	343.269	373.875	70.514	78.166	85.817	93.469
		MCK	100 Jiwa /Unit					2.821	3.127	3.433	3.739
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					94	104	114	125
9	Kota Mataram	Septictank	25% Jumlah Penduduk	445.033	458.066	471.099	484.132	111.258	114.517	117.775	121.033
		MCK	100 Jiwa /Unit					4.450	4.581	4.711	4.841
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					148	153	157	161
10	Kota Bima	Septictank	25% Jumlah Penduduk	162.593	168.986	175.379	181.771	40.648	42.246	43.845	45.443
		MCK	100 Jiwa /Unit					1.626	1.690	1.754	1.818
		Motor Tinja	3.000 Jiwa /Unit					54	56	58	61

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

5.12.5 Analisa Kebutuhan Penanganan Sampah

Untuk dapat mengetahui volume sampah yang dihasilkan akan dihitung timbulan sampah harian dari tahun ke tahun. Dasar perhitungannya adalah perkiraan timbulan sampah sebesar 2,5 liter/orang/hari untuk sampah domestik (rumah tangga), 1 liter/orang/hari atau 500 lt/org/1.000 m² untuk sampah non-domestik (pertokoan/ komersial, perkantoran, dan jalan) dan untuk sarana umum diasumsikan 0,2 liter/orang/hari atau 100 lt/1.000 m².

Dari hasil perhitungan dengan mengasumsikan prosentasi pelayanan sampah sampai akhir tahun perencanaan adalah 95% dan pada empat tahap pembangunan perencanaan, terlihat timbulan sampah yang terjadi di wilayah perencanaan cukup besar. Atas dasar pertimbangan tersebut maka sebaiknya dilakukan peningkatan pelayanannya. Akan tetapi permasalahan yang menjadi kendala dalam usaha peningkatan pelayanan tersebut adalah masih terbatasnya kuantitas dan kualitas peralatan dan personil yang dimiliki serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam masalah pengelolaan dan pembuangan sampah.

Berdasarkan analisis di atas, hal mendesak yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan sektor persampahan antara lain berupa penambahan sarana persampahan dan peningkatan manajemen pengelolaannya; Peningkatan kuantitas dan kualitas personil;

Untuk daerah yang tidak dilayani pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dilaksanakan secara individual seperti dibakar atau ditimbun, dan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pengertian dan upaya-upaya pengelolaan sampah rumah tangga secara individual ataupun komunal terbatas.

Tabel 5.49 Proyeksi Produksi Sampah di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

PRODUKSI SAMPAH											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah Penduduk				Produksi Sampah (Kg)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	804.613	877.415	950.218	1.023.021	2.011.532	2.193.539	2.375.546	2.557.552
		Perdagangan pasar	25% RT					502.883	548.385	593.886	639.388
		Perdagangan lainnya	5% RT					100.577	109.677	118.777	127.878
		Jalan	10% RT					201.153	219.354	237.555	255.755
		Lain-lain	5% RT					100.577	109.677	118.777	127.878
Jumlah								2.916.721	3.180.631	3.444.541	3.708.451
2	Kab. Lombok Tengah	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	2.896.058	3.167.865	3.439.673	3.711.480
		Perdagangan pasar	25% RT					724.014	791.966	859.918	927.870
		Perdagangan lainnya	5% RT					144.803	158.393	171.984	185.574
		Jalan	10% RT					289.606	316.787	343.967	371.148
		Lain-lain	5% RT					144.803	158.393	171.984	185.574
Jumlah								4.199.283	4.593.404	4.987.525	5.381.646
3	Kab. Lombok Timur	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	3.704.440	4.049.127	4.393.814	4.738.501
		Perdagangan pasar	25% RT					926.110	1.012.282	1.098.453	1.184.625
		Perdagangan lainnya	5% RT					185.222	202.456	219.691	236.925
		Jalan	10% RT					370.444	404.913	439.381	473.850
		Lain-lain	5% RT					185.222	202.456	219.691	236.925
Jumlah								5.371.437	5.871.234	6.371.030	6.870.826
4	Kab. Sumbawa	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	580.086	640.393	700.699	761.006	1.450.216	1.600.982	1.751.748	1.902.514
		Perdagangan pasar	25% RT					362.554	400.246	437.937	475.629
		Perdagangan lainnya	5% RT					72.511	80.049	87.587	95.126
		Jalan	10% RT					145.022	160.098	175.175	190.251
		Lain-lain	5% RT					72.511	80.049	87.587	95.126
Jumlah								2.102.813	2.321.424	2.540.035	2.758.646

PRODUKSI SAMPAH											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah Penduduk				Produksi Sampah (Kg)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
5	Kab. Dompu	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	246.961	255.721	264.481	273.241	617.403	639.303	661.203	683.103
		Perdagangan pasar	25% RT					154.351	159.826	165.301	170.776
		Perdagangan lainnya	5% RT					30.870	31.965	33.060	34.155
		Jalan	10% RT					61.740	63.930	66.120	68.310
		Lain-lain	5% RT					30.870	31.965	33.060	34.155
Jumlah								895.234	926.989	958.745	990.500
6	Kab. Bima	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	564.821	609.198	653.575	697.953	1.412.053	1.522.996	1.633.939	1.744.881
		Perdagangan pasar	25% RT					353.013	380.749	408.485	436.220
		Perdagangan lainnya	5% RT					70.603	76.150	81.697	87.244
		Jalan	10% RT					141.205	152.300	163.394	174.488
		Lain-lain	5% RT					70.603	76.150	81.697	87.244
Jumlah								2.047.477	2.208.344	2.369.211	2.530.078
7	Kab. Sumbawa Barat	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	162.985	181.422	199.859	218.295	407.462	453.554	499.646	545.739
		Perdagangan pasar	25% RT					101.866	113.389	124.912	136.435
		Perdagangan lainnya	5% RT					20.373	22.678	24.982	27.287
		Jalan	10% RT					40.746	45.355	49.965	54.574
		Lain-lain	5% RT					20.373	22.678	24.982	27.287
Jumlah								590.820	657.654	724.487	791.321
8	Kab. Lombok Utara	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	282.057	312.663	343.269	373.875	705.142	781.657	858.172	934.687
		Perdagangan pasar	25% RT					176.286	195.414	214.543	233.672
		Perdagangan lainnya	5% RT					35.257	39.083	42.909	46.734
		Jalan	10% RT					70.514	78.166	85.817	93.469
		Lain-lain	5% RT					35.257	39.083	42.909	46.734
Jumlah								1.022.456	1.133.403	1.244.349	1.355.296
9	Kota Mataram	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	445.033	458.066	471.099	484.132	1.112.583	1.145.165	1.177.748	1.210.330

PRODUKSI SAMPAH											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah Penduduk				Produksi Sampah (Kg)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Perdagangan pasar	25% RT					278.146	286.291	294.437	302.583
		Perdagangan lainnya	5% RT					55.629	57.258	58.887	60.517
		Jalan	10% RT					111.258	114.517	117.775	121.033
		Lain-lain	5% RT					55.629	57.258	58.887	60.517
Jumlah								1.613.245	1.660.490	1.707.734	1.754.979
10	Kota Bima	Rumah Tangga	2,5 Kg/jiwa/hr	162.593	168.986	175.379	181.771	406.482	422.464	438.447	454.429
		Perdagangan pasar	25% RT					101.621	105.616	109.612	113.607
		Perdagangan lainnya	5% RT					20.324	21.123	21.922	22.721
		Jalan	10% RT					40.648	42.246	43.845	45.443
		Lain-lain	5% RT					20.324	21.123	21.922	22.721
Jumlah								589.399	612.573	635.747	658.922
Total								21.348.886	23.166.146	24.983.405	26.800.665

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

Tabel 5.50 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Persampahan di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

FASILITAS PERSAMPAHAN											
No.	Kabupaten/ Kota	Jenis	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Unit)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Gerobak Sampah	640	804.613	877.415	950.218	1.023.021	1.257	1.371	1.485	1.598
		Container Amroll Truk	5330					151	165	178	192
		TPS Tipe I	2500					322	351	380	409
		TPS Tipe II	30000					27	29	32	34
		TPS Tipe III	120000					7	7	8	9
2	Kab. Lombok Tengah	Gerobak Sampah	640	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	1.810	1.980	2.150	1.810
		Container Amroll Truk	5330					217	238	258	217
		TPS Tipe I	2500					463	507	550	463
		TPS Tipe II	30000					39	42	46	39
		TPS Tipe III	120000					10	11	11	10
3	Kab. Lombok Timur	Gerobak Sampah	640	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	2.315	2.531	2.746	2.962
		Container Amroll Truk	5330					278	304	330	356
		TPS Tipe I	2500					593	648	703	758
		TPS Tipe II	30000					49	54	59	63
		TPS Tipe III	120000					12	13	15	16
4	Kab. Sumbawa	Gerobak Sampah	640	580.086	640.393	700.699	761.006	906	1.001	1.095	1.189
		Container Amroll Truk	5330					109	120	131	143

FASILITAS PERSAMPAHAN											
No.	Kabupaten/ Kota	Jenis	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Unit)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		TPS Tipe I	2500					232	256	280	304
		TPS Tipe II	30000					19	21	23	25
		TPS Tipe III	120000					5	5	6	6
5	Kab. Dompu	Gerobak Sampah	640	246.961	255.721	264.481	273.241	386	400	413	427
		Container Amroll Truk	5330					46	48	50	51
		TPS Tipe I	2500					99	102	106	109
		TPS Tipe II	30000					8	9	9	9
		TPS Tipe III	120000					2	2	2	2
6	Kab. Bima	Gerobak Sampah	640	564.821	609.198	653.575	697.953	883	952	1.021	1.091
		Container Amroll Truk	5330					106	114	123	131
		TPS Tipe I	2500					226	244	261	279
		TPS Tipe II	30000					19	20	22	23
		TPS Tipe III	120000					5	5	5	6
7	Kab. Sumbawa Barat	Gerobak Sampah	640	162.985	181.422	199.859	218.295	255	283	312	341
		Container Amroll Truk	5330					31	34	37	41
		TPS Tipe I	2500					65	73	80	87
		TPS Tipe II	30000					5	6	7	7
		TPS Tipe III	120000					1	2	2	2

FASILITAS PERSAMPAHAN											
No.	Kabupaten/ Kota	Jenis	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan (Unit)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
8	Kab. Lombok Utara	Gerobak Sampah	640	282.057	312.663	343.269	373.875	441	489	536	584
		Container Amroll Truk	5330					53	59	64	70
		TPS Tipe I	2500					113	125	137	150
		TPS Tipe II	30000					9	10	11	12
		TPS Tipe III	120000					2	3	3	3
9	Kota Mataram	Gerobak Sampah	640	445.033	458.066	471.099	484.132	695	716	736	756
		Container Amroll Truk	5330					83	86	88	91
		TPS Tipe I	2500					178	183	188	194
		TPS Tipe II	30000					15	15	16	16
		TPS Tipe III	120000					4	4	4	4
10	Kota Bima	Gerobak Sampah	640	162.593	168.986	175.379	181.771	254	264	274	284
		Container Amroll Truk	5330					31	32	33	34
		TPS Tipe I	2500					65	68	70	73
		TPS Tipe II	30000					5	6	6	6
		TPS Tipe III	120000					1	1	1	2

Sumber : Hasil Analisis Data , 2022

5.12.6 Analisa Kebutuhan Jaringan Listrik

Keseluruhan kebutuhan energi listrik di kawasan perencanaan berdasarkan standar perencanaan lingkungan perkotaan kebutuhan listrik adalah :

- Kebutuhan energi listrik perumahan dan permukiman diasumsikan minimum 450 VA/Watt dan maksimum 990 VA/Watt setiap unitnya.
- Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum dengan tipe kecil adalah 1.500 VA/Watt, tipe sedang adalah 2.500 VA/Watt dan tipe besar dengan 3.500 VA/Watt.
- Fasilitas umum kebutuhan energi listriknya adalah 20 %.
- Penerangan jalan kebutuhan listriknya adalah 10 % dari total kebutuhan keseluruhan.

Kebutuhan sistem energi listrik dimaksudkan adalah kebutuhan sistem yang meliputi jaringan dan distribusinya. Pelayanan listrik di kawasan perencanaan dibutuhkan peningkatan daya listrik serta jaringan yang relatif mencukupi termasuk penerangan jalan.

Sistem distribusi jaringan kabel listrik dengan menggunakan tiang yang terbuat dari pipa beton yang penempatannya pada daerah manfaat jalan dengan jarak satu dengan yang lainnya adalah lebih kurang 50 meter dan sebagai upaya untuk menghindari gangguan jaringan listrik, maka di beberapa tempat akan ditempatkan gardu listrik yang sekaligus berfungsi sebagai pengontrol gangguan listrik yang akan terjadi.

Tabel 5.51 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

KEBUTUHAN LISTRIK											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah KK				Kebutuhan (Watt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Kab. Lombok Barat	Rumah Tangga	900 Watt/RT	229.889	250.690	271.491	292.292	206.900.418	225.621.123	244.341.827	263.062.531
		Fasilitas Umum	20% RT					41.380.084	45.124.225	48.868.365	52.612.506
		Penerangan Jalan	10% RT					20.690.042	22.562.112	24.434.183	26.306.253
		Total Kebutuhan						268.966.869	268.970.544	293.307.460	317.644.375
2	Kab. Lombok Tengah	Rumah Tangga	900 Watt/RT	330.978	362.042	393.105	424.169	297.880.206	325.837.555	353.794.904	381.752.253
		Fasilitas Umum	20% RT					59.576.041	65.167.511	70.758.981	76.350.451
		Penerangan Jalan	10% RT					29.788.021	32.583.755	35.379.490	38.175.225
		Total Kebutuhan						387.244.268	423.588.821	459.933.375	496.277.929
3	Kab. Lombok Timur	Rumah Tangga	900 Watt/RT	423.365	462.757	502.150	541.543	381.028.066	416.481.590	451.935.114	487.388.637
		Fasilitas Umum	20% RT					76.205.613	83.296.318	90.387.023	97.477.727
		Penerangan Jalan	10% RT					38.102.807	41.648.159	45.193.511	48.738.864
		Total Kebutuhan						495.336.486	541.426.067	587.515.648	633.605.228
4	Kab. Sumbawa	Rumah Tangga	900 Watt/RT	165.739	182.969	200.200	217.430	149.165.085	164.672.455	180.179.825	195.687.196
		Fasilitas Umum	20% RT					29.833.017	32.934.491	36.035.965	39.137.439
		Penerangan Jalan	10% RT					14.916.508	16.467.246	18.017.983	19.568.720
		Total Kebutuhan						193.914.610	214.074.192	234.233.773	254.393.355
5	Kab. Dompu	Rumah Tangga	900 Watt/RT	70.560	73.063	75.566	78.069	63.504.282	65.756.879	68.009.475	70.262.072
		Fasilitas Umum	20% RT					12.700.856	13.151.376	13.601.895	14.052.414
		Penerangan Jalan	10% RT					6.350.428	6.575.688	6.800.948	7.026.207

KEBUTUHAN LISTRIK											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah KK				Kebutuhan (Watt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Total Kebutuhan						82.555.567	85.483.943	88.412.318	91.340.694
6	Kab. Bima	Rumah Tangga	900 Watt/RT	161.377	174.057	186.736	199.415	145.239.722	156.650.987	168.062.252	179.473.517
		Fasilitas Umum	20% RT					29.047.944	31.330.197	33.612.450	35.894.703
		Penerangan Jalan	10% RT					14.523.972	15.665.099	16.806.225	17.947.352
		Total Kebutuhan						188.811.639	203.646.283	218.480.928	233.315.572
6	Kab. Sumbawa Barat	Rumah Tangga	900 Watt/RT	46.567	51.835	57.102	62.370	41.910.394	46.651.302	51.392.210	56.133.118
		Fasilitas Umum	20% RT					8.382.079	9.330.260	10.278.442	11.226.624
		Penerangan Jalan	10% RT					4.191.039	4.665.130	5.139.221	5.613.312
		Total Kebutuhan						54.483.512	60.646.692	66.809.873	72.973.054
8	Kab. Lombok Utara	Rumah Tangga	900 Watt/RT	94.019	104.221	114.423	124.625	84.617.078	93.798.856	102.980.634	112.162.411
		Fasilitas Umum	20% RT					16.923.416	18.759.771	20.596.127	22.432.482
		Penerangan Jalan	10% RT					8.461.708	9.379.886	10.298.063	11.216.241
		Total Kebutuhan						110.002.201	121.938.512	133.874.824	145.811.135
9	Kota Mataram	Rumah Tangga	900 Watt/RT	127.152	130.876	134.600	138.323	114.437.070	117.788.426	121.139.781	124.491.137
		Fasilitas Umum	20% RT					22.887.414	23.557.685	24.227.956	24.898.227
		Penerangan Jalan	10% RT					11.443.707	11.778.843	12.113.978	12.449.114
		Total Kebutuhan						148.768.191	153.124.953	157.481.716	161.838.478
10	Kota Bima	Rumah Tangga	900 Watt/RT	46.455	48.282	50.108	51.935	41.809.595	43.453.476	45.097.358	46.741.239
		Fasilitas Umum	20% RT					8.361.919	8.690.695	9.019.472	9.348.248
		Penerangan Jalan	10% RT					4.180.960	4.345.348	4.509.736	4.674.124

KEBUTUHAN LISTRIK											
No.	Kabupaten/ Kota	Sumber	Standart	Proyeksi Jumlah KK				Kebutuhan (Watt)			
				2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
		Total Kebutuhan						54.352.474	56.489.519	58.626.565	60.763.610
Total								1.984.439.492	2.153.726.443	2.323.013.393	2.492.300.344

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

5.12.7 Analisa Kebutuhan Mitigasi Bencana Kebakaran

Dalam menyediakan sarana proteksi kebakaran di suatu tempat, maka dikenal 2 (dua) istilah yaitu sarana kebakaran aktif dan sarana kebakaran pasif. Berikut penjelasannya :

- **Sarana Proteksi Kebakaran Aktif**

Sarana proteksi kebakaran aktif berupa alat ataupun instalasi yang disiapkan untuk mendeteksi dan atau memadamkan kebakaran. Di antara sarana proteksi kebakaran aktif antara lain :

1. Detektor Asap, Api maupun Panas.
2. Alarm kebakaran otomatis maupun manual.
3. Tabung Pemadam / APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
4. Sistem Hidran.
5. Sistem Springkler.
6. dsb

- **Sarana Proteksi Kebakaran Pasif**

Sarana proteksi kebakaran pasif berupa alat, sarana atau metode/cara mengendalikan asap, panas maupun gas berbahaya apabila terjadi kebakaran. Di antara sarana proteksi kebakaran pasif antara lain :

1. Sistem Kompartementasi (Pemisahan Bangunan Resiko Kebakaran Tinggi).
2. Sarana Evakuasi dan Alat Bantu Evakuasi.
3. Sarana dan Sistem Pengendali Asap dan Api (Fire Damper, Smoke Damper, Fire Stopping, dsj).
4. Fire Retardant (Sarana Pelambat Api).
5. Dsb

Untuk lebih jelas nya menenai proyeksi kebutuhan penanganan bencana kebakaran dapat dilihat pada tabel 5.51.

5.12.8 Analisa Kebutuhan Sarana Peribadatan

Dalam menghitung kebutuhan sarana peribadatan menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Adapun sarana peribadatan pada tahun 2042 diperkirakan sebanyak 32.530 unit yang terdiri dari Mushola sebanyak 29.573 unit, Masjid sebanyak 2.957

unit. Sedangkan kebutuhan lahan untuk sarana kesehatan pada tahun 2042 diperkirakan seluas 394.309 m². Kebutuhan sarana peribadatan lainnya seperti Pura, Gereja, Wihara jumlah dan luasannya tergantung sistem kekerabatan /hirarki lembaganya. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan dan luas lahan sarana peribadatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.52.

5.12.9 Analisa Kebutuhan RTH

Dalam menghitung kebutuhan sarana RTH menggunakan Permen PU Nomor 05/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Hasil proyeksi pada tahun tahun akhir yaitu tahun 2042 menunjukkan kebutuhan akan taman bermain yaitu sebanyak 29.573 unit dengan luas taman 7.393.287 m². Untuk kebutuhan akan taman lingkungan yaitu sebanyak 2.957 unit dengan luas 3.696.643 m². Sedangkan untuk lapangan olahraga membutuhkan 246 unit dengan luas kebutuhan 2.217.986 m². Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan dan luas lahan sarana RTH dapat dilihat pada Tabel 5.53.

Tabel 5.52 Proyeksi Sarana Mitigasi Bencana Kebakaran di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

PROTEKSI KEBAKARAN															
No.	Kabupaten/ Kota	Sarana	Penduduk/Luas Tanah	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
				2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
								Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
1	Kab. Lombok Barat	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	804.613	877.415	950.218	1.023.021	27	5.364	29	5.849	32	6.335	34	6.820
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					7	6.705	7	7.312	8	7.918	9	8.525
2	Kab. Lombok Tengah	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	39	7.723	42	8.448	46	9.172	49	9.897
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					10	9.654	11	10.560	11	11.466	12	12.372
3	Kab. Lombok Timur	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	49	9.879	54	10.798	59	11.717	63	12.636
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					12	12.348	13	13.497	15	14.646	16	15.795
4	Kab. Sumbawa	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	580.086	640.393	700.699	761.006	19	3.867	21	4.269	23	4.671	25	5.073
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					5	4.834	5	5.337	6	5.839	6	6.342
5	Kab. Dompu	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	246.961	255.721	264.481	273.241	8	1.646	9	1.705	9	1.763	9	1.822
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					2	2.058	2	2.131	2	2.204	2	2.277

PROTEKSI KEBAKARAN

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana	Penduduk/Luas Tanah	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
				2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
								Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
6	Kab. Bima	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	564.821	609.198	653.575	697.953	19	3.765	20	4.061	22	4.357	23	4.653
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					5	4.707	5	5.077	5	5.446	6	5.816
7	Kab. Sumbawa Barat	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	162.985	181.422	199.859	218.295	5	1.087	6	1.209	7	1.332	7	1.455
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					1	1.358	2	1.512	2	1.665	2	1.819
8	Kab. Lombok Utara	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	282.057	312.663	343.269	373.875	9	1.880	10	2.084	11	2.288	12	2.492
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					2	2.350	3	2.606	3	2.861	3	3.116
9	Kota Mataram	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	445.033	458.066	471.099	484.132	15	2.967	15	3.054	16	3.141	16	3.228
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					4	3.709	4	3.817	4	3.926	4	4.034
10	Kota Bima	Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan	30.000/200 m ²	162.593	168.986	175.379	181.771	5	1.084	6	1.127	6	1.169	6	1.212
		Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan	120.000/1.000 m ²					1	1.355	1	1.408	1	1.461	2	1.515

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

Tabel 5.53 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

SARANA PERIBADATAN																	
No.	Kabupaten/ Kota	Sarana Peribadatan	Penduduk/Luas Tanah	Ketersediaan	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan								
					2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042		
									Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	
1	Kab Lombok Barat	Masjid	2.500/600 m ²	659	804.613	877.415	950.218	1.023.021	322	193.107	351	210.580	380	228.052	409	245.525	
		Musholla	250/100 m ²	-					3.218	321.845	3.510	350.966	3.801	380.087	4.092	409.208	
		Gereja	Tergantung sistem	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	6					-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vihara		161					-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah								3.540	514.952	3.861	561.546	4.181	608.140	4.501	654.733		
2	Kab Lombok Tengah	Masjid	2.500/600 m ²	659	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	463	278.022	507	304.115	550	330.209	594	356.302	
		Musholla	250/100 m ²	-					4.634	463.369	5.069	506.858	5.503	550.348	5.938	593.837	
		Gereja	Tergantung sistem	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	6					-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vihara		161					-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah								5.097	741.391	5.575	810.973	6.054	880.556	6.532	950.139		
3	Kab Lombok Timur	Masjid	2.500/600 m ²	659	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	593	355.626	648	388.716	703	421.806	758	454.896	
		Musholla	250/100 m ²	-					5.927	592.710	6.479	647.860	7.030	703.010	7.582	758.160	
		Gereja	Tergantung sistem	-					-	-	-	-	-	-	-		
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	6					-	-	-	-	-	-	-		
		Vihara		161					-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah								6.520	948.337	7.126	1.036.576	7.733	1.124.816	8.340	1.213.056		

SARANA PERIBADATAN

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana Peribadatan	Penduduk/Luas Tanah	Ketersediaan	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan								
					2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042		
									Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	
4	Kab. Sumbawa	Masjid	2.500/600 m ²	436	580.086	640.393	700.699	761.006	232	139.221	256	153.694	280	168.168	304	182.641	
		Musholla	250/100 m ²	-					2.320	232.035	2.562	256.157	2.803	280.280	3.044	304.402	
		Gereja	Tergantung sistem	37					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	37					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vihara		37					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah								2.552	371.255	2.818	409.851	3.083	448.448	3.348	487.044		
5	Kab. Dompu	Masjid	2.500/600 m ²	265	246.961	255.721	264.481	273.241	99	59.271	102	61.373	106	63.476	109	65.578	
		Musholla	250/100 m ²	1					988	98.784	1.023	102.288	1.058	105.793	1.093	109.297	
		Gereja	Tergantung sistem	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	16					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vihara		22					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah								1.087	158.055	1.125	163.662	1.164	169.268	1.202	174.874		
6	Kab. Bima	Masjid	2.500/600 m ²	289	564.821	609.198	653.575	697.953	226	135.557	244	146.208	261	156.858	279	167.509	
		Musholla	250/100 m ²	-					2.259	225.928	2.437	243.679	2.614	261.430	2.792	279.181	
		Gereja	Tergantung sistem	1					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura	kekerabatan/hirark i lembaga	1					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vihara		2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah								2.485	361.486	2.680	389.887	2.876	418.288	3.071	446.690		

SARANA PERIBADATAN

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana Peribadatan	Penduduk/Luas Tanah	Ketersediaan	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan								
					2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042		
									Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	
7	Kab. Sumbawa Barat	Masjid	2.500/600 m ²	187	162.985	181.422	199.859	218.295	65	39.116	73	43.541	80	47.966	87	52.391	
		Musholla	250/100 m ²	-					652	65.194	726	72.569	799	79.943	873	87.318	
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan/hirark i lembaga	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura		2					-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vihara		5					-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah				717	104.310	798	116.110	879	127.910	961	139.709						
8	Kab Lombok Utara	Masjid	2.500/600 m ²	659	282.057	312.663	343.269	373.875	113	67.694	125	75.039	137	82.385	150	89.730	
		Musholla	250/100 m ²	-					1.128	112.823	1.251	125.065	1.373	137.308	1.495	149.550	
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan/hirark i lembaga	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pura		6					-	-	-	-	-	-	-		
		Vihara		161					-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah				1.241	180.516	1.376	200.104	1.510	219.692	1.645	239.280						
9	Kota Mataram	Masjid	2.500/600 m ²	659	445.033	458.066	471.099	484.132	178	106.808	183	109.936	188	113.064	194	116.192	
		Musholla	250/100 m ²	-					1.780	178.013	1.832	183.226	1.884	188.440	1.937	193.653	
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan/hirark i lembaga	-					-	-	-	-	-	-	-		
		Pura		6					-	-	-	-	-	-			
		Vihara		161					-	-	-	-	-	-			
Jumlah				1.958	284.821	2.015	293.162	2.073	301.503	2.130	309.845						
10	Kota Bima	Masjid	2.500/600 m ²	126	162.593	168.986	175.379	181.771	65	39.022	68	40.557	70	42.091	73	43.625	

SARANA PERIBADATAN

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana Peribadatan	Penduduk/Luas Tanah	Ketersediaan	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
					2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
									Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
		Musholla	250/100 m ²	-					650	65.037	676	67.594	702	70.151	727	72.709
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan/hirark i lembaga	1					-	-	-	-	-	-	-	-
		Pura		4					-	-	-	-	-	-	-	-
		Vihara		14					-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah									715	104.059	744	108.151	772	112.242	800	116.334
Total									25.913	3.769.183	28.119	4.090.023	30.325	4.410.863	32.530	4.731.704

Sumber : Hasil Analisis Data , 2023

Tabel 5.54 Proyeksi Kebutuhan RTH di Provinsi NTB Tahun 2027-2042

RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana	Penduduk/Luas Tanah	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
				2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
								Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
1	Kab. Lombok Barat	Taman Bermain	250/250 m ²	804.613	877.415	950.218	1.023.021	3.218	804.613	3.510	877.415	3.801	950.218	4.092	1.023.021
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					322	402.306	351	438.708	380	475.109	409	511.510
		Pemukaman Umum	120.000/-					7	-	7	-	8	-	9	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					27	241.384	29	263.225	32	285.065	34	306.906
2	Kab. Lombok Tengah	Taman Bermain	250/250 m ²	1.158.423	1.267.146	1.375.869	1.484.592	4.634	1.158.423	5.069	1.267.146	5.503	1.375.869	5.938	1.484.592
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					463	579.212	507	633.573	550	687.935	594	742.296
		Pemukaman Umum	120.000/-					10	-	11	-	11	-	12	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					39	347.527	42	380.144	46	412.761	49	445.378
3	Kab. Lombok Timur	Taman Bermain	250/250 m ²	1.481.776	1.619.651	1.757.525	1.895.400	5.927	1.481.776	6.479	1.619.651	7.030	1.757.525	7.582	1.895.400
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					593	740.888	648	809.825	703	878.763	758	947.700
		Pemukaman Umum	120.000/-					12	-	13	-	15	-	16	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					49	444.533	54	485.895	59	527.258	63	568.620
4	Kab. Sumbawa	Taman Bermain	250/250 m ²	580.086	640.393	700.699	761.006	2.320	580.086	2.562	640.393	2.803	700.699	3.044	761.006
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					232	290.043	256	320.196	280	350.350	304	380.503
		Pemukaman Umum	120.000/-					5	-	5	-	6	-	6	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					19	174.026	21	192.118	23	210.210	25	228.302
5	Kab. Dompu	Taman Bermain	250/250 m ²	246.961	255.721	264.481	273.241	988	246.961	1.023	255.721	1.058	264.481	1.093	273.241

RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana	Penduduk/Luas Tanah	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
				2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
								Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					99	123.481	102	127.861	106	132.241	109	136.621
		Pemukaman Umum	120.000/-					2	-	2	-	2	-	2	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					8	74.088	9	76.716	9	79.344	9	81.972
6	Kab. Bima	Taman Bermain	250/250 m ²	564.821	609.198	653.575	697.953	2.259	564.821	2.437	609.198	2.614	653.575	2.792	697.953
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					226	282.411	244	304.599	261	326.788	279	348.976
		Pemukaman Umum	120.000/-					5	-	5	-	5	-	6	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					19	169.446	20	182.759	22	196.073	23	209.386
7	Kab. Sumbawa Barat	Taman Bermain	250/250 m ²	162.985	181.422	199.859	218.295	652	162.985	726	181.422	799	199.859	162.985	181.422
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					65	81.492	73	90.711	80	99.929		
		Pemukaman Umum	120.000/-					1	-	2	-	2	-		
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					5	48.895	6	54.427	7	59.958		
8	Kab. Lombok Utara	Taman Bermain	250/250 m ²	282.057	312.663	343.269	373.875	1.128	282.057	1.251	312.663	1.373	343.269	1.495	373.875
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					113	141.028	125	156.331	137	171.634	150	186.937
		Pemukaman Umum	120.000/-					2	-	3	-	3	-	3	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					9	84.617	10	93.799	11	102.981	12	112.162
9	Kota Mataram	Taman Bermain	250/250 m ²	445.033	458.066	471.099	484.132	1.780	445.033	1.832	458.066	1.884	471.099	1.937	484.132
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					178	222.517	183	229.033	188	235.550	194	242.066
		Pemukaman Umum	120.000/-					4	-	4	-	4	-	4	-

RUANG TERBUKA HIJAU

No.	Kabupaten/ Kota	Sarana	Penduduk/Luas Tanah	Proyeksi Jumlah Penduduk				Kebutuhan							
				2027	2032	2037	2042	2027		2032		2037		2042	
								Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)	Keb.	Luas (m ²)
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					15	133.510	15	137.420	16	141.330	16	145.240
10	Kota Bima	Taman Bermain	250/250 m ²	162.593	168.986	175.379	181.771	650	162.593	676	168.986	702	175.379	727	181.771
		Taman Lingkungan	2.500/1.250 m ²					65	81.296	68	84.493	70	87.689	73	90.886
		Pemukaman Umum	120.000/-					1	-	1	-	1	-	2	-
		Lapangan Olah Raga	30.000/9.000 m ²					5	48.778	6	50.696	6	52.614	6	54.531

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

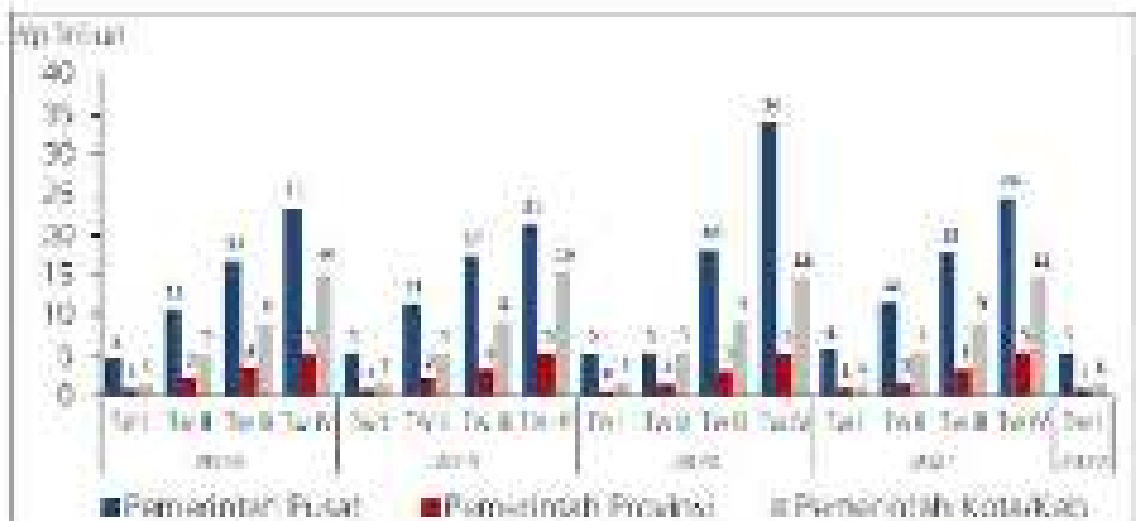
5.13 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pembiayaan PKP

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

5.13.1 Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah di Wilayah NTB

Anggaran belanja Pemerintah NTB tahun 2022 secara total sebesar Rp 46,59 triliun, terkontraksi 1,67% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp47,33 Triliun. Berdasarkan nominal dan pangsa, APBN mendominasi anggaran pengeluaran pemerintah NTB (Rp24,18 triliun, pangsa 51,90%), diikuti dengan APBD Kabupaten/Kota (Rp16,03 triliun, pangsa 34,40%), dan terendah adalah APBD Provinsi NTB (Rp6,38 triliun, pangsa 13,69%). Penurunan pagu belanja didorong oleh penurunan pagu belanja APBN tahun 2022 yang sebesar Rp24,18 Triliun atau mengalami kontraksi 2,97% (yoy).

Realisasi belanja Pemerintah NTB (APBD dan APBN) pada triwulan I 2022 mencapai 15,92% dari pagu anggaran tahun 2022. Secara nominal, realisasi belanja Pemerintah NTB triwulan I 2022 sebesar Rp7,42 triliun atau terkontraksi 4,87% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi belanja utamanya disebabkan oleh realisasi belanja APBN pada triwulan I 2022 yang tercatat mengalami kontraksi 5,31% (yoy), sejalan dengan penurunan belanja barang dan belanja modal yang masih dalam proses lelang. Selain itu, pada triwulan I 2022 sempat terjadi lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang seharusnya direalisasikan menjadi tertunda.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Gambar 5.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB

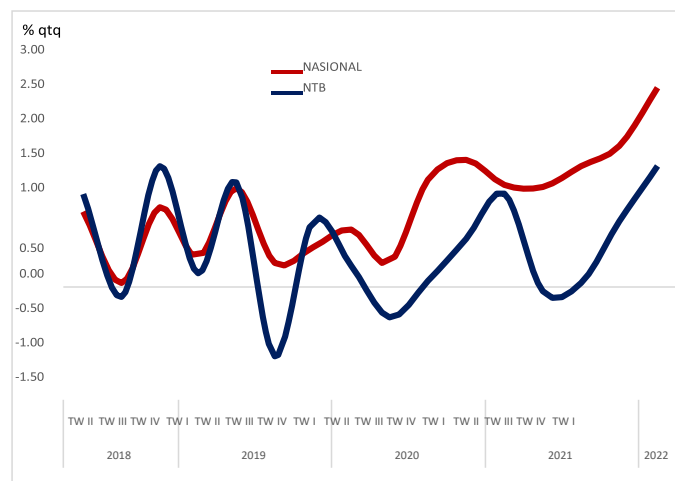
APBD Provinsi NTB tahun 2022 terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang masing-masing sebesar Rp5,39 triliun dan Rp5,96 triliun. Angka ini relatif mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang masing-masing mencapai Rp5,74 triliun dan Rp6,38 triliun. Secara nominal, anggaran pendapatan APBD Provinsi NTB tahun 2022 mengalami penurunan 5,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan anggaran pendapatan didorong oleh menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan penurunan pagu anggaran belanja utamanya dipengaruhi oleh menurunnya komponen belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Di sisi lain, penurunan pagu anggaran pendapatan yang lebih rendah ditopang oleh meningkatnya estimasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 13,88% (yoy) yang didorong oleh estimasi peningkatan keseluruhan komponen PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah termasuk pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya.

5.13.2 Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan I tahun 2022 provinsi NTB tercatat mengalami inflasi sebesar 2,49% yoy, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2021 yang mengalami inflasi sebesar 2,12% yoy. Peningkatan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh kelompok transportasi, terutama pada sub kelompok jasa angkutan penumpang sejalan dengan pelonggaran mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan internasional. Secara spasial, Kota Mataram dan Kota Bima mengalami inflasi pada triwulan I tahun 2022. Kota Mataram mencatatkan inflasi sebesar 2,46%

(yodya) dan Kota Bima mencatatkan inflasi sebesar 2,63% (yoy) . Upaya penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu terus dilakukan untuk memastaiakn terkendalnya tekanan inflasi ke depan.

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), serta ekspor Luar Negeri yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh progres pembangunan smelter perusahaan tambang dan kenaikan target produksi konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekspektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama. Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun berpotensi masih dalam kisaran atas target inflasi nasional 3% +/- 1% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi NTB

Gambar 5.9 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB

5.12.3 Prospek Perekonomian Provinsi NTB

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,1%-7,9% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,30% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), serta Ekspor Luar Negeri yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh

progres pembangunan smelter perusahaan tambang dan kenaikan target produksi konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekspektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama. Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun berpotensi dalam kisaran atas target inflasi nasional 3% +/-1% (yoy), sehingga perlu memerlukan perhatian lebih lanjut hal ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja perekonomian di tahun 2022 sehingga permintaan cenderung lebih tinggi.

5.14 Analisis Kelembagaan PKP

Dalam pelaksanaan pembangunan PKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada beberapa unsur- unsur penting yang merupakan pelaku utama pembangunan dan memiliki peran/fungsi yang sangat besar, yaitu:

- Lembaga pemerintah,
- Masyarakat pada umumnya,dan
- Lembaga non-pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, ketiga unsur tersebut memiliki peran tersendiri namun memiliki pula keterkaitan yang erat sehingga unsur-unsur tersebut dapat berjalan secara harmonis, bergerak secara dinamis dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, ketiga unsur tersebut merupakan pelaku utama pembangunan dan memiliki fungsi/peran seperti diuraikan berikut.

A. Lembaga Pemerintah

Peran dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang bersifat multi dimensional dan multi sektoral akan sangat penting. Kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yaitu Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) pemantapan kelembagaan ini adalah upaya untuk mendukung pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan termasuk penyelenggaraan koordinasi antar pelaku pembangunan yang ada di bidang penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasanpermukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman, mensyaratkan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk membentuk kelembagaan Pokja PKP dan Forum PKP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Pokja PKP, untuk itu diperlukan penguatan Peran Pokja PKP. Pemerintah dalam hal ini adalah membantu dalam penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman, pemangku kebijakan pada sektor perumahan dan permukiman, membantu peningkatan kualitas permukiman seperti RTLH dan kumuh serta membantu penyediaan PSU, Tugas-tugas dari Pokja PKP sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
3. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
4. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberfungsian Pokja PKP seperti dibawah ini

1. Memiliki Rencana Kerja
2. Memiliki Sekretariat Pokja
3. Dukungan BOP
4. Aktivitas Rapat Rutin
5. Aktivitas Monitoring Rutin

Tabel 5.55 Matrik Kondisi kelembagaan PKP di Kabupaten/Kota Provinsi NTB

No.	Kabupaten/ Kota	Indikator Keberfungsian POKJA PKP					Status Keberfungsian
		Sekretariat Pokja	Dukungan BOP	Rencana Kerja	Koordinasi Rutin (Min 3x)	Monitoring Rutin (Min 3x)	
1	Lombok Barat	Ada	Ada	Belum ada	3 kali	1 kali	Kurang berfungsi
2	Lombok Tengah	Ada	Ada	Ada	2 kali	0 kali	Kurang berfungsi
3	Lombok Timur	Ada	Ada	Ada	4 kali	3 kali	Berfungsi
4	Sumbawa	Ada	Ada	Ada	5 kali	3 kali	Berfungsi

No.	Kabupaten/ Kota	Indikator Keberfungsian POKJA PKP					
		Sekretariat Pokja	Dukungan BOP	Rencana Kerja	Koordinasi Rutin (Min 3x)	Monitoring Rutin (Min 3x)	Status Keberfungsian
5	Dompu	Ada	Ada	Ada	2 kali	1 kali	Kurang berfungsi
6	Bima	Ada	Ada	Ada	0 kali	0 kali	Kurang berfungsi
7	Sumbawa Barat	Ada	Ada	Ada	1 kali	2 kali	Kurang berfungsi
8	Lombok Utara	Ada	Ada	Belum ada	0 kali	0 kali	Kurang berfungsi
9	Kota Mataram	Ada	Ada	Ada	3 kali	4 kali	Berfungsi
10	Kota Bima	Ada	Ada	Ada	3 kali	3 kali	Berfungsi

Lembaga badan usaha milik negara yang selama ini mendapat tugas utama untuk mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diantaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dan Perum Perumnas serta Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA).

B. Lembaga Non Pemerintah

1) Organisasi Non Pemerintah

Selain Pemerintah, lembaga lain yang berperan dalam kelembagaan PKP adalah Organisasi Non Pemerintah (ONP) atau *Non Government Organization* (NGO). NGO dapat membantu menterjemakan prioritas pemerintah kepada masyarakat dan menjelaskan prioritas masyarakat kepada pemerintah. Dalam penyelenggaraan PKP membantu dalam pembangunan rumah: memberikan bantuan dalam pengadaan bahan bangunan murah, pengurusan ijin-ijin yang diperlukan, pengelolaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik rumah.

2) Kemitraan Dengan Swasta

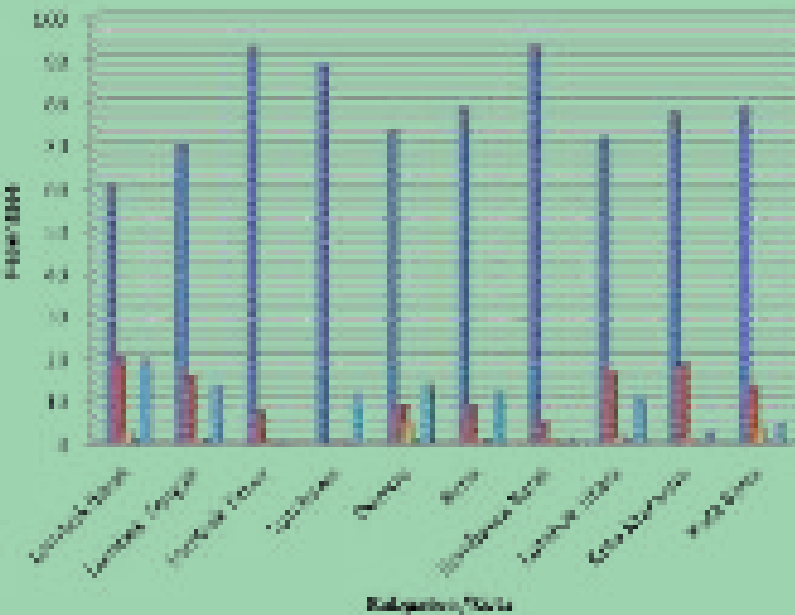
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk kemitraan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman mengingat keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.

Adapun kemitraan dengan swasta yaitu APERNAS dan PERUMNAS. Bentuk bantuan dari pihak swasta adalah membantu dalam penyediaan dan pendanaan perumahan. Ada beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antarlain:

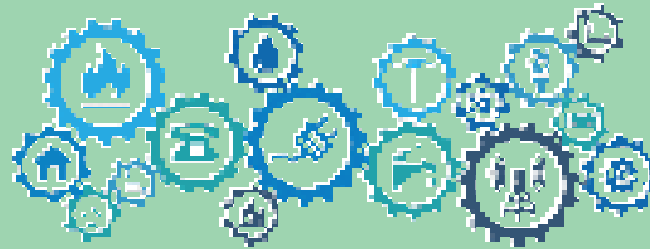
1. Kemitraan sesama instansi pemerintah (baik vertikal maupun horizontal), yaitu kerjasama yang dilakukan antar instansi pemerintah yang bertujuan agar ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam simpulikasi dari kebijakan dan ketentuan yang arahnya adalah pada efisiensi danefektivitas.
2. Antara pemerintah dan swasta, yang intinya adalah komunikasi yang sejajar dan saling menguntungkan. Strategi kemitraan disini adalah dengan mengajak peran serta swasta dan masyarakat (*public-private partnership*). Bentuk kerjasama ini dapat berupa bentuk kerjasama operasi (KSO), BOT (*Building Operation Transfer*), BTO (*Building Transfer operation*), BOO (*ruislag*).
3. Antara sesama swasta (khususnya antara pengusaha besar dan kecil), kerjasama ini diharapkan dapat mengangkat peran pengusaha kecil agar keterlibatannya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman semakin meningkat.




Prasarana, Sarana dan Fasilitas Umum



Persentase Kepemilikan Jamban di Provinsi NTB



Berdasarkan data dari Disperkim Kab/Kota Se- Provinsi NTB pada Tahun 2022 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak yakni sebesar 91,75% Dimana rata-rata setiap Kab/Kota persentasenya sudah mencapai 90% keatas kecuali Kota Mataram dengan persentase hanya 74,09%



BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PKP

Rencana pembangunan kawasan permukiman dan perumahan merupakan analisis, rencana, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dalam Agenda Global Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*) atau yang dikenal dengan SDGs, terutama *Goals* 6.1.1 (akses air minum); *Goals* 6.2.1 (akses sanitasi); dan *Goals* 11.1.1 (akses rumah layak huni).

Visi dan strategi pada dokumen RP3KP Provinsi Nusa Tenggara Barat masih relevan sebagai sebuah tujuan yang menjadi dasar atau acuan besar dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan Permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena telah sesuai dan mengacu pada tujuan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan rujukan tujuan dari visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Aman, Layak Huni, Terjangkau, Berbudaya, Berkelanjutan”.

Guna mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam bentuk misi. Adapun misi yang dapat digunakan untuk mencapai visi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan bebas dari kekumuhan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang berkualitas.
3. Mewujudkan penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman dengan jumlah dan

kualitas yang layak;

6.1 Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi.

Penyelenggaraan perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang dalam rangka menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

6.1.1 Perencanaan dan Penanganan Perumahan

Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat terdiri atas perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Perencanaan perumahan wajib dilaksanakan dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Perencanaan untuk lokasi bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan bagi rumah sederhana yang dimiliki rumah tangga miskin didasarkan atas Basis Data Perumahan.

Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk :

- a. menciptakan rumah layak huni;
- b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah;
- c. meningkatkan nilai ekonomi bagi pemilik rumah; dan
- d. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan tata ruang, termasuk struktur bangunan dengan konstruksi rumah tahan gempa.

6.1.2 Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan untuk kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:

- a. rencana penyediaan akses jalan;
- b. rencana penyediaan ruang terbuka hijau;

- c. rencana penyediaan prasarana olah raga;
- d. rencana sarana peribadatan;
- e. rencana penyediaan pemakaman umum minimal 2% (dua persen) dari luas kawasan hunian, khusus untuk perumahan MBR; dan
- f. rencana penyediaan prasarana air minum, penerangan, pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan serta sarana proteksi kebakaran kawasan.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan tata ruang dan harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.

6.1.3 Pembangunan Perumahan

Pembangunan perumahan meliputi:

- 1) pembangunan rumah (rumah tunggal, rumah deret dan atau rumah susun), dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan/atau
- 2) peningkatan kualitas rumah.

Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi, rancang bangun yang ramah lingkungan dan tahan gempa serta mengembangkan industri bahan bangunan yang memanfaatkan:

- a. sumber daya alam;
- b. daur ulang limbah; dan
- c. kearifan lokal.

6.1.3.1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Rumah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan bertujuan untuk memberikan arahan dan rencana terkait pemanfaatan, pengembangan, dan peningkatan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana pembangunan dan pengembangan rumah dapat dilihat pada penjelasan dan matriks berikut :

1. Menetapkan lokasi dan luas lahan perumahan yang sudah terbangun dan masih dapat di bangun atau dikembangkan rumah/perumahan baru.
 - a. Luas lahan permukiman eksisting di Provinsi NTB adalah 58.152,39 Ha atau sekitar 3,13% dari total luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan di arahkan pada lokasi perencanaan lingkungan hunian (perkotaan dan perdesaan) di setiap wilayah di Provinsi NTB.
2. Merumuskan rencana fasilitasi, kepemilikan perumahan/rumah bagi masyarakat dengan beberapa sekma antara lain dengan membuat tabungan perumahan bagi masyarakat miskin dan MBR, bantuan uang muka, bantuan uang sewa rumah, keringanan uang cicilan rumah.
3. Merumuskan rencana penyediaan rumah layak huni meliputi jenis (Rumah Komersial,

Rumah Umum, Rumah Khusus, Rumah Swadaya Dan Rumah Negara), bentuk (tunggal, deret dan susun), tipologi dan jumlah rumah yang akan dibangun di masing-masing lokasi.

- a. Rumah swadaya, meliputi perbaikan rumah RTLH yang tersebar di tiap-tiap kecamatan.
- b. Rumah susun, diperuntukan bagi penanganan rumah kumuh pada kawasan permukiman kumuh.
- c. Rumah khusus, diperuntukan bagi korban bencana alam.
- d. Rumah umum bentuk tapak dan deret, diperuntukan bagi warga yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan terdampak bencana alam.

Tabel 6.1 Matriks Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Variabel	Arahan Rencana
Rencana pemanfaatan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan rumah dengan fungsi lain (kios, toko, warung, bengkel, salon, laundry, dan penginapan) mengikuti arahan pada rencana zonasi pada rencana tata ruang di wilayah Provinsi. b. Pemanfaatan rumah diutamakan untuk pemanfaatan kegiatan hunian, kegiatan tambahan (non hunian) harus diikuti dengan ijin pengembanganusaha atau kegiatan lainnya. c. Peningkatan dan perbaikan pelayanan serta kondisi fisik PSU.
Rencana pencegahan perumahan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan rumah tidak layak huni. b. Pengaturan KDB, KLB, KDH Perumahan. c. Penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB. d. Perbaikan kualitas fisik rumah yang mengalami penurunan kualitas. e. Mengadakan pelatihan peningkatan SDM. f. Membangun koperasi. g. Mendirikan UMKM bersama.
Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan kondisi fisik RTLH dengan skema BSPS, bantuan CSR, program pembangunan perumahan lainnya, dan dana desa pada setiap kecamatan. b. Peningkatan kualitas jalan lingkungan perumahan.
Rencana peningkatan kualitas layanan terhadap Perumahan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas layanan air bersih. c. Peningkatan kualitas layanan persampahan. d. Peningkatan kualitas layanan Sanitasi layak e. Penataan sistem drainase. f. Peningkatan kualitas jalan. g. Membangun Bank Sampah dan TPST 3R. h. Pengadaan alat angkut sampah. i. Membangun IPAL atau sumur resapan komunal. j. Pengadaan penerangan jalan. k. Pembangunan fasilitas pendidikan (TK dan PAUD). l. Membangun area bermain anak. m. Membangun RTH. n. Membangun Posyandu. o. Membangun Mushollah/Langgar.

Sumber : Profil PKP Disperkim Provinsi NTB 2021

6.1.3.2 Rencana Pembangunan Perumahan Baru

Rencana pembangunan perumahan baru bertujuan untuk penyediaan perumahan bagi warga yang belum memiliki rumah dan bagi warga pendatang yang datang bekerja di wilayah Perkotaan. Pembangunan perumahan baru juga memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang ada serta menunjang pengembangan potensi perekonomian wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana pembangunan perumahan baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 6. 2 Matriks Rencana Pembangunan Kembali Perumahan di Wilayah Provinsi NTB

Variabel	Arahan Rencana
Rencana Perumahan Baru skala besar	a. Daya tampung lokasi pengembangan perumahan disesuaikan dengan arahan pada rencana lingkungan hunian (perkotaan dan perdesaan). b. Typologi rumah direncanakan: <ul style="list-style-type: none"> • Rumah susun pada wilayah perkotaan • Rumah tapak tunggal dan deret pada wilayah perkotaan • Rumah tapak tunggal pada wilayah Perdesaan • Rumah tapak deret pada wilayah perkotaan dan perdesaan • Rumah susun pada penataan kawasan permukiman kumuh c. Tahapan pembangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Tahap I-II, perencanaan pembangunan perumahan dengan skema hunian berimbang dan pembangunan perumahan baru pada seluruh wilayah layak huni • Tahap III-IV, proses pembangunan fisik perumahan skala besardengan skema hunian berimbang. d. Peningkatan dan pembangunan PSU: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas fisik jalan lingkungan. • Pembangunan jalan baru (jalan lingkungan). • Pembangunan sistem drainase. • Pembangunan sistem persampahan. • Pembangunan sistem limbah. • Pembangunan fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan (skala pelayanan lingkungan). • Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau termasuk kebutuhan atas Ruang pemakaman (kuburan) seluas 2% dari kebutuhan permukiman.
Rencana Perumahan Baru bukan skala besar	

Sumber: Profil PKP Disperkim Provinsi NTB 2021

6.1.3.3 Rencana Pembangunan Kembali

Rencana pembangunan kembali memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang ada. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui konsep peremajaan dan pemukiman kembali. Rencana pembangunan kembali perumahan pada wilayah Kota/Kabupaten dapat dilihat pada tabel matriks berikut :

Tabel 6.3 Matriks Rencana Pembangunan Kembali Perumahan

Variabel	Arahan Rencana
Rencana Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh	a. Perencanaan peningkatan kualitas perumahan dengan melibatkan perpaduan antara pemerintah dan pihak swasta dengan sumber pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan dana lainnya yang sah. b. Pola kolaborasi dapat dilakukan dengan membagi peran dari tiap-tiap stake holder (pemerintah perbaikan dan peningkatan perumahan, swastapenyediaan PSU). c. Pembangunan perumahan dengan konsep rumah tahan gempa, rumah risha, dan rumah panggung bagi rumah dengan luas lahan yang terbatas. <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pelatihan terkait konstruksi rumah tahan gempa.

Variabel	Arahan Rencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan pelatihan terkait pembangunan rumah risha. • Pengembangan konsep dan desain rumah panggung sebagai ciri khas lokalitas kawasan. <p>b. Rencana peremajaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan perumahan pada perumahan kumuh di kawasan permukiman kumuh (bukan pada wilayah sempadan sungai dan panta). • Peremajaan perumahan pada kawasan yang memiliki nilai strategis (pusat perkotaan, lokasi wisata, dan lokasi industri). <p>c. Pemukiman kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan permukiman kumuh wilayah 10-15 ha. • Pada kawasan permukiman yang masuk pada kawasan negatif list (sempadan pantai, sungai, SUTT, dan daerah rawan bencana).
Rencana penataan perumahan sesuai nilai lokasi dan kebutuhan perumahan	Rencana penataan perumahan. <p>a. Pada pusat-pusat kegiatan (perdagangan jasa dan pemerintahan).</p> <p>b. Pada pusat-pusat perkotaan dan perdesaan.</p> <p>c. Pada lokasi strategis kabupaten.</p>
Rencana pembangunan perumahan korban terdampak bencana dan Rencana fasilitasi bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah	<p>a. Pendataan rumah terdampak bencana dan terdampak program pemerintah.</p> <p>b. Pendataan lokasi perumahan yang aman dari bencana.</p> <p>c. Perencanaan pembangunan rumah khusus bagi korban bencana alam.</p> <p>d. Perencanaan pembangunan rumah susun bagi masyarakat terdampak program pemerintah.</p> <p>e. Perencanaan pembangunan rumah tapak bagi masyarakat terdampak bencana dan terdampak program pemerintah.</p>

Sumber : Profil PKP Disperkim Provinsi NTB 2021

6.1.3.4 Rencana Keterpaduan PSU Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

Rencana pengembangan keterpaduan PSU pada perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjabarkan arahan pengembangan keterpaduan PSU yang nantinya akan menjadi *guideline* atau panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan pengembangan perumahan. Rencana pengembangan keterpaduan PSU pada kawasan perumahan, dapat dilihat pada tabel matriks berikut :

Tabel 6.4 Matriks Keterpaduan Pembangunan PSU

Variabel	Arahan Rencana	
	Pencegahan	Peningkatan
Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terkait Penerapan peraturan KDB, KLB pada bangunan baru • Sosialisasi Pengaturan dan pengendalian GSB • Sosialisasi tentang garis sempadan pantai dan sempadan sungai serta kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan pada kawasan tersebut • Penyesuaian dan penegakan aturan kesesuaian bangun terhadap lahan serta tuntutan bagi keteraturan • Sosialisasi dan advokasi Masyarakat terhadap budaya hidup rapi, teratur dan sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan RTH privat dengan potisasi tanaman • Pengembangan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan sungai • Perbaiki rumah tidak layak huni dengan jumlah 106.471 unit pada tahun 2021: • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur • Peningkatan kualitas dan Kapasitas bangunan hunian sesuai persyaratan teknis
Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala • Pemeriksaan berkala terhadap usia pakai jalan/Vitalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas permukaan jalan tanah ke paving dan Rabat Beton sesuai dengan karakteristik lokasi • Peningkatan kualitas dan Kapasitas jalan lingkungan

Variabel	Arahan Rencana	
	Pencegahan	Peningkatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Organisasi Masyarakat dalam pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan Lingkungan 	<p>sesuai persyaratan teknis baik dari segi akses jangkauan maupun syarat teknis jalan yang layak</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan jalan padatahun 2030 sepanjang 218.77 meter
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi hemat air dan menjaga sumber air Penyediaan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru oleh PDAM Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam Pemeriksaan berkala terhadap kelayakan penggunaan air 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum melalui penambahan jaringan pipanisasi PDAM Optimalisasi layanan eksisting Mencari/meningkatkan sumber-sumber air baru. Pembangunan Tandon air dan bangunan pendukung untuk layanan kepada masyarakat Mmenuhi kebutuhan air bersih pada tahun 2021 sebanyak 5,220.32 (Liter/Detik) pada tahun 2021 dan pada tahun 2030 sebanyak 6,136.44 (Liter/Detik)
Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase Melakukan sosialisasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat bencana banjir dan cara menanggulangnya Pemeliharaan saluran drainase eksisting Pelibatan masyarakat dalam memelihara keberlanjutan fungsi drainase Mengajak dan melibatkan seluruh masyarakat agar menutup semua saluran limbah rumah tangga yang menuju Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun saluran drainase Normalisasi Sungai Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala Pengembangan saluran drainase pada gang sempit dengan model U-Gutter di sepanjang jalan lingkungan yang berdimensi ≤ 1 m Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase Peningkatan kualitas dan kapasitas/ kemampuan fungsi drainase (Konstruksi) Pembuatan saringan drainase untuk penyaringan sampah
Pengolahan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kampanye dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat Peningkatan sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau Septic Tank yang memenuhi syarat teknis Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat Pengawasan limbah rumah tangga yang masuk ke drainase lingkungan Mengajak keterlibatan seluruh masyarakat/elemen masyarakat dalam pengendalian limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jambanisasi yang dilengkapi dengan tangki septic Pembangunan IPAL komunal Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah Pembangunan unit perpipaan menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah
Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan Membuat program clean, green and healthy sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan Sosialisasi dan advokasi kesadaran PHBS masyarakat. Pelebagaan system pengeloaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sarana persampahan yang sudah ada Peningkatan TPS eksisting menjadi TPS 3 R Peningkatan sistem pengangkutan sampah yang melayani seluruh kawasan Penambahan sarana dan prasarana persampahan termasuk sarana gerobak/mobil/motor pengangkut sampah dari hunian menuju TPS dan TPA
Sistem Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran kepada masyarakat dan siswa sekolah Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat Penyediaan alat pemadam kebakaran portable Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)

Sumber : Profil PKP Disperkim Provinsi NTB 2021

6.1.3.5 Rencana Pembangunan Perumahan Dikawasan Rawan Bencana

Rencana pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang ada di kawasan rawan bencana. Konsep yang di berikan agar dapat meningaktkn kualitas perumahan terhadap kawasan rawan bencana. Rencana pembangunan perumahan dikawasan rawan bencana pada wilayah Kota/Kabupaten dapat dilihat pada tabel matriks berikut :

Tabel 6.5 Pembangunan Perumahan di Kawasan Rawan Bencana

No	Rawan Bencana	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
1.	Rawan Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan sistem drainase dan aturan tambahan terhadap bangunan - Pelarangan pendirian permukiman di sempadan sungai - Pelarangan pendirian permukiman di atas saluran irigasi - Pengendalian aturan intensitas KDB minimal 70% dan penyediaan RTH minimal 10% - reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) meliputi ruang milik pribadi 10 % (sepuluh persen) dan milik umum 20 % (duapuluh persen) yang disediakan oleh pemerintah sebagi ruang serap air - Pembuatan sumur resapan dalam, sumur resapan dangkal, dan biopori di daerah rawan bencana banjir - Pengembangan Kolam Retensi untuk menampung dan menghambat arus aliran air yang memiliki daya rusak pada daerah yang dilewatinya - Penyiapan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “plotting” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir / ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir
2.	Bencana Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan pembangunan menghindari daerah rawan banjir (kecuali untuk taman dan fasilitas olah raga), dan dilanjutkan dengan kontrol penggunaan lahan. - revitalisasi fungsi resapan tanah; - pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana
3.	Rawan Longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan wilayah rentan longsor tinggi sebagai terbuka hijau. - Penegakan Peraturan Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup, serta pengetatan izin mendirikan bangunan dan fasilitas utama lainnya di daerah rawan longsor. - Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat - Pembangunan terasering dengan sistem drainase yang tepat - Pemasangan sistem peringatan dini bencana Tanah Longsor dengan Keterpaparan informasi peringatan dini bencana Tanah Longsor kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya Tanah Longsor - Pembangunan sarana dan prasarana Evakuasi Masyarakat pada daerah rawan bencana tanah longsor - Peningkatan Daerah Resapan Air di rawan bencana tanah longsor dengan melakukan Penghijauan di Kawasan lahan tandus, membuat sumur resapan, dan membuat biopori - Pembangunan Infrastruktur Pengaman Lereng di daerah rawan bencana tanah longsor dengan membangun talud pengaman lereng di daerah aliran sungai maupun di daerah yang rawan longsor pada bahaya kelas tinggi
4.	Rawan Gelombang Pasang dan Gelombang Ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelarangan pendirian permukiman di sempadan pantai - Pengembangan permukiman dengan jarak minimal 100 meter dari sempadan pantai - Pembangunan break water minimal satu sel pantai pada daerah yang terancam abrasi dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam pengambilan material pembangunan dalam setiap tahun - Pengembangan kawasan hutan bakau dan tembok penahan
5	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan RTH di Kawasan Permukiman - Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis Menjadi Ruang Terbuka Hijau atau Hutan Kota - Pengembangan resapan air di Kawasan Permukiman - Pelestarian sumber daya air - Pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan

No	Rawan Bencana	Upaya Peningkatan Kualitas Permukiman
6	Rawan Akan Bencana Letusan Gunung Berapi	<ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran kegiatan budi daya di kawasan risiko bencana letusan gunung api; - Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api; - Pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana; - Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan risiko bermukim di kawasan sekitar gunung api, mitigasi bencana, dan tindakan dalam menghadapi bencana gunung api; dan - Peningkatan kesiapan dan koordinasi segenap pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dan menghadapi kejadian bencana gunung api. - Pemberlakuan dan Pengetatan Ijin mendirikan bangunan di kawasan KRB 1 yang paling rawan bencana gunung api - Pembangunan saluran dan jalur aliran lahar untuk mengantisipasi aliran lahar ke kawasan permukiman penduduk - Pemasangan rambu-rambu bahaya dan rambu-rambu evakuasi di daerah gunung api terutama pada jalur pendakian - Pemasangan sistem peringatan dini bencana Letusan Gunung Api dengan Keterpaparan informasi peringatan dini bencana Letusan Gunung Api kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya Letusan Gunung Api - Sosialisasi rencana evakuasi bencana Letusan Gunung Api bagi masyarakat di kawasan rawan bencana Letusan Gunung Api
7	Bencana Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan bangunan perumahan dan fasilitas umum yang vital (seperti : rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan sebagainya) di wilayah yang aman dari gempa bumi. - Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan yang di adopsi dari Building Code provinsi pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana; - penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan upaya dalam menghadapi kejadian gempa - Pengembangan teknik konstruksi tahan gempa, baik bangunan untuk fasilitas umum maupun permukiman - Pembangunan rumah tahan gempa RISHA - Pemetaan zonani daerah rawan gempa bumi dan melakukan penyesuaian penggunaan lahan sesuai dengan zonasi tersebut - Penerapan peraturan tata guna lahan dan IMB berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi - Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa - Sosialisasi tentang bahaya Gempa Bumi dan dampaknya kepada siswa-siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah secara simultan berkelanjutan di daerah rawan bencana Gempa Bumi - Sosialisasi pengetahuan tentang cara-cara penyelamatan diri dari bencana Gempa Bumi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana Gempa Bumi di daerah rawan bencana Gempa Bumi - Penyusunan perencanaan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana gempa bumi
8	Rawan Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan daerah penyangga dan peredam dampak bencana Tsunami dengan melakukan penanaman mangrove sepanjang 10 km dengan ketebalan 100 meter per tahun di garis pantai berpotensi terkena tsunami Pembatasan pembangunan fasilitas umum (rumah sakit, sekolah, kantor polisi, pemadam kebakaran) di zona rawan bencana tsunami - Pemerkuatan bangunan agar tahan terhadap tekanan gelombang dan arus kuat, antara lain dengan merekonstruksi pondasi struktur agar dapat menahan erosi dan penggerusan oleh arus - Penetapan peraturan terkait tata guna lahan dan Izin Medirikan Bangunan di wilayah pesisir pantai - Proteksi kawasan terumbu karang 2-3 km dari pantai di Zona Prioritas PB Tsunami - Pembangunan tembok penahan Tsunami pada garis pantai yang berisiko. - Pemasangan sistem peringatan dini bencana Tsunami dengan Keterpaparan informasi peringatan dini bencana Tsunami kepada masyarakat rentan satu jam sebelum terjadinya Tsunami

Sumber : Profil PKP Disperkim Provinsi NTB 2021

6.1.4 Pengendalian Perumahan

Pengendalian perumahan meliputi:

- 1) Pengendalian perumahan dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Pengendalian perumahan dilakukan dalam bentuk perizinan, penertiban dan penataan.
- 2) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah lintas kabupaten/kota

1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdiri dari :
 - a. diijinkan pengembangan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat);
 - b. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
 - c. zona perumahan harus terlayani oleh moda sarana umum angkutan massal
 - d. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - e. diijinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - f. dilarang pengembangan budidaya lainnya.
2. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan terdiri dari :
 - a. diijinkan pengembangan rumah tunggal, cluster perumahan;
 - b. intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
 - c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - d. diijinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - e. dilarang pengembangan budidaya lainnya.

6.2 Penyelenggaraan Permukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan serta wajib dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui:

- a. pembangunan baru;
- b. pengembangan yang telah ada; atau

- c. pembangunan kembali.

6.2.1 Perencanaan Kawasan Permukiman

Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup:

- a. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- b. mitigasi bencana.

Dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman, pemerintah provinsi dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha, rencana pembangunan dan peningkatan kualitas pada kawasan permukiman harus mendapatkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

6.2.2 Pembangunan Kawasan Permukiman

Pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum, harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung serta harus mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Skenario Penanganan Capaian Target Indikator SDGs Bidang Perumahan dan Permukiman

Sesuai dengan agenda SDGs sampai pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melanjutkan pengintegrasian target dan indikator SDGS ke dalam RPJMN 2020-2024. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung kesepakatan global, mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara umum Perpres tersebut hanya menyatakan program pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dianggap sejalan dengan SDGs. Selibuhnya, mengatur bagaimana program pembangunan yang sudah ada di Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 akan dijalankan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain dengan RPJMN, integrasi target dan indikator SDGs juga otomatis harus dilakukan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II ayat 2. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa tujuan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan nasional) adalah untuk menjamin terciptanya integrasi,

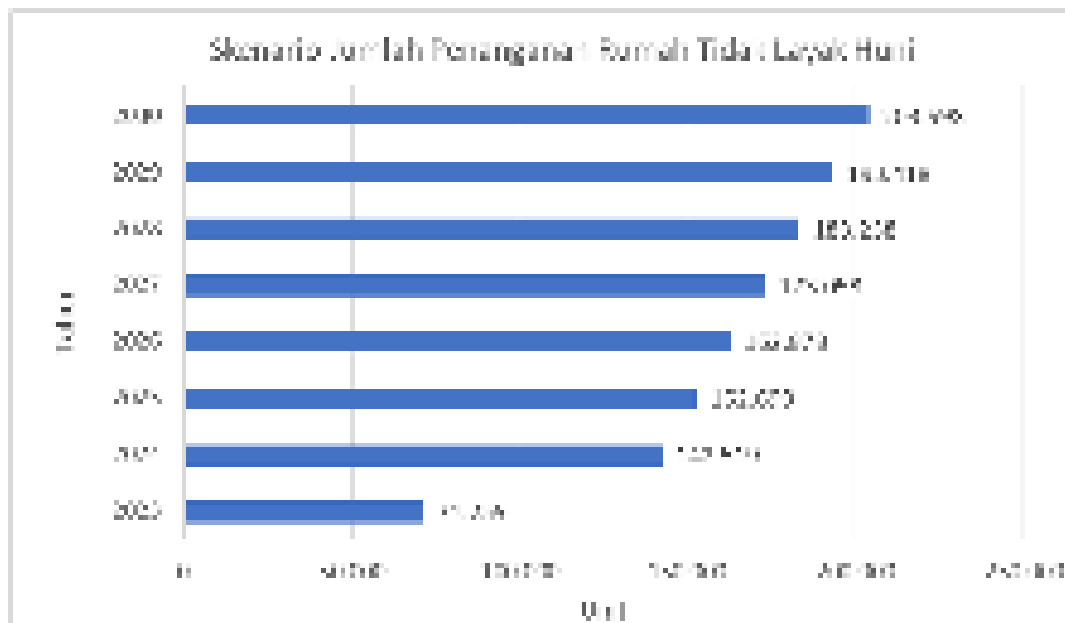
sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Hubungan antara RPJMN dengan RPJMD juga termuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian dua pasal 263 yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Dengan mengacu pada SDG's bidang perumahan dan permukiman di atas adapun skenario capaian penanganan target untuk mendapatkan hunian yang layak, yang secara spesifik masuk ke dalam Tujuan 11 sasaran 11.1 yaitu pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

6.2.2.1 Skenario peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks permukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan dalam pertimbangan mengenai standart rumah layak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diketahui bahwa jumlah rumah yang tidak layak huni sesuai dengan data E-RTLH per 2 Juni 2022 sebesar 206.760 unit dan jumlah ini berkurang pada akhir tahun 2022 menjadi 203.598 unit berdasarkan data kabupaten/kota di Provinsi NTB. Skenario penanganan rumah layak berdasarkan kebijakan pemenuhan rumah layak 70% di Tahun 2024 sejumlah 142.519 unit (sesuai dengan amanat RPJMN) dan 100% di Tahun 2030 sejumlah 61.079 unit (sesuai dengan target SDG;s)



Gambar 6.1 Skenario Pengurangan RTLH

Backlog rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah. Berdasarkan hasil pengkajian mengenai *Backlog* rumah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 berjumlah 204.492 unit. Sehingga untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kepemilikan rumah perlu adanya skenario penanganan. Adapun strategi pemerintah provinsi menangani *backlog* yaitu dengan penyediaan database bidang perumahan, fasilitasi pemanfaatan lahan di kabupaten/kota untuk pembangunan rumah susun sewa, fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

6.2.2.2 Skenario keterpenuhan akses air minum , sanitasi dan persampahan

Secara nasional telah disepakati, melalui program global MDGs agar sesuai dengan misi SDGs terkait indikator Sanitasi dan air bersih layak, sesuai dengan tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi

nonpemerintah. Dalam sasaran pencapaian target air bersih dan sanitasi tersebut untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait capaian pelayanan air minum/SPAM yaitu 81,05%, kemudian cakupan pelayanan air limbah domestik/SPALD yaitu 89,46%, serta pengelolaan persampahan perkotaan mencapai 37,63%. Dengan capaian tersebut tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam mencapai air bersih dan sanitasi layak dan berkelanjutan hingga tahun 2030 sesuai dengan tujuan SDG's, sehingga skenario penanganan yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah harus searah dengan kebijakan yang ada.

Untuk mewujudkan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memiliki skenario penetapan strategi yaitu :

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi;
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
5. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi;
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis

Kebijakan Tujuan 6. Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah:

1. Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh gubernur;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan fasilitasi upaya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah social;
4. Perbaiki sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air;
5. Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya;
6. Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan;

- a. Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP); dan
- b. Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.

6.2.3 Pengendalian Kawasan Permukiman

Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- 1) Pengendalian dalam tahap perencanaan meliputi:
 - a. mengawasi rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - b. memberikan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung.

Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman pada tahap perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang.

- 2) Pengendalian pembangunan dilakukan untuk:
 - a. menjaga proses pembangunan kawasan permukiman sesuai rencana;
 - b. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman.
- 3) Pengendalian pemanfaatan dilakukan dengan :

Pengendalian pemanfaatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman dengan melakukan pengendalian pada tahap pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain dapat berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum. Hal ini merupakan amanat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

RPJMN Tahun 2020 - 2024 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Pembangunan nasional bidang perumahan yang melibatkan seluruh *stakeholders* secara kolaboratif ditargetkan mampu meningkatkan rasio rumah tangga yang menempati hunian layak secara nasional, dari 54,1% pada tahun 2018 (56,51% pada tahun 2019) menjadi 70,00% pada tahun 2024. Pencapaian target diatas dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Sisi permintaan (*demand side*), meliputi:
 - a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
 - c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
 - d. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
2. Sisi pasokan (*supply side*), meliputi:
 - a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
 - b. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun perkotaan;
 - c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
 - d. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
 - e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan

perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

3. Sisi penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), meliputi:
 - a. Pembangunan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;
 - b. Peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
 - c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan; dan
 - d. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dimuat dalam dokumen RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian PUPR, ditetapkan bahwa arah kebijakan penyelenggaraan perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan difokuskan pada upaya peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.

Kebijakan pembangunan perumahan Provinsi NTB pada dokumen RPJP dan RPJMD Provinsi NTB, adalah menyediakan hunian yang layak huni bagi masyarakat yang dilengkapi dengan ketersediaan PSU yang memadai.

Pada kebijakan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan dan pengembangan perumahan akan diarahkan untuk menunjang pengembangan potensi dan pusat kegiatan yang ada di wilayah kota/kabupaten. Pembangunan dan pengembangan perumahan diarahkan untuk mendukung atau menunjang potensi wisata yang ada, menunjang keberadaan kawasan strategis Provinsi, menunjang fungsi perkotaan dan perdesaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh yang tersebar pada kawasan permukiman kumuh di kota/kabupaten.



Gambar 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan 2020 – 2024

Berdasarkan penjabaran kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam konteks nasional, provinsi, dan kabupaten, kebijakan dan strategi yang akan dilakukan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan hunian yang layak huni, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten/Kota khususnya bagi masyarakat miskin dan MBR;
 - a. Melakukan pendataan terkait sebaran dan jumlah rumah tidak layak huni serta jumlah *backlog* di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Perbaiki kondisi fisik rumah tidak layak huni melalui program BSPS, bantuan CSR, dana desa, dan program bantuan lainnya.
 - c. Pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh, bagi ASN, TNI, buruh/pekerja, Mahasiswa, Petugas kesehatan, dan MBR.
 - d. Pembangunan rumah tapak dalam mendukung kawasan industri dan pariwisata.
 - e. Melakukan pengembangan inovasi teknologi pembangunan perumahan.
 - f. Menyediakan ketersediaan PSU melalui program bantuan PSU bagi perumahan bagi masyarakat miskin dan MBR.
 - g. Pembangunan rumah dengan konstruksi tahan bencana.
2. Membantu masyarakat Kabupaten/Kota khususnya masyarakat miskin dan MBR dalam mengakses hunian yang layak;
 - a. Membantu proses pengajuan kredit rumah bagi masyarakat miskin dan MBR.
 - b. Mengembangkan skema bantuan kepemilikan rumah bagi masyarakat miskin dan MBR dengan Skema FLPP, Tabungan Perumahan, Subsidi Bantuan Uang Muka dan Uang Sewa Rumah).
 - c. Mengembangkan konsep low cost housing terkait penyediaan rumah bagi masyarakat miskin dan MBR.
 - d. Membantu kemudahan perizinan bagi pembangunan perumahan.
3. Menyediakan lahan bagi pembangunan perumahan;
 - a. Membangun sistem informasi land banking dalam menunjang ketersediaan lahan. Semakin lama harga tanah akan semakin tinggi dan Pemerintah daerah provinsi akan kesulitan untuk membeli dan menyediakan lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan land banking. Land banking meliputi kegiatan :

- a) Analisa kondisi fisik lahan
- b) Analisa Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c) Analisa Kesesuaian dengan Rencana Detail Tata Ruang
- d) Analisa Kedekatan Lokasi terhadap Pusat Pertumbuhan
- e) Analisa Prediksi Harga
- f) Analisa Proses Pembebasan Tanah
- g) Analisa Ganti Rugi Aset
- h) Analisa Biaya Proses Pembebasan Lahan

Pelaksanaan Bank Tanah dilakukan sbagi pembangunan perumahan.

b. Pemetaan kasiba dan lasiba wilayah Kabupaten/Kota.

Penyediaan tanah untuk kepentingan umum perumahan dan Kawasan permukiman diwujudkan dalam Pembangunan Kasiba dan Lisiba. Pembangunan Permukiman skala besar yang diwujudkan dalam Pembangunan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri (Kasiba dan Lisiba BS).

Ketentuan Kasiba dan Lisiba

- a) Kajian pertumbuhan penduduk baik yang alamiah maupun migrasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
- b) Kebutuhan rumah dapat didekati dengan melihat selisih antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada.
- c) Lokasi Kasiba, Lisiba dan Lisiba BS harus berada pada Kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota.
- d) Seluruhnya terletak dalam wilayah satu daerah administratif:
 - Kasiba dan Lisiba: kawasan permukiman skala besar pada kawasan perkotaan dan atau kawasan perdesaan dan atau kawasan tertentu yang terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Lisiba BS : Kawasan permukiman yang bukan dalam skala besar pada kawasan perkotaan dan atau kawasan tertentu yang terletak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e) Lokasi dapat dikembangkan mengikuti kecenderungan perkembangan yang ada atau untuk merangsang terjadinya pengembangan baru.
- f) Calon lokasi bukan / tidak merupakan tanah sengketa atau berpotensi sengketa.
- g) Dalam menentukan urutan prioritas calon-calon lokasi, pertimbangan utama sekurang-kurangnya adalah strategi pengembangan wilayah, biaya terendah

untuk pengadaan prasarana dan utilitas, berdekatan dengan tempat kerja atau lokasi investasi yang mampu menampung tenaga kerja.

- h) Lokasi yang akan ditetapkan mencakup lokasi yang belum terbangun yang mampu menampung:
- Kasiba : ≥ 3.000 unit rumah & ≤ 10.000 unit rumah;
 - Lisiba : 1.000 unit rumah ≤ 3.000 unit rumah.
 - Lisiba BS : ≥ 1.000 unit rumah dan ≤ 2.000 unit rumah.
- i) Bagi lokasi tanah yang sudah ada permukimannya, akan merupakan integrasi antara pembangunan baru dan yang sudah ada sehingga seluruhnya menampung sekurang-kurangnya sesuai ketentuan Kasiba, Lisiba dan Lisiba BS pada huruf(h)
- j) Kedekatan dengan fasilitas kesehatan
- k) Kedekatan dengan pusat perbelanjaan
- l) Kemungkinan pembuangan sampah.
- m) Tidak mengubah bentang alam
- n) Masyarakat yang akan menghuni mempunyai karakter/budaya yang tidak berlawanan dengan karakter/budaya masyarakat yang ada di sekitarnya.
- o) Adanya perhitungan neraca pembiayaan (usulan pengeluaran, perkiraan penerimaan, cash flow)

Kriteria Pemilihan Lokasi

- Jarak tempuh lokasi menuju pusat kegiatan dan pelayanan selama kurang lebih 30 menit
 - Ketersediaan jalan penghubung dengan kawasan sekitarnya
 - Keadaan topografi lapangan datar
 - Daya dukung tanah untuk bangunan sesuai
 - Drainase alam baik
 - Kemudahan memperoleh air bersih
 - Kemudahan memperoleh sambungan listrik
 - Kemudahan memperoleh sambungan telepon
 - Kedekatan dengan fasilitas pendidikan tinggi
- c. Memanfaatkan lahan tidur bagi pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat miskin dan MBR.

4. Meningkatkan kinerja dan komunikasi antar *stakeholder* pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - a. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* (swasta dan pemerintah) dalam menunjang pembangunan perumahan di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan sinkronisasi program pembangunan perumahan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
 - c. Memberikan pelatihan bagi pejabat yang berwenang dalam pengembangan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dilingkup pemerintahan Kota/Kabupaten.

Arah strategi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kerangka kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, serta rencana sektor lainnya adalah mendukung tersedianya pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan hunian yang terjangkau serta ditunjang dengan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Rencana Strategi penyelenggaraan RP3KP meliputi:

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi,
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi,
- (3) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha,
- (4) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota
- (5) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- (6) Peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6.3.1 Strategi Perwujudan permukiman layak dan sehat

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Arah strategi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Provinsi dalam

kerangka kebijakan pembangunan dan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, serta rencana sektor lainnya adalah mendukung tersedianya pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan hunian yang terjangkau serta ditunjang dengan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Provinsi.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, merupakan salah satu layanan dasar dalam rangka penanggulangan bencana baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Dengan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang meliputi rehabilitasi rumah, pembangunan kembali, pembangunan baru/relokasi dan bantuan akses rumah sewa layak huni, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 6.3 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

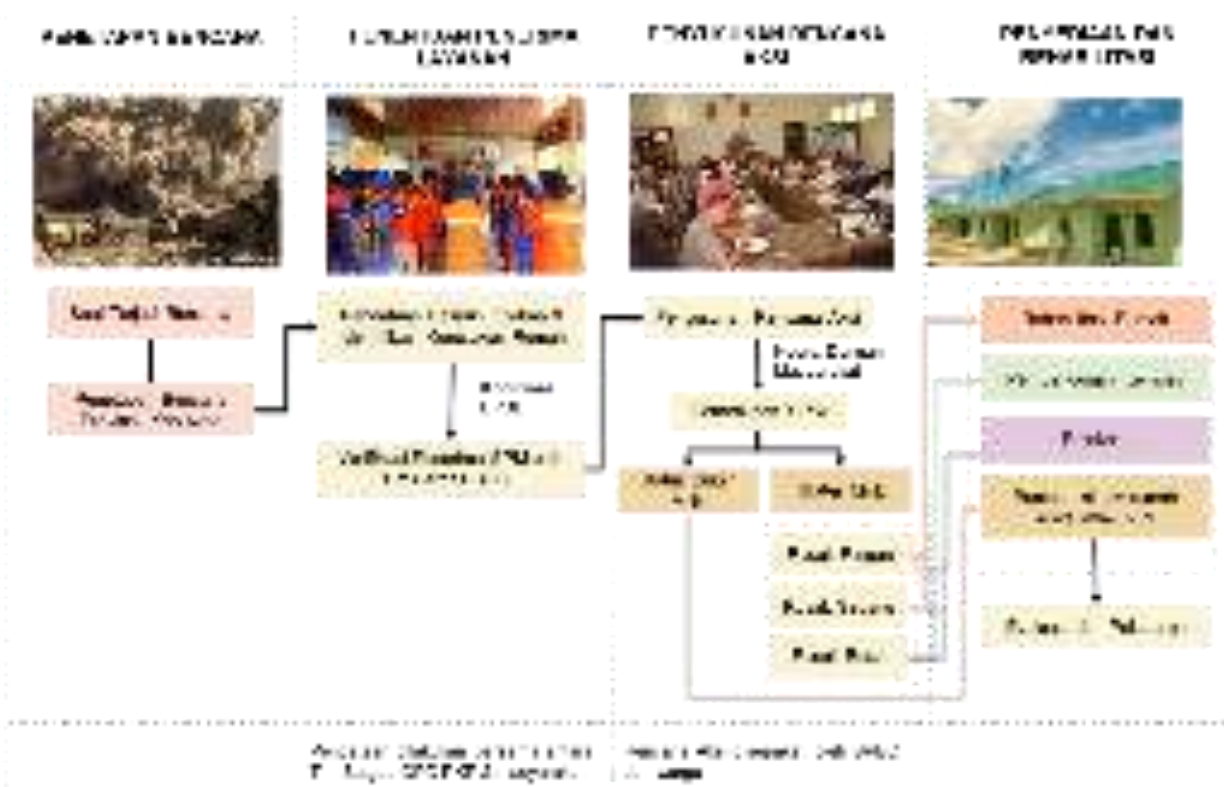
Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

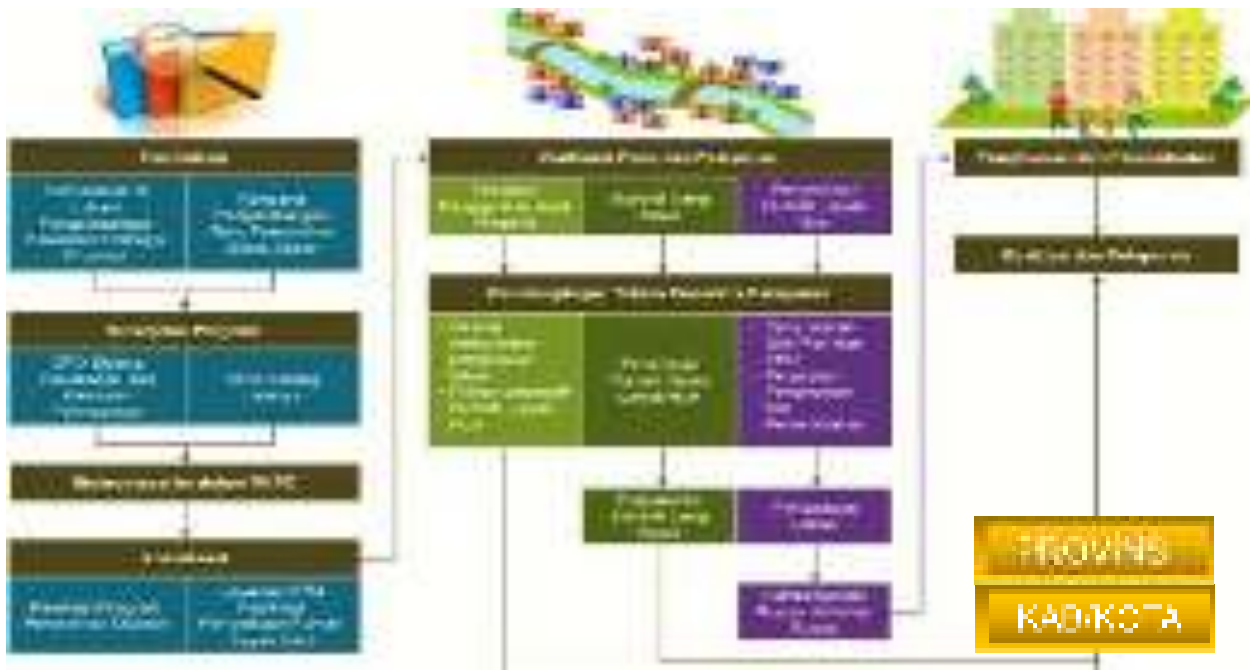
bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
- e) Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:



Gambar 6.4 Penerapan SPM Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Untuk tahapan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 6.5 Penerapan SPM tahapan dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Tabel 6.6 Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Penyiapan Regulasi	Penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana, dan penetapan status bencana tingkat Daerah Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Gubernur tentang status darurat bencana, ▪ Keputusan Gubernur tentang Status bencana Skala Provinsi..
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Pedoman Teknis Rumah Layah Huni (RLH) ▪ Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan, ▪ Pembentukan Tim Satgas Bencana, ▪ Pembentukan Tim Pendamping pelaksanaan rehabilitasi rumah, ▪ Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan, ▪ Sosialisasi Pedoman Teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ Sukarelawan tanggap bencana / Fasilitator, ▪ Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme akses perumahan KPR-FPLP, ▪ Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana, ▪ Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus.

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana, Identifikasi lahan lahan potensial sebagai tempat relokasi, Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana, Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus.
	Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Site Plan/ DED bagi rumah korban bencana, Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang, Pembangunan kembali rumah rusak berat, Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana,
	Pendistribusian dan Serah Terima rumah bagi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi, Penatausahaan Serah terima rumah bagi korban bencana provinsi.

2. Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terkena relokasi dilekan melalui fasilitasi pendampingan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis. Alur dari grafik fasilitasi dan bantuan teknis dapat dilihat pada grafik dan table strategi berikut :



Gambar 6.6 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah

Tabel 6.7 Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Penyiapan Regulasi.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Gubernur tentang Relokasi Masyarakat yang terdampak Program Pemerintah daerah Provinsi, ▪ Pembentukan Tim Apraisal untuk penghitungan asset tanah dan bangunan.
Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Sosialisasi dan persiapan penyediaan RLH bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan, ▪ Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan, ▪ Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan dan Mekanisme akses perumahan KPR-FPLP.
	Pendataan Penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi perumahan dilokasi yang terkena relokasi program daerah provinsi,, ▪ Identifikasi lahan lahan potensial sebagai tempat relokasi , ▪ Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi masyarakat terkena relokasi.
	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah d Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Site Plan/ DED Kawasan pemukiman baru , ▪ Pembangunan Rumah khusus (RLH) beserta PSU Umum ▪ Operasional dan Pemeliharaan lingkungan perumahan.
	Pendistribusian dan Serah Terima rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, ▪ Penatausahaan Serah terima rumah bagi masyakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 6.8 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Penyiapan Regulasi	Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kewenangan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan dengan Keputusan Gubernur
	Penyusunan grand desain penanganan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan program pengurangan kumuh, ▪ Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Pencegahan dan Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas rumah warga , - Peningkatan jalan lingkungan - Pembuatan Darainase Lingkungan - Menyiapkan PJU - Penyiapan IPAL komunal ▪ Peremajaan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh: <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi tanah, - Pembangunan Rumah Layak Huni. ▪ Pembangunan PSU Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan lingkungan - Pembuatan Darainase Lingkungan - Menyiapkan PJU - Penyiapan SPAM - Penyiapan IPAL komunal - Penyiapan Ruang Terbuka Hijau - Penyiapan Proteksi Kebakaran ▪ Pemukiman kembali : <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah - Pembangunan RLH ▪ Pembangunan PSU Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan akses jalan - Pembuatan jalan lingkungan - Pembuatan Darainase Lingkungan - Menyiapkan PJU - Penyiapan SPAM - Penyiapan IPAL komunal - Penyiapan Ruang Terbuka Hijau - Penyiapan Proteksi Kebakaran
	Peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU umum.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsolidasi tanah, dan ▪ Pembangunan RLH baik vertikal maupun horizontal.
	Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pasca peningkatan kualitas .

Tabel 6.9 Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan grand desain penanganan kawasan Lintas Kab./Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,
	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas rumah warga agar menjadi Layak Huni, - Peningkatan jalan lingkungan - Pembuatan Drainase Lingkungan - Menyiapkan PJU - Penyiapan IPAL komunal ▪ Peremajaan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh: <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi tanah, - Pembangunan Rumah Layak Huni, Pembangunan PSU: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan lingkungan - Pembuatan Drainase Lingkungan - Menyiapkan PJU - Penyiapan SPAM - Penyiapan IPAL komunal - Penyiapan Ruang Terbuka Hijau - Penyiapan Proteksi Kebakaran
	Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Tabel 6.10 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

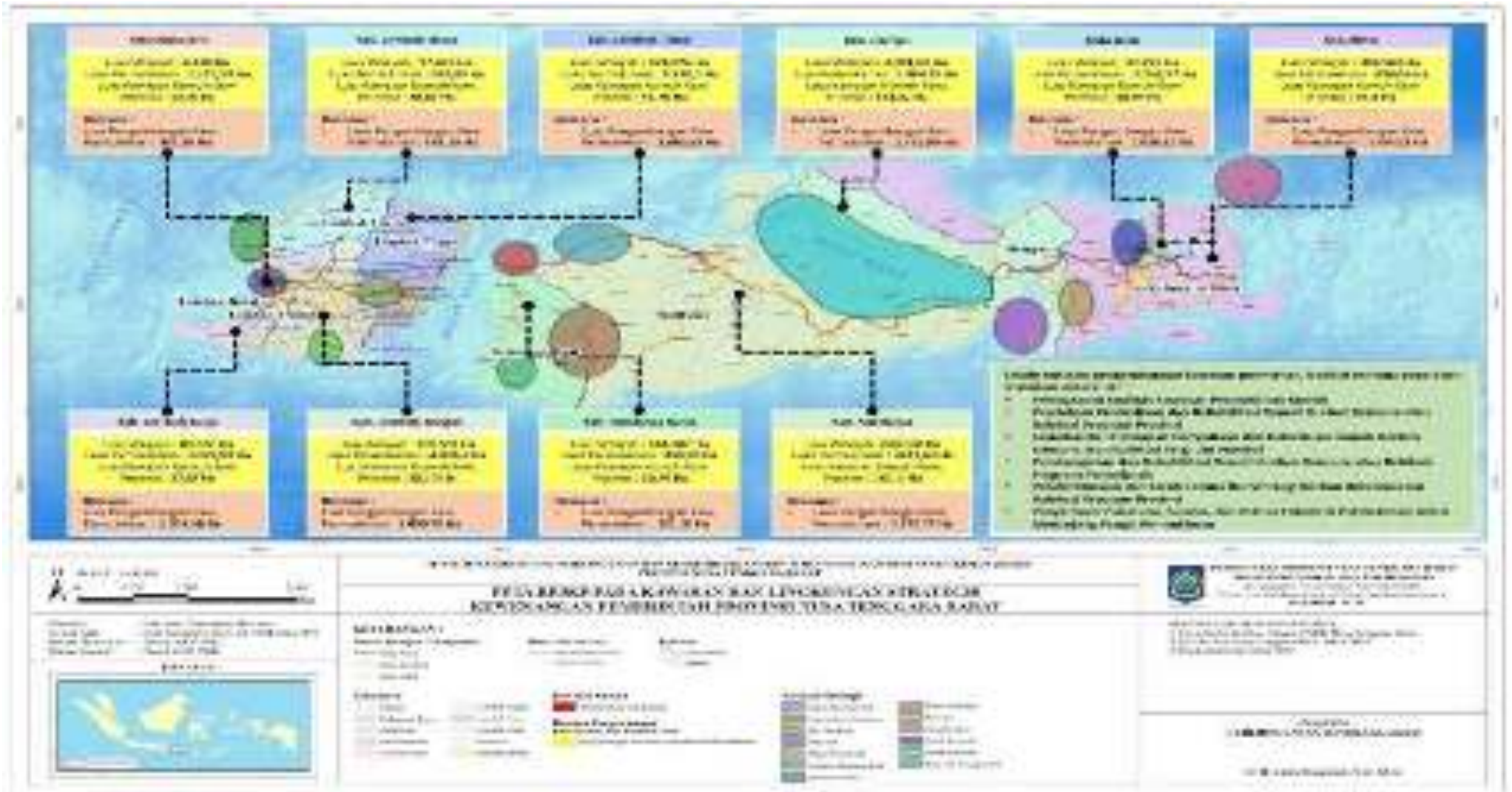
Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Site Plan/ DED Kawasan permukiman. ▪ Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman, meliputi:

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jalan lingkungan: - Pembuatan Drainase Lingkungan - Menyiapkan Penerangan Jalan Umum - Penembokan Kuburan umum - Penyiapan Sistem Drainase air limbah domestic. - Penyiapan PSU untuk Ruang Terbuka Hijau - Penyiapan Fire Hidrant (Proteksi Kebakaran). • Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Umum Permukiman.

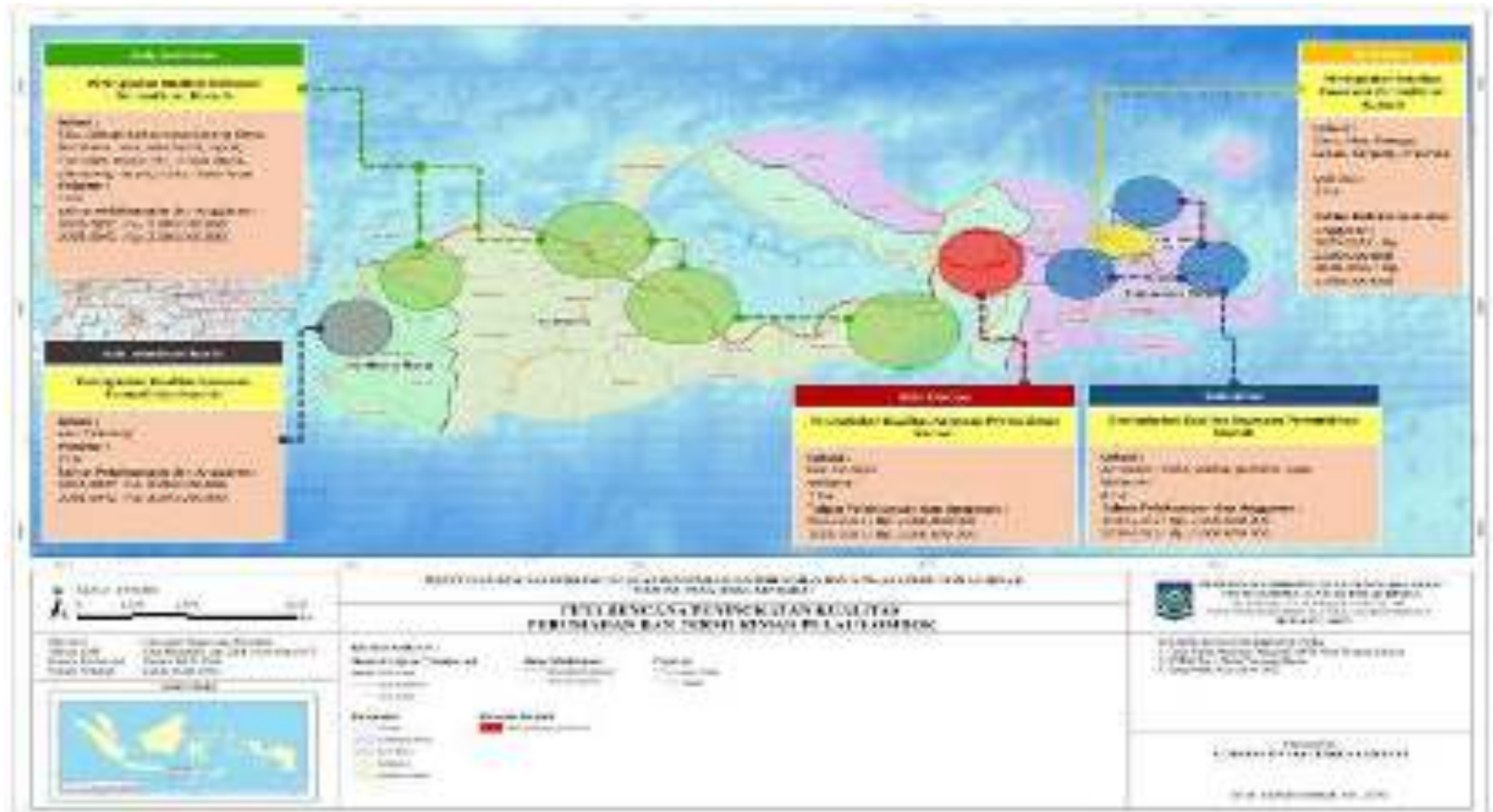
Tabel 6.11 Peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
	Peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah.

Peta 6.1 Peta RP3KP Pada Kawasan Dan Lingkungan Strategis Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB



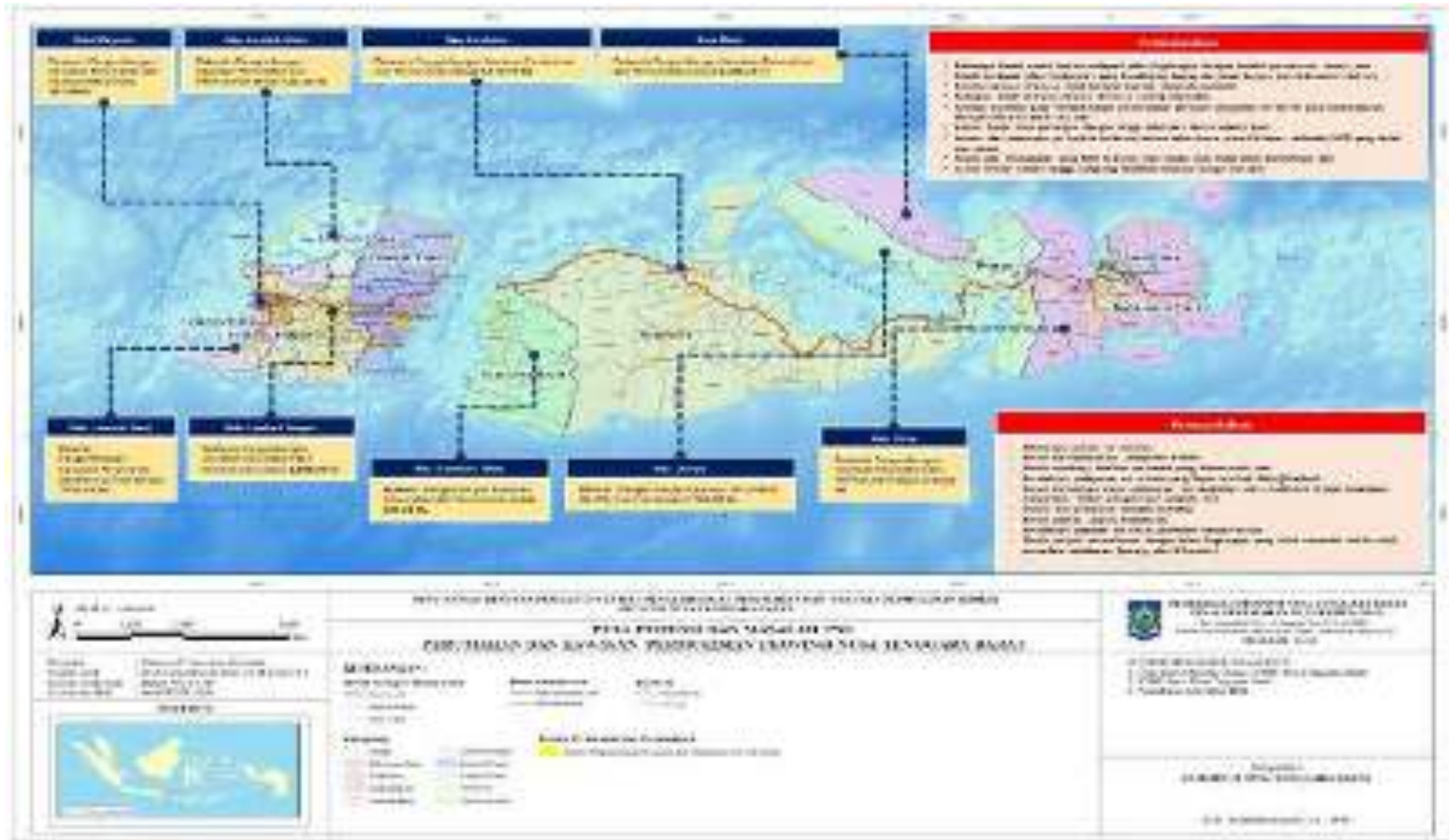
Peta 6.3 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Pulau Sumbawa



Peta 6.4 Arahan PSU



Peta 6.5 Potensi dan Masalah PSU





LAMPIRAN

**INDIKASI PROGRAM DAN MEMORANDUM
PROGRAM**

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Prov NTB		Orang	270	499,24	250	491,96	250	491,96	250	491,96	1.020,00	1.975,11
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Prov NTB		Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Prov NTB		Orang	320	598,39	300	556,45	300	556,45	300	556,45	1.220,00	2.267,73
4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Prov NTB		Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Prov NTB		Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Prov NTB		Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah													
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Prov NTB		Unit Rumah	140	4.396,30	100	3.273,86	100	3.273,86	100	3.273,86	440,00	14.217,88
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Desain (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Dokumen		-	5	3.125,00	5	3.125,00	5	3.125,00	15,00	9.375,00
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Prov NTB		Ha		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Prov NTB		Unit Rumah	40	2.949,66	50	3.687,07	50	3.687,07	50	3.687,07	190,00	14.010,87

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Unit Rumah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Unit Rumah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Prov NTB		Unit Rumah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi			Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi			Unit Rumah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Prov NTB		Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Prov NTB		Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penata Usahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Prov NTB		Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Prov NTB		Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Program Kawasan Permukiman					272.288,06		346.069,86		346.069,86		346.069,86		1.310.497,65
A	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Dokumen	4	800	5	1.000	5	1.000	5	1.000		3.800,00

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
B	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
1	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha													
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Barat	Kec. Kuripan Kawasan Tongkeke, Kec. Labuapi Kawasan Perampuan Timur, Perampuan Barat	37,64	Ha	9,41	9.410,00	9,41	9.410,00	9,41	9.410,00	9,41	9.410,00	-	37.640,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Tengah	Kec. Pujut desa Mertak Kawasan Sokat, Kec. Pringgrata Kawasan Pemepek	29,19	Ha	7,30	7.297,50	7,30	7.297,50	7,30	7.297,50	7,30	7.297,50	-	29.190,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Timur	Kec. Labuhan Haji , Kawasan Dsn. Kokok Daya, Timba Timuk, Selungkep, Timba Daya, Kec. Sembalun , Kawasan Sembalun Timba Gading, Bilok Petung Kec. Sakra Barat Kawasan Bungtiang, Kec. Wanasaba Kawasan Lingkungan Bebidas 4	64,68	Ha	16,17	16.170,00	16,17	16.170,00	16,17	16.170,00	16,17	16.170,00	-	64.680,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Sumbawa	Kec. Labuan Badas Kawasan Karang Dima, Kec. Sumbawa Kawasan Bugis, Kec. Alas Kawasan Pulau Bungin, Kec. Alas Barat kawasan Gontar , Kec. Lopok Kawasan Langam , Kec. Maronge Kawasan Maronge, Kec. Moyo Hilir Kawasan Moyo Mekar Kec. Moyo Utara Kawasan Sebewe Kec. Plampang Kawasan Plampang, Kec. Terano Kawasan Labuan Aji , Kec. Unter Iwes Kawasan Nijang, Uma Beringin, Kec. Utan Kawasan Jorok, Kec. Moyo Hulu Kawasan Sampe, Kec. Lenangguar Kawasan Lenangguar, Tetebal	200,82	Ha	50,21	50.205,00	50,21	50.205,00	50,21	50.205,00	50,21	50.205,00	-	200.820,00

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Dompu	Kec. Woja , Kawasan Tolomba'a, Meciangi II, Doronawa II, Madarutu I. Kec. Pekat Kawasan Kaldera I, Kaldera II, Kaldera III.	91,9	Ha	22,98	22.975,00	22,98	22.975,00	22,98	22.975,00	22,98	22.975,00	-	91.900,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Bima	Kec. Sape Kawasnae, Sangia , Kec. Bolo Kawasan Darussalam, Kec. Woha Kawasan Dadibou, Kec. Palibelo Kawasan Panda	63,4	Ha	15,85	15.850,00	15,85	15.850,00	15,85	15.850,00	15,85	15.850,00	-	63.400,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Sumbawa Barat	Kec.Taliwang Kawasan Menala	10,44	Ha	2,61	2.610,00	2,61	2.610,00	2,61	2.610,00	2,61	2.610,00	-	10.440,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Utara	Kec. Pemenag Kawasan Malaka, Kec.Tanjung Kawasan Sigar Penjalim, Sokong, Kec.Bayan , Kawasan Loloan, Senaru Kec.Gangga Kawasan Sambik Bangkol	78,07	Ha	19,52	19.517,50	19,52	19.517,50	19,52	19.517,50	19,52	19.517,50	-	78.070,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Mataram	Kec.Sandubaya kawasan Turida	12,04	Ha	3,01	3.010,00	3,01	3.010,00	3,01	3.010,00	3,01	3.010,00	-	12.040,00
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Bima	Kec. Asakota dan Kec Rasanae Barat kawasan Ranggo (Tato, Gindi, Ranggo, Nae, Sarae, Gili Panda) Kec. Mpunda dan Kec. Raba Kawasan Sambimaci (Mande I, Waki, Bedi, Samporo, Sambinae, Rabangodu Selatan)	24,65	Ha	6,16	6.162,50	6,16	6.162,50	6,16	6.162,50	6,16	6.162,50	-	24.650,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Unit Rumah	2066	56.108,73	2750	86679,3395	2750	86679,3395	2750	86679,3395	10.316,00	316.146,75
4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Dokumen	4	467,92	5	670,98372	5	670,98372	5	670,98372	19,00	2.480,88

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali	Prov NTB		Hektar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Hektar		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemadangan Ruman Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Unit Rumah	1100	61.703,91	1750	104512,038	1750	104512,038	1750	104512,038	6.350,00	375.240,02

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IV	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman													
A	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah													
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		1	Dokumen	4	1.000,00	5	1.250,00	5	1.250,00	5	1.250,00		4.750,00

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN														
I	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					20.075,00		20.075,00		20.075,00		20.075,00		80.300,00
1	Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.	Kabupaten/Kota	1.107,83	Ha	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	1.067,83	40.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten/Kota		ha	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000		40.000,00
3	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten/Kota		Dokumen	50	37,50	50	37,50	50	37,50	50	37,50		150,00
4	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten/Kota		Dokumen	50	37,50	50	37,50	50	37,50	50	37,50		150,00
II	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)					-		-		-		-		-
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten/Kota		Ha										
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten/Kota		Ha										
III	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh					100.500,00		100.500,00		100.500,00		100.500,00		402.000,00
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00		200.000,00

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00		200.000,00
	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten/Kota		Kali	50	500,00	50	500,00	50	500,00	50	500,00		2.000,00
IV	Program Pengembangan Perumahan					5.200,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00		20.800,00
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	10	2.500,00	10	2.500,00	10	2.500,00	10	2.500,00		10.000,00
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	10	2.500,00	10	2.500,00	10	2.500,00	10	2.500,00		10.000,00
	Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	500	100,00	500	100,00	500	100,00	500	100,00		400,00
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	500	100,00	500	100,00	500	100,00	500	100,00		400,00
V	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					-		-		-		-		-

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			(Dalam Juta)
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Program Pengembangan Perumahan					185.000,00		185.000,00		185.000,00		185.000,00		740.000,00
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		Dokumen	50	5.000,00	50	5.000,00	50	5.000,00	50	5.000,00		20.000,00
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		Dokumen	50	5.000,00	50	5.000,00	50	5.000,00	50	5.000,00		20.000,00
	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	2.500	125.000,00	2.500	125.000,00	2.500	125.000,00	2.500	125.000,00		500.000,00
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kabupaten/Kota		Unit Rumah	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00	2.500	50.000,00		200.000,00

Matriks Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
BALAI PELAKSANA PRASARANA WILAYAH PROVINSI NTB (BPPW)						5.467.919,55		-		-		-		5.467.919,55
SEKTOR PERMUKIMAN						4.867.721,00		-		-		-		4.867.721,00
I	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung													
A	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman													
1	Pengembangan Kawasan Permukiman	Prov NTB		Ha	29	4.782.071,00			-		-		-	4.782.071,00
2	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Prov NTB		Ha	57	85.650,00			-		-		-	85.650,00
SEKTOR AIR MINUM						274.478,51		-		-		-		274.478,51
II	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak													-
B	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													-
1	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Prov NTB		liter/detik	57	100.001,00			-		-		-	100.001,00
2	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Prov NTB												-
3	Optimalisasi SPAM Kecamatan Pekat kabupaten Dompu	Dompu		Paket	1	2.592,68			-		-		-	2.592,68
4	Optimalisasi SPAM Kawasan Terano Simoang Boak Kabupaten Sumbawa	Sumbawa		Paket	1	4.605,18			-		-		-	4.605,18
5	Optimalisasi SPAM Kawasan Batu Putih Kecamatan Sekotong	Lombok barat		Paket	1	1.359,42			-		-		-	1.359,42
6	Optimalisasi SPAM Kawasan Sekongkang Bawah dan Kawasan Brang Ene	Sumbawa		Paket	1	4.190,95			-		-		-	4.190,95
7	Pengembangan SPAM Kawasan PPI Awang (Lanjutan II) Kecamatan Pujut	Lombok Tengah		Paket	1	6.934,39			-		-		-	6.934,39
8	Optimalisasi SPAM Kawasan Semut II Kabupaten Lombok Tengah	Lombok Tengah		Paket	1	4.182,45			-		-		-	4.182,45
9	Optimalisasi SPAM IKK Rasanæ Timur Kawasan Lelamase Kota Bima	Kota Bima		Paket	1	4.000,00			-		-		-	4.000,00
10	Optimalisasi SPAM Kawasan Nungga Kota Bima	Kota Bima		Paket	1	3.293,44			-		-		-	3.293,44
11	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	Prov NTB		SR	9.206	101.268,00			-		-		-	101.268,00
12	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	Prov NTB		SR	3.823	42.051,00			-		-		-	42.051,00

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Database pada Tahun Awal Perencanaan (awal 2022)	Satuan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode (2042)	Total Anggaran (Rp) (Dalam Juta)
					2023-2027		2028-2032		2033-2037		2038-2042			
					Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SEKTOR SANITASI						308.651,30		-		-		-		308.651,30
III	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak													
C	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	Prov NTB		KK	6.044	44.459,00		-		-		-		44.459,00
2	Optimalisasi Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Kawasan Masbagik	Lombok Timur		Paket	1	4.393,32		-		-		-		4.393,32
3	Optimalisasi IPAL Permukiman Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Kawasan Perumnas Tampar-Ampar Kabupaten Lombok Tengah	Lombok Tengah		Paket	1	4.499,98		-		-		-		4.499,98
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	Prov NTB		KK	3.376	30.382,00		-		-		-		30.382,00
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	Prov NTB		KK	11.838	224.917,00		-		-		-		224.917,00
SEKTOR BINA PENATAAN BANGUNAN						17.068,74		-		-		-		17.068,74
IV	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung													
E	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan													
1	Penataan Kawasan Bike Park Meninting Senggigi Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat		Paket	1	17.068,74		-		-		-		17.068,74
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA 1 (BP2PNT1)						488.466,00		-		-		-		488.466,00
I	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI					488.466,00		-		-		-		488.466,00
1	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Prov NTB		Unit Rumah	6.830	266.906,00		-		-		-		266.906,00
2	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	Prov NTB		Unit Rumah	80	18.640,00		-		-		-		18.640,00
3	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	Prov NTB		Unit	320	105.485,00		-		-		-		105.485,00
4	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	Prov NTB		Tower	15	16.274,00		-		-		-		16.274,00
5	Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Prov NTB		Unit Rumah	5.957	81.161,00		-		-		-		81.161,00

MEMORANDUM PROGRAM

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NTB							319.483,32									386.411,71				450.404.489,04					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						2.595			4.271				4.559			4.875			5.224					
A	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																								
1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	349.617.400	349,62	1	384.579.140	384,58	1	423.037.054	423,04	1	465.340.759	465,34	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Terealisasi	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	449.338.000	449,34	1	494.271.800	494,27	1	543.698.980	543,70	1	598.068.878	598,07	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
3	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	460.454.000	460,45	1	506.499.400	506,50	1	557.149.340	557,15	1	612.864.274	612,86	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
4	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	307.024.000	307,02	1	337.726.400	337,73	1	371.499.040	371,50	1	408.648.944	408,65	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
5	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	454.617.400	454,62	1	500.079.140	500,08	1	550.087.054	550,09	1	605.095.759	605,10	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
6	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Provinsi NTB	5	Dokumen	1	227.874.005	227,87	1	201.400.500	201,40	1	221.540.550	221,54	1	243.694.605	243,69	1	268.064.066	268,06	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
7	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Provinsi NTB	5	Dokumen	1	222.969.874	222,97	1	307.024.000	307,02	1	337.726.400	337,73	1	371.499.040	371,50	1	408.648.944	408,65	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
8	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Provinsi NTB	4	Dokumen				1	191.597.400	191,60	1	210.757.140	210,76	1	231.832.854	231,83	1	255.016.139	255,02	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
B	Sosialisai dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																								
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Provinsi NTB	270	Orang	70	2.230.835	156	50	1.478.464	74	50	1.626.310	81	50	1.788.941	89	50	1.967.836	98	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Provinsi NTB		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Provinsi NTB	320	Orang	80	2.629.306	210,34	60	1.393.553	84	60	1.532.909	92	60	1.686.200	101	60	1.854.819	111	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Provinsi NTB		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi NTB		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Provinsi NTB		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
7	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Provinsi NTB		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
C	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah																								
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi NTB	140	Unit Rumah	60	29.620.145	1.777	20	32.738.600	654,77	20	32.738.600	654,77	20	32.738.600	654,77	20	32.738.600	654,77	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Desain (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi NTB		Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Provinsi NTB	40	Unit Rumah	-	-	-	10	73.741.400	737,41	10	73.741.400	737,41	10	73.741.400	737,41	10	73.741.400	737,41	-	-	V	-	-	Disperkim Provinsi NTB	
5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	Disperkim Provinsi NTB	
6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	Disperkim Provinsi NTB	
7	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Provinsi NTB		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Provinsi NTB		Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																									
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	Disperkim Provinsi NTB	
2	Penata Usahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Provinsi NTB		Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	Disperkim Provinsi NTB	

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Barat		9,41	Ha	1,88	1.882.000.000	1.882	1,88	1.882.000.000	1.882	2,35	2.352.500.000	2.353	2,35	2.352.500.000	2.353	2,35	2.352.500.000	2.353	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Tengah		7,30	Ha	1,46	1.459.500.000	1.460	1,46	1.459.500.000	1.460	1,46	1.459.500.000	1.460	1,46	1.459.500.000	1.460	1,46	1.459.500.000	1.460	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Timur		16,17	Ha	3,23	3.234.000.000	3.234	3,23	3.234.000.000	3.234	3,23	3.234.000.000	3.234	3,23	3.234.000.000	3.234	3,23	3.234.000.000	3.234	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Sumbawa		50,21	Ha	10,04	10.041.000.000	10.041	10,04	10.041.000.000	10.041	10,04	10.041.000.000	10.041	10,04	10.041.000.000	10.041	10,04	10.041.000.000	10.041	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Dompu		22,98	Ha	4,60	4.595.000.000	4.595	4,60	4.595.000.000	4.595	4,60	4.595.000.000	4.595	4,60	4.595.000.000	4.595	4,60	4.595.000.000	4.595	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Bima		15,85	Ha	3,17	3.170.000.000	3.170	3,17	3.170.000.000	3.170	3,17	3.170.000.000	3.170	3,17	3.170.000.000	3.170	3,17	3.170.000.000	3.170	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Sumbawa Barat		2,61	Ha	0,52	522.000.000	522	0,52	522.000.000	522	0,52	522.000.000	522	0,52	522.000.000	522	0,52	522.000.000	522	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kab. Lombok Utara		19,52	Ha	3,90	3.903.500.000	3.904	3,90	3.903.500.000	3.904	3,90	3.903.500.000	3.904	3,90	3.903.500.000	3.904	3,90	3.903.500.000	3.904	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Mataram		3,01	Ha	0,60	602.000.000	602	0,60	602.000.000	602	0,60	602.000.000	602	0,60	602.000.000	602	0,60	602.000.000	602	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh di Kota Bima		6,16	Ha	1,23	1.232.500.000	1.233	1,23	1.232.500.000	1.233	1,23	1.232.500.000	1.233	1,23	1.232.500.000	1.233	1,23	1.232.500.000	1.233	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB	2.066	Unit Rumah	166	29.718.374,70	4.933,25	400	22.189.911	8.876	450	24.655.457	11.095	500	27.737.389	13.868,69	550	31.519.759,82	17.335,87						

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Dokumen	-	-	-	1	100.824.000	100,82	1	110.906.400	111	1	121.997.040	122	1	134.196.744	134						
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB
6	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	Prov NTB		Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB
7	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB
8	Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB		Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB
9	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Prov NTB	1.100	Unit Rumah	0	-	-	200	53.510.164	10.702	250	53.510.163	13.378	300	55.739.753	16.722	350	59.721.165	20.902	-	-	-	-	-	Disperkim Provinsi NTB

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Program	Prov NTB			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
IV	Peningkatan Pelayanan					250				250				250					250						
A	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan																								
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Prov NTB	4	Dokumen	0	250.000.000	250	1	250.000.000	250	1	250.000.000	250	1	250.000.000	250	1	250.000.000	250	--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB

MEMORANDUM PROGRAM

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK C	APBD TK U	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA					967.546,05			562.938,39			665.150,40			648.323,93			565.312,34								
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK BARAT					6.725			3.450			5.875			6.375			7.025								
I	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																								
A	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																								
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Unit	267	19.250.936	5.140	50	20.000.000	1.000	75	20.000.000	1.500	100	20.000.000	2.000	150	20.000.000	3.000	V			V	V	Disperki m Kabupa ten/kot a
II	Program Pengembangan Perumahan																								
A	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																								
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Unit	41	38.658.537	1.585	40	35.000.000	1.400	50	35.000.000	1.750	50	35.000.000	1.750	40	35.000.000	1.400	V			V		Disperki m Kabupa ten/kot a
I	Program Kawasan Permukiman																								
A	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																								
1	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			Unit	-	-	-	30	35.000.000	1.050	75	35.000.000	2.625	75	35.000.000	2.625	75	35.000.000	2.625				V		Disperki m Kabupa ten/kot a

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH							184.024			74.324			74.074			73.824			-							
						110.000			-				-			-			-							
1	Pembangunan Jalan/Jembatan Pariwisata	Mekarsari – Pantai Mawi			1	3.000.000.000	3.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
2	Pembangunan Jalan/Jembatan Pariwisata	Hortypark- Danau Biru			1	2.500.000.000	2.500													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
3	Pembangunan Jalan/Jembatan Pariwisata	Wajegeseng-DTW Tandung- Andung			1	1.000.000.000	1.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
4	Pembangunan Jalan/Jembatan Pariwisata	DTW Sintung			1	1.000.000.000	1.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
5	Pembangunan Homestay 50 Dewi x 10 unit (Rp150.000.000)	Lombok Tengah			10	3.750.000.000	37.500													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
6	Pengembangan Amenitas di Kawasan DTW Gunung Tunak	Desa Mertak			1	5.000.000.000	5.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
7	Pembangunan Gili Perigi	Desa Mertak			1	5.000.000.000	5.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
8	Fasilitas PAM Wisata dan Pokdarwis	Kecamatan Pujut			1	2.500.000.000	2.500													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
9	Fasilitas kebersihan (TPS dan Armada)	50 Dewi			1	2.500.000.000	2.500													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
10	Penataan Pinggir Pantai/Lapak Pedagang Pantai Mawun	Pantai Mawun Desa Mekar Sari			1	5.000.000.000	5.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
11	Penataan Lapak PKL Pinggir Pantai Kuta	Pantai Kuta Desa Kuta			1	2.000.000.000	2.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
12	Penataan Kawasan Lingkar Bandara dan Desa Wisata Tanak Awu	Desa Tanak Awu			1	40.000.000.000	40.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
13	Penataan Koridor Ruas Kuta - Mawun	Desa Kuta dan Mawun			1	3.000.000.000	3.000													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
14	Peningkatan Kualitas RTLH sebagai Sarana Hunian dan Usaha Wisata (Sarhunta) di Kawasan Permukiman Kumuh depan sirkuit Mandalika	Desa Lingkar KEK			200		-													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	
15	Peningkatan Kualitas RTLH di 4 (empat) desa penyangga KEK Mandalika	4 Desa Penyangga KEK Mandalika			400		-													V	-	-	-	-	Kementr ian PUPR	

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	Pembangunan Rumah Susun Umum Sewa (Rusunawa) untuk pekerja KEK Mandalika	Desa Ngolang			1															V	-	-	-	-	Kemertian PUPR
I	Program Kawasan Permukiman						4.500			4.750			4.500			4.250			-						
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		40	Ha	10	200.000.000,00	2.000,00	10	200.000.000	2.000,00	10	200.000.000,00	2.000,00	10	200.000.000,00	2.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Kabupaten/kota
2	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		40	Ha	10	200.000.000,00	2.000,00	10	200.000.000	2.000,00	10	200.000.000,00	2.000,00	10	200.000.000,00	2.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Kabupaten/kota
3	Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan di bawah 10 (sepuluh) Ha		4	Dokumen	1	500.000.000,00	500,00	1	750.000.000	750,00	1	500.000.000,00	500,00	1	250.000.000,00	250,00				--	--	--	V	--	Disperkim Kabupaten/kota
II	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)						28.264,31			28.264,31			28.264,31			28.264,31			-						
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																			--	--	--	V	--	Disperkim Kabupaten/kota
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian			Lokasi	150	188.428.756,76	28.264,31	150	188.428.757	28.264,31	150	188.428.756,76	28.264,31	150	188.428.756,76	28.264,31				--	--	--	V	--	Disperkim Kabupaten/kota
III	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh						20.100,00			20.100,00			20.100,00			20.100,00			-						
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota (Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani)		2.000	Unit	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha (Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani)		2.000	Unit	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		40	Dokumen	10	10.000.000,00	100,00	10	10.000.000,00	100,00	10	10.000.000,00	100,00	10	10.000.000,00	100,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah	
IV	Program Pengembangan Perumahan						960,00			960,00			960,00			960,00										
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12	Unit	3	150.000.000,00	450,00	3	150.000.000	450,00	3	150.000.000,00	450,00	3	150.000.000,00	450,00				--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12	Unit	3	150.000.000,00	450,00	3	150.000.000	450,00	3	150.000.000,00	450,00	3	150.000.000,00	450,00				--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB	
	Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		1.000	Unit	250	120.000,00	30,00	250	120.000,00	30,00	250	120.000,00	30,00	250	120.000,00	30,00										
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan		4	Unit	1	30.000.000,00	30,00	1	30.000.000,00	30,00	1	30.000.000,00	30,00	1	30.000.000,00	30,00				--	--	V	--	--	Disperkim Provinsi NTB	
V	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						-			50,00			50,00			50,00										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		30	Laporan	-	-	-	10	5.000.000,00	50,00	10	5.000.000,00	50,00	10	5.000.000,00	50,00				-	-	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah
VI	Program Pengembangan Perumahan						20.200,00			20.200,00			20.200,00			20.200,00										
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		4	Dokumen	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000,00	100,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah	
2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		4	Dokumen	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000,00	100,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah	
3	Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota		2.000	Unit	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah	
4	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		2.000	Unit	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00	500	20.000.000,00	10.000,00				--	--	--	V	--	Disperkim Lombok Tengah	

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		100	Unit	25	50.000.000	1.250,00	25	50.000.000	1.250,00	25	50.000.000	1.250,00	25	50.000.000	1.250,00				V	V	V	V	V	Perkim Lotim
4	Peningkatan jaringan jalan		8	Km	2	500.000.000	1.000,00	2	500.000.000	1.000,00	2	500.000.000	1.000,00	2	500.000.000	1.000,00				V	V	V	V	V	Perkim Lotim
5	Peningkatan drainase permukiman		20	Km	5	350.000.000	1.750,00	5	350.000.000	1.750,00	5	350.000.000	1.750,00	5	350.000.000	1.750,00				V	V	V	V	V	Perkim Lotim
6	Penataan ruang terbuka hijau		7	Lokasi	3	200.000.000	600,00	2	200.000.000	400,00	1	200.000.000	200,00	1	200.000.000	200,00				V	V	V	V		Perkim Lotim
7	Rehab dan peningkatan kualitas Instalasi pengolahan air limbah permukiman		20	Lokasi	5	400.000.000	2.000,00	5	400.000.000	2.000,00	5	400.000.000	2.000,00	5	400.000.000	2.000,00				V	V	V	V		Perkim Lotim
8	Pendampingan PISEW		4	Kegiatan	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00				V		V	V		Perkim Lotim
9	Pendampingan Kotaku		4	Kegiatan	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00				V		V	V		Perkim Lotim
10	Monitoring, evaluasi Pokja PKP		4	Kegiatan	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00				V		V	V		Perkim Lotim

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB		
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA			
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT								12.237		14.559		14.645		14.645		-											
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.303,39				3.528,09				3.615,04						-							
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Dokumen	2	81.481.000,00	162,96	3	100.000.000	300,00	3	100.000.000,00	300,00	3	100.000.000,00	300,00					--	--	--	V	--	Disperkim KSB	
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			Meter	5.907	104.678,12	618,33	800	869.565,22	695,65	900	869.565,22	782,61	900	869565,2174	782,61						--	--	--	V	--	Disperkim KSB
3	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			Meter	2.072	734.528,24	1.522,09	1.300	1.948.027,69	2.532,44	1.300	1.948.027,69	2.532,44	1300	1948027,692	2.532,44						--	--	--	V	--	Disperkim KSB
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					8.234,26				9.555,44				9.555,44						-							
A	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																										
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Meter	10.014	822.247,87	8.234,26	2.304	4.146.684,07	9.555,44	2.304	4.146.684,07	9.555,44	2304,35715	4146684,066	9.555,44						--	--	--	V	--	Disperkim KSB
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					144,18				325,00			325,00		325,00					-							
A	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																										
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Unit	6	24.029.670,00	144,18	15	10.000.000,00	150,00	15	10.000.000,00	150,00	15	10.000.000,00	150,00						--	--	--	V	--	Disperkim KSB
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Unit			-	5	35.000.000,00	175,00	5	35.000.000,00	175,00	5	35.000.000,00	175,00						--	--	--	V	--	Disperkim KSB

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
IV	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1.554,82			800,00			800,00			800,00			-							
A	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						-			-			-			-										
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			Dokumen	3	148.170.833,33	444,51	3	100.000.000	300,00	3	100.000.000,00	300,00	3	100.000.000,00	300,00				--	--	--	V	--	Disperkim KSB	
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Unit	37	30.008.366,49	1.110,31	25	20.000.000,00	500,00	25	20.000.000,00	500,00	25	20.000.000,00	500,00				--	--	--	V	--	Disperkim KSB	
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						-			350,00			350,00			350,00			-							
A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						-			-			-			-										
1	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat			Unit			-	75	2.000.000,00	150,00	75	2.000.000,00	150,00	75	2.000.000,00	150,00				--	--	--	V	--	Disperkim KSB	
2	Pembangunan Rumah Khusus			Unit			-	2	100.000.000	200,00	2	100.000.000,00	200,00	2	100.000.000,00	200,00				--	--	--	V	--	Disperkim KSB	

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA								13.770,60		6.371,54			6.700,20			7.149,19			7.632,13							
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						3.024,09			127,33			195,79			204,55			213,75							
A	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																									
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen	1	29.995.050,00	30,00	1	11.910.050,00	11,91	1	12.505.552,50	12,51	1	13.130.830,13	13,13	1	13.787.371,63	13,79							
2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen	1	44.998.050,00	45,00	1	22.063.050,00	22,06	1	23.166.202,50	23,17	1	24.324.512,63	24,32	1	25.540.738,26	25,54							
B	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																									
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka melawan Tanggap Bencana			Orang	2	12.499.739,00	25,00	2	23.307.239,00	46,61	2	24.472.600,95	48,95	2	25.696.231,00	51,39	2	26.981.042,55	53,96							
C	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																									
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Unit Rumah	1.258	1.247.603,34	1.569,49	24	1.027.958,33	24,67	50	518.091,00	25,90	50	543.995,55	27,20	50	571.195,33	28,56							
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Unit Rumah	17	78.212.352,94	1.329,61	-			10	4.149.852,00	41,50	10	4.357.344,60	43,57	10	4.575.211,83	45,75							
3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Unit Rumah				25	581.160,00	14,53	25	610.218,00	15,26	25	640.728,90	16,02	25	672.765,35	16,82							
D	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																									
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			Laporan	1	24.999.500,00	25,00	1	7.546.900,00	7,55	1	7.924.245,00	7,92	1	8.320.457,25	8,32	1	8.736.480,11	8,74							

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau rumah khusus			Dok							1	20.589.000,00	20,59				1	20.589.000,00	20,59							
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						5.916,29			2.240,16				2.300,16					2.530,17							
A	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman																									
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			dok	6	4.059.875,00	24,36	6	736.666,67	4,42	8	1.828.750,00	14,63	10	1.609.300,00	16,09	12	1.475.191,67	17,70							
2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			dok	6	4.193.666,67	25,16	6	790.833,33	4,75	8	2.143.625,00	17,15	10	1.886.390,00	18,86	12	1.729.190,83	20,75							
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			Laporan	6	4.031.666,67	24,19	6	801.666,67	4,81	8	1.343.000,00	10,74	10	1.181.840,00	11,82	12	1.083.353,33	13,00							
B	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																									
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Dok	1	33.755.000,00	33,76				1	22.972.000,00	22,97	1	25.269.200,00	25,27	1	27.796.120,00	27,80							
2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			Dok	1	69.737.000,00	69,74	1	4.485.000,00	4,49	1	22.984.000,00	22,98	1	25.282.400,00	25,28	1	27.810.640,00	27,81							
3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			Laporan	1	59.238.000	59,24	1	4.550.000,00	4,55	1	9.649.000,00	9,65	1	10.613.900,00	10,61	1	11.675.290,00	11,68							

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			Laporan	1	14.993.000,00	14,99	1	4.680.000,00	4,68	1	24.262.000,00	24,26	1	26.688.200,00	26,69	1	29.357.020,00	29,36							
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Laporan	1	14.867.000,00	14,87				1	11.625.000,00	11,63	1	12.787.500,00	12,79	1	14.066.250,00	14,07							
6	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Laporan	1	24.722.000,00	24,72				1	5.200.000,00	5,20	1	5.720.000,00	5,72	1	6.292.000,00	6,29							
7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Dokumen	1	24.961.500,00	24,96				1	3.280.000,00	3,28	1	3.608.000,00	3,61	1	3.968.800,00	3,97							
C	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Ha)																									
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			Dok	1	409.517.000	409,52	1	54.750.000,00	54,75	1	333.488.000	333,49	1	366.836.800,00	366,84	1	403.520.480,00	403,52							
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kerja Sama			Unit Rumah	304	17.009.175,99	5.170,79	87	24.748.287,36	2.153,10	50	34.758.360,00	1.737,92	60	31.861.830,00	1.911,71	70	30.041.154,00	2.102,88							
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Dok	3	6.665.833,33	20,00	3	1.538.333,33	4,62	3	28.751.666,67	86,26	3	31.626.833,33	94,88	3	34.789.516,67	104,37							

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA								1.500,00		4.750,00			4.750,00			18.775,00			10.925,00							
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						875,00			2.875,00			2.875,00			2.875,00			2.875,00							
A	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																									
1	Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban																									
2	- Pembangunan Baru	kelurahan di Kota Bima		Unit	5	40.000.000,00	200,00	25	40.000.000	1.000	25	40.000.000	1.000	25	40.000.000	1.000	25	40000000	1.000					V		
	- Peningkatan Kualitas	kelurahan di Kota Bima		Unit	27	25.000.000,00	675,00	75	25.000.000	1.875	75	25.000.000	1.875	75	25.000.000	1.875	75	25000000	1.875					V		
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						625,00			1.875,00			1.875,00			15.900,00			8.050,00							
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																									
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																									
	- Peningkatan Kualitas	kelurahan di Kota Bima		Unit	25	25.000.000,00	625,00	75	25.000.000	1.875	75	25.000.000	1.875											V		
	- Pembangunan Baru Backlog	Kelurahan Melayu		Unit										25	50.000.000	1.250	35	50.000.000	1.750	V						
	- Pembangunan Baru Relokasi	Kelurahan Melayu		Unit										179	50.000.000	8.950				V						
	- Peningkatan Kualitas RT/H	Kelurahan Melayu		Unit										114	50.000.000	5.700	126	50.000.000	6.300	V						

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MATARAM							43.544		52.714		57.295		56.785		56.820											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						2.523			2.064			2.145			2.235			2.270							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program																									
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen			-	1	522.500.000	522,50	1	574.750.000	574,75	1	632.225.000	632,23	1	632.225.000	632,23							
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Dokumen			-	1	110.000.000	110,00	1	121.000.000	121,00	1	133.100.000	133,10	1	146.410.000	146,41							
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanggung			Dokumen			-	1	38.500.000,00	38,50	1	42.350.000	42,35	1	46.585.000	46,59	1	51.243.500	51,24							
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			Dokumen			-	1	33.000.000,00	33,00	1	36.300.000	36,30	1	39.930.000	39,93	1	43.923.000	43,92							
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program			Dokumen	1	195.788.094	195,79	1	110.000.000	110,00	1	121.000.000	121,00	1	133.100.000	133,10	1	146.410.000	146,41							
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program						-			-			-			-			-							
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Lokasi	5	252.531.200	1.262,66	5	40.000.000,00	200,00	5	40.000.000	200,00	5	40.000.000	200,00	5	40.000.000	200,00							
	Pembinaan Pengelolaan Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus						-			-			-			-			-							
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Persen		878.324.618	878,32		800.000.000	800,00		800.000.000	800,00		800.000.000	800,00		800.000.000	800,00							
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						-			-			-			-			-							
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara			Rekomen dasi	10	6.638.017	66,38	10	10.000.000,00	100,00	10	10.000.000	100,00	10	10.000.000	100,00	10	10.000.000	100,00							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan			Komplek Perumahan	9	13.305.815	119,75	18	8.333.333,33	150,00	18	8.333.333	150,00	18	8.333.333	150,00	18	8.333.333	150,00							

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						9.118			12.425			16.325			16.325			16.325						
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10																								
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Unit				25	24.000.000,00	600,00	100	45.000.000,00	4.500,00	100	45.000.000	4.500,00	100	45.000.000	4.500,00						
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Titik	80	110.875.625	8.870,05	80	143.750.000	11.500,00	80	143.750.000	11.500,00	80	143.750.000	11.500,00	80	143.750.000	11.500,00						
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10																								
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Ha	90	197.534,79	17,78	80	1.250.000,00	100,00	70	1.428.571,43	100,00	60	1.666.666,67	100,00	60	1.666.667	100,00						
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			Kelompok	10	2.658.946,30	26,59	10	2.500.000,00	25,00	5	5.000.000,00	25,00	5	5.000.000,00	25,00	5	5.000.000	25,00						
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			Kali	2	19.276.636,50	38,55	2	25.000.000,00	50,00	2	25.000.000,00	50,00	2	25.000.000	50,00	2	25.000.000	50,00						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Laporan	12	13.780.520,67	165,37	12	12.500.000,00	150,00	12	12.500.000,00	150,00	12	12.500.000	150,00	12	12.500.000	150,00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						8.950			5.325			5.325			5.325			5.325						
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah																								
	Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha			Unit	30	298.332.750	8.950	30	33.333.333	1.000	30	33.333.333	1.000	30	33.333.333	1.000	30	33.333.333	1.000						

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB		
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA			
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha			Titik				25	140.000.000	3.500		25	140.000.000	3.500		25	140.000.000	3.500									
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha			KK				275	3.000.000	825		275	3.000.000	825		275	3.000.000	825									
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						22.879			32.000			32.600			32.000		32.000									
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																										
	Perencanaan Penyediaan PSU										1	600.000.000	600														
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Titik	115	22.879.279.250	22.879	115	139.130.435	16.000	115	139.130.435	16.000	115	139.130.435	16.000	115	139.130.435	16.000								
			Titik	60	60			141.666.667	8.500	60	141.666.667	8.500	60	141.666.667	8.500	60	141.666.667	8.500	60	141.666.667	8.500						
			Lokasi	2031,25	2031,25			3.692.308	7.500	2031,25	3.692.308	7.500	2031,25	3.692.308	7.500	2031,25	3.692.308	7.500	2031,25	3.692.308	7.500						
	Urusan Wajib non pelayanan dasar Pertanahan																										
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						73,99			900,00			900,00			900,00		900,00									
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.			Kegiatan	1	73.991.604	73,99	2	450.000.000	900,00	2	450.000.000	900,00	2	450.000.000	900,00	2	450.000.000	900,00								

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB	
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA		
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BIMA							19.000		20.450		22.950		25.650		25.750											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					750,00		950,00		1.150,00		1.350,00		1.350,00												
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program																									
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen	1	75.000.000,00	75,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00							
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Terpenuhi			Dokumen	1	75.000.000,00	75,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00							
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program						-			-			-													
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap			Dokumen	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	125.000.000,00	125,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00							
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program						-			-			-													
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Unit		150.000.000,00	150,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000,00	150,00	1	200.000.000	200,00	1	200.000.000	200,00							
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dokumen	1	50.000.000,00	50,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	100.000.000	100,00							
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Ha		100.000.000,00	100,00	1	100.000.000	100,00	1	225.000.000,00	225,00	1	300.000.000	300,00	1	300.000.000	300,00							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Unit		100.000.000,00	100,00	1	200.000.000	200,00	1	250.000.000,00	250,00	1	300.000.000	300,00	1	300.000.000	300,00							
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						-			-			-													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan			Laporan	1	50.000.000,00	50,00	1	50.000.000	50,00	1	50.000.000,00	50,00	1	50.000.000	50,00	1	50.000.000	50,00							

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA	
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUB) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			Laporan	1	50.000.000,00	50,00	1	50.000.000	50,00	1	50.000.000,00	50,00	1	50.000.000	50,00	1	50.000.000	50,00						
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						250			300			400			500			500						
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10																								
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Dokumen	1	25.000.000,00	25,00	1	45.000.000,00	45,00	1	50.000.000,00	50,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00						
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			Dokumen	1	200.000.000,00	200,00	1	200.000.000	200,00	1	150.000.000,00	150,00	1	150.000.000	150,00	1	150.000.000	150,00						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Laporan	1	25.000.000,00	25,00	1	55.000.000,00	55,00	1	200.000.000,00	200,00	1	200.000.000	200,00	1	200.000.000	200,00						
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.000			18.000			20.000			22.000			22.000						
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangannya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)			Unit		17.000.000.000	17.000	1	18.000.000.000	18.000	1	20.000.000.000	20.000	1	22.000.000.000	22.000,00	1	22.000.000.000	22.000,00						

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK	APBD TK	SWASTA	PENANGGUNG JAWAB
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM					1.000			1.200			1.400			1.800			1.900							
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																								
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Dokumen	1	125.000.000,00	125,00	1	150.000.000,00	150,00	1	150.000.000,00	150,00	1	150.000.000,00	150,00	1	150.000.000,00	150,00						
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi			Lokasi	1	750.000.000,00	750,00	1	900.000.000,00	900,00	1	1.100.000.000	1.100,00	1	1.450.000.000	1.450,00	1	1.550.000.000,00	1.550,00						
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			Laporan	1	125.000.000,00	125,00	1	150.000.000,00	150,00	1	150.000.000,00	150,00	1	200.000.000,00	200,00	1	200.000.000,00	200,00						

No.	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Indikasi Kebutuhan Biaya dan Tahun Anggaran															Sumber Pendanaan Pembiayaan					PENANGGUNG JAWAB		
					2023			2024			2025			2026			2027			APBN	DAK	APBD TK I	APBD TK II	SWASTA			
					Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)	Vol	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp. (Dalam Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27		
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN NUSA TENGGARA 1 (BP2PNT1)						233.452,00				255.014,00																	
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI						488.466	233.452			255.014			-			-			-								
1	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Provinsi NTB	6.830	Unit Rumah	3.170	38.935.962	123.427	3.660	39.201.913	143.479											V	-	-	-	-	BP2P NT1	
2	Jumlah Rumah Khusus Yang Dibangun	Provinsi NTB	80	Unit Rumah	40	233.000.000	9.320	40	233.000.000	9.320												V	-	-	-	-	BP2P NT1
3	Jumlah Rumah Susun Yang Dibangun	Provinsi NTB	320	Unit	173	320.549.133	55.455	147	340.340.136	50.030												V	-	-	-	-	BP2P NT1
4	Jumlah Rumah Susun Yang Dipelihara	Provinsi NTB	15	Tower	9	1.052.666.667	9.474	6	1.133.333.333	6.800												V	-	-	-	-	BP2P NT1
5	Jumlah rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU	Provinsi NTB	5.957	Unit Rumah	2.625	13.628.952	35.776	3.323	13.657.839	45.385												V	-	-	-	-	BP2P NT1